

ISSN 2338 - 5162 (Cetak)
ISSN 2527 - 8444 (Online)

ARIST

Volume 6 No. 2 Juli 2018 halaman 202 - 390



Konstruksi Masyarakat Menurut Mahatma Gandhi (202-224)

Ketut Wisarja
I Ketut Sudarsana

Tata Kelola Olah Raga dengan Figur Politik dari Militer: Studi Kasus Pemerintah Indonesia dalam Konteks Sepak Bola (225-242)

Andika Sanjaya
Hardi Alunaza SD
Achmad Bayu Chandra Buwono
Nining Nadya Rukmana Sari

Forestry and agriculture policy governance regarding water contestation in State Production Forest (Case of Margo and Ngiyom spring water in Begal forest, Ngawi Regency) (243 - 261)

Anna Istyaningrum

Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Di Kota Ternate (262 - 282)

Sukur Suleman

Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari People Centered Development (283 - 300)

Purwowibowo Purwowibowo
Kris Hendrijanto
Pra Adi Soelistijono

Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 (301 - 328)

Muhammad Fadli
Muh. Kausar Bailusy
Jayadi Nas
Achmad Zulfikar

Pendidikan Konservasi Perspektif Warisan Budaya Untuk Membangun History For Life (329 - 343)

Khoirul Huda
Yoga Ardian Feriandi

Perayaan Grebeg Suro sebagai Potensi Pengembangan Sektor Wisata Budaya Ponorogo (344 - 353)

Khoirurrosyidin

How Are They Elected? Vote Buying And General Election In Ogan Ilir District, South Sumatera Province (357 - 372)

Mery Yanti
Alamsyah Alamsyah

Moderation and Civilization (A Historical Analysis on the Moderate Policy of the Rustamid Dynasty) (373 - 390)

Ahmad Choirul Rofiq

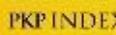
Plagiarism



Preference Tools



Indexing by



Diterbitkan Oleh :
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo



Editor In Chief

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Editorial Board

Rebbeka Risma, S.IKOM,
Audra Jovani, S.Sos, MPS
Hayat Abdullah, S.AP, M.Si
Robby Darwis Nasution, S.IP, MA
Ayub Dwi Anggoro, S.IKOM, M.Si
Winda Hardiyanti, S.Sos, M.Si
Ahmad Harakan, S.IP, M.A
Yuliyanto Budi Setiawan, M.Si.

Section Editor

Rohfin Indriya Gestanti, S.Pd, M.Pd

Peer – Reviewer’s

<p>Prof. Dr. Wan Abd Aziz Bin Wan Mohd Amin Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si DR. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol Admin Dr.Habib Ahmad, S.Sos, M.A Alamsyah, S.AP, M.AP Dr.Ihyani Malik, M.Si Ari Ganjar Hardiansah, S.IP, M.Pol Dr. Muhlis Madani, M.Si Cahyo Seftyono, S.Sos, M.A</p>	<p>Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si Prof. Dr. Andi Alimmudin Unde, M.Si Dr. Mohd Yusri Ibrahim Dr. Adde Oriza Rio, M.Si Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si Nurudin AB, S.Sos, M.Si Rachmat Kriyantono, Ph.D Dr. Jaelan Usman, M.Si Drs. Jusuf Harsono, M.Si</p>
---	--

Published By

Social and Politic Department
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Editorial Address

Jl. Budi Utomo No.10 Siman Ponorogo Indonesia
Email: aristo@umpo.ac.id
Website: <http://journal.umpo.ac.id/index.php/aristo/index>

DAFTAR ISI

Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Konstruksi Masyarakat Menurut Mahatma Gandhi Ketut Wisarja, I Ketut Sudarsana	-202
Tata Kelola Olah Raga dengan Figur Politik dari Militer: Studi Kasus Pemerintah Indonesia dalam Konteks Sepak Bola Andika Sanjaya, Hardi Alunaza SD, Achmad Bayu Chandra Buwono, Nining Nadya Rukmana Sari	-225
Forestry and agriculture policy governance regarding water contestation in State Production Forest (Case of Margo and Ngiyom spring water in Begal forest, Ngawi Regency) Anna Istyaningrum	-243
Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Di Kota Ternate Sukur Suleman	-262
Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari <i>People Centered Development</i> Purwowibowo, Kris Hendrijanto, Pra Adi Soelistijono	-283
Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Muhammad Fadli, Muh. Kausar Bailusy, Jayadi Nas, dan Achmad Zulfikar,	-301
Pendidikan Konservasi Perspektif Warisan Budaya nntuk Membangun <i>History For Life</i> Khoirul Huda, Yoga Ardian Feriandi	-329
Perayaan Grebeg Suro sebagai Potensi Pengembangan Sektor Wisata Budaya Ponorogo Khoirurrosyidin	-343
How Are They Elected? Vote Buying And General Election In Ogan Ilir District, South Sumatera Province Merry Yanti, Alamsyah	-354
Moderation and Civilization (A Historical Analysis on the Moderate Policy of the Rustamid Dynasty) Ahmad Choirul Rofiq	-373



Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatullohiwabarokatuh

Puji Syukur Kehadirat ALLAH Subhanawata'ala, yang telah memberikan hidayah serta kelapangan hati, sehingga kita dapat diberikan kesempatan untuk berkarya dan menghasilkan berbagai produk ilmu pengetahuan, yang dapat mencerahkan serta mampu berkontribusi pada perbaikan kondisi masyarakat. Karya ilmiah berupa artikel yang kemudian di himpun sebagai sebuah Jurnal Ilmiah merupakan salah satu bagian penting dari praktik Tridharrma perguruan tinggi yang memberikan kesempatan bagi para akademisi, pemerhati, dan juga praktisi untuk mengaplikasikan keilmuannya, sehingga bisa disebarluaskan melalui sarana tersebut. Perkembangan jurnal ilmiah saat ini telah sampai kepada titik dimana pengelolaannya dilakukan secara, *Open Journal System* (OJS), yakni memadukan praktik penulisan ilmiah dengan sentuhan teknologi, sehingga karya – karya ilmiah bisa di akses dalam satu waktu dari berbagai belahan penjuru negeri.

Jurnal ARISTO (Sosial, Politik, Humaniora), merupakan salah satu terbitan jurnal, yang dikelola oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, untuk memfasilitasi karya – karya terbaik di bidang keilmuan Sosial, Politik, dan Humaniora, aktifitas tersebut dilakukan secara *Full Open Journal System* (OJS) dengan proses yang panjang dan melibatkan reviewer dari berbagai institusi dan juga disiplin keilmuan dengan format dan ketentuan baku. Jurnal ini pernah mendapatkan undangan persiapan akreditasi jurnal dengan pihak Kemenristek Dikti, Oleh karena itu ada beberapa perubahan yang kami siapkan untuk memenuhi criteria yang ditentukan, tentunya yang relevan dan sesuai dengan kemampuan kami.

Besar harapan kami supaya Jurnal ARISTO kedepannya mampu mewadahi karya - karya terbaik, dari berbagai institusi yang ada di dalam negeri maupun dari luar negeri, hal ini diharapkan supaya ada tukar menukar informasi dan juga ilmu pengetahuan supaya kegiatan ilmiah bisa terus membawa kemaslahatan bersama.

Editor In Chief

Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Konstruksi Masyarakat Menurut Mahatma Gandhi

Ketut Wisarja, I Ketut Sudarsana

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

wisarja@ihdn.ac.id, iketutsudarsana@ihdn.ac.id

Abstract

The cotruction of society that Gandhi is trying to build is a manifestation of his religious or religious faith. Where each individual jointly runs his life activity in the life of society as a holy dharma of religion. As dharma then every individual must be able to defeat any potential greed in developing autonomization of individuality to realize mutual interests. The idealization of society that Gandhi aspires to is inseparable from the idealization of the perfection of human beings as the main core of society. The idealization of society for Gandhi is what the Indian community calls the ashram. Ashram has in common with ashrama terminology. Ashram is the ideal conception of community building as a model community. Such community prototypes contain a set of cultural roots that make up the ideological constructions of society. The cultural roots are established as living principles that must be obeyed by the ashram citizens. The estuary of all is the enforcement of the principle of brotherhood of mankind. The value of humanity that is the culmination and the key word for every form of devotion by upholding that all human beings are equal and brothers, should not be exaggerated or feel more than others. This principle of 'all brothers' is the moral principle in Gandhi idealized society. The implications of Gandhi's thought increasingly find a point of relevance to forming civil society in Indonesia.

Keyword: Community Construction, Nonviolence, and Ashram.

Abstrak

Konstruksi masyarakat yang hendak dibangun Gandhi merupakan manifestasi dari ajaran religiusitas atau keyakinan keagamaannya. Dimana setiap individu bersama-sama menjalankan aktivitas hidupnya dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu dharma suci agama. Sebagai dharma maka setiap individu harus dapat mengalahkan segala potensi keserakahan dalam mengembangkan otonomisasi individualitasnya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Idealisasi masyarakat yang dicita-citakan Gandhi tidak terlepas dari idealisasi kesempurnaan dari manusianya sebagai inti pokok penyusun masyarakat. Idealisasi masyarakat bagi Gandhi adalah apa yang oleh masyarakat India disebut ashram. Ashram mempunyai kesamaan dengan terminologi ashrama. Ashram adalah konsepsi ideal tentang bangunan masyarakat sebagai komunitas teladan. Prototype masyarakat seperti itu memuat seperangkat akar kultural yang membentuk konstruksi masyarakat yang dicita-citakan. Akar kultural tersebut ditegakkan sebagai prinsip-prinsip hidup yang harus ditaati oleh warga ashram. Muara dari semua itu adalah penegakan prinsip persaudaraan umat manusia. Nilai kemanusiaan yang menjadi titik puncak dan kata kunci bagi setiap bentuk pengabdian dengan menjunjung tinggi bahwa semua manusia adalah sama dan bersaudara, tidak boleh ada yang diletakkan atau merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Prinsip 'semua manusia bersaudara' inilah yang menjadi prinsip moral dalam masyarakat yang diidealisasikan Gandhi. Implikasi pemikiran Gandhi tersebut semakin menemukan titik relevansinya untuk membentuk masyarakat sipil (civil society) di Indonesia.

Keyword: Konstruksi Masyarakat, Tanpa kekerasan, dan Ashram.

Submite	: 20 Desember 2017
Review	: 10 Januari 2018
Accepted	: 25 Juni 2018
Surel Corespondensi	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Pada dasarnya Mahatma Gandhi secara eksplisit tidak pernah memberikan batasan dan pemahaman secara sistematis mengenai masyarakat. Pemahamannya tentang masyarakat selalu terintegrasi ke dalam seluruh gagasan-gagasan besarnya tentang perlunya tatanan dalam masyarakat yang harmoni dan terhindar dari berbagai bentuk konflikual. Namun demikian, sebagai seorang yang sangat konsisten memegang pendiriannya dan keteguhannya untuk membangun suatu komunitas yang mengedepankan harmoni sosial, maka Gandhi selalu berusaha menampilkan suatu konsepsi tentang konstruksi masyarakat, bukan pengertian tentang masyarakat.

Gagasan Gandhi tentang masyarakat tidak bisa dilepaskan dari gagasan pokoknya tentang prinsip-prinsip pola relasi antar manusia untuk hidup berdampingan secara damai, toleran dan jauh dari perilaku kekerasan. Pola relasi antar manusia yang kemudian berada dalam suatu tempat (wilayah) adalah jaminan pertama dan utama yang membentuk masyarakat. (Gandhi, 1988). Artinya, masyarakat adalah suatu komunitas yang terjadi dan terbentuk dari proses relasi antar manusia yang menduduki suatu wilayah tertentu.

Hubungan antar manusia tersebut tidaklah dipahami dalam proses secara individual, dimana manusia dianggap sebagai subjek otonom, sebagaimana dipahami oleh konstruksi masyarakat modern, melainkan manusia adalah makhluk yang beragama dengan kemampuannya untuk menjadi otonom, tetapi dengan tetap menghargai hubungannya dengan kehidupan manusia yang lain. Gandhi menganggap bahwa manusia tidak dapat menjadi otonom ketika tidak membangun suatu bentuk relasi dengan manusia lainnya. Individualitas menjadi tidak berarti ketika manusia hanya hadir di dunia dalam kesendiriannya tanpa manusia yang lain. (Gandhi, 1988).

Manusia sebagai makhluk otonom selalu berusaha sekuat tenaga untuk membangun hubungan baik dengan sesama. Prinsip inilah yang menjadi suatu pendasaran tentang konsepsi masyarakat bagi Gandhi, bahwa masyarakat terbentuk karena kehadiran manusia sebagai makhluk otonom dan berkorelasi. Faktor berkorelasi tersebut memberikan suatu ikhtiar bagi manusia untuk tidak memusnahkan manusia lainnya dan menghindarkan diri dari perilaku kekerasan.

Konsepsi dasar Gandhi tentang manusia inilah menjadi titik tolak mengenai pemahamannya tentang masyarakat. Gandhi menganggap bahwa masyarakat yang sempurna tidak bisa dilepaskan dari suatu keadaan manusianya yang memiliki kesempurnaan pula. Begitu

pula sebaliknya, manusia yang jahat juga berakibat bagi bangunan masyarakat yang menjadi tempat dimana para individu tersebut mengembangkan kehidupannya. Bagi Gandhi manusia yang sempurna adalah pribadi yang *satyagrahi*, yaitu orang yang mampu mengatasi kekuatan-kekuatan jahat yang dilakukan dengan sikap *ahimsa* dan pemurnian diri yang mencakup sikap lepas bebas terhadap harta milik dan bebas terhadap kelezatan dan kenikmatan melalui pengekangan diri, puasa, dan *brahmacharya*. Kesempurnaan manusia yang demikian pada akhirnya akan berhubungan dengan kondisi masyarakat yang dibentuknya. (Wegig, 1986)

Konsekuensi logisnya, kebaikan dan kesempurnaan suatu masyarakat sangat terpengaruh oleh kehidupan manusia di dalamnya. Karena manusia adalah penyusun bagi bangunan sebuah masyarakat (Gandhi, 1988). Artinya, baik buruknya suatu masyarakat dipengaruhi oleh keadaan dari para penyusunnya, yaitu perilaku manusianya. Tidak akan ada gunanya mengidealisasikan suatu komunitas yang sempurna, ketika tidak disertai dengan suatu keteguhan hati untuk menjadikan manusia secara sempurna pula. Meski manusia sempurna secara individu, pada akhirnya ia juga akan menyempurnakan dirinya secara sosial.

Konstruksi pemahaman Gandhi yang demikian seolah mengindikasikan bahwa ia adalah seorang penganut paham individualisme yang mementingkan aspek otonomisasi manusia. Padahal Gandhi sesungguhnya adalah orang yang sangat menghargai manusia sebagai subjek otonom disatu sisi dan juga menekankan aspek sosialitas manusia disisi lainnya. Bagi Gandhi, otonomisasi manusia sebagai makhluk individu tidak mempunyai makna apa-apa manakala tidak dikembangkan dalam konteks sosialitas manusia. Kebebasan manusia sebagai makhluk otonom, tidaklah boleh melanggar kepatuhan sosial. Artinya, otonomisasi manusia secara individual tetap dihargai dalam konteks hubungannya dengan orang lain. Manusia dalam sosialitasnya tidak hidup sendirian, melainkan ia menjadi bermakna nilai kemanusiaannya ketika hidup bersama dan menghormati orang lain yang juga memiliki otonomiasinya sendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana lebih menekankan pada proses dan makna yang akan dikaji secara utuh, statis dan konkrit yang berlandaskan pada filsafat sosial. Pada kondisi yang alamiah dari munculnya berbagai perubahan paradigma dalam fakta kehidupan sosial, realita atau fenomena yang terjadi di masyarakat tersebut dapat diklasifikasikan, realita tetap, konkrit, teramati, terukur, dan dilakukan hubungan gejala yang

bersifat sebab akibat. Dalam paradigma perubahan tersebut dipandang sebagai suatu yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna yang sering disebut paradigma positivisme yang mengembangkan jenis penelitian kualitatif.

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan instrumen yang dipergunakan adalah berbagai alat bantu pengumpulan data, seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, alat-alat perekam dan sebagainya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan langkah-langkah seperti; (1) Reduksi data, (2) Klasifikasi data, (3) Interpretasi data, dan (4) Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Bangunan Masyarakat yang Diidealisasikan Mahatma Gandhi

Hidup bersama dalam masyarakat pada dasarnya menunjukkan dimensi keagamaan yang mendalam. Hal ini karena bagi Gandhi bahwa hidup bermasyarakat merupakan *dharma*; pengabdian dari setiap manusia. Menurut Gandhi, dunia kemasyarakatan tidaklah sekuler, dunia kemasyarakatan adalah suci. Implikasi logisnya, setiap orang harus terlibat di dalamnya, ini berarti setiap orang juga harus terlibat di dalam *dharma* suci sebagai manusia. Penyerahan diri pada tuntutan-tuntutan *dharma* tersebut pada dasarnya merupakan wujud penyerahan murni serta bersahaja kepada Tuhan dan kehendak-Nya, yang dimanifestasikan ditengah-tengah rakyat. (Thomas Merton, 1992)

Dengan demikian, konsepsi masyarakat yang hendak dibangun oleh Gandhi merupakan manifestasi dari ajaran religiusitas atau keyakinan keagamaannya. Dimana setiap individu bersama-sama menjalankan aktivitas hidupnya dalam kehidupan masyarakat sebagai suatu *dharma* suci agama. Sebagai *dharma* maka setiap individu harus dapat mengalahkan segala potensi keserakahan dalam mengembangkan otonomisasi individualitasnya untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Dharma telah menjadi spirit utama bagi Gandhi untuk memberikan suatu pemahamannya tentang hubungan timbal balik dalam masyarakat dari setiap individu. Hubungan timbal balik merupakan keniscayaan sejarah dalam peradaban kemanusiaan. Tiada kehidupan di dunia ini yang saling terlepas satu sama lain, melainkan semuanya terkait secara

timbang balik. Sebagaimana dikatakan Gandhi, yakni; “Keterkaitan dan ketergantungan yang timbal balik seharusnya dijadikan cita-cita umat manusia, selain dari hasrat untuk berswasembada. Manusia adalah mahluk sosial. Tanpa keterkaitan dengan masyarakat, tidak mungkin akan disadarinya persatuan dengan seluruh alam semesta dan tidak mungkin ditindasnya nafsu kepentingan sendiri. Keterkaitan timbal balik dengan masyarakat memungkinkan dia menguji imannya pada batu ujian kenyataan, seandainya seseorang telah diberi kedudukan ataupun bila dia mampu mencapai kedudukannya yang mengakibatkan dia lepas dari segala keterkaitan dengan sesama mahluk, dia pasti akan menjadi bangga dan angkuh.... Ketergantungan pada masyarakat membuat dirinya sadar akan sifat umat manusia”. (Gandhi.1988)

Keterkaitan individu dengan masyarakat, dengan demikian seperti hukum sejarah atau hukum alam yang tidak boleh dilepaskan. Tanpa keterkaitan, manusia hanya menjadi seongkok subjek otonom yang tidak memiliki nilai atau jauh dari sikap *dharma*. Hidup dalam Masyarakat adalah bagian terpenting dari *dharma* sebagai manusia. Lebih jauh Gandhi menguraikan; setiap pengabdian dalam masyarakat, tidaklah mungkin saling melepaskan diri dari bagian-bagiannya. Kewajiban seseorang kepada dirinya sendiri, kepada keluarganya, kepada bangsanya dan kepada seluruh dunia, misalnya; mutlak saling berkaitan. Tidak mungkin seseorang berjasa kepada tanah airnya dengan merugikan diri sendiri atau keuangannya. Demikian pula tidak mungkin orang berjasa kepada tanah airnya dengan cara merugikan dunia luar. Sehingga, wujud dari pengabdian seseorang kepada masyarakat adalah membangun secara bersama-sama kepentingannya masing-masing dengan tetap mengedepankan kepentingan bersama. Artinya, masyarakat yang dikembangkan adalah komunitas yang saling terkait dan tergantung antar setiap individu untuk bersama mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Dalam hal ini individu juga perlu dikembangkan potensi otonomisasinya, tetapi tetap dalam kerangka sosialitas manusia.

2. Ashram sebagai Model Idealisasi Masyarakat

Sebagai wujud tidak adanya konsepsi secara sistematis dari Gandhi tentang arti dan makna masyarakat, ia lebih mementingkan suatu wujud ideal dari masyarakat tersebut. Idealisasi masyarakat yang hendak dibangun dan dicita-citakan Gandhi pada dasarnya juga tidak terlepas dengan idealisasi kesempurnaan dari manusianya sebagai inti pokok penyusun

masyarakat. Idealisasi masyarakat bagi Gandhi adalah apa yang oleh masyarakat India disebut *ashram*, yang mempunyai kesamaan dengan terminologi *ashrama*. *Ashram* disadari adalah konsepsi ideal tentang bangunan masyarakat yang hendak dicita-citakan oleh Gandhi sebagai komunitas teladan.

Wakefield menjelaskan bahwa pengertian *ashram* asal mulanya berarti suatu pemukiman di hutan, dimana seseorang menarik diri dari sisa kehidupannya setelah memenuhi tugas-tugas orang tua atau rumah tangganya, untuk mencari kedamaian dan konsentrasi rohaniah yang kuat tentang suatu pandangan dan kesatuan realitas yang merupakan sumber dari segala yang berwujud. Dalam perspektif ini, *ashram* merupakan lembaga keagamaan, utamanya yang melembaga dalam masyarakat Hindu di India. *Ashram* biasanya didirikan oleh pemimpin spiritual keagamaan yang menghabiskan kehidupannya untuk men-*dharma*-kan baktinya kepada Tuhan setelah menjalani proses-proses kehidupan duniawi. Sebut saja misalnya, Gopal Khrisna Gokhale dengan lembaganya ‘*The Servants of India Society*’, sastrawan Rabindranat Tagore dengan *ashram Santiniketan*-nya; dan Swami Sradananda yang mendirikan *Gurukula* (Andrews, 1949).

Gandhi adalah seorang pemimpin spiritual yang juga mencita-citakan terwujudnya suatu *ashram* untuk mengamalkan dan meneruskan ajaran-ajarannya. *Ashram* yang dicita-citakan oleh Gandhi pada dasarnya dilatarbelakangi oleh realitas kesengsaraan hidup masyarakat India di Afrika Selatan pada paruh tahun 1900-an yang hidup di bawah ketertindasan dan kesewenang-wenangan penguasa saat itu. Dilatarbelakangi oleh situasi tersebut, Gandhi memulai kehidupannya dengan menekankan pada kesederhanaan. Suatu sikap hidup yang merepresentasikan kehidupan seorang *grehasta*. Sikap hidup yang demikian merupakan upaya untuk mendasari munculnya gerakan *satyagraha*, yaitu suatu gerakan yang menggunakan prinsip-prinsip *non-violence* (tanpa kekerasan).

Keinginan untuk membangun komunitas yang mengedepankan gerakan *satyagraha* tersebut, Gandhi mengawalinya dengan membangun ‘*Phonix Settlement*’ atau *Perkampungan Phonix*, yang letaknya 12 mil dari Durban, Afrika Selatan. *Perkampungan Phonix* yang didirikan oleh Gandhi pada awalnya juga diilhami dari tulisan *Unto This Last* karya Ruskin; “Tahun 1904 pada saat saya membaca bukunya Ruskin, *Unto This Last*, yang amat terkesan pada saya. Saya memutuskan untuk memindahkan ‘*Indian Opinion*’ dan membuka tanah baru

dengan pekerja-pekerja sebagai suatu keluarga besar. Maka saya membeli tanah seluas 100 acree dan mendirikan *Phonix Settlement*” (Gandhi, 1981)

Keinginan Gandhi untuk mendirikan komunitas masyarakat India yang teladan dengan perilaku dan kehidupan yang mengamalkan ajaran spiritualnya adalah bukti awal bahwa ia memiliki sejumlah konsepsi tentang masyarakat yang diidealisasikannya.

Berdasarkan pada keyakinan keagamaannya yang mendalam, Gandhi mendirikan ‘*Perkampungan Phonix*’ tersebut. Sehingga, banyak pihak menyebut bahwa dasar *Perkampungan Phonik* adalah agama yang bertujuan melatih kemurnian badan dan pikiran serta mencita-citakan kedudukan ekonomi yang sama. Dalam perkampungan tersebut, setiap warga diharuskan melakukan kerja secara jasmani untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan mendapatkan upah yang sama untuk nafkahnya. *Perkampungan Phonix* menjadi masyarakat teladan yang dicita-citakan Gandhi untuk melakukan *brahmacharya* (kebersihan lahir dan batin). *Brahmacharya* seolah menjadi *sine qua non*, kondisi wajib bagi setiap warga untuk melaksanakan *dharma*-nya kepada kehidupan.

Pada perkembangan selanjutnya bersama Hermaun Kallen seorang sahabatnya di Afrika Selatan, Gandhi mendirikan sebuah *ashram* yang dinamakan ‘*Tolstoy Farm*’ di atas tanah seluas 1100 acree di Lawely dekat Johannesburg. Penggunaan istilah *Tolstoy* mengindikasikan kuatnya pengaruh *Tolstoy* pada diri Gandhi dan berusaha untuk mengamalkan pemikirannya. Dalam *Tolstoy Farm* ini, semua didasarkan pada keyakinan spiritual Gandhi yang mengharuskan warganya mengamalkan *ahimsa* dan *silibasi*. Suatu prinsip hidup yang harus ditaati oleh setiap individu yang hidup dalam *ashram* tersebut.

Doktrin *ahimsa* mengharuskan seseorang mencintai kehidupan, baik sesamanya maupun kepada makhluk lainnya dengan tanpa melukai atau menyakiti. Sedangkan doktrin *silibasi* diwujudkan dalam bentuk pemisahan tempat tinggal antara laki-laki dan wanita, termasuk kepada mereka yang sudah menikah-pun harus mentaati prinsip ini. Doktrin ini seolah mencerminkan suatu ajaran dari para *sosialisme utopis klasik* yang berusaha mencita-citakan suatu komunitas teladan yang hidup dalam sebuah tempat dengan aturan yang sangat ketat. Plato misalnya, pernah mengintrodusir suatu komunitas teladan dimana para pemimpin dalam komunitas tersebut dilarang memiliki harta benda sekaligus tidak diperbolehkan untuk menikah, karena bagi Plato kecintaan pada harta benda dan keluarga adalah awal dari perilaku kerusakan, termasuk korupsi dan keserakahan.

Komunitas ideal dalam *ashram* yang dibentuk oleh Gandhi tersebut seolah-olah mengindikasikan suatu sikapnya untuk merealisasikan konsep masyarakat yang sempurna. Untuk merealisasikan konsep tersebut, maka Gandhi tidak hanya berbicara pada tataran ide, melainkan menjadikannya dalam bentuk praksis. Setiap individu dalam *ashram* harus mengamalkan dan mentaati ajaran spiritual yang dikemukakan dan diyakini oleh Gandhi. Sehingga melalui pelaksanaan ajaran spiritual tersebut diharapkan terjadi kesamaan kehidupan dalam setiap warga tanpa terkecuali. Artinya, setiap warga yang awalnya berlatarbelakang sosial yang berbeda, tetapi ketika hidup dalam *ashram*, maka semuanya harus menjadi satu; yaitu satu keluarga besar tanpa ada diskriminasi.

Sebagaimana dijelaskan di atas, dalam *ashram* tidak hanya terdiri dari satu komunitas yang sama, melainkan berasal dari berbagai ragam komunitas dengan identitasnya masing-masing. Dalam *Tolstoy Farm*, para warganya tidak saja terdiri dari orang India, melainkan juga orang Eropa yang berlainan agama. Terminologi *ashram* sendiri pada dasarnya menunjukkan suatu kebersamaan dan satu kesatuan tanpa ada perbedaan. Menjadi warga dalam *ashram* dengan sendirinya menjadi satu keluarga. Setiap warga diwajibkan melakukan kerja secara bersama, tidak ada yang menjadi pembantu, semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri tanpa menyuruh orang lain yang menjadikan kedudukan orang lain *sub-ordinat*. (Gandhi, 1978).

Prinsip hidup yang dicoba dikembangkan dalam *ashram* tersebut adalah kesederhanaan. Meskipun demikian, dalam komunitas tersebut tetap dijalankan latihan-latihan keagamaan dan moral. Bagi Gandhi moral merupakan keharusan bagi orang yang menjunjung dan membela kebenaran, karena moralitas adalah dasar bagi segala sesuatu, dan kebenaran merupakan inti moralitas. Dengan demikian, *ashram* dengan bentuk dan nama yang berbeda-pun pada dasarnya selalu disemangati oleh penekanan hidup sederhana serta persiapan-persiapan pada warganya untuk menjadi *Satyagrahi*, termasuk ketika Gandhi memindahkan lokasi *ashram* ke India pada tahun 1912. (Gandhi, 1978).

Komunitas teladan atau *ashram* yang didirikan Gandhi di India diberi nama *Satyagraha*. Pemberian nama ini dilandasi oleh suatu keinginan untuk menyesuaikan diri dengan tujuan dan cara pengabdian, dan kegiatan pokok dalam *ashram* adalah menenun pakaian sebagai upaya penghargaan terhadap kerja badani yang menekankan pada kesederhanaan. Menariknya, dalam kehidupan sehari-hari, para penghuni diwajibkan untuk

menolong diri sendiri. Artinya, setiap warga baik laki-laki maupun wanita diharuskan berkarya pangan atau bekerja untuk hidupnya. Kewajiban ini berlaku bagi yang sehat maupun yang sakit, dan orang tua dibantu dalam pelayanan. (Gandhi, 1978).

Dalam *ashram* diberikan sejumlah aturan berdasarkan kesepakatan bersama yang tidak boleh dilanggar. Kesepakatan bersama ini mengindikasikan bentuk-bentuk *sosialisme utopis*, karena di dalamnya juga menunjuk pada suatu kenyataan kepemilikan dan tanggungjawab bersama. Setiap pekerjaan harus dijalankan bersama, tidak diperkenankan terjadinya proses pelibatan orang luar *ashram* yang membantu bekerja, termasuk di dalamnya adalah program pokok pemintalan benang sebagai upaya untuk membantu bangsa dan tanah air yang saat itu dilanda kelaparan. Bagi Gandhi setiap warga *ashram* memiliki kewajiban untuk berkorban demi bangsa dan tanah air. Oleh karena itu, ketika rakyat India menghadapi problem kelaparan akibat penghasilan utamanya dihancurkan oleh Kolonial Inggris, maka serentetan program kerja berkaitan dengan pemulihan kerja pokok rakyat mulai digiatkan, misalnya; penanaman kapas, memberus, memintal, menenun kain, memisahkan biji kapas, perbengkelan untuk membuat jantera, mencelup sekaligus mencetaknya, dilakukan oleh warga *ashram*. (Gandhi, 1981).

Komunitas teladan dalam *ashram* ini menunjukkan watak kemandirian yang sangat mengagumkan, sebab selain menunjukkan kemandirian dalam usaha memintal, juga dijalankan usaha pemerahan susu dan penyamakan kulit sapi untuk dijadikan sandal dan sepatu. Penyamakan kulit harus diambil dari kulit sapi yang sudah mati, karena dalam tradisi Hindu terdapat larangan membunuh sapi sebagai binatang yang dilindungi. Upaya-upaya tersebut mengandung makna yang mendalam bagi tumbuhnya swasembada dan swadaya dari warga untuk tidak tergantung kepada orang lain, apalagi terhadap negara koloni.

Sebagai suatu bentuk masyarakat yang dicita-citakan, Gandhi juga memberikan suatu bentuk pengajaran bagi warga agar memiliki kemampuan intelektualitas, seperti; membaca dan menulis. Dalam hal ini Gandhi menjelaskan; “Jika dikehendaki dan memungkinkan, *ashram* patut memberikan kepada para pekerja waktu yang lebih lapang untuk membaca dan menulis, dan juga pantas kalau warga yang buta huruf diberikan seorang guru untuk membantu mereka dalam pekerjaannya. Namun waktu untuk membaca dan semacamnya tidak dapat disisihkan dengan pengorbanan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di *ashram* sekarang ini”. (Gandhi, 1981).

Pemahaman ini semakin memberikan bukti bahwa dalam *ashram*, kerja menjadi sesuatu yang sangat penting. Orientasi pendidikan *ashram* diarahkan pada kesejahteraan bangsa. Setiap bentuk pendidikan, baik spiritual, intelektual dan perkembangan badan harus dapat dikembangkan bersama. Keberhasilan tersebut hanya dapat dicapai melalui proses perangsangan untuk menciptakan kerajinan sebagai suatu karya nyata, sedangkan teori hanya diberikan menurut keperluannya saja.

Realitas kehidupan dalam *ashram* menunjukkan suatu sisi kebersamaan dalam setiap warga. Semua warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama serta proses pentaatan terhadap prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam *ashram* yang tidak pandang status sosial dan latar belakang agama. Hal ini menunjukkan suatu bentuk masyarakat yang mempunyai orientasi kehidupan yang sama berdasarkan nilai-nilai spiritual yang sama pula yang dijunjung tinggi sebagai kebaikan bersama.

Proses kehidupan sosial dalam *ashram* adalah pencerminan sikap hidup Gandhi yang memiliki satu komitmen bahwa semua manusia adalah bersaudara. Tidak ada musuh dan tidak ada lawan, yang ada adalah kawan. Sehingga, prinsip ini melatarbelakangi kehidupan warga di *ashram* untuk menjauhkan diri dari perilaku yang merusak dan merugikan diri sendiri dan orang lain.

Dalam kehidupan *ashram* yang harus dijaga adalah bagaimana membangun ketaatan warganya terhadap setiap peraturan yang sudah disepakati bersama. Ciri yang membedakan antara penghuni *ashram* sebagai komunitas teladan dengan masyarakat lainnya adalah keteguhan mereka dalam menjaga dan mengemban peraturan. Selama ini realitas membuktikan bahwa ketidaktaatan terhadap aturan bersama merupakan awal dari kehancuran dan rusaknya tatanan dalam masyarakat.

Sebagaimana disebutkan di atas, jalannya kehidupan di *ashram* senantiasa diatur oleh peraturan-peraturan yang disepakati bersama. Pandangan Gandhi terhadap peraturan tersebut adalah sebagai sumpah yang harus ditaati, karena aturan tersebut akan menghantar pada tercapainya cita-cita dan sekaligus sebagai penangkal kendala yang muncul dan yang menghambat terealisasinya cita-cita tersebut. Bagi Gandhi, sumpah memiliki peranan yang penting dalam keteguhan menjaga komitmen bersama. Sebagaimana dikatakan Gandhi (1951: 11) “Bersumpah bukan suatu tanda kelemahan, tetapi suatu kekuatan. Untuk setiap pengorbanan, seseorang harus melakukan sumpah. Ia akan menjadi suatu benteng kekuatan.

Seseorang yang mengatakan akan melakukan ‘sejauh mungkin’, berarti akan menyingkapkan kegagahan atau kelemahan”.

Peranan sumpah bagi warga *ashram* adalah sebagai kekuatan untuk meneguhkan kesadaran untuk menaati peraturan yang ada. Tanpa ikatan tersebut dikhawatirkan setiap warga akan hidup sekehendak hatinya, dan itu sangat berbahaya bagi pencapaian cita-cita yang terdapat dalam *ashram*.

3. Moralitas Masyarakat Tanpa Kekerasan

Konsepsi masyarakat menurut Gandhi di atas memuat seperangkat akar kultural yang membentuk konstruksi masyarakat yang dicita-citakan. Akar kultural tersebut diwujudkan dalam pendirian *ashram* yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip hidup yang semestinya harus ditaati oleh warganya. Muara dari ketaatan terhadap berbagai bentuk prinsip tersebut adalah bahwa Gandhi sepakat untuk memberikan suatu argumen tentang prinsip persaudaraan umat manusia. Nilai kemanusiaan yang menjadi titik puncak bagi setiap bentuk pengabdian menjadi kata kunci untuk memberikan suatu penilaian bahwa setiap manusia adalah sama dan bersaudara, tidak boleh ada yang diletakkan atau merasa lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Prinsip ‘*semua manusia bersaudara*’ inilah yang menjadi prinsip moral dalam masyarakat yang diidealisasikan (Gandhi, 1959)

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam *ashram* yang didirikan Gandhi tersebut di atas merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sebagai bentuk pengabdian tertinggi. Kemanusiaan adalah suatu representasi atas prinsip bahwa semua manusia bersaudara. Tanpa peneguhan pada prinsip ini maka interaksi sosial dalam masyarakat hanya memunculkan sikap saling permusuhan, saling membenci dan saling menyakiti yang ujung-ujungnya adalah dibiarkannya perilaku kekerasan dalam masyarakat. Kekerasan bagi Gandhi adalah bentuk pengingkaran atas kemanusiaan. Kekerasan adalah wujud bahwa antar manusia dalam sebuah interaksi sosial tidak menjalankan suatu keyakinan bahwa semua manusia adalah bersaudara (Thomas Merton, 1992)

Persepsi Gandhi bahwa semua manusia bersaudara tidak bisa dilepaskan dari pengertiannya tentang manusia. Sebagaimana dijelaskan di atas, manusia tidak akan menemukan dirinya sendiri, tanpa terlibat dalam kebutuhan besar, yaitu sosialitas. Manusia memang makhluk otonom, tetapi otonom yang berkorelasi Artinya, tanpa korelasi, otonom

tidak bisa ditentukan. Itulah sebabnya, Gandhi berpegang teguh pada pemahaman untuk mengajarkan kepada setiap orang agar menghargai orang lain sebagai manusia. Manusia dengan nilai kemanusiaannya harus menjadi landasan dalam setiap bentuk pergaulan hidup dalam sosialitas. (Gandhi, 1988).

Perspektif ini memberikan suatu bukti betapa Gandhi mempunyai landasan filosofis dalam meneguhkan ajarannya bahwa semua manusia bersaudara. Sebagai saudara, maka manusia tidak diperbolehkan untuk hidup saling menghancurkan, menghina dan membuat manusia lain sengsara. Realitas ini oleh Gandhi dikatakan: “Manusia adalah makhluk sosial, tanpa keterkaitan dengan masyarakat tidak mungkin akan disadarinya persatuan dengan seluruh alam semesta dan tidak mungkin ditindasnya nafsu kepentingan sendiri. Sekalipun di dalam alam cukup terdapat daya tolak, tetapi alam itu hidup berkat adanya rasa timbal balik. Manusia bukan hidup karena penghancuran. Rasa cinta diri mendorongnya untuk mementingkan orang lain pula. Bangsa-bangsa hidup rukun karena terdapat saling mengindahkan dikalangan warganya”. (Gandhi, 1988).

Dalam konteks ini, Gandhi mengajukan dua ajaran sebagai penguat bahwa semua manusia adalah bersaudara; yaitu penolakan terhadap penghancuran orang lain dan kehidupan yang mementingkan orang lain. Ajaran ini bagi Gandhi akan menuntun setiap umat manusia untuk menjadikan orang lain sebagai saudara, bukan musuh. Bentuk persaudaraan tersebut sekaligus mengandaikan suatu kenyataan penghilangan setiap bentuk kekerasan, baik fisik maupun psikis dalam masyarakat. Semua manusia bersaudara merepresentasikan suatu bentuk masyarakat damai melalui peniadaan kekerasan.

4. Bangunan Dasar Masyarakat Tanpa Kekerasan

Masyarakat tanpa kekerasan merupakan cerminan dari model masyarakat yang diimpikan oleh Gandhi. Gandhi adalah seorang pemikir yang dapat dimasukkan dalam kategori penganut *sosialisme utopis*, karena ia membayangkan terbentuknya komunitas teladan yang ia contohkan dengan pembentukan *ashram*. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai prinsip etis yang oleh Gandhi digunakan sebagai ajaran moral bagi warga untuk menciptakan *prototype* masyarakat sebagaimana yang ia inginkan, yaitu masyarakat damai yang *nir-kekerasan*. Kekerasan hanya akan menimbulkan kesengsaraan bagi umat manusia dan penderitaan yang berlebihan. Hal ini dapat dibuktikan dengan penderitaan warga India

akibat kekejaman perang serta penderitaan orang miskin akibat keserakahan segelintir masyarakat.

Pembentukan masyarakat tanpa kekerasan bagi Gandhi hanya dapat ditemukan melalui komitmen warganya untuk menjalankan *ahimsa* dan *satyagraha*. Keduanya merupakan dua kata kembar yang melandasi perjuangan pantang kekerasan Gandhi. *Ahimsa* adalah falsafah pantang kekerasan yang dikembangkannya, dan *satyagraha* adalah aksi perjuangan yang tidak memakai kekerasan. *Ahimsa* dan *satyagraha* menjadi basis dasar pembentukan masyarakat tanpa kekerasan; *ahimsa* adalah falsafahnya dan *satyagraha* adalah perjuangannya. (Thomas Merton, 1988)

Masyarakat yang mengamalkan kedua basis ini akan bergerak menuju komunitas yang *emoh* kekerasan. Basis tersebut menjadi kekuatan bagi umat manusia untuk menyelenggarakan masyarakat yang terhindar dari penghancuran manusia, termasuk nilai kemanusiaan. Gandhi mengatakan; “Kekuatan yang paling hebat tersedia bagi umat manusia adalah *emoh* kekerasan. Kekuatan ini lebih ampuh dari senjata pemusnah yang terampuh yang dirancang oleh kecerdikan manusia. Pemusnahan bukanlah hukum bagi manusia. Manusia bisa hidup merdeka hanya dengan kesiapannya untuk mati, bila perlu oleh saudaranya sendiri dan tidak pernah dengan membunuhnya. Setiap pembunuhan dan bentuk penganiayaan lain tak peduli apa penyebabnya yang dilakukan oleh atau ditujukan kepada orang lain adalah suatu tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan”. (Gandhi, 1966).

Inti dari bangunan dasar masyarakat tanpa kekerasan tersebut adalah penghargaan atas martabat kemanusiaan. Penghargaan terhadap nilai kemanusiaan menjadi ukuran bagi terciptanya masyarakat yang jauh dari perilaku kekerasan. Semua warga bersama untuk tetap menjadikan nilai kemanusiaan sebagai syarat bagi terbentuknya masyarakat *nir*-kekerasan. Penguatan sikap moral untuk menjauhi (*emoh*) kekerasan adalah pilar utama merubah keadaan masyarakat dari *himsa* menuju *ahimsa*. “*Emoh* kekerasan adalah suatu kekuatan aktif yang mulia. Dia adalah kekuatan jiwa dan kekuatan Tuhan dalam diri kita. Manusia yang tidak sempurna tidak bisa menangkap seluruh maknanya.... Kita bisa mendekati sifat Tuhan seimbang dengan kemampuan kita menghayati *emoh* kekerasan; tetapi kita tak akan pernah menyamai Tuhan. *Emoh* kekerasan dampaknya bagaikan *Radium*. Namun setitik *Radium* itu bisa disusupkan ke dalam tubuh kanker, berdampak terus menerus secara diam-diam tanpa berhenti sampai akhirnya dia berhasil mengubah seluruh bagian yang tertimpa penyakit

menjadi tubuh yang sehat. Begitu pula secuil *emoh* kekerasan bereaksi secara diam-diam halus dan tak terlihat namun sanggup mengubah seluruh masyarakat”. (Gandhi, 1978).

Dalam konteks ini, *emoh* kekerasan yang dipersepsikan Gandhi tidaklah terbatas pada sekat-sekat keagamaan atau status sosial. *Emoh* kekerasan mengandung nilai universalitas, karena ia dikembangkan ke dalam prinsip kemanusiaan yang bersifat universal. Gandhi mengatakan; “*Emoh* kekerasan hanya bisa berhasil bila iman kita aktif dan kuat. *Buddha*, *Yesus*, dan *Muhammad* adalah pejuang-pejuang perdamaian dengan caranya masing-masing. Kita harus memperkaya warisan yang ditinggalkan oleh para jagat Guru ini. Tuhan ada caranya sendiri nan-hebat untuk melaksanakan maupun memilih sarananya. *Nabi Muhammad* dan *Abubakar* yang terperangkap dalam sebuah goa, diselamatkan dari pengejar mereka oleh laba-laba yang membuat sarangnya menutupi goa itu”. (Gandhi, 1996).

Dalam perspektif ini tampak betapa Gandhi tidak pernah mempersoalkan asal-muasal sekat primordialisme yang terintegrasi dalam ajaran tanpa kekerasan. Artinya, pantang kekerasan (*ahimsa*) dan perjuangan tanpa kekerasan (*satyagraha*) yang hendak dibentuknya terlahir secara objektif sebagai kebutuhan manusia. Meminjam terminologi Kuntowijoyo objektivikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal dalam agama (misalnya) ke dalam kategori-kategori objektif. Nilai-nilai yang terkandung dalam *ahimsa* dan *satyagraha* sebagai basis bangunan masyarakat tanpa kekerasan secara implisit terdapat dalam semua agama dan tradisi, sekaligus merupakan objektivikasi ajaran kebenaran. (Kuntowijoyo. 1997)

Basis penguatan masyarakat tanpa kekerasan tersebut mewujudkan diri ke dalam perilaku masyarakat untuk mengedepankan rasa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Umat manusia sebagai saudara, tanpa permusuhan, tanpa saling membenci serta kemampuan untuk tidak pernah menghadirkan kekerasan di dalamnya menjadi representasi dari kesempurnaan sikap hidup manusia dalam mewujudkan dirinya sebagai makhluk sosial. Nilai-nilai tersebut jelas merepresentasikan sebuah kebenaran. Kebenaran adalah Tuhan itu sendiri, sehingga wujud kasih sayang sebagai sebuah kebenaran merupakan tempat bersemayamnya Tuhan. Gandhi, berkata: “dimana ada kasih sayang disanalah Tuhan bersemayam”. (Gandhi, 1988)

Persepsi Gandhi yang demikian kuat terbentuk dari pengalaman panjang keperihan dan penderitaan yang dialaminya, serta pula dialami oleh masyarakat korban kekejaman perang. Perang dan kekerasan telah menghadirkan derita berkepanjangan yang implikasi

logisnya justru semakin menjebak manusia untuk menguatkan perilaku kekerasan dalam masyarakat. Dalam perang seringkali kekerasan hanya dilawan dengan kekerasan. Perilaku tersebut pada akhirnya hanya membentuk – meminjam terminologi Dom Camara sebagai *spiral of violence* (spiral kekerasan). Kekerasan yang dilawan dengan kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan terus menerus dan itu yang disaksikan oleh Gandhi dalam perjalanan hidupnya baik di Afrika Selatan maupun di India. (Dom Camara. 1971)

Realitas tersebut membulatkan tekadnya untuk melakukan perjuangan *satyagraha* (Gandhi, 2001). Menurut Gandhi memulai langkahnya dengan menerapkan pola kehidupan *ahimsa* (falsafah pantang kekerasan) kepada warga untuk menjadi semangat dalam menjalankan perjuangannya. Dia mengatakan bahwa: “ tidaklah mungkin sebuah perjuangan terhindar dari perilaku kekerasan, tatkala falsafah hidupnya tidak digerakkan oleh basis sikap perilaku yang juga menghindarkan diri dari kekerasan”. Artinya, falsafah hidup dapat berpengaruh secara massif ke dalam perilaku kongkrit masyarakat. Falsafah hidup menggerakkan manusia untuk menentukan sikap dan tindakannya. Itulah sebabnya Gandhi berkeyakinan bahwa falsafah hidup pantang kekerasan (*ahimsa*) harus merupakan landasan bagi setiap bentuk perjuangan melawan penindasan dan kesewenang-wenangan. Kekerasan tidak boleh dilawan dengan kekerasan. Kekerasan dilawan dengan kekerasan hanya akan memunculkan reproduksi kekerasan atau kekerasan jenis baru. (Gandhi.1988)

Gandhi menjelaskan pantang kekerasan dan gerakan tanpa kekerasan merupakan suatu kebaikan yang universal. Kedua basis tersebut bukan semata-mata sebagai suatu taktik politik dalam upayanya membebaskan rakyatnya dari kekuatan asing, namun semangat tersebut lahir dari suatu kesadaran batin tentang kesatuan spiritual dalam dirinya sendiri. (Gandhi. 1988) Thomas Merton memberikan penjelasan tentang keseluruhan konsep ajaran Gandhi yakni aksi pantang kekerasan dan *satyagraha* tidak akan dapat dipahami apabila dipikirkan sebagai suatu cara untuk mencapai persatuan serta bukan sebagai buah persatuan batin yang tercapai terlebih dahulu. (Thomas Merton. 1992)

Melalui gerakan yang dilakukan oleh Gandhi, *ahimsa* dan *satyagraha*, ia berusaha mewujudkan tiga macam pembebasan; *Pertama*, ia ingin melepaskan kebijaksanaan religius India dari kebutaan dan kemerosotan yang sedang dialami. Kebijaksanaan religius India sebagai akibat ketidakadilan yang keterlaluan dari suatu sistem yang sudah menyalahi sifatnya sendiri yang sebenarnya. *Kedua*, ia ingin membebaskan kaum hina dina ‘*Harijan*’, bukan

hanya dari penindasan politik dan ekonomi melainkan juga dari mimpi buruk mereka yaitu kebencian diri serta keputusan mereka, dan *Ketiga*, Gandhi berkeinginan membebaskan para penindas sendiri dari ketergantungan mereka secara membabibuta dan tanpa harapan pada sistem yang mempertahankan keadaan seperti apa adanya. Ketiga upaya tersebut menunjukkan semangat Gandhi dari upaya untuk melakukan liberalisasi (pembebasan) umat manusia dari situasi-situasi yang bersifat *sub-human*. Yang bertidak kekerasan sekaligus yang tertimpa kekerasan pada dasarnya berada dalam derajat *sub-human* tersebut.

Thomas Merton memaparkan yang menarik dalam konsepsi Gandhi tersebut adalah keluasannya, keterpaduannya dan kesatuannya. Gandhi telah memberikan ajaran sekaligus warisan kepada dunia bahwa kejahatan yang diderita umat manusia tidak dapat dibinasakan dengan serangan kekerasan, yakni satu bagian umat manusia menyerbu bagian yang lain dengan kemurkaan yang menghancurkan. Kejahatan yang terjadi pada umat manusia dalam masyarakat adalah kejahatan bersama dan pemecahannya-pun harus pemecahan bersama. (Thomas Merton. 1992)

Perubahan masyarakat dengan demikian harus diawali terbentuknya pribadi luhur manusia penyusunnya. Sebagaimana dikatakan Gandhi bahwa tidak mungkin ada perdamaian di dunia tanpa jenis perubahan batin yang memulihkan manusia pada 'hati-nurani'-nya. (Gandhi. 1982) namun demikian bagi Gandhi *ahimsa* (pantang kekerasan) merupakan hukum dasar bagi hidup manusia. Itulah sebabnya mengapa *ahimsa* dapat digunakan sebagai prinsip paling efektif untuk tindakan sosial, karena secara mendalam sesuai dengan kebenaran sifat alami manusia dan sesuai benar dengan keinginan bawaannya akan perdamaian, keadilan, ketertiban, kebebasan dan martabat pribadi. Oleh karena *himsa* (kekerasan) merendahkan dan merusak manusia, maka menghadapi kekerasan dengan kekerasan, dan kebencian dengan kebencian hanya akan menambah parahnya kemerosotan secara progresif dari manusia. Sedangkan pantang kekerasan kebalikannya, menyembuhkan dan memulihkan sifat alami manusia sembari memberikan kepadanya sarana bagi penyembuhan serta pemugaran ketertiban dan keadilan sosial. *Ahimsa* bukan suatu kebijakan untuk merebut kekuasaan. *Ahimsa* merupakan jalan untuk mengubah hubungan-hubungan agar terlaksana peralihan kekuasaan secara damai, dilakukan dengan sukarela tanpa desakan oleh semua yang bersangkutan. Oleh karena semua mengakuinya sebagai hak. (Gandhi. 1988)

Pantang kekerasan bagi Gandhi adalah kekuasaan yang dapat membentuk masyarakat. Kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat hanya dapat terwujud bila antara individu penyusunnya mempunyai kesadaran penuh untuk melaksanakan prinsip pantang kekerasan. “Pantang kekerasan mencakup pemurnian diri yang sesempurna mungkin bagi manusia. Bagi perorangan, kekuatan pantang kekerasan adalah dalam proporsi yang tepat sesuai dengan kemampuan, bukan kamauan, dari pengamat pantang kekerasan untuk menimbulkan kekerasan. Kekuatan yang tersedia bagi penganut pantang kekerasan selalu lebih besar daripada jika ia bersifat keras. Tidak ada kekalahan dalam pantang kekerasan. *Ahimsa* (pantang kekerasan) adalah satu-satunya kekuatan yang sejati dalam hidup. *Ahimsa* adalah satu-satunya hal yang permanen dalam hidup, satu-satunya mengandung arti, usaha apapun yang engkau limpahkan baginya adalah berguna sebaik-baiknya”. (Gandhi, 1972).

Konsepsi masyarakat tanpa kekerasan yang dikonstatir Gandhi tersebut di atas mempunyai ciri khas. Hal tersebut dapat ditemukan dari bentuk-bentuk kekuatan yang menyusun bangunan dasar bagi masyarakat tersebut yang lebih bersifat spiritual daripada material. Spiritual dalam artian bahwa basis dasar masyarakat yang hendak dikembangkan oleh Gandhi berhubungan dengan aspek kerohanian manusia bukan aspek fisik dari kodrat kemanusiaan.

Konskuensi logis dari penerapan *ahimsa* dalam pembentukan masyarakat tanpa kekerasan tersebut adalah diberlakukannya gerakan *satyagraha* atau perjuangan tanpa melibatkan unsur-unsur kekerasan. Gandhi memaparkan secara detail jika *satyagraha* selalu lebih unggul dari perlawanan bersenjata. Untuk dapat mencapai tujuan dalam *satyagraha*, Gandhi selanjutnya memberikan tiga syarat; *pertama*, *sang satyagrahi* harus tidak mempunyai rasa benci kepada lawan; *kedua*, urusannya harus benar dan penting; *ketiga*, *sang satyagrahi* harus bersedia menderita sampai akhir. Muara dari semuanya adalah bahwa manusia dalam sosialitas harus memainkan hidup dengan cinta kasih antara sesama. Hanya dengan cinta kasih hidup menjadi bermakna, dan hanya melalui cinta kasih, *satyagraha* dapat diwujudkan. (Gandhi, 1972).

5. Implikasi Pemikiran Gandhi Terhadap Pembentukan Masyarakat Sipil di Indonesia

Sejak belakangan ini tema tentang masyarakat sipil di Indonesia mulai menunjukkan bentuknya. Hampir setiap saat ditemukan berbagai perdebatan panjang perihal konsepsi

masyarakat sipil yang cocok diterapkan di Indonesia, yang realitas masyarakatnya beragam dan multi-etnik. Realitas masyarakat yang demikian seringkali menyulitkan bagi terciptanya masyarakat sipil yang dicita-citakan. Apalagi, kenyataan menyebutkan betapa kemajemukan atau pluralitas tidak hanya menjadi kekuatan untuk mempersatukan (*uniting factor*), melainkan juga dapat berfungsi sebagai faktor pemecah belah (*deviding factor*). Berbagai konflik dan kekerasan yang muncul belakangan ini merepresentasikan betapa masih sulitnya keinginan untuk menciptakan masyarakat sipil yang dicita-citakan, yaitu masyarakat sipil yang mandiri, otonom dan jauh dari perilaku kekerasan.

Berdasarkan fenomena kekerasan dan konflik yang terjadi di Indonesia, maka ajaran prinsip-prinsip etis yang dikembangkan Gandhi dalam *ashram* serta keyakinannya bahwa '*semua manusia bersaudara*' menemukan titik relevansinya. Sebagaimana diketahui, salah satu tema penting yang mengedepan dalam *diskursus* pemikiran di Indonesia belakangan ini adalah menguatkan ide tentang masyarakat sipil. Setelah lama hidup dalam bayang-bayang otoritarianisme kekuasaan negara pada masa Orde Baru, masyarakat Indonesia seolah terlepas dari kekuasaan yang hegemoni tersebut.

Antonio Gramsci menjelaskan bahwa kekuasaan yang bersifat hegemonik selalu mematikan potensi-potensi penguatan masyarakat sipil. Berakhirnya kekuasaan yang hegemonik semasa Orde Baru memberikan inspirasi dan semangat baru bagi munculnya ide-ide penguatan masyarakat sipil. Artinya, selama ini negara menguasai hampir keseluruhan sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga ruang-ruang '*rakyat*' yang secara kultural tumbuh subur dalam masyarakat menjadi tidak berkembang atau sengaja dimatikan. Akibatnya, masyarakat menjadi tergantung secara berlebihan pada negara. Implikasi logisnya, ketika negara dalam keadaan tidak stabil atau mengalami kemunduran peran, maka situasi masyarakat berada dalam kondisi yang *chaos* (kacau). Fenomena merebaknya konflik dan disintegrasi bangsa di berbagai belahan daerah merepresentasikan suatu bukti terjadinya ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola kepentingan dan perbedaan yang berkembang. (Antonio Gramsci. 1991)

Menurut Umar Kayam Implikasi logisnya adalah situasi *anarki* atau pemecahan masalah dengan kekerasan telah menjadi satu-satunya jalan bagi masyarakat. Realitas ini membuktikan terjadinya situasi *paradoks* dalam perubahan masyarakat di Indonesia pasca-reformasi nasional. Di satu sisi menginginkan terjadinya penguatan masyarakat sipil yang

mandiri, lepas dari intervensi negara, tetapi di sisi lain justru melahirkan fenomena konflikual yang semakin terakumulasi. Padahal basis dasar dari masyarakat sipil adalah kemampuan untuk mengelola perbedaan dan persoalan melalui kultur masyarakat dialog. Kultur masyarakat dialog mencerminkan kekuatan untuk menghormati kepentingan yang berbeda dan penyelesaiannya juga harus meminimalkan terjadinya konflik antar kelompok. (Tim Maulana, 1999)

Basis masyarakat sipil yang seharusnya dikembangkan di Indonesia adalah penguatan masyarakat yang mengedepankan; (1) dialog dalam menyelesaikan masalah, (2) menjauhkan diri dari perilaku konflikual dan kekerasan, (3) mengedepankan kepentingan bersama atas dasar nilai-nilai kemanusiaan, dan (4) mempunyai kemandirian dalam segala bidang, sosial, politik dan ekonomi. Kemandirian dalam konteks ini adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri tanpa keterlibatan kekuatan lain, termasuk negara. Kemandirian di bidang ekonomi misalnya, menunjukkan satu sisi kekuatan dari masyarakat sipil untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. (AS. Hikam, 1999)

Prinsip-prinsip yang demikian menunjukkan relevansinya dengan ajaran Gandhi yang terdapat dalam 11 prinsip etik yang harus dipatuhi oleh warga *ashram*. Kesebelas prinsip etik tersebut merupakan kekuatan untuk mewujudkan kemandirian secara penuh dalam masyarakat dari berbagai bentuk hegemoni dan intervensi oleh kekuatan manapun. Melalui penerapan ajaran Gandhi, maka dapat diciptakan suatu komunitas teladan yang dalam konteks ini minimal dinamakan sebagai *civil society* (masyarakat sipil). Menurut Umar Kayam salah satu yang memberikan dasar bagi perlunya ide-ide penguatan masyarakat sipil adalah pentingnya prinsip harmoni sosial, yang mengandung pengertian untuk tidak menciptakan situasi *chaos* (kekacauan) yang dapat merusak hubungan antar manusia. (Tim Maulana, 1999)

Masyarakat sipil dalam hal ini pada dasarnya merupakan suatu model masyarakat yang tercipta berkat partisipasi yang penuh kebebasan oleh sejumlah manusia yang masing-masing dalam kedudukan yang berkesamaan derajat, berkomitmen untuk membangun bersama suatu komunitas politik yang disebut Negara, Dalam kehidupan modern yang penuh dengan cita-cita pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan dan ketertindasan, maka pembentukan masyarakat sipil merupakan realitas yang harus dikedepankan. (Soetandyo Widnjosoebroto, 1999).

Masyarakat sipil yang demikian adalah realitas hilangnya bentuk penindasan sekaligus ketertindasan dari manusia. Pembentukan masyarakat sipil merupakan keniscayaan untuk menghilangkan berbagai bentuk kekerasan sekaligus perilaku yang mengedepankan kekerasan di dalamnya. Prinsip dasar yang hendak dibangun dalam konsep masyarakat sipil pada dasarnya adalah pengarus-utamaan tema-tema kepentingan bersama di atas, kepentingan sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan sebagai nilai yang bersifat universal. Prinsip ini dalam banyak hal diyakini oleh Gandhi sebagai moralitas bersama yang harus dianut dan dijalankan oleh setiap warga agar kehidupan umat manusia tidak dilandasi oleh nafsu untuk menguasai orang lain. Sebagaimana pernah diyakini Gandhi bahwa '*semua manusia bersaudara*', sehingga setiap manusia harus menghormati orang lain atas dasar kemanusiaan sebagai nilai yang berlaku secara universal.

Kesimpulan

Secara eksplisit Gandhi tidak pernah memberi batasan dan pemahaman mengenai masyarakat. Pemahamannya tentang masyarakat selalu terintegrasi dengan gagasan-gagasan besarnya tentang perlunya tatanan dalam masyarakat yang harmonis dan terhindar dari perilaku konfliktual. Namun demikian, Gandhi adalah seorang yang konsisten memegang pendirian dan keteguhan hati untuk membangun komunitas yang mengedepankan harmoni sosial, maka ia selalu berusaha menampilkan suatu konsepsi tentang konstruksi masyarakat dan bukan pengertian masyarakat.

Konstruksi masyarakat yang diinginkan Gandhi adalah masyarakat *nir-kekerasan (non violence)*, hal ini memungkinkan dicapai hanya melalui komitmen warganya untuk menjalankan prinsip *ahimsa* dan *satyagraha*. *Ahimsa* adalah falsafah pantang kekerasan dan *satyagraha* adalah aksi perjuangan yang tidak mengenal kekerasan. Hal ini dicoba diterapkan Gandhi pada *ashram*, yang kemudian warga *ashram* menjadi komunitas tauladan yang diidamkan.

Mencermati fenomena kekerasan dan konfliktual yang terjadi di Indonesia, maka prinsip-prinsip etis masyarakat yang dikembangkan Gandhi dalam *ashram* serta keyakinannya bahwa '*semua manusia bersaudara*', menjadi menemukan titik relevansinya bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*). Prinsip dasar yang hendak dibangun dalam masyarakat sipil adalah pengarus-utamaan tema-tema kepentingan bersama dan kepentingan individu pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

Daftar Pustaka

- Andrews, C.F., 1949. *Mahatma Gandhi Ideas*. George Alen dan Unwin Ltd: London.
- Bakker, A. dan A. Charis Zubair, 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Kanisius: Yogyakarta.
- Gandhi, M.K., 1959. *Ashram Observances Action*. Navajivan Publishing House: Ahmedabad.
- Gandhi, M.K., 1981. *Ashram Observance in Action*. terj. Gedong Bagoes Oka. Yayasan Bali Santi Sena: Bali.
- Gandhi, M.K., 1978. *A Story of My Experiments with Truth*. terj. Gd. Bagoes Oka. Yayasan Bali Santi Sena: Denpasar.
- Gandhi, M.K., 1979. *From Yeravda Mandir*. terj. Gedong Bagoes Oka. Yayasan Bali santi Sena: Bali.
- Gandhi, M.K., 1982. *Gandhi Sebuah Otobiografi, Kisah Ekspremen-Ekspremenku Dalam Mencari Kebenaran*. terj. Gedong Bagoes Oka. Sinar Harapan: Jakarta.
- Gandhi, M.K., 1950. *Religi Susila*. terj. Sumirat. Balai Pustaka: Jakarta.
- Gandhi, M.K., 1951. *Satyagraha*. Navajivan Publishing House: Ahmedabad.
- Gandhi, M.K., 1958. *Satyagraha* (ed. Bharatan Kamurappa). Navajivan Publishing House: Ahmedabad.
- Gandhi, M.K., 1988. *Semua Manusia Bersaudara, Kehidupan dan Gagasan Mahatma Gandhi Sebagaimana Diceritakannya Sendiri*. terj. Kustiniyati Mochtar; kata pengantar Mochtar Lubis. Obor dan Gramedia: Jakarta.
- Gandhi, M.K., 1953. *Toward New Education*. Navajivan Publishing House: Ahmedabad.
- Gandhi, M.K., 1982. *Tuhanku (oh My Gandhi)*. Ashram Gandhi: Bali.
- Gramsci, Antonio, 1991. *Selections from Prison Notebooks*. Lawrence & Wishat: London.
- Hikam, Moh. AS., 1999. *Politik Kewarganegaraan*. PT. Rosdakarya: Bandung.
- Sugiharta, I. P. S. O., & Sudarsana, I. K. (2017). Hypnotic Learning Characteristics On Sisya Brahmakunta Community In Denpasar. *Vidyottama Sanatana: International Journal of Hindu Science and Religious Studies*, 1(2), 132-145.
- Kayam, Umar, 1999. "Menghidupkan Kultur Masyarakat Berembuk", dalam Tim MAULANA, editor 1999. *Jika Rakyat Berkuasa*. Pustaka Hidayah: Bandung.
- Kuntowijoyo, 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Mizan: Bandung.

- Lubis, Mochtar, 1988. *Menggapai Dunia Damai*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Mehta, Ved, 2002. *Ajaran-Ajaran Mahatma Gandhi, Kesaksian dari Para Pengikut dan Musuh-musuhnya*, terj. Siti Farida. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Merton, Thomas, 1992. *Gandhi tentang Pantang Kekerasan*. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.
- Nicholson, Michael, 1994. *Mahatma Gandhi, Pahlawan yang Membebaskan India dan Memimpin Dunia dalam Perubahan Tanpa Kekerasan*. terj. Hilman Farid Seiadi. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Pleyser, 1992. *Gandhi Pelopor Kemerdekaan India*. Jambatan: Yogyakarta.
- Richards, Glyn, 1982. *The Philosophy of Gandhi, A Study of his basic ideas*. Curzon Press, Barnes & Noble Books: London.
- Sudarsana, I. K. (2016). Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia). *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(2), 44-53.
- Sen, Ela, 1948. *Gandhi Biographical Study*. Valian Publications Ltd.: London.
- Thekkenedath, J., 1978. *Love of Neighbour in Mahatma Gandhi*. St. Paul's Press Training School: Bangalore.
- Veeger, K.J., 1993. *Realitas Sosial, Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu-Masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Wakefield, Gordon S., 1986. *Dictionary of Cristian Spirituality*. SCM Press: London.
- Wegig, R. Wahana, 1986. *Dimensi Etis Ajaran Gandhi*. Kanisius: Yogyakarta.
- Wibowo, Toto Wasis, 1989. *Ajaran Gandhi tentang Ashram (Suatu Studi Sosiologis Mengenai Toleransi Umat Beragama)*. *Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta*.
- Widnjosoebroto, Soetandyo, 1999. "Masyarakat Warga: Prasyarat Terwujudnya Kehidupan Demokratis dalam Bernegara" dalam Tim MAULA, 1999. *Jika Rakyat Berkuasa*. Pustaka Hidayah: Bandung.
- Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). REFLEKSI KRITIS IDEOLOGI PENDIDIKAN KONSERVATISME DAN LIBERALISME MENUJU PARADIGMA BARU PENDIDIKAN. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(4), 283-291.

Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). Praksis Pendidikan Menurut Habermas (Rekonstruksi Teori Evolusi Sosial Melalui Proses Belajar Masyarakat). *Indonesian Journal of Educational Research*, 2(1), 18-26.

Wisarja, I. K., & Sudarsana, I. K. (2017). REFLEKSI KRITIS IDEOLOGI PENDIDIKAN KONSERVATISME DAN LIBRALISME MENUJU PARADIGMA BARU PENDIDIKAN. *Journal of Education Research and Evaluation*, 1(4), 283-291.

Tata Kelola Olah Raga dengan Figur Politik dari Militer: Studi Kasus Pemerintah Indonesia dalam Konteks Sepak Bola

Andika Sanjaya¹, Hardi Alunaza SD², Achmad Bayu Chandra Buwono³, Nining Nadya Rukmana Sari⁴

¹Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

²Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Tanjungpura Pontianak.

³Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

⁴Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

andikasanjaya@student.undip.ac.id, hardialunaza@gmail.com, Bayuchandra459@gmail.com, nining_nadya@yahoo.com

Abstract

Indonesian football turns to be a “colosseum” of yearly political conflict among political “gladiators”. The government aware that according to the history, there is a closeness between football and politics. The government also aware that football can be used as a soft power to stay existed on the international stage. The problem is, the international football federation prohibit the intervention of the government and give a punishment in the shape of suspension for the violators. This paper used a case study method to explain the phenomenon. The government choose using a political figure to indirectly resolute the conflict and govern the football. The military-political figure tends to have suitable characteristics to help the government. However, the political figure has a personal political ambition. It is reasonable in Indonesia.

Keyword: *Sports governance, political figure, public spaces, conflict resolution, political communication.*

Abstrak

Sepak bola Indonesia menjadi “koloseum” konflik politik menahun bagi para “gladiator” politik. Pemerintah menyadari bahwa menurut sejarah, ada kedekatan antara sepak bola dan politik. Pemerintah juga menyadari sepak bola dapat digunakan sebagai kekuatan halus untuk eksis di panggung internasional. Permasalahannya, federasi sepak bola internasional melarang intervensi pemerintah dan memberi hukuman berupa pembekuan bagi negara pelanggar. Paper ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Pemerintah memilih menggunakan figur politik untuk secara tidak langsung menyelesaikan konflik dan mengelola sepak bola. Figur politik militer memiliki karakteristik untuk memuluskan rencana pemerintah. Meskipun demikian, figur politik juga memiliki ambisi politik pribadi. Hal itu wajar di Indonesia.

Keyword: *Tata kelola olahraga, figur politik, ruang publik, resolusi konflik, komunikasi politik.*

Submite	: 20 Desember 2017
Review	: 10 Januari 2018
Accepted	: 30 Juni 2018
Surel Correspondensi	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Pada panggung internasional, *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) berlaku sebagai TNC (*transnational corporations*) pemasaran sepak bola global sekaligus NGO (*non-governmental organization*). Posisi FIFA sebagai aktor non-negara yang memiliki

kekuasaan dalam politik. Kasus dominasi politik FIFA menjadi contoh bagaimana sudut pandang neo-liberal berlaku di ranah global. Sebagai TNC, FIFA memiliki TPR (*transnational private regulation*), semacam regulasi yang memungkinkan penetapan regulasi dan standar global terkait suatu isu. Batas negara tidak berlaku dalam konteks TNC (Meier & Garcia, 2015). Statuta FIFA merupakan wujud TPR dari FIFA. Statuta FIFA merupakan *Lex Sportiva* yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik dualisme dari sepak bola suatu negara (Aruan, Sirait, Leviza, 2014).

Pemerintahan FIFA merujuk pada hierarkis kekuasaan vertikal. FIFA membawahi kompetisi regional, kompetisi nasional, klub, dan pemain. Pengaruh FIFA sampai ke pemain sebagai individu (Amara et al, 2005). Pada tahun 2005, FIFA semakin menunjukkan dominasi melalui kebijakan “*suspension*” (pembekuan). FIFA menegasi pihak-pihak diluar mereka untuk melakukan intervensi. Sasaran utama FIFA tidak lain adalah pemerintahan negara. Intervensi pemerintah merupakan alasan paling umum suspensi FIFA. Antara 2004-2013, sepak bola 17 negara merasakan sanksi FIFA karena intervensi pemerintah. Guatemala, Kenya, Macau, Yaman, Yunani, Iran, Kuwait, Albania, Madagascar, Chad, Iraq, Ethiopia, Peru, Brunei Darussalam, El Salvador, Nigeria, dan Kamerun adalah negara-negara yang terkena sanksi tersebut (Meier & Garcia, 2015).

Di dalam ekosistem sepak bola suatu negara, terdapat banyak *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang terlibat. Selain FIFA dan pemerintahan negara, ada pengaruh juga dari pemerintah kota, federasi regional, suporter, agen, lembaga penyiaran terrestrial, lembaga penyiaran satelit, klub kecil, klub semi-major, klub G14, dan FIFPRO selaku lembaga yang mengurus pemain. Pemerintah bukan satu-satunya pemangku kepentingan dalam sepak bola. Dari semua pemangku kepentingan, FIFA muncul sebagai kekuatan terkuat yang dapat mengatur semuanya (Amara et al, 2005). Pemerintah berkepentingan untuk memajukan sepak bola. Sebagai olahraga rakyat, sepak bola mampu menjadi hiburan sekaligus menjadi pendongkrak ekonomi negara. Sepak bola juga dapat menjadi *soft power* bagi suatu negara (Santosa, 2017).

Eksistensi di dunia internasional menjadi fokus pemerintah Indonesia. Gerakan tersebut dimulai khususnya sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Keaktifan dalam dunia internasional menjadi salah satu indikator kebangkitan Indonesia. Sepak bola adalah salah satu jalan bagi pemerintah untuk lebih aktif di dunia internasional. Selain itu, konflik yang terjadi di dalam negara harus segera diselesaikan, apalagi konflik yang sudah mengganggu stabilitas nasional (Santosa, 2017).

Belajar dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), negara tersebut menggunakan sepak bola untuk visi negara *superpower*. Sedangkan, sepak bola Asia saat ini mulai memperoleh tempat di dalam percaturan sepak bola internasional. Oleh karena itu, jika sepak bola Indonesia mengalami konflik berkepanjangan, maka sesegera mungkin harus diselesaikan (Santosa, 2017).

Sepak bola Indonesia memiliki karakteristik unik. Dari sejak sebelum kemerdekaan, sepak bola Indonesia selalu digunakan untuk kepentingan politik. Archetti (2005) menentang bahwa sepak bola bukan tentang politik, namun, kenyataannya, sepak bola Indonesia sangat erat kaitannya dengan politik. Aktor-aktor politik dan partai politik mengintervensi jalannya persepakbolaan nasional (Colombijn, 2000). Pemerintah Indonesia sadar telah terjadi konflik bertahun-tahun di dunia sepak bola nasional. Konflik sepak bola berkaitan dengan politik. Oleh karena itu, pemerintah berkeinginan untuk menyelesaikannya. Namun, ego kedua kubu yang berkonflik sangat besar, pemerintah memerlukan cara khusus yang relatif aman di bawah pengawasan FIFA (Ariyanto, 2013).

Secara khusus, Colombijn menyayangkan bahwa sepak bola Indonesia, khususnya terkait politik, kurang menarik minat kaum akademisi. Bidang tersebut hanya dikaji oleh jurnalis. Oleh karena itu, riset terkait politik sepak bola seharusnya diperbanyak. Colombijn dan Santosa mempelajari politik sepak bola berkonteks Indonesia. Bowen, Amara, dan kolega, Archetti, Meier & Garcia, mempelajari politik sepak bola berkonteks internasional.

Pengamatan terhadap riset-riset sebelumnya menghasilkan kesimpulan bahwa belum ada yang secara rinci membahas peran pemerintah dan figur politik kalangan militer dalam *sports governance* (tata kelola olahraga), khususnya di Indonesia. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana tata kelola pemerintah Indonesia dalam olahraga. Tulisan ini mengidentifikasi peran pemerintah dan figur politik dalam mengelola olahraga. Tulisan ini terbagi menjadi empat poin penting dalam menjelaskan manajemen sepak bola dengan figur politik. Pertama, penjelasan figur politik dan komunikasi politik dalam ruang publik. Kedua, model tata kelola olahraga internasional dan kekuatan halus. Ketiga, model tata kelola olahraga Indonesia dan resolusi konflik. Juga, penglibatan figur politik serta konsekuensi negatif penglibatan figur politik.

Metode

Pada dasarnya sebuah penelitian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang ingin diketahui penulis. Tulisan tentang manajemen sepak bola dengan

figur politik ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan keadaan objek serta permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode deskriptif di sini diharapkan dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara jelas fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Secara khusus, penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Studi kasus diperlukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa tentang fenomena yang dijadikan tujuan riset. Penelitian studi kasus ini hanya mengambil satu fenomena, yaitu tata kelola olahraga oleh pemerintah Indonesia dengan figur politik. Pemilihan kasus untuk studi kasus dengan dilengkapi alasan. Peneliti menemukan bahwa kecenderungan pemerintah untuk intervensi dengan cara tidak langsung di bawah bayang-bayang ancaman hukuman dari federasi sepak bola internasional menjadi isu menarik (Boue & Kjaer, 2010).

Penulis menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, buku-buku, jurnal, laporan penelitian, prosiding konferensi, dan data dari situs yang reliabel yang terkait dan mendukung data penelitian ini. Dalam tulisan ini digunakan tiga alur untuk mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh dan diamati (Sugiono, 2011).

Metode studi deskriptif kualitatif telah digunakan oleh Colombijn dan Santosa untuk mempelajari politik sepak bola berkonteks Indonesia. Colombijn (2000) menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk menganalisis aspek kontinuitas sepak bola Indonesia, peran sepak bola terhadap perubahan sosial, serta peran aktor-aktor politik dalam sepak bola Indonesia. Santosa (2017) menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk mempelajari bagaimana negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengelola *soft power* sepak bola untuk menjadi negara superpower. Selain melibatkan pemerintah, pengelolaan juga melibatkan sektor bisnis.

Selain itu, metode studi deskriptif kualitatif juga digunakan oleh Bowen, Amara, dan kolega Archetti, Meier & Garcia dalam meneliti politik sepak bola dalam konteks internasional. Sesuai dengan riset-riset terdahulu, data diperoleh melalui literatur akademis dan media massa. Bowen menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk meneliti peran tentara PBB dalam mengintervensi situasi suatu negara. Meskipun tidak secara langsung berhubungan dengan sepak bola, namun peran tentara dalam menyelesaikan konflik dijelaskan secara rinci dalam riset tersebut.

Amara dan kolega menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk memetakan beberapa model intervensi pemerintah dalam sepak bola. Beberapa negara menjadi contoh kasus yang

diteliti, secara khusus mewakili karakteristik yang berbeda-beda. Archetti menggunakan studi deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi kebimbangan moral yang terjadi antara politik dan sepak bola. Konteks yang diambil adalah dalam penyelenggaraan event internasional Piala Dunia di Argentina yang bersamaan dengan kondisi junta militer.

Meier & Garcia meneliti bagaimana tiga negara berusaha melawan dominasi FIFA sebagai TNC. Namun, pada akhirnya, ketiganya harus menggunakan cara yang direstui FIFA untuk menyelesaikan konflik sepak bola. Dari beberapa riset tersebut, menjadi alasan peneliti menggunakan metode studi deskriptif kualitatif. Pengambilan data dari media massa sebagai pelengkap, karena data primer penelitian politik dan sepak bola berkonteks Indonesia belum banyak tersedia, seperti yang diungkapkan oleh Colombijn.

Hasil dan Pembahasan

Figur Politik dan Komunikasi Politik dalam Ruang Publik

Politisi berusaha meraih tujuan mereka melalui komunikasi politik dalam ruang publik. Politisi berkomunikasi untuk memperoleh apa yang mereka inginkan. Politisi dapat memanfaatkan ruang publik, seperti dijelaskan Habermas, sebagai ruang penghubung antara publik dan pemerintah. Politisi dapat memanfaatkan media massa untuk mendominasi ruang publik. Ketika memperoleh akses kepada ruang publik, politisi dapat mempengaruhi masyarakat selaku calon pemilih (Iqbal, 2016).

Sepak bola merupakan cabang olahraga terpopuler di Indonesia. Sepak bola dianggap sangat menarik untuk dimanfaatkan para politisi. Mereka bisa menggunakan sepak bola untuk memperoleh imej positif, memperoleh pendanaan, dan memperoleh peliputan media yang luas (Dorsey & Sebastian, 2016). Sepak bola merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh politisi. Ketika politisi berhasil masuk ke sepak bola, maka mereka secara otomatis memperoleh ruang publik untuk berkampanye. Sepak bola adalah ruang publik yang banyak memperoleh visibilitas, khususnya di Indonesia (Iqbal, 2016).

Politisi di Indonesia bahkan berani menjalankan cara kotor pengaturan skor untuk kepentingan politik. Pengaturan skor merupakan cara yang dilakukan politisi lintas generasi (Colombijn, 2000). Pengaturan skor untuk politik, merupakan cari bagi figur politik untuk memperoleh visibilitas dalam ruang publik. Politisi menggunakan beranekaragam cara untuk mempengaruhi hasil pertandingan tim yang mereka dukung. Ketika tim yang mereka dukung

menang, maka politisi secara otomatis akan lebih sering memperoleh atensi media massa. Atensi media massa, bagi politisi dapat berarti memperoleh ruang publik, sedangkan ruang publik berarti visibilitas (Iqbal, 2016).

Perebutan ruang publik, pada akhirnya menghasilkan konflik politik. Konflik internal dalam federasi sepak bola Indonesia, PSSI, bermula dari perubahan sistem kompetisi Liga Indonesia yang diganggu ketua umum terpilih pada September 2011, Djohar Arifin Husein. Anggota Komite Eksekutif (exco) PSSI, La Nyalla Mattalitti meminta liga tidak diubah dan kepengurusan lama era ketum Nurdin Halid dimasukkan dalam kepengurusan PSSI yang baru. Djohar menentang tuntutan La Nyalla, dan menjalankan kompetisi dengan format baru bernama Liga Primer Indonesia (LPI). Kompetisi ini memecah exco PSSI menjadi dua kelompok. Dari sinilah, kemudian terjadi dualisme PSSI dan KPSI. KPSI adalah federasi bayangan yang dibuat untuk menentang kebijakan PSSI (Sammy, 2012).

Media massa dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk mewujudkan tujuan mereka. Konflik dapat dipertajam dan diperjelas dengan adanya media massa. Hiperrealitas yang dibangun media massa, dramatisasi melampaui realitas, menjadi ancaman bagi resolusi konflik. Konflik lanjutan akan tersulut melalui provokasi figur politik (Anggoro, 2014).

Sekilas, konflik dualisme sepak bola yang dimulai tahun 2011 tersebut bukan merupakan konflik politik. Kedua disputasi punya prinsip masing-masing untuk tetap berkonflik. Namun, pada perjalanannya, kedua ketua federasi Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti, menjadikan sepak bola sebagai jalan memperoleh visibilitas politik. Djohar mendeklarasikan diri berhasrat mendaftar sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Langkat untuk pemilihan umum (pemilu) 2018 (Santama, 2017). La Nyalla juga berkeinginan menjadi calon kepala daerah di Provinsi Jawa Timur untuk pemilu di tahun yang sama (Priyasidarta, 2017). Selain keduanya, mantan ketum PSSI sebelumnya, Nurdin Halid, juga berkeinginan maju sebagai calon kepala daerah di Provinsi Sulawesi Selatan (Wirabhuana, 2017).

Sepak bola merubah masyarakat. Pertarungan sepak bola bergeser dari etnis ke wilayah, hal ini menandakan suatu integrasi karena identitas bergeser pada pembagian wilayah. Dulu sepak bola mempertemukan perlawanan nasionalisme dan kolonialisme. Sekarang, pemimpin memanfaatkan sepak bola untuk mengalahkan rivalnya untuk menumbuhkan sikap kedaerahan dan membuat imej positif (Colombijn, 2000).

Politisi, ketika muncul di ruang publik, akan mengelola visibilitas (tampilan) secara khusus. Sebagai figur publik, politisi akan menunjukkan nilai-nilai pribadi yang melekat pada mereka. Masyarakat akan menilai imej seorang politisi seperti politisi memposisikan diri mereka di ruang publik. Publik dapat berkomunikasi sekaligus mengamati dimensi simbolis dari politisi. Visibilitas terkait dengan representasi sosial. Politisi dapat memunculkan citra "pahlawan" maupun "orang biasa", atau menonjolkan sifat-sifat khusus. Sifat-sifat humanis yang ditunjukkan politisi di ruang publik dapat berupa kekuatan, kejujuran, dapat dipercaya (Iqbal, 2016).

Model Tata Kelola Olahraga Internasional dan *Soft Power*

Tata kelola (*governance*) merupakan pergeseran dari pemerintahan (*government*). Perbedaan dari tata kelola dan pemerintahan yaitu pada prosesnya. Pemerintahan bersifat intervensi langsung, sedangkan tata kelola bersifat intervensi tidak langsung. Dominasi FIFA mengharuskan sepak bola dikelola secara tidak langsung, oleh karena itu, pemerintah memerlukan tata kelola yang tepat (Amara et al, 2005).

Tata kelola sepak bola di Indonesia berbeda dengan lima negara yang diteliti oleh Amara dan kolega. Federasi sepak bola Inggris (FA) juga pernah mengalami konflik domestik dalam hal kompetisi seperti di Indonesia, namun berbeda penanganan. Inggris pernah mengalami konflik kompetisi domestik yang saat ini bertransformasi menjadi Premier League (Liga Primer Inggris). Tahun 1985, Manchester United, Liverpool, Everton, Arsenal, dan Spurs bersama-sama mogok dengan tuntutan adanya kompetisi tandingan kecuali tim-tim tersebut memperoleh pemasukan kontrak televisi yang lebih tinggi. Keinginan kelima klub tersebut juga tidak serta merta terwujud. Pada tahun 1961, gaji maksimum dihilangkan. Liga yang sudah terbentuk profesional sejak tahun 1885 tersebut menunjukkan dinamisme menuju atmosfer yang lebih kompetitif. Pada tahun 1965, BBC menayangkan "*Match of the Day*" dengan bayaran besar untuk klub peserta. Klub menyadari bahwa liga semakin kompetitif, mereka membutuhkan pemasukan yang lebih banyak melalui pengelolaan yang lebih profesional. Klub-klub bernegosiasi dengan stasiun televisi hingga tersepakati pada tahun 1992. Liga Primer Inggris dimulai sejak didukung stasiun televisi BskyB dan BBC. Liga memperoleh kontrak komersial yang tinggi pasca terbentuk Liga Primer Inggris (Amara et al, 2005).

Satu hal yang unik, pada masa tersebut, FIFA cenderung menerima jadi hasil pemberontakan klub Inggris tersebut. Bahkan, bersama Uni Eropa, FIFA mengandemen sistem

transfer pemain. Pada fase-fase tersebut, dominasi FIFA belum sekuat saat ini, namun hal itu dapat disebabkan konflik dapat selesai tanpa campur tangan pemerintah Inggris. Peran pemerintah, khususnya nasional dan lokal, sangat rendah dalam sepak bola Inggris. Pembentukan Task Force adalah peran pemerintah dalam penyelesaian konflik, namun, lima klub besar dan media menjadi pemangku kebijakan utama. Dari model neo-liberal Inggris tersebut, dapat dijelaskan bahwa konflik bukan merupakan hal yang harus dihindari. Konflik jika dikelola dengan benar, maka akan berdampak pada kondisi yang lebih baik bagi pemangku kebijakan yang terlibat dalam industri sepak bola (Amara et al, 2005).

Hampir mirip dengan model Inggris, intervensi pemerintah pusat di Jepang juga cukup rendah. Namun, pemerintah lokal memiliki kekuatan yang dominan. Bersama sektor bisnis dan korporat, pemerintah lokal mengelola sepak bola Jepang, termasuk penyediaan fasilitas semisal stadion. Kondisi terbalik terjadi di sepak bola RRT dan Perancis. Peran pemerintah sangat besar, khususnya di RRT. Hampir seluruh kepentingan terkait sepak bola RRT dibatasi oleh pemerintahan negara dan lokal. Di Perancis, peran klub hanya mempengaruhi, tidak dapat menginisiasi konflik terbuka seperti di Inggris. Selain ujung kiri dan kanan dalam bandul tata kelola sepak bola keempat negara (Inggris, Japan, Perancis, dan RRT), ada kondisi yang berada di tengah-tengah. Sepak bola Algeria menjadi contoh kasus yang mana pemerintah memiliki peran intervensi pada taraf sedang. Ada variasi tingkat pengaruh pemerintah dalam pengelolaan sepak bola dari negara-negara tersebut (Amara et al, 2005).

Jika dibandingkan dengan beberapa negara yang telah disebut, pemerintah Indonesia, baik pusat maupun lokal, memiliki niat yang tinggi untuk mengintervensi sepak bola. Konflik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik. Disputan merupakan dua federasi (PSSI dan KPSI) dalam satu negara, keduanya didasari oleh kepentingan politik (Colombijn, 2000; Amara et al, 2005). Intervensi pemerintah dapat berupa kekuatan halus. Negara adalah tentang kekuatan terhadap negara lain. Kekuatan halus ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mempengaruhi pihak-pihak lain. Kelebihan kekuatan halus ini terletak pada minimnya penggunaan pemaksaan maupun kekerasan (Alunaza& Sanjaya, 2016).

Model Tata Kelola Olahraga Indonesia dan Resolusi Konflik

Olahraga merupakan salah satu alat untuk melanggengkan atau menghentikan konfrontasi dan konflik. Olahraga merupakan alat diplomasi yang digunakan oleh negara-negara di dunia.

Olahraga juga menjadi alat untuk mempromosikan atau melindungi kepentingan (Bang, 2012). Sepak bola di Indonesia dapat menjadi sumber konflik (Colombijn, 2000).

Resolusi konflik dapat dijalankan dengan menempatkan figur politik dengan kepemimpinan kuat. Kepemimpinan kuat merupakan faktor utama dalam perundingan perdamaian. Pemimpin yang kuat juga diperlukan dalam menyelesaikan konflik. Sikap dan perilaku pemimpin tersebut penting untuk menyelesaikan konflik (Bağriyanik, 2016).

Figur politik sejak sebelum kemerdekaan terbiasa melakukan intervensi dalam dunia sepak bola Indonesia. Dibandingkan dengan kasus Inggris, dimana konflik dimulai oleh klub-klub besar di negara tersebut. Tujuan konflik di sepak bola Inggris cenderung berasaskan bisnis, bukan politik (Colombijn, 2000; Amara et al, 2005). Dalam kondisi konflik politik di Indonesia, FIFA mengancam memberikan sanksi jika konflik tidak diselesaikan (Sammy, 2012).

FIFA menganggap Liga Super Indonesia (LSI), liga yang dikelola KPSI, adalah liga pertandingan yangmana orang-orang didalamnya tidak boleh mengikuti agenda FIFA. PSSI diminta FIFA segera menyelesaikan permasalahan ini. Selanjutnya, KONI muncul sebagai penengah dalam rekonsiliasi kedua belah pihak. KPSI tidak bergeming, bahkan mengadakan kongres pertandingan. Pada Maret 2012, PSSI mengakui KPSI untuk menghindari ancaman dari FIFA. Kemunculan FIFA ini adalah faktor eksternal yang mempengaruhi politik sepak bola nasional (Sammy, 2012).

Sempat berdamai untuk meredam faktor eksternal dari FIFA, kedua disputan masih berkonflik hingga perwakilan pemerintah turun tangan. Pada tahun 2015, Menteri Pemuda Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi turun tangan. Pada 17 April 2015, Menpora menerbitkan Surat Keputusan berisi pembekuan PSSI. Sehari setelahnya, PSSI mengangkat La Nyalla Mattalitti sebagai Ketua Umum PSSI periode 2015-2019. Namun, La Nyalla tidak diakui karena PSSI dalam kondisi beku oleh pemerintah. Selanjutnya, Menpora mengirimkan surat ke FIFA untuk menjelaskan kronologi konflik dalam PSSI. Wakil Presiden Jusuf Kalla mencoba menengahi kedua belah pihak dengan Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN), namun belum terselesaikan. Sekali lagi, intervensi FIFA kembali muncul dengan ancaman sanksi pada tanggal 29 Mei 2015. PSSI menggugat SK Pembekuan ke PTUN, sedangkan Menpora melarang pertandingan ISL melalui kepolisian. Selanjutnya, kompetisi berhenti di tengah jalan, hingga sebagian publik sepak bola memprotes Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan konflik ini. Pemerintah melalui Menpora membentuk Tim Transisi (TT) untuk mengambil alih fungsi PSSI

yang beku. Selanjutnya, TT mencoba berkomunikasi dengan FIFA namun ditolak. FIFA justru meminta PSSI mencabut SK Pembekuan PSSI sebelum tanggal 29 Mei 2015 (Christian, 2015).

Selanjutnya, karena konflik belum selesai, FIFA memberikan sanksi kepada Indonesia pada tanggal 30 Mei 2015. Indonesia tidak dapat mengirimkan wakil tim nasional maupun klub ke pertandingan tingkat internasional yang dibawah FIFA. Karena mengagggap campur tangan pemerintah dalam PSSI cukup besar, FIFA mencantumkan syarat pencabutan sanksi. FIFA mensyaratkan PSSI harus bebas dari intervensi pemerintah. Setahun terkena sanksi, FIFA mencabut sanksi terhadap Indonesia pada tanggal 13 Mei 2016, hal ini dilakukan setelah Menpora mencabut sanksi pembekuan terhadap PSSI (Susanto, 2016).

Dengan pemberian sanksi ini, sebagai faktor eksternal FIFA memegang peran penting dalam mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri. Pemerintah juga melakukan aktivitas yang dilarang oleh FIFA sendiri, yaitu mengintervensi PSSI. Sebagai TNC yang memiliki TPR, FIFA menggunakan regulasi untuk menundukkan pemerintah. FIFA bahkan dapat memaksa pemerintah untuk memfasilitasi resolusi konflik. Posisi tawar FIFA sangatlah kuat, karena FIFA adalah satu-satunya jalur partisipasi sepak bola dunia (Meier & Garcia, 2015).

Statuta FIFA berfungsi sebagai Lex Sportiva dalam komunitas internasional. Lex Sportiva adalah hukum transnasional yang dapat digunakan untuk menghukum stakeholder sepak bola. Hukum bersifat *self-regulatory*, yang artinya dirumuskan secara sepihak oleh FIFA namun bersifat mengikat. Pemerintah menyelesaikan sengketa dengan membimbing dan memfasilitasi berpegangan dengan instruksi FIFA. Hal ini akhirnya dianggap bukan bentuk intervensi. Negara sebaiknya hanya turun tangan, bukan campur tangan, secara strategis, terbatas, dan fokus sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya (Aruan, Sirait, Leviza, 2014).

Jika menentang, maka industri sepak bola akan disingkirkan dari panggung internasional. Selain itu, jika memperoleh sanksi, subsidi FIFA terhadap suatu negara akan dicabut, begitupula perlindungan para pemain. Jika hal ini terjadi, maka banyak sekali pemangku kebijakan yang terkena imbas dari sanksi FIFA. Oleh karena itu, pemerintah menyadari bahwa intervensi secara langsung bukan merupakan solusi yang tepat (Meier & Garcia, 2015).

Penglibatan Figur Politik dari Tentara

Dengan adanya sanksi FIFA, pemerintah Indonesia melibatkan figur politik untuk mengintervensi PSSI. Jika sebelumnya menggunakan SK Pembekuan, saat ini pemerintah

menggunakan figur politik yang diinjeksikan ke dalam tubuh PSSI. Pengaruh pemerintah Indonesia diarahkan untuk pemenangan Edy Rahmayadi untuk Ketua Umum PSSI yang baru. Pada tanggal 10 November 2016, PSSI resmi mengangkat Edy Rahmayadi. Edy adalah figur dalam militer dengan jabatan Pangkostrad. Edy melengkapi deretan ketua umum PSSI dari militer, setelah Ali Sadikin, Maulwi Saelan, Kardono, dan Agum Gumelar. Ketua umum dengan latar belakang militer dianggap sebagai pribadi yang teguh pendirian, tegas, dan tepat untuk meresolusi konflik PSSI (Pandit Football, 2016).

Peran tentara dalam resolusi konflik dapat dipelajari dari konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Konflik pemerintah Indonesia dan GAM dimulai sejak era kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1976. Presiden dari kalangan militer, Soeharto, memulai konflik dengan GAM setelah deklarasi sepihak mereka untuk memerdekakan Aceh. Konflik tetap berjalan meskipun sudah beberapa kali berganti presiden. Konflik berhenti pada tahun 2005 di era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (Bağriyanik, 2016).

Uniknya, penelitian Bağriyanik (2016) membandingkan resolusi konflik yang terjadi di dua negara. Pemerintah Indonesia berkonflik dengan GAM, sedangkan Pemerintah Turki dengan Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), gerakan suku Kurdi. Pemerintah Indonesia berhasil menghentikan konflik menahun, sedangkan Pemerintah Turki gagal. Perbedaannya adalah kepemimpinan militer yang tepat.

SBY menolak untuk melanjutkan konfrontasi dengan GAM, namun memilih jalur negosiasi. Bahkan, SBY memberhentikan Panglima TNI saat itu. Ryamizard Ryacudu. Posisi ini menunjukkan kepada disputan niat pemerintah untuk menggeser konflik ke meja negosiasi. Sikap dan perilaku SBY sebagai pemimpin militer ini menjadi pembeda dalam resolusi konflik ini (Bağriyanik, 2016). Jika diamati dari sudut pandang perilaku, kepemimpinan politik sangat dipengaruhi latar belakangnya (Burns, 2010). Dengan latar belakang militer, otomatis Edy sejak dini dididik untuk berjiwa nasionalis dan membela negara. Didikan nasionalisme ini cenderung berbeda dibandingkan ketua umum yang berasal dari sipil. Oleh karena itu, ada kecenderungan Edy cenderung lebih dekat dengan pemerintah (Hanifan, 2016).

Intervensi tidak langsung ini dapat diamati dari poin-poin yang dititipkan Menpora untuk Edy. Menpora meminta Edy untuk menjalankan konsolidasi internal, dedikasi terhadap organisasi, melawan pengaturan skor, menemukan kebijakan untuk suporter, menjaga hubungan

dengan pemerintah, mengembangkan sepak bola usia dini, mempersiapkan Asian Games 2018, membuka akuntabilitas keuangan, dan mendinginkan konflik. Jika diamati, jika Edy memperbaiki hubungan dengan pemerintah, maka pemerintah tetap dapat mengintervensi secara tidak langsung (Pandit Football, 2016). Intervensi ini terkait dengan kekuatan halus pemerintah (Alunaza & Sanjaya, 2016).

Meskipun demikian, secara struktural, hanya Edy dipandang sebagai satu-satunya perwakilan pemerintah dalam struktur organisasi PSSI. Wakilnya dan seluruh bawahannya didominasi oleh kubu-kubu yang dekat dengan federasi disputan sebelumnya. Jadi, secara internal organisasi sekalipun, porsi intervensi pemerintah juga terbatas, hanya mengandalkan Edy (Hanifan, 2016). Pada tahun 2017, pemerintahan Joko Widodo memberikan perhatian khusus pada sepak bola. Presiden mengadakan rapat terbatas Percepatan Pembangunan Sepak bola Nasional dan melalui Menpora memaparkan program-program yang akan dijalankan, seperti infrastruktur, pembinaan, hingga keterbukaan komunikasi dengan PSSI. Dengan masuknya sepak bola nasional pada agenda negara, maka peran Edy dianggap vital (Tempo, 2017).

Tentara ditugaskan untuk menjaga integritas teritorial negara, menjaga dan mempromosikan kepentingan, dan sebagai simbol kenegaraan. Tentara juga ditugaskan untuk merespon ancaman luar maupun menjaga kepentingan dalam negeri. Peran tentara dijelaskan pada kondisi *“something must be done”*. Tentara akan diturunkan jika pemerintah menyadari bahwa mereka lah satu-satunya yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Tentara juga diminta menengahi konflik yang susah diselesaikan. Tentara memiliki kelebihan yaitu ketangkasan dalam segala kondisi. Tentara juga dapat menerjemahkan dan menjalankan penugasan langsung di lapangan. Tentara memiliki kedisiplinan yang jauh melebihi masyarakat sipil. Kekuatan memaksa adalah kelebihan tentara yang dapat digunakan untuk resolusi konflik (Bowen, 1998).

Intervensi tentara dalam sepak bola dapat dipelajari melalui kasus Argentina era 70-an. Dalam kondisi junta militer, militer yang saat itu memegang kendali pemerintahan, melakukan intervensi pada Piala Dunia 1978. Militer menghalalkan segala cara agar Argentina juara dunia, termasuk membayar pihak lawan agar mengalah. Meskipun diliputi kontroversi, pada tahun 1978 Argentina juara dunia untuk pertama kalinya (Archetti, 2005).

Meskipun dalam sejarah PSSI berkali-kali ditekan oleh FIFA, namun secara perilaku, Edy Rahmayadi menunjukkan sikap yang konsisten. Edy sebagai tokoh militer menunjukkan kebijakan yang tegas. (Prayugi, 2017). Ketegasan ini dapat dikaitkan dengan gaya komunikasi efektif dan gaya komunikasi konteks rendah (*low-context*). Gaya komunikasi efektif dapat menarik simpati dari pengikut dengan beranekaragam karakter. Gaya komunikasi konteks rendah, dapat diartikan sebagai penglibatan pesan yang lugas dan tepat pada pokok permasalahan. Dengan gaya komunikasi ini, ada peluang bagi seorang pemimpin dapat diterima masyarakat (Lestarini, 2014).

Edy menerapkan kebijakan perubahan yang kontroversial yang bagi sebagian pihak dianggap sebagai wujud perlawanan dari *Law of The Game* dari FIFA. Edy merubah jumlah pergantian pemain dalam kompetisi dari tiga menjadi lima. Angka lima ini ditujukan untuk memfasilitasi perkembangan pemain muda, karena ada syarat wajib menurunkan tiga pemain muda minimal satu babak. Kebijakan lima pertandingan ini berbeda dengan aturan pertandingan resmi di negara-negara lain di bawah FIFA. Secara tegas, Edy memaksa FIFA harus menyetujui aturan tersebut. Padahal, peraturan penambahan pergantian pemain ini masih dalam tahap uji coba di beberapa turnamen oleh FIFA (Prayugi, 2017).

Dari pemberlakuan aturan pergantian pemain tersebut, dan pemberian tekanan terhadap FIFA, dapat diidentifikasi bahwa Edy tidak lain adalah penyalur kepentingan pemerintah. Pemerintah sadar bahwa induk PSSI adalah FIFA. Namun, FIFA harus disadarkan bahwa PSSI beroperasi di Indonesia (Hanifan, 2016).

Konsekuensi Negatif Penglibatan Figur Politik

Meskipun tergolong berhasil menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam resolusi konflik PSSI, tata kelola sepak bola melibatkan figur politik memiliki kekurangan. Pertama, Edy menentang proses perpindahan dua pemain Indonesia ke Malaysia, yaitu Evan Dimas dan Ilham Udin Armaiyn. Proses perpindahan dua pemain itu dikritik karena bersamaan dengan persiapan tim nasional dalam Asian Games 2018. Target Edy pada kejuaraan tersebut sangat tinggi, yaitu semifinal. Di sisi lain, pemerintah melalui Menpora Imam Nahrawi tidak sepakat dengan kebijakan tersebut (Ridwan, 2017).

Kebijakan kontroversial Edy ini disebabkan keinginan figur politik tersebut untuk memperoleh visibilitas dalam ruang publik. Prestasi timnas di level regional akan berdampak

besar kepada figur politik tersebut. Figur politik tersebut ingin menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia, meskipun dengan cara-cara yang kontroversial. Selain itu, Edy berkeinginan menunjukkan sikapnya kepada publik. Sebagai tentara, Edy seharusnya memiliki sikap tegas dan nasionalis. Oleh karena itu, Edy mengkomunikasikan pesan-pesan kepada media massa untuk memposisikan diri pada kedua sikap (Iqbal, 2016).

Kedua, Edy pada perjalanannya menunjukkan ambisinya sebagai figur politik. Pada Agustus 2017, Edy mendeklarasikan diri berniat menjadi cagub Sumatera Utara. Kondisi pencalonan ini memverifikasi argumen Colombijn bahwa sepak bola Indonesia tidak jauh dari politik. Selain itu, sepak bola Indonesia juga digunakan sebagai alat untuk menjadi kepala daerah. Jika Edy berhasil terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, maka ada kemungkinan Edy rangkap jabatan sebagai Pangkostrad, Ketua Umum PSSI, dan Gubernur Sumatera Utara. Pada dasarnya, seorang Pangkostrad dilarang rangkap jabatan dengan kepala daerah. Hal ini juga berusaha tidak digubris oleh Edy (Fajriyah, 2017; Wiratri, 2017).

Melihat kondisi ini, PSSI melalui sekjenjnya Ratu Tisha Destria, tidak menentang ambisi ketua umumnya. Tisha menganggap bahwa hal tersebut sebagai urusan politik pribadi Edy, seharusnya tidak disangkutpautkan dengan masa depan federasi. Pada satu sisi, pemerintah tidak dapat mengatur sepenuhnya ketua umum militer tersebut. Meskipun demikian, pemerintah berhasil memanfaatkan figur politik untuk menjalankan tata kelola sepak bola (Wiratri, 2017).

Sepakbola Indonesia hanya menjadi ruang publik bagi figur politik didalamnya. Edy Rahmayadi memverifikasi tren tersebut. Edy menjadi ketum PSSI demi memperoleh visibilitas dalam ruang publik penting seperti sepak bola. Edy mengkomunikasi pesan-pesan politik dalam setiap aksinya di ruang publik. Kemudian, Edy memanfaatkan ruang publik untuk mewujudkan visi politiknya memperoleh jabatan eksekutif dalam pemerintahan.

Kesimpulan

Dari paparan dalam artikel ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, tata kelola olahraga di Indonesia menggunakan figur politik. Berbeda dengan beberapa kasus di negara lain, konflik politik mengharuskan tata kelola olahraga yang juga melibatkan aspek politik. Dominasi FIFA menjadi alasan lain perlunya tata kelola olahraga di Indonesia memerlukan figur politik. Pemerintah Indonesia tidak dapat secara langsung mempengaruhi sepak bola, hal tersebut sesuai dengan implementasi konsep *governance*. Kedua, tata kelola olahraga di Indonesia memerlukan

figur tentara sebagai ketua federasi. Tentara adalah kepanjangan tangan dari pemerintah untuk mengamankan kepentingan negara sekaligus berpengalaman dalam menyelesaikan konflik. Kekuatan pemaksaan yang dimiliki figur dari kalangan militer diharapkan dapat menghentikan para disputan untuk semakin memperkeruh konflik. Dengan peran ketua umum dari militer, konflik berhasil diselesaikan. Ketua umum memiliki ketegasan untuk melakukan perubahan internal sepak bola nasional. Ketiga, ada hal yang tidak berubah dalam sepak bola Indonesia. Sepak bola selalu digunakan sebagai kendaraan politik bagi politisi. Dengan segala kelebihan seorang tentara dalam resolusi konflik, ambisi politik pribadi tetap ada, khususnya di Indonesia. Figur politik memanfaatkan sepak bola untuk mendominasi ruang publik dan memperoleh visibilitas. Citra positif dalam sepak bola (disebabkan prestasi) diusahakan oleh figur politik sekalipun itu menggunakan cara kontroversial. Imej positif yang berhasil dihimpun figur politik pada selanjutnya digunakan untuk mengikuti pemilu kepala daerah. Penelitian ini hanya memfokuskan pada kasus penglibatan figur politik dalam tata kelola olahraga, khususnya sepak bola. Penelitian mendatang dapat ditujukan pada kepemimpinan dan gaya komunikasi figur politik dalam sepak bola (Lestarini, 2014). Selain itu, penggunaan media baru untuk tata kelola sepak bola, yang merupakan produk dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dapat dijadikan sebagai fokus penelitian mendatang. Misalnya adalah implementasi konsep “smart city” (kota pintar) pada konteks sepak bola. Konsep kota pintar digunakan oleh pemerintah sebagai solusi dari permasalahan urban. Sejarah sepak bola Indonesia diliputi konflik, oleh karena itu, penggunaan TIK dapat menjadi urgensi sebagai solusi sekaligus sarana pembangunan sepak bola (Sanjaya et al, 2017).

Daftar Pustaka

- Alunaza, H, & Sanjaya, A.. (2016) Aktualisasi Soft Diplomacy Indonesia Melalui Tari Saman Gayo dalam Promosi Perdamaian Dunia dan Penguatan Identitas Lokal: Analisa Pasca Pengakuan Tari Samanoleh UNESCO. Dalam *Proceeding of The 1 st International Conference on Social Sciences and Humanities (ICSSH)*, LIPI, Jakarta, Indonesia, 135-148.
- Amara, M., Henry, I., Liang, J., & Uchiumi, K. (2005). The governance of professional soccer: Five case studies—Algeria, China, England, France and Japan. *European Journal of Sport Science*, 5(4), 189-206.
- Anggoro, A.D.. (2014). Media, Politik dan Kekuasaan: Analisis Framing Model Robert N. Entman tentang Pemberitaan Hasil Pemilihan Presiden, 9 Juli 2014 di TV One dan Metro TV. *Aristo*, 2(2), 25-52.
- Archetti, E. P. (2005). Military Nationalism, Football Essentialism, and Moral Ambivalence. Dalam A. Tomlinson & C. Young (Eds.), *National Identity and Global Sports Events*. New York: State University of New York Press, New York.
- Ariyanto, K. (2014). Analyzing the Conflict between Football Organizations in Indonesia. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 115, 430-435.
- Aruan, H. B. P., Sirait, N. N., & Leviza, J. (2014). Berlakunya Statuta Fédération Internationale de Football Association (FIFA) Dikaitkan dengan Kedaulatan Negara (Studi Kasus Dualisme Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)). *Journal of International Law*, 2(1).
- Bang, S.Y. 2012. Investigation of Institutional Discourse on Change in South Korean Football from 1945 to Pre-2002 FIFA World Cup. *PhD thesis*. Loughborough University.
- Boue, K. & Kjaer, K.. 2010. Creating Value through Strategic Partnerships between Businesses and NGOs. *Master thesis*. Copenhagen Business School.
- Bowen, D. (2000). Something Must be Done-Military Intervention. *Studies in Conflict and Terrorism*, 23(1), 1-19.
- Burns, J.M. (2010). *Leadership*. New York: Harper Collins.
- Christian, A. (2015). Begini Kronologi Kisruh PSSI dan Menpora. Diakses 4 Agustus 2017 dari *Tribunnews*: <http://kaltim.tribunnews.com/2015/05/26/begini-kronologi-kisruh-pssi-dan-menpora?page=2>
- Colombijn, F. (2000). The politics of Indonesian football. *Archipel*, 59(1), 171-200.

- Dorsey, JM & Sebastian, LC. (2015). The Politics of Indonesian and Turkish Soccer: Analysis The Politics of Indonesian and Turkish Soccer: a Comparative Analysis. Dalam: Cho Y (Eds.), *Football in Asia: History, Culture and Business*. New York: Routledge.
- Fajriyah, T. (2017). Ketum PSSI: Tak Masalah Rangkap Jabatan Gubernur Sumut. Diakses 4 Agustus 2017 dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/olahraga/20170803203008-142-232350/ketum-pssi-tak-masalah-rangkap-jabatan-gubernur-sumut/>
- Hanifan. (2016). Tarik Menarik Siapa Mengontrol Edy Rahmayadi di PSSI? Diakses 4 Agustus 2017 dari *Tirto.id*: <https://tirto.id/tarik-menarik-siapa-mengontrol-edy-rahmayadi-di-pssi-b36g>
- Iqbal, M. (2016). Ridwan Kamil for mayor: A study of political figures on twitter. *Unpublished master's thesis*. Stockholm University, Swedia
- Lestarini, N.. (2014). Gaya Komunikasi Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013: Penelitian Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. *Aristo*, 2(2), 1-14.
- Meier, H. E., & Garcia, B. (2015). Protecting Private Transnational Authority against Public Intervention: FIFA's Power over National Governments. *Public Administration*, 93(4), 890-906.
- Nasution, R.D.. (2005). Indonesia sebagai Emerging Power: Perspektif Ekonomi Militer. *Aristo*, 3(2), 54-67.
- Panditfootball. (2017). Sepenggal Kisah Edy Rahmayadi, Ketua Umum Baru PSSI, Diakses 4 Agustus 2017 dari *Panditfootball*: <http://panditfootball.com/cerita/206675/RDK/161111/sepenggal-kisah-edy-rahmayadi-ketua-umum-baru-pss>
- Prayugi, W. (2017). PSSI Segera Komunikasi dengan FIFA soal Regulasi Liga 1. Diakses 4 Agustus 2017 dari *Bola.com*: <http://www.bola.com/indonesia/read/2905139/pssi-segera-komunikasi-dengan-fifa-soal-regulasi-liga-1>
- Priyasidarta, D. 2017. Pilgub Jatim, La Nyalla Klaim Didukung Gerindra, PAN, dan PKS. Diakses 2 Januari 2018 dari *Tempo.co*: <https://nasional.tempo.co/read/1028759/pilgub-jatim-la-nyalla-klaim-didukung-gerindra-pan-dan-pks>
- Ridwan, M. 2017. Anomali Sikap Edy Rahmayadi Terhadap Pemain Indonesia Ke Luar Negeri. Diakses 2 Januari 2018 dari *goal.com*: <http://www.goal.com/id/berita/anomali-sikap-edy-rahmayadi-terhadap-pemain-indonesia-ke/de6yrpjh4daf18f0ylseo28cr>

- Sammy, A. (2012). Inilah Kronologi Lengkap Perseteruan PSSI dan KPSI. Diakses 4 Agustus 2017 dari *Republika*: <http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/03/19/m14r3z-inilah-kronologi-lengkap-perseteruan-pssi-dan-kps>
- Sanjaya, A., Alunaza, H., Hidayah, T., Biyoga, S. (2017). Mass Media and Green Airport in Indonesia: Do They Aware of Smart Village? Dalam *Proceedings of The 9 th International Graduate Students and Scholars' Conference in Indonesia (IGSSCI)*, UGM Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 543-552.
- Santama, J. 2017. Mantan Ketum PSSI Djohar Arifin Maju Pilbup Langkat Via Independen. Diakses 2 Januari 2018 dari *Detik.com*: <https://news.detik.com/berita/d-3751325/mantan-ketum-pssi-djohar-arifin-maju-pilbup-langkat-via-independen>
- Santosa, G. A. (2017). China's Soft Power: The Making of Football Superpower: 'Soft Power' Cina: Menuju Kekuatan Adidaya dalam Sepakbola. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 7(1).
- Susanto, H. (2016). Sejarah Hari Ini (30 Mei): FIFA Resmi Jatuhkan Sanksi Untuk Indonesia. Diakses 4 Agustus 2017 dari *goal.com*: <http://www.goal.com/id-ID/news/5650/sejarah-hari-ini/2016/05/30/24069092/sejarah-hari-ini-30-mei-fifa-resmi-jatuhkan-sanksi-untuk>
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & B*, Bandung : Alfabeta.
- Tempo. 2017. Program Menpora Seusai Ikuti Rapat Kabinet Soal Sepak Bola. Diakses 2 Januari 2018 dari *Tempo.co*: <https://bola.tempo.co/read/news/2017/01/25/099839456/program-menpora-seusai-ikuti-rapat-kabinet-soal-sepak-bola>
- Wiratri, L. 2017. Edy Rahmayadi Daftar Jadi Cagub Sumatera Utara, Pengurus PSSI Buka Suara. Diakses 4 Agustus 2017 dari *Indosport*: <http://www.indosport.com/sepakbola/20170802/edy-rahmayadi-daftar-jadi-cagub-sumut-ini-respons-pssi>
- Wirabhuana, K. 2017. Nurdin Halid Tidak Main-Main Maju Jadi Cagub Sulsel. Diakses 2 Januari 2018 dari *kumparan.com*: <https://kumparan.com/golkar-celebes/nurdin-halid-tidak-main-main-maju-jadi-cagub-sulsel#gTmocCmfQ14t1IQY.99>

Forestry and agriculture policy governance regarding water contestation in State Production Forest (Case of Margo and Ngiyom spring water in Begal forest, Ngawi Regency)

Anna Istyaningrum

MPKD, Faculty of Engineering, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
istyaningrumanna@yahoo.co.id

Abstract

Water related problem usually involving many stakeholder with different interest, attitude, power scale and level, which make it complex as well as water contestation problem in Begal State production forest in Ngawi Regency which involving different level government agency and its community base institution. Teak production forest and rice agriculture area usually located nearby especially in Ngawi regency with 40% agriculture area and 32% forest area, which make high occurrence of water related problem. This research purpose is to identify and analyze the root of water contestation among involved stakeholder in Ngiyom and Margo spring water utilization and its leading factors. In depth interview was done to all involved stakeholder in February 2017 to obtain the data about the water contestation problem in this area. Although changes in water and forest land utilization are causing water contestation problem but understanding root of water problem in this research from agriculture and forestry policy are important to make a sustainable solution. Forestry and agriculture governance are use to understand the relation among stakeholder toward water contestation in this area. Social ecological system framework that captures the relation among resource users and governance to resources utilization is useful to get the whole picture of water contestation problem in this area. Government policy on rice agriculture and forestry sector was indirectly affecting the water contestation problem in this area. Combined with in field governance, government policy effect were causing social and economic gap among water resources user in this area.

Keyword: Irrigation Water Contestation, Forestry Governance, Rice Agriculture Governance

<i>Submite</i>	: 20 Desember 2017
<i>Review</i>	: 15 Januari 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: hayat.150318@gmail.com

Introduction

Water is important resources in human livelihood and has no administrative boundary which create mismatch problem of resource and institutional boundaries. Resource boundaries rarely match institutional boundaries such as water related problem and face several kinds of scale mismatch institutions which do not “fit” to resource or ecosystem boundaries for a number of ecological reasons, including the complexity and dynamics of ecosystems. Interconnected surface water and groundwater in quantity and quality has to consider in viewing the water utilization related problem which usually involve many institution with different interest and different level governance institution as happened in Margo and Ngiyom spring water.

Land utilization of an area also describing its main activities. The potential land utilization of Ngawi regency is on agriculture and forestry, from a total area of 129,598 Ha (2.75% of the total area of East Java Province) about 39 percent (50,476 Ha) is utilized as paddy fields and 32 % (41,903 Ha) utilized as forest which 4,470 Ha of it is community forestry and state forest 37,433 ha (Ngawi statistic data, 2015). Agriculture and forestry as main land utilization in this area make the water contestation problem in this area often appear and quite similar in terms of motive. If in good condition, Ngawi forest area is enough to maintain the water recharge rate in a good condition. But, in 1997's monetary crisis and political chaos has destroyed Java forest, mass illegal logging that happened at that time was deforestation of at least 21% of Java forests during the period 1997 – 2000 as well as state production forest in Ngawi regency.

State teak production forest in Ngawi regency was established in Dutch colonial and now governed by Perhutani (Indonesian Forest enterprises) which under State Enterprises Ministry authority. Long history of teak production forest governance is shaping the relation between forest authority and villager near the forest area in seeing forest and its resources. After Indonesia independence, the state forest authority was under forestry ministry and later delegated to Indonesian Forest Enterprises. Through Indonesia Consultative assembly decree No. 11/MPRS/1960, Indonesian Forest Enterprises functioned to financially support national development project. Over harvest timber was done to cope with government target of non oil revenue growth for 4% per year (Peluso, 2009).

In 8th world forestry congress held in Jakarta 1978, the term of Social forestry was started to take into account by Indonesian forestry policy as mentioned by vice president Adam Malik in his speech. Although already politically stated, but social forestry was not well implemented in Indonesia since this program regulated without assistance and willingness to empower local people. social conflict of local people and Forest authority resulted in mass illegal logging that deforested at least 23% (558,749 ha) of Java forests during the period 1998 – 2000 (Santoso, 2004).

On the other hand, from agriculture governance, previous centralized agriculture development is affecting nowadays rice agriculture activities in this area. Green revolution is the movement of significant increasing crop production from modern agriculture innovation in third world country since 1960's. "High yield varieties/ HYV" terminology is used to mislead monoculture agriculture benefit which is high productivity from new seed variety itself (Shiva, 1993).

The Green revolution packages introduced in Indonesia through rice self sufficiency program under the Suharto government in 1961. This program not only aimed to fulfill national food security need but also maintain political and economic stability. Major factors that cause high yield increase are high utilization of fertilizer and improved irrigation network. Much larger government budget was allocated to rehabilitation and expansion irrigation infrastructure which mostly funded by foreign aid and soft loan from World Bank (Manning, 1987).

East Java role in supporting national food security proven by its contribution to national rice production which always positioned in top 3 of highest rice producer area in Indonesia since 1993- 2012 (Indonesia statistic report 2013) and Ngawi regency is including top 5 of rice producer in East Java province. Irrigation water is essential to support the success of rice agriculture in this area. Viewing agriculture and forestry governance in this area would help in capturing the whole water contestation problem in the state production forest in this research area.

Begal forest is located 3 sub district; Ngrambe, Widodaren and Kedunggalar sub district. Ngiyom and Margo spring water are two spring water that located inside of Begal forest (state teak production forest) which previously utilized by local government irrigation agency to irrigate more than 1.400 hectares rice field in nearby area but after 2000, the land utilization changes in forest area was stopping the water supply to irrigation rice field area as described below;

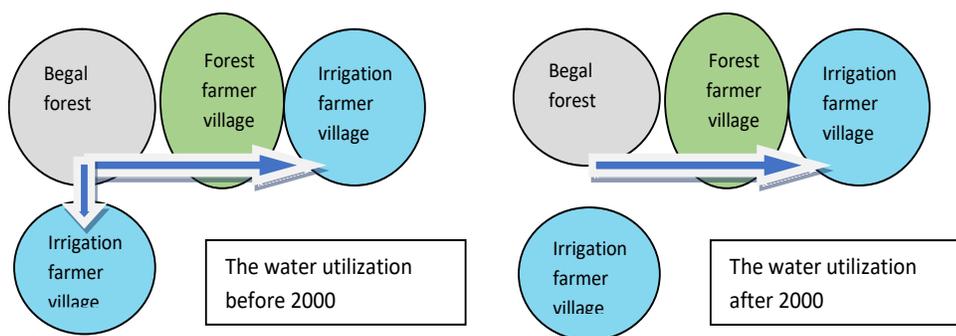


Figure 1. the water utilization changes in Margo and Ngiyom Spring water

The water contestation problem is complex because involving multi level government institutions and its community empowerment organization which are; state production forest governance (Indonesian Forest Enterprises) under Ministry of State own Enterprises, Community

based forestry in Sekarputih Village, local government irrigation agency for Agriculture governance and water user association in Begal village. Since there is not any improvement in spring buffer area vegetation, some local people through Kraton Ngiyom non-profit organization try to establish buffer area conservation through series of happening art in 2015. This initiative rooted from traditional local belief on spring and able to gather Indonesian Forest Enterprises, Ngawi Local Government, forest an irrigation farmer to support spring area conservation. although successes in gathering all stake holder on reforesting buffer area but the water contestation problem is still occur and need to be resolved in order preventing further environmental and social risk from water scarcity. Water contestation in forest and rice field area is unique phenomenon that needs to be understanding in order to establish sustainable spring water utilization and reduce water contestation problem in Although happen in local level, but the complexity of the problem as well as the relation among involved stakeholder in this area is the small model of complex regional water problem since there are many villages in Ngawi that borders to state production forest and shared the water resources for agriculture use. Furthermore, un-resolved water contestation problem in this area would lead into other environmental problem.

Well known Hardin (1968) parable about “Tragedy of the common” problem that appear from uncontrolled resources utilization was proposed solution as either government or private party control are the best resources management. But through Elinor Ostrom seminal work (1990), the success story of resources management by local people are used to build Social Ecological System (SES) framework to depict all involved stakeholders interaction regarding resource utilization in broader social (political) and ecological setting. SES framework is used in this research to find the causal of water contestation problem in this area through governance policy and each involved stakeholder interaction. SES framework is a new and dynamic theory, many case studies on resources governance system are enriching the establishment of this theory.

Method

This research is exploratory case study with a qualitative and quantitative approach to identify the relation among stakeholder and resources governance policy that involved in Margo and Ngiyom spring water and buffer area utilization which contribute to water contestation in this area. the Social Ecological System Framework approach, is used to capture the interaction

among resource system, governance system and actor as well as social, political setting which resulting water contestation in this area.

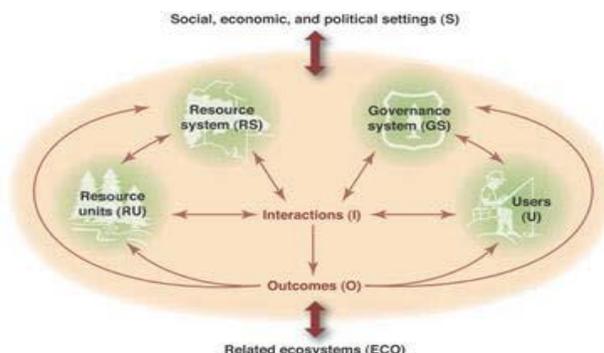


Figure 2. The core system of social ecological system framework (Ostrom, 2009)

Social-ecological system (SES) framework is sub section of social systems in which interdependent relationships among humans are mediated through interactions with biophysical and non-human biological units, its complexity of multi level and multi scale relationship among its component captured by this SES framework (Anderies, 2004). The social-ecological system represents the integration of the social/political and the ecological scales. It emphasizes the view that social and ecological systems are linked, and that the delineation between the two is artificial and arbitrary (Berkes and Folke 1998). Action situation (Interaction and outcomes) of particular resources and it resources user on their livelihood from social and ecological component can be breakdown to smaller situated context or broader aggregates. In depth interview was done to 37 respondents from involved stakeholders in February 2017.

Some stakeholders in this research are grouping into resources governance, users and a local NPO (Non-profit organization) as described in figure3.

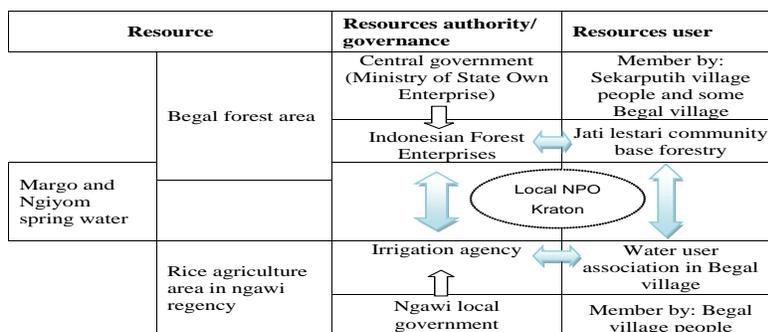


Figure 3 involved stakeholder and their connection

Research workflow of this study is shown in figure 4. This study start with identify the past and recent policy related to agriculture and forestry, current condition of resources system both forest and water resources, resource governance and their relation with resources user group regarding water contestation problem. Stakeholder and data analysis was done respectively.

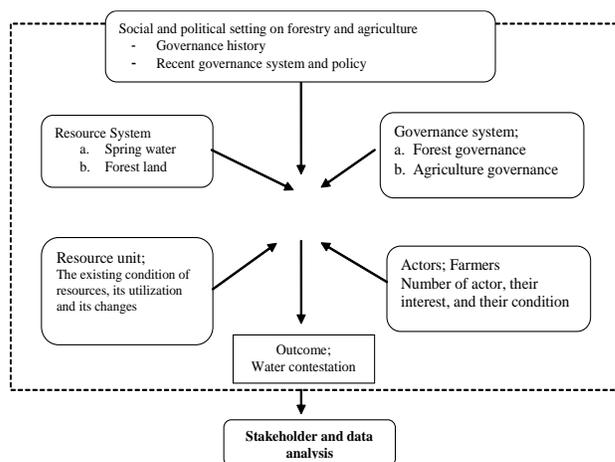


Figure 4. the research framework

Result and Discussion

Begal forest is a state production forest under Indonesian Forest Enterprises authority with area width 2,737.80 ha and teak tree (*Tectonia grandis*) as the main product. Teak tree is well known as strong log for house making material but it grows very slowly which takes 80 years to harvest fully grown tree. This forest vegetation dominated by 1st (0-10 years tree age) and 2nd (10-20 year tree age, each tree age class is ranged 10 years) which means, mass deforestation destroy almost all trees in this area in 1998-2000. The condition of deforested Begal forest area is affecting the spring water condition which reduces its water debit.



Picture 1. Rice agriculture in spring buffer area (left) and spring water utilization by forest farmers

The entire respondent stated that the spring vegetation in spring area was drastically changes after 1998 mass deforestation such as less buffer vegetation, the disappearance of small spring in river side area, decreasing spring water debit into 8l/s (from 10l/s according to Ngawi Irrigation agency) and converted buffer and river side area into rice field area. Margo and Ngiyom are spring water that located inside Begal forest, which is state production forest under Indonesian Forest Enterprises KPH Ngawi. These two spring water located near one to each other (500 m), but its utilization is a little bit different. In Margo spring water, water tapping pool was built by Dutch government in late 19th century for recreational and rice field irrigation purposes. Whilst, Ngiyom spring water is remain natural and utilize for daily activities and irrigation use.

Although located inside state production forest, but the water from these two spring was utilize by irrigation agency to irrigate 1,400 ha rice field in this area. There was not any problem before 2000, but when political and monetary crisis hit in 1998, mass deforestation was happen in Begal forest. Along with deforestation effect, changes in forest land utilization, more intensive rice planting cycle and Indonesia decentralization policy has made water contestation conflict is annually happen in this area especially in dry season.

Decentralization policy that regulated in the end 2001 has change the government structure. Delegation of authority from central government as well as managing local natural resources in short time bring some consideration in governing local resources that under other or central authority governance. Eventually, overlapping authority of centralist Indonesian Forest Enterprises (autonomous institution under ministry of state Enterprises) and decentralist irrigation agency under Ngawi local government become a problem afterward. In order to get the picture of existing relationship among stakeholder in this area based on field observation, chart below will be describes each stakeholder interest and its power on authority and influence regarding water contestation problem.

Table 1. Stakeholder analysis regarding water contestation problem

Key stakeholder	Interest	Attitude	Condition	Power	
				Authority	Influence
Indonesian Forest Enterprises (Forest authority)	Manage production forest for timber production profit	focused on increasing timber production after 1998 mass deforestation	<ul style="list-style-type: none"> - According to Government law no. 72/2010 Indonesian Forest Enterprises mandates to manage production forest in java and Madura Island including protecting future forest resources, and conservation. - Support state company food security program (GP3K) - Lose their forest due to 1998-2000 mass deforestation 	Strong	Strong
Forest farmers	Land to grow food crops; livelihood improvement; co-ownership of trees; share in timber revenues	try to get benefit from forest agriculture or even create rice field in spring buffer area and along the riverside area	<ul style="list-style-type: none"> - Has obligation to secure Indonesian Forest Enterprises tree whilst doing forest agriculture in allocated area. - Mostly poor land less farmer from nearby forest 	Medium	Low
Irrigation agency	Water to irrigate more than 1,400 hectare rice field	focused on securing water source distribution	<ul style="list-style-type: none"> - According to Law 37/2014 on water and land conservation, Local government has obligation to conserve spring water area. - Has obligation to regulate ground water extraction according to Government law No 83/2008 on ground water 	Medium	Strong
Irrigation farmer	Water for agriculture	Focused on fulfilling water need for rice agriculture (3times/year)by surplisce from dug well	<ul style="list-style-type: none"> - mostly land own farmer - highly depend on rice agriculture for main income 	Low	Low
Kraton Ngiyom	Conserving the buffer area through cultural and art activity(2015)	Try to establish buffer protected area, and improve resource condition	<ul style="list-style-type: none"> - Has moral consideration to improve the water resources and it nearby area environment condition 	Medium	Strong

Forest farmers and irrigation farmers condition

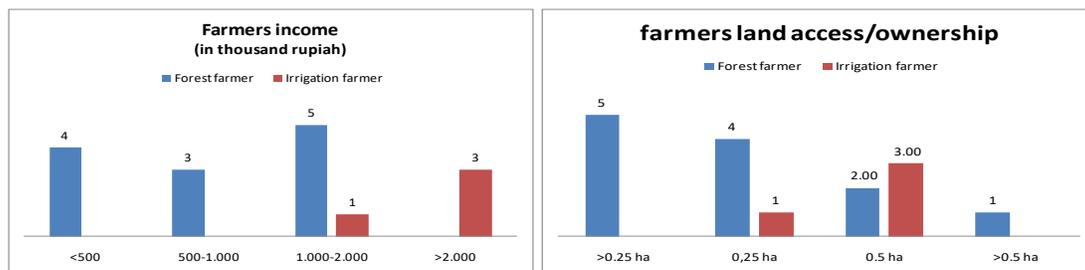


figure 5. Farmer's income (Left) and land access (forest farmer)/ land ownership (irrigation farmers) (Right)

From the graph above, there is income and land ownership gap between irrigation farmer and forest farmer. It was gross income calculation, with high production input cost which cost up to 30% of gross production (Indonesian Statistic data, 2015), farmer earn less than decent living standard in this area which is 1,334,000 idr. Small agriculture income make farmers have to seek another source of income. According to interview with farmer, usually work as seasonal agriculture labor, trade labor in local market, construction labor or even taking care of other people livestock. For agriculture income is regular income that they can count on once every 6 month for dry agriculture (peanut or maize) and 4 month for rice field agriculture

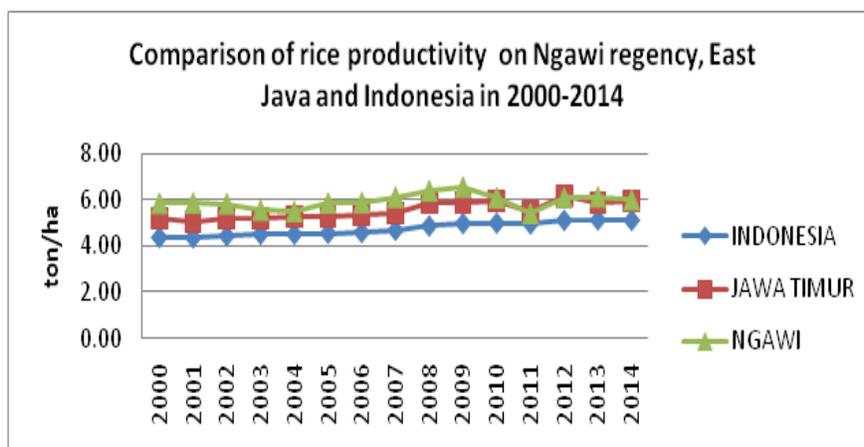
The loose forest ranger monitoring on forest agriculture is lead forest farmers to prolong the agro forestry time and constrain the main tree growth. Usually agriculture in forest area was done among the teak tree lines for only 1-3 year of teak tree aged and it prolong into 5 year after 2000. After 5 year period, teak tree canopy will constraint the agriculture crop to grow optimally. Since almost all forest area is reforested in almost same time, it means that although the agriculture time already prolonged, but available area for the agriculture will be not continuously available like before mass deforestation. The forest farmer resistance to cope this problem is by preventing the successful reforestation program as shown on some picture bellow.



Picture 2. Peanut agriculture in forest area and some burnt dead trees (left) and Small lines for teak tree and less tree canopy in forest area for rice agriculture (right)

Rice agriculture in Ngawi regency is affected with green revolution through rice self sufficiency policy. Farmer in this area becomes more familiar with chemical fertilizer, pesticides and herbicides to increase their productivity. It can be seen that Ngawi regency during 2000-2010 has productivity above East Java Province and Indonesia productivity, but decreased in

2011 up to 2014. The decreasing was because the brown plant hopper annual attack. Intensive rice farming is prone to pest outbreak risk, since 2010, the infestation of brown plant hopper (BPH), *Nilaparvata lugens* happen in Ngawi rice field and then in 2011 severely damaged 18,448 hectare rice field (East Java Province Board Planning Agency).



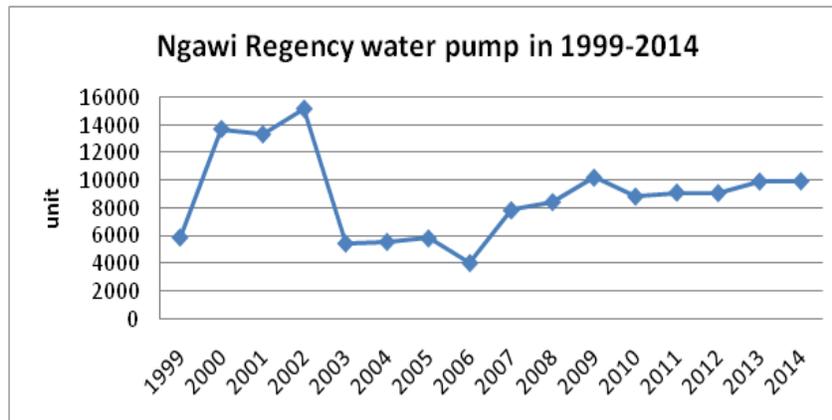
Source: Ngawi and Indonesia Statistic data

Figure 6. Rice productivity in Ngawi regency 2000-2014

Some reasons for farmer to cultivate rice in dry season are the higher productivity and price. In dry season when the sun ray intensified without many cloudy days, rice plant can grow optimally and produce less moisture content grain which increases the grain price. According to interviewed farmer, rice price in dry season could reach 3,700 idr which is higher than in rainy season which only range from 3,000- 3,500 idr.

The success of dry season rice agriculture is on irrigation water availability. Whilst existing irrigation systems only support rainy season cultivation, irrigation farmer start copied well irrigation from irrigation agency to fulfill their water need. Some other factor that promoted the use of well irrigation are:

- a) Relatively cheap water pump price
- b) High rice harvest yield and price in dry season
- c) Prepaid electricity policy that released in 2010 is open the access for electricity in rice field and enable deeper ground water extraction by using submersible pump.



Source: Ngawi statistic data compiled by author

Figure 7 Trend of pump number in Ngawi Regency area in 1999-2014

The number of water pump indicates the rapid ground water extraction in this area. Although decreased in number since 2002, but through the fieldwork observation, the wells become deeper up to 100 meters depth. According to Dani (2011), the decreasing water table was happen 2011 in many areas in Ngawi regency such as in Paron sub district for 3-5 m, in Geneng Sub district for 6-8 meter, and Gerih sub district for 7- 14 meter. In Begal rice field area, there are 7 well that ranged from 30 -100 m and one of it is artesian well. If assumed that the condition of rice field that irrigated by Margo spring water (16.5 ha with 7 well) is the same with Ngiyom irrigation area, it predicted that more than 600 well established in this area or even more. The resulting situation is that ground water is almost impossible to extract with manual effort (dug well).



Picture 3. Diesel pump in 30m depth well, many hut in rice field for well equipment, and deep well using electric submersible pump in rice field area

Furthermore, not every well drill is successful. There are some cases of failed drilling from failed to get the water into gas explosion. Ngawi regency located near inland oil drilling in Cepu oil blocks which only 60.5 kilometres away. The two case of well drill explosion was happen in Kedunggalar and Widodaren sub district where Begal forest located. The drill well explosion risk is faced by farmer in this area and worsen with the loose law enforcement of ground water utilization in Indonesia Government Law 43/2008 and it derived Law



Source: *Surya tribun news*

Picture 4. Well drilling explosion in Widodaren Sub district 2013 and 2014
 From the interview, some factor that affecting the water contestation problem in this area are;

Unequal resources benefit distribution

Unequal spring water benefit distribution between forest and irrigation farmer

Economic gap among forest farmer which is landless and irrigation rice farmer land own become justification for forest farmer to utilize spring water. Margo and Ngiyom spring are located in Begal production forest which the main access is from Sekarputih village. But the water from these two spring water was utilized for rice field irrigation in another village and sub district. Based on the interview, landless farmer in Sekarputih felt that the economic advantages from spring water utilization only benefit other village farmers and it proved by the monthly average income gap of forest farmers which only achieved 142.916 rupiah/ month whilst irrigation farmers 2.296.875 rupiah/month and housing condition where forest farmers mostly live in wooden house without paved floor while irrigation farmers mostly live in permanent concrete house. After loose forest governance, they start doing rice agriculture in river side and near spring area.

Water utilization that monopolized by forest farmer is lead to water contestation in this area. After tried to confront with forest farmer about water utilization and mediated with city

council but not yet resolved, irrigation farmer start to find surplise water from ground water extraction. The intensive rice agriculture is causing well irrigation become more common for rice field irrigation which creates rapid ground water extraction in this area. Moreover, high fertilizer use is dried up the soil which makes water demand increase (Shiva, 1993).

Unequal forest resource benefit distribution between forest farmer and Indonesian Forest Enterprises

Long history of state production forest governance was affecting local people near forest area. According to Peluso (1993), from the beginning of state production forest establishment, forester and government officer believed that excluding local people from forest utilization will reduce their claim over forest product. Repressive way often used to limit local people access to forest. Local people were seen as cheap labor provider for production forest work.

After Indonesia independence, the state forest authority was under forestry ministry and later delegated to Indonesian Forest Enterprises to fund the Indonesia development. In 2001, Indonesian Forest Enterprises was under the authority of State Enterprise Ministry, which cleared the production forest profit oriented purpose. Less sustainable log harvest is also caused by timber theft in forest area to supply furniture industry material.

Timber theft actors always associated to local people, which create social problem between forest authority and local people. Most of forest farmer respondent felt offended and afraid to answer about the Begal forest condition in mass deforestation or if asked about their relation with forest authority. It might be caused by stereotyping by forest authority to local people near forest area. Based on researches that conducted by NGOs Arupa and LBH Semarang, during 1998 - 2011 Indonesian Forest Enterprises had 108 conflict cases with villagers around forests for timber theft or forest destruction in Java Island, 34 of them were shot or abused by Forest security officer and 74 others injured. Types of violence committed by forest officials ranged from terror, torture, up to killing citizens and criminalize people who accused as timber theft.

Usufruct forest product, such as tree branch for fire wood as well as agriculture in forest area which done through *taungya agroforestry system*, was given to local people to reduce their claim over forest product. *taungya* was initiated by Duchth forester in late 19th century (Peluso, 1993) and continued after independence up to nowadays despite of its failure in improving local

people economic condition. After 2000, Community based forestry program also adopt, modify and legalized this agro-forestry mechanism to overcome post mass deforestation problem. Unavailable continuous agro forestry area because mass reforestation, has made forest farmer overcoming the problem by resisting the reforestation success and do rice agriculture in spring and riverside in forest area which causing water contestation problem. . In Begal forest area, this program regulated in 2004 with the establishment of Community Base Forestry named “Jati Lestari but its partnership contract agreement content was only decided by Forest Company. Some benefit that achieved by CBFM from log thinning in forest area according to the partnership contract are will be achieved in 10 year, 15 year, 25 year, and 40 year tree age with forest authority decided term and condition.

Unequal partnership between local people (Forest Farmer) and forest authority (Indonesian Forest Enterprises) is hindering the success of forest co-management program through community base forestry. Furthermore, it creates lack of choice to local people near forest area to sustain their source of income from forest area utilization. It was not so easy for poor rural people to define a choice, not only because their assets are limited, but also poor people often experience and feel of being isolated, left out, looked down upon, alienated, and ignored by the mainstream socio-cultural and political process (Narayan, *et al*, 2000, p 133).

High dependency on intensive agriculture sector

Limited job opportunity due to low education level and limited available formal job vacancies in this area make almost all local people in Sekarputih and Begal village work in agriculture sector. Green revolution policy has make farmer in this area becomes familiar with chemical fertilizer, pesticides and herbicides to increase their productivity. Benefit from cash crop practices encourage farmer to produce more in order to gain more and led irrigation farmer to shift their rice cultivation trend into intensive rice agriculture 3 times per year) which cause increased rice agriculture water need and forest farmer start doing rice agriculture in river side and near spring area.

The increasing water demand was not fulfilled by the irrigation system which designated for 2 times rice cultivation per year (in the first and third cultivation period). The convenience of using well irrigation from irrigation agency deep well, water contestation problem and the changing in rice cultivation make farmer started to make their own well. Unfortunately, Intensive

rice agriculture productivity in Ngawi regency was decreased in 2011 up to 2014 because the brown plant hopper infestation. Increasing production cost for irrigation water and pest infestation make rice farmer livelihood at risk and make them more dependent on rice agriculture.

Loose forest governance

Based on conducted interview, freedom of speech and human right recognition which intensified in reformation era has deprived Forest Company officer to secure forest in strict way. Previous failure of social forestry program implementation is resulting constant conflict of Indonesian Forest Enterprises and Local people near forest area over the access to forest resource for livelihood. 1998-2000 mass deforestation can be seen as the peak of conflict in forest governance by Indonesian Forest Enterprises. In overcoming the problem, community base forestry program was regulate in 2001 by establish legal forestry community in village level. However, this program done without equal partnership because all articles in partnership contract were made by Forest Company and less benefited local people which resulting on forest farmer resistance and un-improved local people economic condition (short agroforestry time and long period of achieving shared benefit).

Due to supporting National food security program for state own Enterprises, some forest area has been allocated for agro-forestry by local people farmer. Moreover, less forest officer number in this area (only 5 officer) and highlighted by many NGO for occupy 2.4 million hectare production forest in Java Island and high number of poverty near forest area make Indonesian forest enterprise loosen their governance in this area.

No law enforcement on ground water extraction

In Indonesia the law that regulated water resources management and utilization is Government Law 43/2008 about water resources. This law was already adopted by Ngawi Local Government with Ngawi regency Regional Law no. 23/2012 on water conservation and Ground Water management. According to article 34 (3), this law allowed ground water extraction for agriculture use without applying formal permission if followed several condition such as;

- a. The discharge of groundwater does not bring problem to local community daily water needs;

- b. Wells should located in agricultural areas away from the settlements; and
- c. Use no more than 2 (two) litters per second per hectare, if surface water is not sufficient.

This article usually used by local reGENCY officer to allow the ground water extraction for agriculture water need. However, loose regulation has resulting on addition of agriculture well number and utilization of submersible pump which have high suction capacity (for 100m depth, maximum flow rate is 15 liter per second, which lowering the water table (deepen the well up to 100m). although already impacting the water table but up to now there is not any act from Ngawi local Regency to limit the ground water extraction. Not enough socialization of the ground water law and information on Ngawi regency hydrogeology condition which lies in Ponorogo-Ngawi ground water basin are made local people unaware of potential risk of excessive ground water extraction.

The effort to socialize and enforce the Government Law no. 43/2008 on water conservation and Ground Water management should be done immediately to avoid further environmental risk. According to my observation, the trend of well irrigation is also happening in other region of east java and central java province as cheap electricity power and modify water pump with high suction power is easily available.

Conclusion

In summary, government policy on rice agriculture and forestry sector was indirectly affecting the water contestation problem in this area. From forest resource governance side, changes in forest area utilization after 2000 mass deforestation in Begal forest area into rice field in spring and river area, un-success community base forestry management program make forest farmer utilize spring water for rice agriculture in forest area (the water previously utilize for irrigation farmer), loose forest governance because of internal and external pressure on Indonesia forest Enterprises are some factor that causing water contestation between forest farmers and irrigation farmers in this area.

From agriculture governance, government policy on rice self sufficiency program (on Suharto's era) which weighed triggered the change in rice planting cycle into 3 times per year which resulting increasing water demand which cannot be fulfilled. As the water resources monopolize by forest farmer, the water contestation problem was remain unresolved, and then dam damages are some cause of water problem. Well irrigation is utilized by irrigation farmer as

self-solution for fulfilling agriculture water need, and then well number is increase and more deep overtime in almost all Ngawi area. Decreasing water table, well drilling failure and increasing groundwater extraction cost are some risk that faced by irrigation farmer. Located in cross province groundwater basin make depletion water table in this area would affect many other region.

In conclusion, Combination of; agriculture and forestry policy management side effect are causing economic gap (between forest vs. irrigation farmers) and led to more intensive rice agriculture; and loose forest and agriculture governance which allow rice agriculture in forest area and deep well irrigation in rice field were causing water contestation problem in this area and would led into water scarcity problem in future. This condition was in line with SES framework which stated that the resources user actions toward resources utilization are affected by the resources governance policy.

References

- Anderies, J. M., M. A. Janssen, and E. Ostrom. 2004. *A framework to analyze the robustness of social-ecological systems from an institutional perspective*. *Ecology and Society* 9(1): 18. [online] URL: <http://www.ecologyandsociety.org/vol9/iss1/art18/>
- Danni, Y. Kurniawan, 2011, *Pemanfaatan sumber daya air bagi kegiatan budidaya di daerah Pengaliran sungai (dps) ketonggo kabupaten Ngawi*, unpublished master tesis, Magister perencanaan kota dan Daerah, UGM, Indonesia
- Ostrom, E , (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peluso, L.N., 1993, *Tradition of Forest control in Java: Implication for social forestry and sustainability*, global ecology and biogeography letters, vol. 3 no. 4/6, The political ecology of southeast Asian forest : transdisciplinary discourses, Wiley, pp. 138-157
- Manning, Chris, 1987, *Public Policy, Rice Production, and Income Distribution: Review of Indonesia Rice Self- Sufficiency Program*, South east asian journal of social science Vol 15. No. 1 Social AND Political Change In Contemporary Indonesia, Brill.
- Narayan, Deepa, Patel, R., and Schafft, 2000, *Can Anyone Hear Us?: Voices of the Poor*, World Bank Publication.
- Peluso, Nancy Lee. 2006, *Hutan Kaya Rakyat Melarat: penguasaan sumberdaya dan perlawanan di Jawa*. Konphalindo, Jakarta.
- Santoso, Hari. 2004. *Perlawanan di Simpang Jalan: Konteks Hutan di Desa-Desa Sekitar Hutan Jawa*. Damar Press. Yogyakarta.
- Suprpto, E., A., B., 2013, *Hutan Jawa : kontestasi dan kolaborasi*, Biro Penerbitan ARUPA, Yogyakarta , ISBN 978-979-96513-6-5.
- Shiva, Vandana, 1993, *The Violence of the green revolution; third world agriculture, ecology and politic*, Zen book Ltd, London & New York.
- Walker, B., Gunderson, L., Kinzig, A., Folke, C., Carpenter, S., and Schultz, L.(2006). *A handful of heuristics and some propositions for understanding resilience in social-ecological systems*. *Ecol. Soc.* 11, 13.

Zips, W. and Weilenmann M., 2011, *The Governance of Legal Pluralism: Empirical Studies from Africa and Beyond*, LIT Verlag Münster, 304p.

<https://perhutaniunit3.wordpress.com/2013/09/26/sejarah-perum-perhutani/>

<http://www.mongabay.co.id/2013/01/28/pegelolaan-hutan-di-jawa-oleh-perhutani-dinilai-gagal-sejahterakan-masyarakat/>

<http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159>

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) 2014 by Perum Perhutani.

Government data:

1. Ngawi dalam Angka 203, 2004, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014
2. Statistik kecamatan Kedunggalar 2015
3. Statistic Kecamatan Widodaren 2015
4. Profil desa Sekarputih 2016
5. Perhutani report 2016
6. <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/864> Produksi padi Indonesia 1993-2013
7. Statistik Perhutani tahun 2009-2013

Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima Di Kota Ternate

Sukur Suleman

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
sukursuleman@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the performance of North Maluku Representative Ombudsman as a supervisory body in realizing excellent public service in the city of Ternate. This study used a qualitative approach with emphasis on phenomenology. The data obtained from this research is through observation, in-depth interviews and documentation, and secondary data is document tracking. Data analysis technique is qualitative analysis with Milles and Huberman model that is, collecting data, data reduction, display data, conclusion and verification. The results showed that the performance of Ombudsman representative of North Maluku in Ternate City was quite good by looking at the process and stages of acceptance of reports submitted by the community or the Ombudsman's initiative, clarifying the report, field investigation to convince the existing information, performing mediation actions against the complainant and reported, as well as on the stages of recommendations based on the mechanisms and or rules contained in Law No. 37 of 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia. North Maluku Ombudsman is also always working with related institutions and socialize about the functions, duties and authority of Ombudsman, and coordination in order to prevent maladministration practices so that the community can contribute actively and can support the existence of Ombudsman as an independent oversight institution to public service providers both government and private in Ternate City

Keyword: *Performance, Ombudsman, Public Service.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga pengawasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada fenomenologi. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi, serta data sekunder yakni penelusuran dokumen. Teknik analisis data yaitu analisis kualitatif dengan model Milles dan Huberman yakni, mengumpulkan data, reduksi data, data display, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara (OPMU) di Kota Ternate cukup baik dengan melihat pada proses dan tahapan penerimaan laporan yang di sampaikan masyarakat atau insiatif Ombudsman, melakukan klarifikasi terhadap laporan, infestigasi lapangan untuk meyakinkan informasi yang ada, melakukan tindakan mediasi terhadap pelapor dan terlapor, serta pada tahapan rekomendasi yang berdasarkan mekanisme dan atau aturan yang ada dalam UU No 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Ombudsman Maluku Utara juga senantiasa kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait dan melakukan sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman serta koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya praktek maladministrasi, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dan dapat mendukung eksistensi Ombudsman sebagai lembaga independen pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta di Kota Ternate.

Kata Kunci : *Kinerja, Ombudsman, Pelayanan Publik*

<i>Submit</i>	: 20 November 2017
<i>Review</i>	: 20 Januari 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: arifzainudin@gmail.com

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif merupakan dambaan setiap warga Negara. Hal tersebut telah menjadi tuntutan masyarakat yang selama ini hak-hak sipil mereka kurang memperoleh perhatian dan pengakuan secara layak, sekalipun hidup di dalam Negara hukum Republik Indonesia. Sebelum reformasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan diwarnai dengan praktek maladministrasi, antara lain terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme, sehingga mutlak di perlukan reformasi birokrasi penyelenggaraan Negara dan pemerintahan, demi terwujudnya penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang baik hanya dapat tercapai dengan peningkatan mutu aparatur penyelenggara Negara dan pemerintahan, juga penegakan asas-asas pemerintahan umum yang baik (*good governance*).

Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan Negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna bertanggung jawab serta bebas KKN (Uar, 2016). Setelah reformasi bergulir, reformasi mengamanatkan perubahan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, yaitu kehidupan yang didasarkan pada penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang demokratis.

Sejalan dengan semangat reformasi itu, pemerintah melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Perubahan yang di maksud antara lain dengan membentuk lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan yang baru. Salah satu di antaranya adalah lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI). Tujuan dibentuknya lembaga ini yaitu dengan visi “Mewujudkan pelayanan publik yang prima yang mensejahterakan dan berkeadilan seluruh rakyat Indonesia“. Tujuan mulia ini tentunya memerlukan proses panjang untuk mewujudkannya, mengingat pelayanan publik

kondisi saat ini secara umum masih rendah kualitasnya, masih banyak masalah yang mengakibatkan terjadinya ketidakpuasan pelayanan publik di masyarakat secara luas.

Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan implikasinya sebagaimana diketahui sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain (Mahsyar, 2011).

Sejalan dengan pendapat di atas maka kinerja secara kelembagaan sangat perlu ditingkatkan. Pada dasarnya kinerja merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara sinergi antara lembaga, individu dan kelompok terhadap suatu pekerjaan di dalam organisasi. Kinerja didasarkan pada kesepakatan tentang sasaran, rencana kerja dan pengembangan yang mencakup pengkajian ulang terhadap kinerja secara berkesinambungan dan dilakukan secara bersama berdasarkan kesepakatan mengenai sasaran pengetahuan, keahlian, serta pengimplementasian peningkatan dan pengembangan lebih lanjut sebagaimana Dharma (2013) yang mengatakan bahwa kinerja ditunjukkan untuk meningkatkan aspek-aspek kinerja yang meliputi : Sasaran yang akan dicapai, kompetensi yang akan meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan efektivitas kinerja.

Ombudsman Perwakilan Maluku Utara adalah merupakan sebuah lembaga pengawasan eksternal yang memiliki fungsi kerja yakni (1) mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam upaya memperoleh pelayanan umum yang berkualitas dan efisien, penyelesaian masalah secara adil, tidak memihak dan jujur; (2) meningkatkan perlindungan perorangan dalam memperoleh pelayanan publik, keadilan, kesejahteraan dalam mempertahankan hak-haknya terhadap kegagalan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), keterlambatan yang berlarut-larut (*undue delay*), diskresi yang tidak layak. Selanjutnya kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara meliputi: Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan, Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan ombudsman, Melakukan infestigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, Membangun jaringan kerja, Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan Melakukan tugas

lain yang diberikan oleh undang-undang. Menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik. Menurut Patarai tugas pokok utama Ombudsman adalah mengangkat perilaku buruk pemerintah atau pejabat pemerintah sehingga menjadi perhatian publik agar mendorong suatu perubahan. Dengan demikian dapat di katakan bahwa Ombudsman adalah salah satu aktor sentral dalam penegakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penyelenggaraan mekanisme *voice*, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Ternate. (Patarai. 2010)

Keberadaan lembaga Ombudsman di Maluku Utara menjadi harapan baru bagi seluruh masyarakat Maluku Utara khususnya Kota Ternate, dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Kehadiran Ombudsman di Maluku Utara, masyarakat berharap mendapatkan hak-hak minimumnya dan dapat merasakan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan. Menurut Pramusinto pelayanan publik sudah saatnya diberikan pada masyarakat untuk memenuhi nilai-nilai tentang demokrasi, keadilan, dan transparansi, akuntabilitas yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk dapat dilayani secara cepat, profesional, dan mudah diakses di mana pun berada. (Pramusinto.2009)

Dwiyanto menjelaskan bahwa aparatur birokrasi harus bertindak sebagai pelayanan publik yang profesional, santun dan peduli, memiliki integritas tinggi dan mampu menjadi pilar kesatuan bangsa. Menyimak pada pendapat tersebut di atas, maka tentunya pemerintah punya tanggung jawab besar terhadap masyarakat dalam memberikan pelayanan publik yang baik. Oleh karena itu menurut peneliti, salah satu tugas utama pemerintah birokrasi Kota Ternate adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang sepuasnya penuh dengan keadilan, transparansi dan akuntabilitas. (Dwiyanto. 2015)

Beberapa temuan dari berbagai sumber baik melalui data sekunder Ombudsman, maupun Observasi peneliti diantara Dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DIKBUDPORA) terkait tidak diberikannya tunjangan profesi guru dari tahun 2015 hingga awal tahun 2016 serta tidak adanya penyaluran dana rutin sekolah tingkat SD, Dugaan maladministrasi yang dilakukan pihak Jasa Raharja Ternate terkait pembayaran klaim garansi Asuransi yang tidak sesuai dengan jumlah yang diklaim, Keluhan warga kelurahan Tanah Masjid Kota Ternate Tengah atas sering macetnya air dan dinilai PDAM tidak merata dalam pendistribusian air bersih dan, Keluhan masyarakat atas prosedur atau penambahan tarif daya yang dilakukan PLN Cabang Ternate. Kasus-kasus pelayanan publik

yang lain baik disektor pemerintah seperti dalam pelayanan kesehatan, standar operasional prosedural yang berbelit-belit, layanan administrasi kependudukan yang juga demikian, Begitu pula pada BUMD dan kasus-kasus pada sektor Swata lainnya. Namun Ombudsman perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga independen pengawasan pelayanan publik dengan segala tugas, fungsi dan wewenangnya dapat memberikan saran perbaikan kepada penyelenggaraan layanan publik yang melakukan maladministrasi untuk dapat memperbaikinya. Dengan demikian peneliti dapat menyatakan bahwa problem pelayanan publik Kota Ternate dewasa ini perlu melakukan perbaikan dari Ombudsman sesuai dengan harapan masyarakat Kota Ternate.

Pernyataan tersebut di atas dapat diperkuat dengan melihat pada laporan masyarakat maupun temuan Ombudsman Maluku Utara khususnya pada wilayah Kota Ternate mulai Tahun 2014 sebanyak 30 (tiga puluh) aduan terhadap SKPD maupun pihak swasta yang melakukan pelanggaran maladministrasi, di Tahun 2015 laporan yang masuk pada Ombudsman baik pemerintah maupun swasta sebanyak 46 (empat puluh enam) laporan dan terahir Januari-Juni 2016 sebanyak 35 (tiga puluh lima) laporan. Sementara laporan yang masuk dalam kewenangan Ombudsman mulai pada tahun 2014-2016 sebanyak 110 (seratus sepuluh) laporan, dan semuanya menjadi tanggung jawab Ombudsman untuk dapat ditangani dan diselesaikan. Selain itu dalam kinerjanya ada kendala yang dihadapi Ombudsman Maluku Utara itu sendiri, baik sumber daya manusianya, sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, dan pengetahuan masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Ombudsman.

Ombudsman perwakilan Maluku Utara yang keberadaannya begitu muda dengan berbagai *problem* yang dialami, baik secara internal maupun eksternal kelembagaan dan dengan segala tugas dan wewenangnya, serta kendala dan permasalahannya yang dihadapi, tentunya mengisyaratkan bahwa kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga pengawas dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate perlu ditingkatkan.

Untuk menjawab problem yang dialami Ombudsman baik secara internal maupun eksternal kelembagaan dan dengan segala tugas dan wewenangnya, maka tentunya kinerja Ombudsman harus memiliki indikator yang dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam menjalankan tugasnya, menurut Danim untuk mencapai hasil yang baik maka mereka harus mampu tampil prima dengan kinerja yang sangat tinggi yaitu memiliki spesifik yang jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi, Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, Relevan, artinya bahwa kinerja harus menangani

aspek objektif yang relevan, Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan, Efektif data atau informasi yang berkaitan dengan kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis dengan biaya yang tersedia. Hal ini penting dilakukan oleh ombudsman karena akan meningkatkan partisipasi publik dalam pengaduan terhadap maladministrasi atau kasus pelayanan publik dan tentunya akan lebih mempermudah Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate. (Danim. 2008),

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara selama 2 (dua) bulan dengan pertimbangan bahwa fenomena aparatur penyelenggara pelayanan publik di Kota Ternate Propinsi Maluku Utara diwarnai dengan kondisi birokrasi yang kurang sesuai dengan landasan normatif dan prinsip-prinsip ilmiah, yang membuat pelayanan publik tidak efisien. Sehingga menuntut kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik untuk lebih mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima di Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan melihat bahwa kinerja Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate memuat problem sosial yang membutuhkan pemahaman secara universal agar dapat memperoleh data secara akurat. Oleh karena itu penelitian ini mengacu pada penelitian kualitatif, maka berdasarkan fenomena yang ada, pendekatan penelitian ini adalah fenomenologi yaitu berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena. Peneliti akan mengkaji secara mendalam isu sentral dari struktur utama suatu objek kajian dan selalu bertanya apa pengalaman utama yang akan dijabarkan informan tentang objek kajian penelitian, serta berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang dalam situasi-situasi tertentu, maka dengan demikian peneliti menggambarkan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh para informan terhadap kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Kota Ternate.

Penelitian ini juga menggunakan sumber data yaitu data primer yang diperoleh melalui observasi, melakukan wawancara mendalam, dan dokumentasi. Peneliti memilih informan berdasarkan teknik Purposive yaitu memilih informan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan yang sesuai dengan topik penelitian, mereka yang dianggap cakap, kredibel untuk

menjawab masalah penelitian. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu Komisioner Ombudsman, Asisten dan Staf, masyarakat pelapor, tokoh masyarakat atau LSM dan Pemerintah Kota Ternate yang terlapor. Kemudian sumber data selanjutnya adalah data sekunder berupa data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya, baik berupa penelusuran dokumen laporan-laporan tertulis dan peraturan-peraturan lainnya. Kedua sumber tersebut dapat diuji kredibilitasnya dan dapat dianalisis dengan menggunakan model interaktif teknik analisis data oleh Miles and Huberman yaitu data *Collection*, data *Display*, data *Reduction*, *Conclution Drawing/Verifyngi*. (Sugiyono, 2014)

Hasil dan Pembahasan

Dalam rangka menjalankan kinerjnya sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik, maka peneliti mengacu pada tiga indikator untuk mengukur kinerja organisasi publik oleh Dwiyanto (2006) yaitu produktivitas kinerja, responsivitas dan responsibilitas yang dapat digambarkan berdasarkan hasil penelitian diantaranya:

1. Produktivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Produktivitas menunjukkan pada dua dimensi yaitu efektivitas dan efisiensi dengan pandangan bahwa kinerja yang dilakukan hari ini itu lebih baik dari pada kinerja yang selalu ditunda-tunda, dimana pada efektivitas yaitu melaksanakan sesuatu yang benar dalam memenuhi kebutuhan organisasi berkaitan dengan pencapaian untuk kinerja yang maksimal. Sementara pada efisiensi berkaitan dengan upaya membandingkan masukan dengan realisasi bagaimana kinerja tersebut dapat dilaksanakan. Sebagai upaya Ombudsman perwakilan Maluku Utara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produktivitas kinerja Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasannya maka, pendekatan yang perlu dipakai adalah pendekatan Simamora (2004) yang mengatakan keberhasilan produktivitas kerja sangat berpengaruh pada kuantitas kerja, kualitas kerja dan ketetapan waktu oleh karena itu untuk melihat kuantitas, kualitas dan ketetapan waktu kinerja sebuah organisai publik terutama kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara maka, sejauh peneliti melakukan penelitian dan dengan hasil kajian dan observasi yang ada, untuk itu peneliti dapat menguraikan beberapa bahasan dengan melihat pada sub indikator dibawah ini:

Kuantitas kinerja berkaitan dengan suatu hasil yang dicapai oleh Ombudsman berdasarkan standar dan mekanisme kerja sesuai dengan tugas yang dimilikinya. Oleh karena

itu, peneliti mendeskripsikan hasil penelitian terkait dengan kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam mewujudkan pelayanan publik yang ada di Kota Ternate, berdasarkan tugas Ombudsman yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 diantaranya:

Hasil observasi peneliti dan telaah dokumen menunjukkan bahwa kinerja Ombudsman diawali dengan penerimaan laporan yaitu sejak 2015 dan Januari-Juni 2016 dari 81 kasus yang ditangani oleh Ombudsman Perwakilan Maluku Utara sebanyak 23 hasil temuan atau inisiatif sendiri sementara 34 berasal dari laporan langsung dan 24 adalah laporan melalui via email, surat, telepon maka dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa inisiatif Ombudsman itu sangat penting walaupun dengan capaian yang minimal tetapi sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Adapun gambaran data mengenai jumlah kasus aduan atau laporan berdasarkan instansi pemerintah maupun swasta dalam lingkup Kota Ternate, dapat digambarkan pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1 : Laporan Kasus Ombudsman Perwakilan Maluku Utara 2015-2016.

No	Instansi Terlapor	Jumlah Kasus
1.	Disnakersos	3
2.	Dinas Pendidikan	3
3.	Dinas Tata Kota dan Pertamanan	1
4.	BLHK	2
5.	Dinas Perhubungan	4
6.	Badan Perlindungan Perempuan dan Anak	1
7.	BRI	2
8.	Kelurahan	4
9.	Dinas Pasar	4
10.	Dinas Kesehatan	2
11.	RSUD	2
12.	Telkom	1
13.	Badan Pusat Statistik (BPS)	1
14.	Kecamatan	1
15.	Sekolah	15
16.	PT. Danamon	1
17.	Dinas Kebersihan	1
18.	Kepolisian	2
19.	ASDP	1
20.	Kantor Pelayanan Pajak Pratama	2
21.	Pertamina	2
22.	BPN	3
23.	Pengadilan Negeri	1
24.	Pengadilan Agama	1
25.	Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan	2
26.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1
27.	Jasa Raharja	1
28.	PLN	8
29.	PDAM	4
30.	Perguruan Tinggi	5
Total Jumlah Kasus		81

Sumber : (Data sekunder OMPU, 2016)

Hasil observasi dan telaah dokumen juga menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah instansi terlapor yang ditangani Ombudsman baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang paling dominan melakukan pelanggaran pelayanan publik atau maladministrasi adalah instansi pendidikan atau sekolah dengan jenis kasus yang sangat seragam yakni masalah pungutan liar (pungli), iuran kepada siswa yang penggunaannya tidak jelas, hal ini memungkinkan dampak dari pada kebijakan pendidikan gratis yang pada aspek lain pihak sekolah merasah kewalahan, sementara yang sering berulang kali melakukan kesalahan adalah PLN dengan jenis kasus yang juga seragam yakni pemadaman listrik yang berlarut larut, listrik yang sering mati dan sebagainya. Begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya yang melakukan pelanggaran berulang kali tetapi tidak seperti yang terlihat pada angka yang dominan, kondisi ini memungkinkan peran serta pengaruh pemimpin yang kurang efektif dalam dalam mengorganisir sebuah lembaga atau instansi.

Pernyataan ini didukung oleh Terry yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi, kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan serta mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budaya organisasi. Maka dengan demikian peneliti berkesimpulan bahwa pelanggaran yang berulang kali dilakukan oleh instansi terlapor menandakan manajemen kepemimpinan dari instansi yang belum maksimal dan sikap Ombudsman yang harus lebih tegas. (Thoha 2010)

Kualitas kerja Ombudsman terhadap penanganan laporan masyarakat yang masuk, dapat diselesaikan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Ombudsman. kinerja Ombudsman dalam penanganan laporan sudah mulai terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pelapor.

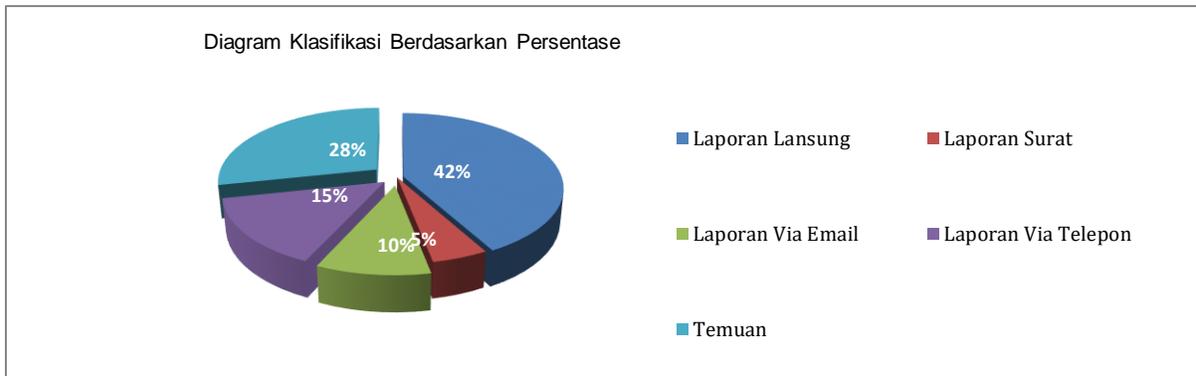
Tabel II: Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Masuk dalam Kewenangan Ombudsman Tahun 2014-2016

No	Jenis Pelayanan	Tahun			Jumlah
		2014	2015	2016	
1.	Pemerintah	20	29	31	79
2.	Swasta	10	17	4	31
Total Per Tahun		30	46	35	110

Sumber: (Data Sekunder OPMU, 2016)

Berdasarkan Tabel II di atas dapat digambarkan bahwa kinerja OPMU dalam penanganan laporan sudah mulai terlihat dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat pelapor, akan tetapi pada tahun 2014 terdapat penurunan laporan sebesar 30 laporan, dengan alasan bahwa diawal-awal berdirinya Ombudsman perwakilan Maluku Utara, bekerja dengan serba keterbatasan personil yang hanya memiliki 2 (dua) Asisten dan pengetahuan masyarakat atas kehadiran Ombudsman yang sangat kurang sehingga, kehadiran Ombudsman diawal tahun bekerja sangat mengalami kekurangan laporan.

Gambar I : Diagram Klasifikasi Laporan / Aduan Berdasarkan Mekanisme Penyampaian Laporan



Sumber : Data Sekunder OMU 2016

Hal penting yang juga perlu dikemukakan adalah lembaga sektor publik maupun sektor swasta yang dilaporkan dari jumlah keseluruhan laporan atau aduan serta temuan selama tahun 2015 dan Januari-Juni Tahun 2016 kepada Ombudsman perwakilan Maluku Utara sebagaimana tercantum pada tabel 4.7 dibawah ini:

Tabel III: Jumlah Instansi Terlapor Sektor Pemerintah

No	Instansi Terlapor	Jumlah Laporan
1.	Kantor Dinas atau Badan	37
2.	Pemerintahan Kecamatan	1
3.	Pemerintahan Kelurahan	4
4.	Satuan Pendidikan/ Sekolah	15
5.	BUMN/BUMN	20
Total		77

Sumber : (Data sekunder OPMU, 2016)

Dari hasil olahan data sekunder OPMU pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa, instansi terlapor dari sektor pemerintah yang paling banyak mendapat laporan adalah kantor dinas dan atau badan yakni dengan jumlah laporan yang masuk pada Ombusman Maluku Utara adalah sebanyak 77 kasus, ini menunjukkan bahwa aduan atau laporan masyarakat untuk dinas atau badan dapat digaris bawahi diantaranya pelayanan yang berbelit-belit dan kaku, kemudian kepentingan masyarakat yang tidak mampu diakomodir, pungutan pembayaran yang diluar dari mekanisme dan prosedur pelayanan. Sedangkan pada Kantor kecamatan dan kelurahan pada umumnya juga pelayanannya berlarut-larut dan melalaikan kewajibannya serta bertindak diluar kewenangan yang ada. Pada pendidikan atau sekolah antara lain adalah pungutan atau biaya partisipasi yang penggunanya tidak jelas, serta penjualan buku kepada siswa.

Selanjutnya jumlah instansi yang terlapor pada sektor Swasta sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel IV: Jumlah Instansi Terlapor Sektor Swasta

No	Bidang Terlapor	Jumlah Laporan
1.	Kontraktor	0
2.	Asuransi dan Pembiayaan	1
3.	Perdagangan barang dan Jasa	0
4.	Perbankan dan keuangan	3
5.	Pribadi	0
Total		4

Sumber : (Data Sekunder OPMU, 2016)

Pada tabel IV tersebut dapat menjelaskan bahwa jumlah aduan atau laporan terhadap sektor swasta yang masuk pada Ombudsman itu sangat menurun, dimana jumlah laporan terbanyak hanyalah 3 kasus yaitu perbankan dan keuangan dengan jenis kasus yang dilaporkan oleh masyarakat adalah pemutusan pinjaman pelapor sebelum berakhirnya perjanjian pinjaman yang mengakibatkan sertifikat pelapor yang dijaminan disita oleh pihak Bank Danamon, pihak Bank BRI tidak mau memberikan sertifikat milik pelapor yang dijaminan pada saat pinjaman uang di Bank padahal pelapor sudah melunasi pinjaman tersebut. Minimnya laporan terhadap sektor swasta dengan asumsi bahwa pihak swasta telah bekerja berdasarkan manajemen profesional. Untuk lebih mempertegas penjelasan diatas tentang kondisi laporan pada sektor swasta.

Tabel V: Klasifikasi Laporan atau Aduan Berdasarkan Proses Tindak Lanjut

No	Tindak Lanjut Laporan	Jumlah Laporan
1.	Kasus selesai atau tutup (yaitu selesai dengan investigasi, mediasi, dan penghentian tindak lanjut)	68
2.	Rekomendasi	0
3.	Dalam Proses	12
4.	Tahapan Konsultasi	1
5.	Tidak ditindak Lanjuti	0
Total		81

Sumber : (Data sekunder OPMU, 2016)

Pada tabel V tersebut dapat dilihat bahwa klasifikasi laporan berdasarkan proses tindak lanjut menunjukkan jumlah kasus yang diselesaikan dengan investigasi, mediasi, dan penghentian tindak lanjut sebanyak 68 laporan. Dengan alasan kasus selesai dikarenakan proses tindak lanjut laporan terhadap instansi yang terlapor Ombudsman lebih memberikan saran perbaikan kepada pihak terlapor dan mereka langsung melaksanakan, sementara pada tahap proses penyelesaian kasus, saat ini sedang berlangsung karena Ombudsman butuh kajian mendalam dan pengutan data-data yang *valid*, begitu juga tahapan konsultasi yang tentunya saling mencocokkan antara data dari pihak terlapor dengan dengan jenis kasus yang dilaporkan. Sementara untuk tahapan rekomendasi dan kasus yang tidak ditindaklanjuti oleh Ombudsman perwakilan Maluku Utara itu tidak ada. Melalui data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kinerja OPMU dalam menangani permasalahan yang dilaporkan masyarakat mulai 2015 -2016 tergolong cukup tinggi.

Untuk melihat persentase laporan berdasarkan tindak lanjut penyelesaian laporan dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut:

Gambar II : Diagram Klasifikasi Laporan Berdasarkan Proses Tindak Lanjut



Sumber : (Hasil olahan data sekunder OPMU, 2016)

Maka dengan demikian produktivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan berdasarkan tugas Ombudsman yang diatur dalam undang-undang No 37 Tahun 2008 yakni di mulai dari Proses dan tahapan penerimaan laporan, proses klarifikasi, proses investigasi, dan mediasi telah dijalankan oleh Ombudsman perwakilan Maluku Utara khususnya fungsi pengawasan yang dilakukan pada pemerintah Kota Ternate. Hanya saja pada tahapan rekomendasi Ombudsman perwakilan Maluku Utara belum mengeluarkan kepada instansi terlapor terhadap sejumlah kasus yang di dilaporkan oleh masyarakat maupun hasil temuannya sendiri. rekomendasi senantiasa belum dilaksanakan, karena rekomendasi bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas terhadap pelaku maladministrasi bahkan pada tingkat pidana, atas dasar itulah instansi terlapor yang ada di Maluku Utara terutama Kota Ternate lebih mempertimbangkan kemudaratannya dan menjalankan saran perbaikan yang diberikan Ombudsman, sehingga sampai saat ini Ombudsman perwakilan Maluku Utara belum mengeluarkan tahapan rekomendasi.

2. Responsivitas Ombudsman terhadap aduan masyarakat

Responsivitas menurut Dwiyanto (2006) adalah merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, dalam konteks ini responsivitas mengacu pada keselarasan antara program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas menggambarkan kemampuan lembaga dalam menjalankan misi dan tujuannya. Ombudsman perwakilan Maluku Utara sangat merespon dengan baik dan selalu memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan atau tuntutan masyarakat yang merupakan pihak yang merasa dirugikan.

Seiring dengan membenaran pernyataan tersebut maka dapat diperkuat melalui hasil wawancara dengan RS seorang informan pelapor yang menyatakan bahwa:

“Pada saat saya melaporkan sebuah kasus maladministrasi di Ombudsman, kasus dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Sekolah SMP Negeri 2 Kota Ternate terkait penjualan buku pelajaran, dan ketika saya melaporkan kasus itu ke Ombudsman saya tidak dikenakan pungutan biaya atau imbalan apapun itu (Hasil wawancara RS, Juli 2016)”.

Berdasarkan pernyataan dari RS sebagai pihak pelapor, hal ini membuktikan bahwa benar Ombudsman perwakilan Maluku Utara tidak memungut biaya atau imbalan dari masyarakat ketika memasukkan laporannya, hasil temuan peneliti bahwa memang untuk mengenai laporan masyarakat ke Ombudsman itu tidak dikenakan pungutan biaya atau imbalan, dan itu diatur dalam Undang-Undang Ombudsman pasal 23 ayat 2.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam menerima laporan dari masyarakat tidak sama sekali dikenakan biaya atau imbalan, melaporkan pelanggaran baik itu berupa korupsi, kolusi, nepotisme merupakan hak mutlak bagi setiap warga negara atau masyarakat setempat yang merasa dirugikan sejauh laporan atau aduan masyarakat itu berhubungan dengan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat atau Instansi terkait itu adalah tindakan semena-mena dan perilaku tidak etis sebagai penyelenggara negara, terutama penyelenggara negara dibidang pelayanan publik, maka dengan demikian temuan yang seperti itu wajib hukumnya sebagai masyarakat untuk melaporkan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeksekusi atau merekomendasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Ombudsman sebagai lembaga independen yang mengawasi pelayanan publik sangat merespon dengan baik terhadap aduan masyarakat.

Ombudsman merupakan lembaga pengawasan pelayanan publik, setelah menerima laporan atau aduan dari masyarakat, maka Ombudsman juga melakukan pemeriksaan substansi terhadap laporan yang diterima dari masyarakat, apakah laporan tersebut masuk pada kewenangan Ombudsman, atau tidak termasuk dalam kewenangan Ombudsman, karena sebagian juga masyarakat yang memasukkan laporan yang substansinya bukan dalam kewenangan Ombudsman, sehingga pemeriksaan substansi sangat perlu untuk dilakukan. Dengan segala kewenangan yang dimiliki Ombudsman maka akan mengurangi berbagai praktek mal administrasi terhadap aparatur penyelenggara layanan publik. Ini kemudian

sangat relevan dengan pendapat Syamsudin (2009), bahwa dengan wewenang yang relatif luas, kehadiran lembaga Ombudsman akan mengikis berbagai praktik maladministrasi publik (penyalahgunaan kekuasaan, penyimpangan wewenang atau jabatan) oleh oknum aparaturnya instansi pelayanan publik, dengan segala wujud dan modusnya, dari dunia pelayanan publik di Indonesia.

Hasil Observasi menunjukkan Ombudsman sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik yang memiliki posisi mandiri dan independen, membangun jaringan yang luas kepada seluruh *stakeholder* guna memperlancar kinerjanya terutama dalam mencari informasi dan data yang akurat terkait dengan pelaksanaan pelayanan yang bersifat maladministratif. Lembaga-lembaga yang dijadikan mitra dengan Ombudsman terdiri dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), lembaga pemberdayaan masyarakat, tokoh masyarakat, RT/RW, sebab dengan membangun jaringan kepada lembaga tersebut akan memperlancar dan memudahkan koordinasi jika ternyata ada dugaan yang terjadi. Selain itu tentunya juga jaringan harus dibangun dengan instansi-instansi pemerintahan maupun lembaga-lembaga negara independen lainnya yang ada di Maluku Utara khususnya Kota Ternate, selain itu juga Ombudsman juga bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta. Selanjutnya dalam merespon segala permasalahan yang ada dan untuk perbaikan penyelenggara layanan terhadap pencegahan maladministrasi maka Ombudsman senantiasa melakukan kegiatan antara lain: (a) melakukan sosialisasi tentang fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman, sehingga masyarakat dapat berkontribusi aktif dan dapat mendukung eksistensi Ombudsman sebagai lembaga independen pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan publik baik pemerintah maupun swasta. Melakukan diskusi publik, dialog dan seminar terkait eksistensi Ombudsman di Maluku Utara di Kota Ternate, (b) Melakukan sosialisasi tentang prosedur pelayanan publik aparat pemberi layanan kepada penerima layanan, serta swasta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 kepada masyarakat, (c) melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dengan menghadirkan masyarakat sebagai penerima layanan publik dan pemberi layanan publik selaku penyelenggara pelayanan publik, (d) *talk show* melalui media, pemasangan iklan layanan publik di media cetak, media online seperti facebook, twitter, WA, dan lain sebagainya. Penjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh AFA salah seorang asisten yang menyatakan bahwa:

“Memang upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi di Kota Ternate adalah melakukan sosialisasi tentang peran Ombudsman, dialog, diskusi maupun seminar, Focus Group Discussion (FGD), pemasangan iklan, pemanfaatan media cetak dan online, baliho, spanduk dan penyuluhan kepada instansi terkait (Hasil wawancara AFA, Juni 2016) ”

Pencegahan terhadap maladministrasi dengan upaya yang dilakukan Ombudsman merupakan langkah yang paling baik untuk mengurangi tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh instansi baik dari sektor pemerintah maupun sektor swasta, hal ini menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan kesadaran akan hak-hak masyarakat mendapatkan pelayanan yang sepatutnya, kesadaran tugas dan kewajiban sebagai aparatur penyelenggara Negara dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, maka dengan demikian wujud dari pada pelayanan publik yang prima itu bisa tercapai dan hasilnya dapat dirasakan oleh masyarakat, apabila masyarakat diutamakan dan merasakan kepuasan, hal ini kemudian diperkuat oleh Nadzaria (2013) yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan prima itu adalah masyarakat merasa penting, sebagai mitra, pelayanan yang cepat dan tepat serta mengutamakan pelayanan optimal yang menghasilkan kepuasan pelanggan.

3. Responsibilitas Ombudsman terhadap penerimaan dan penyelesaian laporan masyarakat.

Responsibilitas merupakan kemampuan organisasi untuk mengatur sejauhmana pemberian layanan telah berjalan sesuai dengan aturan yang diberlakukan atau prosedur yang telah ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar telah ditetapkan sebagaimana dikatakan oleh Lenvine dalam (Sembering 2012) bahwa responsibilitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan pelaksanaan organisasi publik sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang eksplisit maupun implisit.

Responsibilitas Ombudsman terhadap penyelesaian laporan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian kali ini adalah bagaimana kinerja Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam menyelesaikan aduan atau laporan, baik dari masyarakat atau hasil temuan sendiri berdasarkan inisiatif, itu kemudian berdasarkan prinsip administrasi atau tidak lepas dari mekanisme dan prosedur yang berlaku secara konstitusi atau Undang-Undang Ombudsman

dan dengan kata lain prosedur yang telah disepakati bersama atau biasa disebut dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada lembaga Ombudsman. Suatu hal yang menjadi penentu atas keberhasilan Ombudsman dalam menjalankan fungsinya adalah sejauh mana kesiapan dan kelengkapan administratif untuk mendukung setiap kegiatan Ombudsman dalam hal penerimaan dan penyelesaian laporan.

Gambar III: Alur Penerimaan dan Penyelesaian Laporan/Pengaduan



Sumber : (Data Sekunder OPMU, 2016)

Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa proses penerimaan dan penyelesaian laporan atau pengaduan itu kemudian didasari berdasarkan mekanisme dan prosedur yang ada pada Ombudsman, yakni mulai dari tahapan registrasi, seleksi, pemeriksaan secara substansi, tahapan klarifikasi, mediasi sampai pada pemanggilan dan rekomendasi. Ombudsman Maluku Utara sebagai sebuah lembaga yang berperan menangani persoalan maladministrasi yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik tentunya telah memiliki standar Operasional Prosedur (SOP), sebab setiap laporan yang diterima maupun yang diselesaikan harus mengacu pada SOP yang berlaku secara baku atau bersifat tetap. Standar Operasional Prosedur (SOP) Ombudsman MU selanjutnya menjadi landasan kinerja bagi setiap personil termasuk dalam melakukan tindakan penanganan kasus yang dilaporkan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dipertegas oleh AI asisten Ombudsman yang menyatakan bahwa:

“Setiap laporan yang kami terima maupun yang akan kami selesaikan itu sesuai dengan mekanisme yang tentunya tidak lepas dari pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Ombudsman, dan telah menjadi sandaran baku bagi Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya (Hasil wawancara AI, Juni 2016)”

Dari uraian diatas mempertegas bahwa setiap jenis dan tahapan laporan yang disampaikan oleh pihak pelapor kepada Ombudsman, telah memiliki standar yang baku, sehingga sangat sedikit kemungkinan untuk terjadi kelambatan dan kesalahan dalam penanganan perkara yang dilaporkan ke Ombudsman secara administrasi, kemudian pernyataan yang diperkuat adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa setiap menerima laporan maupun laporan yang diselesaikan Ombudsman memiliki standar baku yang telah ditetapkan. Pernyataan ini sebagaimana diperkuat oleh Komisioner SA yang dalam hasil wawancaranya mengatakan bahwa:

“Di Lembaga Ombudsman ini tentunya juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana kami dalam melakukan kinerja baik dalam penerimaan laporan maupun tahapan penyelesaian laporan pun berdasarkan SOP yang ada, apalagi Ombudsman ini adalah lembaga independen pengawasan pelayanan publik terhadap maladministrasi, sehingga kami harus memberikan contoh teladan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat (Hasil wawancara SA, Juni 2016)”.

Hasil wawancara ini juga kemudian diperkuat oleh Yayan (2013) bahwa standar operasional prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. Ombudsman perwakilan Maluku Utara senantiasa bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki. Hal ini dapat pula dimaknai bahwa setiap lembaga apapun itu baik sektor pemerintah maupun swasta harus memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tetap. Ombudsman perwakilan Maluku Utara sebagai lembaga pengawasan pelayanan publik memiliki ciri khas tersendiri yang dapat membedakan dengan lembaga lain, ciri khas tersendiri yang dimaksud adalah Ombudsman diberi fungsi, tugas dan kewenangan secara konstitusi untuk memberantas yang namanya maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik sampai dengan tahapan rekomendasi, ini yang dapat membedakan sehingga Ombudsman juga dituntut bekerja secara profesional, produktif, responsif dan responsibilitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip administrasi dan prosedur yang berlaku (SOP).

Kesimpulan

Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara (OPMU) dalam mewujudkan pelayanan yang prima di Kota Ternate cukup baik dengan melihat pada produktivitas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasannya, yakni mulai dari (a) kuantitas kerja Ombudsman meliputi:

Proses dan Tahapan Penerimaan Laporan, melakukan Klarifikasi laporan, Infestigasi lapnagan, serta mediasi dan Rekomendasi (b) Kualitas Kerja meliputi: jumlah pengaduan masyarakat Kota Ternate yang masuk pada Ombudsman berjumlah berkisar 81 laporan suda termasuk swasta dan pemerintah, kemudian penyapaian laporan dari masyarakat yang cukup baik karena sesuai dengan mekanisme, melakukan proses tindaklanjuti laporan yang masuk dalam kewenangan Ombudsman, (c) ketetapan waktu dalam penyelesaian laporan masyarakat.

Kinerja Ombudsman Perwakilan Maluku Utara khususnya di Kota Ternate cukup baik dengan melihat pada responsivitas Ombudsman terhadap aduan masyarakat meliputi: (a) sikap Ombudsman dalam merespon keluhan/laporan masyarakat Kota Ternate, (b) ombudsman melakukan perbaikan penyelenggara layanan dengan sosialisasi ke instansi penyelenggara layanan publik baik pemerintah maupun swasta, melakukan *Focus Group Discusiion* (FGD), seminar, *Talk show* melalui media, ombudsman juga bekoordinasi dan kerja sama dengan *Stakeholder* sebagai upaya terhadap pencegahan maladministrasi oleh pemerintah Kota Ternate. Selanjutnya dapat dilihat pada tanggungjawab Ombudsman perwakilan Maluku Utara dalam penerimaan dan penyelesaian laporan dengan meliputi: kelengkapan administrasi/registrasi yang disiapkan ombudsman, kemudian pemeriksaan administrasi dan substantif laporan masyarakat, serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan dan berlaku berlaku pada Ombudsman.

Daftar Pustaka

- Andari, Switi, 2012. *Pelaksanaan Fungsi Lembaga Ombudsman Daerah Yogyakarta dalam Rangka Mewujudkan GoodGovernance, Yogyakarta* :Tesis Megister Hukum UGM.
- Dwiyanto, Agus, 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University.
- Hardiyansyah, 2015. *Komunikasi Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi*, Yogyakarta: Gava Media.
- Mahsyar, A. (2011). Masalah Pelayanan Publik di Indonesia dalam Perspektif Administrasi Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).
- Nadzaria, Yessy, 2013. Pelayanan Prima,Pengertian Pelayanan Prima dan dasar-dasar Pelayanan Prima http://yessy-nadzariafib13.web.unair.ac.id/artikel_detail94777Psikologi%20Prinsip%20Pelayanan%20Prima:%20Pengertian%20Pelayanan%20Prima%20dan%20DasarDasar%20Pelayana n%20Prima.html, diakses pada tanggal 25 Oktober.
- Pattarai, Idris, 2010. *Ombudsman dan Akuntabilitas Publik: Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: CV. Jengki Satria.
- Pramusinto, Agus, 2009: *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media.
- Sembiring, Masna, 2012. *Budaya dan Kinerja Organisasi (Prespektif Organisasi Pemerintah)*, Bandung: Fokusmedia
- Simamora, Hendry, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: STIE YKPN.
- Syamsuddin, Aziz, 2009. *Ombudsman Republik Indonesia: Merengkuh Keluhan Rakyat, Menjewer Sang Pejabat*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Thoha, Mifta, 2003. *Prilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Uar, A. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-PrinsipGoodGovernance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 6(1), 1-11.

Usman, J. (2011). Manajemen Birokrasi Profesional dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 1(2).

Yayan, 2013 . Memahami Konsep dasar Pelayanan Publik [http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-70823komsosbang Memahami%20Konsep%20Dasar%20Pelayanan%20Publik.html](http://yayan-s-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-70823komsosbang_Memahami%20Konsep%20Dasar%20Pelayanan%20Publik.html), diakses pada tanggal 21 Oktober

Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peningkatan Kapasitas Manusia Sebagai Fokus dari *People Centered Development*

Purwowibowo¹, Kris Hendrijanto², Pra Adi Soelistijono³

¹² Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

³Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

poerwowibowo@yahoo.co.id, kris.hendrijanto@gmail.com, praadisoelistijono@ymail.com

Abstract

This article discusses the development paradigm that focuses on *human* or *people centered development*. Many development paradigms have been applied in many developing countries, but the results have not been satisfactory. During this time the various paradigms emphasize economic growth, equity of development, and others, but the distortion of development appears everywhere. For example, development by emphasizes economic-growth was followed by massive environmental damage. In addition, poverty is still a portrait of people in developing countries, although the country is experiencing high economic growth. In realizing a prosperous society free of poverty, a new strategy or development paradigm that emphasizes its human factors are needed. In this case, this paradigm discusses the importance of the human element as the 'core' of development itself. If human beings are capable, have sufficient knowledge, adequate skills by themselves poverty will be reduced. Therefore, this paradigm more implies that is a '*capacity building*' of human beings so that it can become the subject of development and not just as an object of development themselves. *Capacity building* can be achieved through social development that emphasizes elements of education, knowledge, and skills so that they can try or do entrepreneurship and open their own job opportunities. Many cases, various development paradigms that emphasize economic growth are not able to absorb the available labor so that many are unemployed. With the ability of human or people, they have will be able to open their own business and do not depend on the provision of employment from the government. In the end they are able to alleviate self-poverty.

Keyword: *Economic Growth, Capacity Building, Entrepreneurship*

Abstrak

Artikel ini membahas tentang paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada manusia (*people centered development*). Banyak paradigma pembangunan yang telah diterapkan di banyak negara berkembang, tetapi hasilnya belum memuaskan. Selama ini berbagai paradigma menekankan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan lainnya, namun distorsi pembangunan muncul di mana-mana. Sebagai contoh, pembangunan yang menekankan pertumbuhan ternyata diikuti oleh kerusakan lingkungan yang sangat masif. Selain itu, kemiskinan masih menjadi potret masyarakat di negara berkembang, walaupun negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terbebas dari derita kemiskinan, diperlukan strategi baru atau paradigma pembangunan yang menekankan faktor kualitas manusianya. Dalam hal ini, paradigma ini membahas pentingnya unsur manusia sebagai 'inti' dari pembangunan itu sendiri. Jika manusianya mampu, mempunyai pengetahuan cukup, ketrampilan yang memadai dengan sendirinya kemiskinan akan dapat dikurangi. Oleh karena itu, paradigma ini lebih mengisyaratkan '*capacity building*' dari manusia sehingga mampu menjadi subyek pembangunan dan bukan hanya sebagai obyek pembangunan semata. Akhirnya, peningkatan kapasitas manusia dapat dicapai melalui pembangunan sosial yang menekankan unsur

pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga mereka bisa berusaha atau melakukan wirausaha dan membuka peluang kerja sendiri. Banyak kasus, berbagai paradigma pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi tidak mampu menyerap tenaga kerja yang tersedia sehingga banyak sekali yang menganggur. Dengan kemampuan yang dimiliki mereka akan mampu membuka usaha sendiri dan tidak menggantungkan dari penyediaan lapangan kerja dari pemerintah. Pada akhirnya mereka mampu mengentaskan kemiskinan diri sendiri.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Manusia, Wirausaha*

<i>Submit</i>	: 30 Oktober 2017
<i>Review</i>	: 20 Januari 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: hayat.150318@gmail.com

Pendahuluan

Di era industrialisasi merupakan suatu masa yang tidak sejalan atau searah antara pencapaian pembangunan bidang teknologi dan juga bidang ekonomi bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Secara substansial keduanya mencapai keberhasilan dalam membawa pengaruh luar biasa dan sangat luas bagi penduduk di Negara Industri Barat pada umumnya, yang telah memberikan inspirasi mengenai visi global tentang pembangunan satu dunia dan memimpikan suatu kondisi tanpa ada kemiskinan pada masyarakatnya. Industrialisasi itu sendiri merupakan kesuksesan dari suatu model perencanaan pembangunan yang digagas dalam bentuk ‘*Marshall Plan*’ dan mampu mempercepat rekonstruksi kembali Eropa dari kehancuran setelah Perang Dunia Kedua dan mendorong suatu pencapaian tujuan satu dunia yang sejahtera. Visi global tersebut menyebar dengan cepat dan sangat luas sehingga mempengaruhi jutaan orang di berbagai belahan dunia dan bangsa dengan beberapa tahapan pembangunan ekonomi. Rahasia keberhasilan itu, diperkirakan sebagai artikulasi dari penerapan teori pembangunan saat itu dan disertai dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi melalui investasi besar-besaran dalam bidang industrialisasi. (Magid, 2012)

Teori Marshall tersebut memperkirakan bahwa negara yang selalu setia mengejar pertumbuhan ekonomi dengan suatu resep kebijakan ekonomi, secara perlahan dapat mengembangkan sektor ekonomi mikro yang mandiri sehingga dapat mengurangi kemiskinan di negara berkembang (Green, 2006). Dengan model ini pada akhirnya semua warga negara dapat mengakses keuntungan dari berkembangnya kehidupan masyarakat modern yang didukung sektor ekonomi mikro. Strategi pembangunan demikian berasal dari teori yang disebut ‘konsentrasi produksi’ dengan menekankan perhatian pada semua sumber daya dalam mencapai

kemungkinan pertumbuhan ekonomi secara maksimun. Berbagai sarana dan prasarana manajemen dikembangkan dan diperluas untuk membantu menentukan keputusan yang tepat agar pengalokasian sumber daya secara konsisten dapat dilakukan dengan tepat sebagai prioritasnya.

Semua kegiatan didasarkan atas maksud untuk mendapatkan keuntungan bagi semua manusia sehingga strategi dan metodologi tersebut pada awalnya disebut dengan pembangunan berpusat pada produksi (Wong and Fung, 2017). Para penganutnya memperkirakan bahwa penekanan satu pemikiran dalam produksi akan secara otomatis dapat mengubah peningkatan keuntungan bagi semua orang dalam suatu negara. Sedangkan indikator dan kebijakan yang menjadi kriterianya adalah dalam periode tertentu biasanya dapat diukur dengan produksi yang dihasilkan baik secara individu maupun masyarakat.

Selanjutnya, kedua pakar di atas menjelaskan bahwa dalam model ini, dapat disebut dengan investasi untuk pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia. Secara rutin bisa dibenarkan pada tataran dasar – yakni para pekerja mendapatkan hasil yang lebih tinggi dalam bentuk pembayaran gajinya dalam proses produksi yang merupakan alternatif investasi - tidak hanya karena mereka mendapatkan keuntungan secara langsung dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga mendapatkan keuntungan lain secara tidak langsung.

Sesungguhnya, pertumbuhan ekonomi yang berbasis pusat produksi bukan hanya sekedar teori, tetapi merupakan hal yang sangat rumit dalam merealisasikannya. Suatu definisi yang jelas dari tujuan pembangunan dan merupakan suatu resep kebijakan untuk dapat diterapkan. Namun, visi demikian, merupakan suatu keyakinan yang sangat kuat bahwa berdasarkan suatu sistem produksi masal pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui pembentukan pusat produksi sebagai suatu paradigma pembangunan yang diterapkan. Di beberapa negara Eropa, penerapan teori tersebut dengan membentuk pusat produksi mengalami keberhasilan, namun setelah diterapkan di negara berkembang dan berada di luar Eropa banyak mengalami kegagalan. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Bahkan, penerapan paradigma pertumbuhan tidak menghasilkan keuntungan, namun hasilnya adalah ‘tumpukan’ hutang dan kerusakan lingkungan. Atas dasar tersebut kemudian muncul perkembangan paradigma yang disebut dengan ‘teori dependensi’ (Cardoso, F.H. and Falleto, E., 1979).

Teori dependensi atau paradigma ini berkembang di akhir tahun 1960-an, yang melakukan kritik terhadap keterbatasan mengenai teori pertumbuhan neo-klasik. Kritiknya secara substansial muncul dari kalangan ilmuwan atau pakar terutama barisan ekonom juga. Para pakar menyadari bahwa teori merembes ke bawah (*trickle-down effects*) seperti dikemukakan oleh Ambrose et al. (2013), baik secara ekonomi maupun keadilan sosial diperkirakan secara teoritis dan praktis mengalami kegagalan.

Sebaliknya, justru kebalikannya yakni pengaruh merembes ke atas (*trickle-up*) yang tidak pernah dipahami secara tuntas sehingga diperlukan bakat berwirausaha, tersedianya lapangan kerja, dan suatu kebijakan dari bawah ke-atas (Ghatak, 2007). Dengan menguji dan memahami kembali yang terjadi dan dimulai akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an, maka diperlukan suatu keberanian untuk berkomitmen di seluruh dunia bahwa perlu menempatkan secara langsung tiga tantangan pusat pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Pertama*, adalah pengurangan kemiskinan bagi masyarakat di negara berkembang, *kedua* perlindungan kapasitas produksi berdasarkan sumber daya lingkungan dan tidak menimbulkan kerusakan, dan *ketiga* adalah pemberdayaan manusia melalui peningkatan partisipasi di dalam proses pembangunan dengan model *bottom-up*. Komitmen demikian disertai dengan menguji kembali teori dan resep yang digunakan terkait dengan teori pusat produksi. Ketiga tantangan tersebut dirujuk dalam pembangunan yang diprakarsai PBB yakni MDGs (UNO, 2000) dan SDGs (UNO, 2015).

Model pertumbuhan dengan mendatangkan teknologi baru yang efisien diyakini dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi secara substansial terkait dengan penyerapan dan produktivitas tenaga kerja industri perkotaan (Gomulka, 2006). Namun, dalam kenyataannya menurut paradigma dependensi kebijakan tersebut tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru pada tingkat bawah sehingga tidak sepadan antara investasi dengan penciptaan lapangan kerja. Dengan memberikan tekanan pada strategi pertumbuhan ekonomi ‘murni’, sesungguhnya strategi tersebut justru sebaliknya dan menjadi bukti yang didasarkan atas asumsi yang keliru – yakni bahwa negara berkembang dan miskin menjadi lebih miskin karena mereka tidak mempunyai tenaga kerja potensial produktif untuk mendukung penerapan paradigma pertumbuhan.

Dalam hal ini, kenyataannya pada masyarakat luas di negara berkembang bahwa secara sosial budaya masalahnya adalah sikap malas sehingga tidak mampu bekerja secara produktif

secara ekonomi. Sikap demikian berkaitan dengan dorongan yang rendah untuk berprestasi (McClelland, 1961) dari masyarakat di negara berkembang memang rendah. Hal tersebut terkait dengan kebiasaan masyarakat yang melakukan kegiatan secara komunal dan tidak produktif dalam pencapaian pekerjaan masyarakat. Kebiasaan mereka dengan kegiatan yang bersifat subsisten dan terjadinya ‘*involusi pertanian*’ (Geertz, 2016) sehingga tidak banyak menghasilkan suatu karya tertentu secara individual maupu masyarakat.

Dipihak lain, masyarakat kecil di negara berkembang secara subsisten mampu dan mahir membuka lapangan kerja secara sendiri sebagai pedagang kecil. Berbagai pekerjaan informal, seperti tukang rongsokan besi, pengumpul barang bekas, pengangkut air, dan pedagang kecil yang mampu menyediakan kesempatan untuk hidup (Sangeeta and Erwan, 2006). Dengan realitas yang demikian, banyak pakar yang menganalis dan mencurahkan perhatiannya guna mengatasi masalah sosial yang muncul di negara berkembang adalah dengan menambah jumlah pekerjaan yang bisa disediakan untuk mengatasi tambahan dan pertumbuhan tenaga kerja dengan kualitas yang lebih baik. Selain itu, perlu juga mendorong dan memberikan pelatihan sehingga kapasitas masyarakat dapat meningkat

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Pembangunan Berpusat Pada Manusia

Perspektif pembangunan yang menekankan kapasitas pada manusia, terus mendapatkan kritikan tetapi juga banyak yang mengakui sebagai paradigma pembangunan yang menjanjikan. Hal ini terkait dengan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasikan mulai tahun 1974 sampai 2003 oleh Bank Dunia dan Studi Pembangunan Institute Sussex yang mengisyaratkan paradigma baru terkait pertumbuhan ekonomi yakni pertumbuhan dan pemerataan (Sumawinta, 2004)

Model ini strateginya adalah memperluas penggunaan produktivitas sumber daya dalam skala kecil di bidang pertanian dan sektor informal perkotaan sehingga dapat membuka lapangan kerja bagi sebagian besar rumah tangga orang miskin. Model itu direkomendasikan juga dalam strategi pembangunan perdesaan yang tekanannya adalah peningkatan akses bagi petani kecil dan buruh tani yang bekerja di sawahnya sendiri. Mereka diberikan air bersih, kredit usaha, dan berbagai fasilitas lainnya untuk mendukung dan dapat memberikan mereka kesempatan untuk meningkatkan produktivitasnya. Selain itu, di negara-negara Asia telah dikembangkan program

satu desa satu produk sehingga bisa mendorong dan mewadahi pertumbuhan ekonomi perdesaan (Natsuda, et al., 2012).

Sedangkan strategi di wilayah perkotaan ditekankan pada pembukaan kesempatan untuk meningkatkan produktivitas para pekerja subsisten sebagai produsen kecil melalui pemberian seluas-luasnya akses terhadap perubahan kebijakan. Selama ini, kebijakan bersifat diskriminatif kepada orang miskin di perkotaan sehingga mereka tidak mampu bertahan hidup – karena termarginalkan oleh berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah setempat. (Mulyadi, 2017)

Tema lain yang menjang munculnya perspektif pembangunan manusia juga diperkenalkan melalui kebijakan mengenai kebutuhan dasar manusia. Seperti kebutuhan sekolah, kesehatan dengan menganjurkan dan memperluas kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan layanan kesehatan yang mudah bagi sebanyak mungkin masyarakat bawah. Salah satu untuk dapat mengukur hal tersebut adalah Indeks Kualitas Hidup Fisik atau *The Physical of Life Index* yang dikembangkan sebagai alternatif dari Produk Nasional Brutto untuk mencapai tujuan pembangunan yang berbasis pada kapasitas manusia dan kesejahteraan sosial. (Larson and Wilford, 1979)

Dalam hal ini, pengembangan pemikiran sangat penting dengan disertai memperkenalkan reformasi kebutuhan manusia dalam prioritas pembangunan. Dengan berbagai kegiatan yang diprogramkan untuk mendukung pertumbuhan dengan pemerataan, maka prioritas menyediakan kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan sangat penting. Dua hal ini bukan hanya sebagai alternatif melainkan prioritas yang harus ditekankan sebagai realisasi dari strategi pembangunan yang diterapkan. Dengan adanya penyesuaian di dalam kedua prioritas tersebut maka akan dapat diwujudkan perspektif dari paradigma *'people-centered development* atau PCD (Corten, 1987).

Selain itu, dengan mengembangkan tiga pusat tantangan pembangunan seperti dijelaskan di atas maka pengentasan kemiskinan dapat segera terwujud. Pada era dekade lalu, sesungguhnya merupakan waktu yang membawa ketenangan dan keharmonisan karena adanya keberhasilan dalam pengembangan pembangunan yang dilaksanakan. Hal tersebut terkait dengan adanya perkembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk membantu kehidupan manusia. Manusia sudah merasa memerlukan bantuan teknologi dalam kehidupannya sehingga memunculkan kesadarannya tentang keterbatasan manusia dengan segala potensi yang ada.

Meskipun tampak harmonis antara kehidupan manusia dan lingkungannya, tetapi masih ada hal perlu dikembangkan lagi. Oleh karena itu, hal tersebut mendorong para pakar mengembangkan pemikirannya tentang perspektif dari PCD dalam kerangka menyempurnakan paradigma pembangunan berpusat pada produksi dan membuka seluas-luasnya kemungkinan baru untuk menciptakan suatu masyarakat global yang sungguh-sungguh harmonis dalam kehidupan yang sejahtera dengan dukungan kelestarian lingkungan (Giddings, 2002).

Para pakar yang menganut paradigma pembangunan yang berfokus pada manusia, mengemukakan bahwa situasi kemanusiaan pada saat ini dalam perspektif perubahan sosial jangka panjang dan terus berlangsung. Argumen dasarnya adalah mereka mengembangkan suatu masyarakat industri yang didukung oleh masyarakat pertanian. Keduanya adalah suatu masa transisi penting termasuk perubahan besar mengenai keberadaan nilai sosial masyarakat, struktur sosial, dan teknik produksi yang terus berkembang. (Mardzuki, 2014).

Suatu transformasi sosial menuju suatu model masyarakat post-industri yang lebih pantas bagi negara dan bangsa yang lebih ramah di seluruh dunia yang berdasarkan pertanian (*agricultural based*) guna lebih maju, dengan melakukan langkah cepat menuju masyarakat industri. Di dalam era industrialisasi demikian seharusnya lebih banyak menciptakan suatu kondisi yang dapat mendorong dan mendukung terjadinya suatu transformasi (perubahan). Suatu perubahan sosial yang dapat menciptakan kemungkinan pencapaian suatu masyarakat global bagi semua orang yang bisa memberikan kesempatan untuk merealisasikan atau mewujudkan potensi yang dimilikinya.

Salah satu hal yang sangat penting saat ini peran teknologi informasi, sudah menjadi pemain utama dalam kehidupan manusia terutama dalam proses pembelajaran masyarakat, maka yang perlu disadari adalah bahwa masyarakat manusia berada dalam suatu terminologi yang kenyataan hidup di dalam suatu planet bumi yang kecil. Hal ini karena jarak tidak menjadi penghalang manusia berinteraksi dengan orang lain di seluruh muka bumi ini. (Kwatolo, 2010)

Akibat dari realitas ini, dapat digambarkan bahwa suatu dasar alternatif ekonomi, yakni dengan mengeksplorasi reorientasi mengenai nilai-nilai dasar kemanusiaan yang diperlukan untuk hidup harmoni melalui proses alamiah dan membahas alternatif yang bisa dibuat terkait dengan bentuk organisasi (lembaga) yang tepat di dalam mengelola sumber daya yang ada. Persaingan memperebutkan sumber daya alam khususnya semakin meningkat sehingga menimbulkan banyak dinamika kemiskinan (BPS, 2016). Meskipun secara absolut kemiskinan

akan berkurang secara berangsur-angsur melalui proses perubahan sosial yang dilakukan tetapi masih banyak tantangan yang harus dicarikan jalan keluarnya melalui transformasi sosial yang dilakukan. Dalam hal ini, dinamika kemiskinan menjadi penting dan terus diperdebatkan melalui perbaikan sistematis yang terus-menerus dilakukan.

Pendukung perspektif dari munculnya paradigma PCD adalah membahas dan mengkritisi masalah definisi dengan mengedepankan isu-isu berdasarkan pada pilihan rekayasa sosial yang tepat bagi tujuan yang ingin diwujudkan. Dalam hal ini, fokusnya adalah pada teori pembelajaran sosial / *social learning* dan aplikasinya di dalam membuat pembelajaran lebih cepat dan efektif bagi individu dan lembaga sosial. (Maisto, 1999).

Selain hal itu, para pakar juga memperdebatkan pula fungsinya paradigma tersebut dalam perubahan sosial sebagai metodologinya. Sedangkan fokusnya pada perhatiannya terhadap sistem produksi, sistem pendidikan, dan sistem layanan kesehatan. Selain itu, paradigma ini juga harus menitikberatkan pada manusia sebagai subyek pembangunan dan kesejahteraan mereka, dengan penekanan pada pentingnya wilayah dan kepercayaan diri masyarakat.

Hal ini sebagai petunjuk dasar implementasinya, sehingga dapat memberikan pilihan terbaik dalam menggunakan sumber daya lokal di bawah kendali masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri sehingga terjadi '*self help to them selves*' (Oliver, 1996), dari masalah kemiskinan yang dialami.

Kerangka *People Centered Development*

PCD sesungguhnya lebih menekankan pada pemberdayaan manusia melalui peningkatan kapasitasnya, sehingga mampu mengendalikan kehidupan mereka sendiri dengan melakukan pengelolaan terhadap sumber dayanya. Dalam hal ini, mereka mampu menciptakan sumber kehidupan rumah tangganya dan secara langsung dapat mengejar pembangunan nasional yang diprogramkan sebagai suatu upaya mencapai kesejahteraan sebagai wujud dan realisasi dari tujuan akhir PCD. Meskipun suatu langkah baru dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan pemerintah, namun PCD terkadang mendapatkan kritik dari berbagai kalangan dan banyak pakar. (McGinty, 2002).

Kompleksitas isu terkait dengan PCD seringkali dikaitkan dengan lembaga sosial modern saat ini yakni suatu lembaga yang demokratis sampai kepada terwujudnya birokrasi di bidang bisnis, dan lembaga perburuhan yang condong melakukan pembelaan terhadap ketidakberdayaan

masyarakat. Selain itu, ketidakberdayaan manusia seringkali menjadi sasaran kebijakan yang memarjinalkan mereka. Satu hal penting dalam PCD adalah tanggung jawab penuh terhadap keberadaan dan pembelaan orang miskin baik di perkotaan maupun di perdesaan. Oleh karena itu, masyarakat miskin menjadi persoal penting dalam PCD karena mereka merupakan bagian besar masyarakat. Dengan membahas secara holistik sebagai strategi penting dalam pembangunan suatu negara dan bangsa, maka argumen logis perlu dijabarkan untuk mendukung kerangka PCD.

Konsep sentral dari PCD sangatlah sederhana. Konsep tersebut sebagai suatu pendekatan pembangunan yang memperhatikan proses yakni berasal dari inisiatif yang kreatif dari masyarakat atau orang-orang yang menjadi sumber daya utama pembangunan dan materinya. Selain itu, sangatlah penting memperhatikan konsep dari sisi kesejahteraan spiritual sebagai akhir dari proses dan implementasi pembangunan yang diprogramkan. Kalau menengok kegagalan terbesar dari model pembangunan konvensional (Majid, 2012), sebelumnya yang bersifat *sosialis dan kapitalis*, pada dasarnya keduanya mengandalkan pusat produksi dengan sistem produksi masal. Dalam hal ini, asumsi yang dibangun adalah pemenuhan kebutuhan manusia harus didahulukan karena pertambahan atau pertumbuhan penduduk terkait dengan kebutuhan dasar yang diperlukan sebagai sarana terpenuhi kehidupan. Dalam pembangunan konvensional, bagi yang beruntung dan dapat berpartisipasi dalam keseluruhan pembangunan maka akan mendapatkan kehidupan dengan mudah, terutama bagi masyarakat yang terlibat di dalam birokrasi, baik swasta maupun publik. Mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mudah karena mendapatkan akses terhadap sumberdaya dalam rumah tangganya dan tidak terbatas dalam memperoleh kesempatan berbagai bidang untuk menciptakan kreativitas dirinya. Bagi masyarakat yang kurang beruntung dan tidak bisa berpartisipasi secara penuh di dalam proses pembangunan, maka mereka terjerumus dengan kehidupan yang marginal sebagai makhluk manusia dan harkat serta martabatnya bisa turun di tengah kehidupan masyarakat.

Dengan sistem sosialis dan kapitalis dengan mengandalkan pusat produksi dan sistem produksi masal, maka dalam waktu yang sama permintaan akan kebutuhan barang meningkat tajam. Guna mensuplai hal tersebut dapat dilihat bahwa kedua sistem dengan menggunakan berbagai perusahaan-perusahaan yang mendorong banyak pihak dalam masyarakat untuk melakukan pengrusakan (*eksploitasi*) terhadap sumber daya alam sehingga membahayakan ekosistem secara keseluruhan bagi kehidupan di bumi, baik manusia maupun binatang dalam menjaga kelangsungan atau kelestarian hidupnya.

Dengan bayangan demikian kemudian muncul kesadaran tentang dehumanisasi (ketidakmanusiawian), ketidak-adilan, dan lingkungan yang tidak lestari yang mengakibatkan model pembangunan konvensional mulai ditinggalkan dan kemudian memunculkan langkah alternatif. Banyak alternatif dan pilihan program sangat meyakinkan sehingga dapat digunakan secara substansial dan dapat meningkatkan produktivitas hasil untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan jumlah penduduk dunia. Namun, langkah yang diambil harus merupakan langkah yang beriringan dan harmonis dengan kebutuhan dasar yakni, partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, pemerataan dan kelestarian lingkungan hidup (UNO 2015).

Dari pengalaman yang telah lalu disarankan terhadap semua negara dan bangsa yang peduli terhadap kesejahteraan penduduknya untuk segera mencari suatu langkah yang tepat dengan menggunakan eksperimen atau percobaan. Hal ini dapat dijadikan suatu alat perencanaan baru yang mendukung definisi baru dari masalah pembangunan. Dengan usaha demikian diharapkan tercapai reorientasi kelembagaan melalui pengelolaan sumber daya masyarakat secara produktif – khususnya sumber daya tanah dan air – mengembalikan pengendaliannya pada masyarakat lokal yang menggantungkan kehidupan pada lingkungannya. Namun, para pembela terhadap praktik pembangunan konvensional tidak akan ragu menjaga dan mempertahankan model pembangunan tersebut dengan asumsi bahwa semua pembangunan yang dilaksanakan bermaksud untuk menguntungkan dan mensejahterakan semua masyarakatnya.

Dalam kenyataannya, banyak kejadian bahwa secara substansial bahwa pembangunan konvensional yang berfokus pada sistem produksi terkadang mengalami kendala atau distorsi (Midgley, 1995), sehingga pendekatan tersebut banyak mendapatkan kritikan. Alasan lain dari pembela paradigma konvensional adalah bahwa program pembangunan demikian merupakan suatu pendekatan yang efektif pada masanya dan mampu merealisasikan potensi produksi yang ada guna mewujudkan produksi massal bagi umat manusia. Selain itu, pembangunan konvensional dengan basis menciptakan sistem produksi massal terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan berbagai kendala tersebut kemudian pembangunan yang menekankan kapasitas manusia menjadi sangat penting dan secara singkat dapat dikemukakan ciri dari pembangunan konvensional dan pentingnya PCD sebagai berikut:

1. Industrialisasi seringkali mengalahkan bidang pertanian, padahal bidang tersebut merupakan bidang sangat penting karena sebagian besar masyarakat di dunia ini menggantungkan kehidupannya.
2. Wilayah perkotaan memang merupakan komunitas yang lebih kompleks daripada perdesaan, namun jangan dikesampingkan bahwa wilayah perdesaan merupakan tempat sebagian besar penduduk hidup dan mensuplai kebutuhan masyarakat kota.
3. Sistem sosialis dan kapitalis dalam pembangunan konvensional seringkali melewati batas kepemilikan mengenai aset produktif dan komunal, sehingga hasil produksi atau produktivitasnya hanya menguntungkan sedikit orang kota daripada kepentingan banyak orang.
4. Penggunaan modal melebihi batas optimal sumber daya manusia yang digunakan, akibatnya modal mendominasi dan sangat kuat sehingga pada akhirnya memperdaya orang miskin yang tidak memiliki modal.
5. Eksploitasi terhadap sumber daya alam dan lingkungan terjadi sangat masif padahal kegiatan demikian hanya untuk mencapai kekayaan material yang berjangka pendek. Sedangkan untuk memulihkan kembali sumber daya yang ada dan rusak dibutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak. Memulihkan kembali lebih berat daripada melakukan konservasi awal.
6. Model pembangunan konvensional berbagai program saling ketergantungan dalam skala produksi sangat besar dan didasarkan pada kemajuan kebutuhan internasional yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan produksi dalam skala kecil dan lokal dengan melakukan adaptasi serta mengorganisir kepercayaan lokal yang kuat sehingga menghasilkan kondisi ekonomi yang tangguh. Selama ini, pembangunan di banyak negara berkembang menghasilkan kondisi ekonomi yang rapuh dan mudah terpengaruh kekuatan ekonomi kapitalis dunia.
7. Banyak ditemui di dalam produksi massal ternyata menggunakan teknologi yang tidak efisien sehingga memerlukan biaya operasional tinggi, mengotori lingkungan dan tidak adaptif. Namun anggapan demikian dapat pula dimanipulasi secara praktik politik di berbagai sistem sosial.

Dengan berbagai asumsi dan alternatif seperti dijelaskan di atas, kini tiba saatnya melihat dan memahami pemikiran Korten tentang pencetus paradigma PCD. Menurutnya, dominasi dari era industrialisasi yang berpusat pada produksi massal adalah logika yang dibangun bahwa produksi dan tujuan akhirnya merupakan hal yang penting dan pokok, yakni untuk mewujudkan

kesejahteraan masyarakat. Pusat-pusat produksi ada nilai-nilainya tertentu, sistem, dan metode praktis yang digunakan untuk mengeksploitasi dan memanipulasi sumberdaya alam untuk kepentingan produksi. Hal tersebut dimaksudkan agar apa yang dilakukan dapat meningkatkan arus barang yang lebih cepat, standar, dan selalu tersedia dalam jumlah besar sehingga layanan kepada masyarakat dapat diberikan dengan leluasa. Dengan kondisi demikian, maka seluruh konsumen yang memerlukan kebutuhan akan barang tertentu tersedia cukup banyak dan dapat menjamin kepastian terpenuhinya kebutuhan konsumen, meskipun mereka dalam jumlah yang sangat banyak. (Korten, 1987)

Pusat-produksi sebagai basis industrialisasi dapat menciptakan sejumlah besar birokrasi yang mengorganisir masyarakat ke dalam sistem produksi yang efisien – pengendalian terpusat dan fungsional. Selain itu, suatu pasar dan sistem keuangan dapat dikendalikan secara efisien guna kepentingan semua bangsa di seluruh dunia. Pengelolanya dirancang dengan suatu system terkendali terpusat untuk memaksimalkan tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Jika semua yang dirancang dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka dapat menghasilkan dan mendorong perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut akan mengindikasikan bahwa pertumbuhan perekonomian dapat diwujudkan dan suatu perubahan sosial yang secara otomatis terkait dengan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Selanjutnya keberadaan paradigma PCD juga sering menghadapi sejumlah kejadian yang membatasi dalam merealisasikannya. Hal ini sebagai suatu wujud dari suatu program pembangunan semata dan tidak hanya kepada sistem nilai individu dan struktur kelembagaan, melainkan juga keberadaan kerangka pemikiran teoritis dan metodologinya yang dapat mengidentifikasi masalah yang muncul dan mencari solusi yang diberikan, baik terkait dengan masalah individu maupun masalah kelembagaannya. Diterimanya model manajemen krisis menurut Pearson and Judith (1998), adalah suatu upaya untuk mencari solusi model pembangunan ekonomi ortodoks dan klasik yang ditengarai kurang berhasil dalam menjembatani praktik politik-ekonomi dunia yang menguntungkan negara maju. Oleh karena itu, para pakar dan pemimpin di seluruh dunia berusaha mencari formulasi berupa instrumen-instrumen kebijakan yang dapat digunakan, namun, kadangkala beberapa pemikiran yang dikemukakan atau disampaikan digunakan dalam waktu terbatas karena dalam era berikutnya pemikiran tersebut tidak digunakan sama sekali. Padahal upaya yang berkelanjutan tersebut sesungguhnya dapat digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki program berikutnya.

Suatu alternatif paradigma pembangunan sangat dibutuhkan untuk memperbaharui model sebelumnya. Di masa sebelum post-industrialisasi, (Featherstone, 1990). program dan strategi pembangunan menghadapi kondisi dan situasi yang sangat berbeda dari era industrialisasi sesudahnya. Sekarang waktunya menggunakan potensi baru sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan untuk memperkuat kemampuan manusia atau kapasitas manusia dan kesejahteraannya. Hal tersebut terkait langsung dengan pemerataan, dan keberlanjutan yang menurut para pakar dan ahli kebijakan disebut dengan PCD. Namun, untuk dapat mewujudkan kerangka teoris dan praktis dari konsep ini masih menemui hambatan, tidak hanya terkait dengan konsep utama dari PCD tetapi juga metode penerapannya. Sekali lagi di dalam era post-modernisasi dan industrialisasi, semua elemen dan unsur pembangunan harus diarahkan pada suatu paradigma baru yang dilandasi suatu alternatif penting tentang PCD, khususnya berkaitan dengan suatu alternatif pemikiran, nilai, dan rekayasa sosial serta penggunaan teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung PCD tersebut.

Ada banyak alasan dan pemikiran untuk menyakini bahwa paradigma PCD yang berkembang saat ini munculnya terkait dengan perubahan sosial yang terjadi secara global. Perubahan sosial tersebut secara integral dan berlangsung bersama-sama di seluruh masyarakat dunia. Tentu saja, dominasi logis dari paradigma PCD adalah pembangunan sosial (Midley, 1995), yakni suatu pembangunan yang menyeimbangkan ekologi manusia dengan terwujudnya kreativitas seluruh masyarakat. Sedangkan inti atau fokusnya adalah pertumbuhan manusia tentang kapasitasnya atau potensi diri yang dimilikinya. Hal ini dapat ditandai dengan berkembangnya peran individu yang selama ini menjadi obyek pembangunan dan kemudian individu sebagai subyek pembangunan. Dengan kata lain, manusia dan masyarakat menjadi aktor dari program pembangunan yang dilaksanakan sendiri, mengikuti proses perencanaan, mengelola sumber daya alam yang lestari. PCD berarti menempatkan substansi nilai masyarakat lokal sangat penting dan berusaha menyandarkan sifat harmonis atas berbagai perbedaan. Berkembangnya model pembangunan PCD harus didukung oleh suatu sistem organisasi yang kuat dan efisien sehingga menguntungkan masyarakat dan organisasi sosial dan pada akhirnya memunculkan kepercayaan masyarakat.

Barang produksi yang diproduksi secara masal oleh pusat-pusat industri memang merupakan hal yang sangat penting terkait dengan upaya mencapai kesejahteraan manusia dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesungguhnya merupakan inti dari PCD yang

mendasarkan suatu pemikiran bahwa kekayaan sendiri yang dimiliki berasal dari partisipasinya dan bukan dari pemberian atas dasar belas kasihan dan amal tertentu. Di dalam kegiatan produksi yang dilakukan masyarakat akan menentukan kualitas diri mereka sendiri yang dilandasi dengan kerja yang telah dilakukan. Oleh karena itu, pemikiran penting yang membedakan antara pusat produksi dengan PCD adalah pada mulanya manusia dan masyarakat hanya sebagai penyumbang dalam proses sistem produksi dan pada akhirnya justru sekarang sistem produksi tidak bisa berjalan manakala tidak ada partisipasi dari masyarakat sebagai penyokong utama sebagai tenaga kerjanya (Hendry, 2011).

Suatu pemahaman penting dari perbedaan antara pusat manusia (*people centered*) dan pembangunan pada pusat produksi adalah pada esensinya tentang pilihan mengenai rekayasa sosial (Peltier, 2006). Dalam hal ini pilihan dari rekayasa sosial haruslah tepat dan sesuai dengan tujuan program pembangunan yang dicanangkan sebelumnya. Oleh karena itu, sejak dari awal metode perencanaan, bentuk organisasi yang netral, dan lainnya harus mendukung dan condong terhadap maksud dari nilai yang dituju. Rekayasa sosial dari PCD pada produksi, misalnya suatu bentuk sistem komando dalam organisasi, bebas nilai, metode analisis kebijakan yang tepat, metodologi penelitian sosial yang dilandasi atas prinsip ilmu pengetahuan ilmiah. Dengan demikian fungsi dalam sistem produksi dan alat, maka faktor manusia sebagai bagian inherent yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan, baik secara eksternal dan internal dari lingkungan dari penerapan PCD.

Perencanaan dan rekayasa sosial terkait dengan PCD terkadang berlawanan arus dengan paradigma sebelumnya. Hal ini ditunjukkan bahwa PCD ciri umumnya adalah berbentuk organisasi yang peran utamanya adalah individu dalam proses pengambilan keputusan. Model ini sering disebut sebagai aplikasi dari nilai humanisme atau kemanusiaan dalam mempertimbangkan semua kebijakan yang diambil dan ditentukan. Selain itu, model demikian merupakan proses pengembangan pengetahuan yang dilandasi oleh konsep dan metode pembelajaran sosial (*social learning*). Secara khusus sesungguhnya bermula dari perspektif fungsional, yakni didominasi oleh perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang efisien dengan menggunakan model sistem pusat produksi

Suatu tantangan yang terus berkembang dan penting dalam PCD adalah reorientasi dan revitalisasi dari pengembangan birokrasi total pemerintahan untuk menjadi suatu organisasi efisien dan dapat memperkuat program pembangunan yang didalamnya didukung oleh anggota

organisasi dan warga masyarakat. Dengan demikian maka layanan yang diberikan akan lebih maksimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui organisasi yang dapat menjadi wadah PCD maka dapat berfungsi sebagai sarana dan media di dalam mewujudkan peningkatan kapasitas masyarakat, baik secara individual maupun kelompok masyarakat. Menurut Battilana (2006), dengan organisasi sosial lokal dapat pula terbentuk suatu *team work* yang memadai di dalam masyarakat sehingga semua program dalam pembangunan yang fokusnya kapasitas manusia atau masyarakat menjadi sangat kuat. Karena individu dan masyarakat merupakan unsur utama dalam PCD, maka keberhasilan dari pembangunan yang menggunakan paradigma ini akan ditentukan pula oleh keberadaan sumber daya manusia baik secara individual maupun masyarakat tersebut. Dengan kata lain, komunitas masyarakat mempunyai peran penting di dalam kerangka jangka panjang untuk merealisasikan PCD karena individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam kerangka komunitas di dalam memberikan kontribusi keberhasilan pembangunan yang telah direncanakan atau diprogramkan. Sekali lagi, dalam komunitas perlu terus dikembangkan proses pembelajaran sosial, karena hal ini akan dapat mewujudkan kapasitas masyarakat baik tentang pengetahuan dan ketrampilannya yang sangat dibutuhkan dalam PCD.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa tujuan dari membangun kekuatan berbasis pembelajaran sosial dalam paradigma PCD adalah memberikan layanan terbaik kepada seluruh individu dan masyarakat dengan melakukan program dan tindakan guna mempercepat munculnya kreativitas baru, daripada hanya berwujud konflik politik yang sulit dihilangkan. Proses persiapannya berlangsung lama melalui kegiatan kolektif dari kreasi manusia dan belajar sosial yang dimulai dari tidak mempunyai visi organisatoris, tidak ada pemimpin, tidak anggaran, tidak mengenal batas negara, melampaui ideologi tradisional dan kepentingan politik tertentu.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikemukakan di sini bahwa pembangunan ekonomi yang menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menggunakan pusat-pusat produksi memang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, model pembangunan demikian masih menyisakan distorsi, yakni kerusakan lingkungan dan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia, yakni PCD.

Paradigma ini diyakini bahwa untuk mengurangi kemiskinan dan membebaskan penduduk dunia dari kemiskinan dapat dilakukan dengan menekankan pembangunan pada manusianya, yakni suatu pembangunan yang titik beratnya atau fokusnya pada manusianya sendiri. Suatu pembangunan penekanannya pada kapasitas manusia yang terkait dengan pengetahuan dan ketrampilan sehingga individu dan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan semata tetapi menjadi subyek dan perancang serta pelaku pembangunan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Aghion, P. and Patrick Bolton (1997). *A Theory of Economic Studies*. Vol. 64, Issue 2. April.
- Battilana, J. (2006). Agency and Institutions: The Enabling Role of Individuals' Social Positions. *Sage Journals*. Vol. 13. Issue 5. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1350508406067008>
- BPS (2016). *Penghitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2016*.
- Cardoso, F.H. and Falleto, E. (1979). *Dependency and Development in Latin America*. University of California Press. Los Angeles
- Magid, J. (2012). Marshall Plan. *Advances in Historical Studies*. Vol.1, No.1, 1-7 Published Online December 2012 in SciRes/<http://www.SciRP.org/journal/ahs>
- Featherstone, M. (1990). *Global Culture*. Sage Journals. Vol. 7 No. 2 – 3. <http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/026327690007002001?journalCode=tcsa>
- Geertz, C (2016) *Involusi Pertanian – Proses Perubahan Ekologi di Indonesia*. Penerbit: Komunitas Bambu. ISBN: 979-979-9542-38-3.
- Giddings, B. et al. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. *View issue TOC*. Volume 10, Issue 4. November 2002. Pages 187–196.
- Hendry, C. (2011) *Human Resources Management. A Analysis Approach to Employment*. Routledge. Taylor and Francis Groups. London – New York.
- Korten, D, C. (1987). “Third Generation NGO Strategies: A Key to People-Centered Development”. *World Development Pergamon Journals*. Vol. 15 supplement. pp. 145 – 159.
- Kwatolo, Y. (2010). Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Penabur*. No.14/Tahun ke-9/Juni 2010.
- Larson and Wilford (1979). The Physical of Life Index: A Useful Social Indicator?. *World Development*. Vol. 9., Issue 6. 581-584. <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X79900949>
- Majid, M.S.A. (2012). Mengkritisi Teori Pembangunan Ekonomi Konvensional. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 1. No. 1.
- Mardzuki, K. et al. (2014) Intersectoral Linkages in Malaysian Agricultural Industry: Identification of Key and Non Key Sector for Growth Promotion. *Proceeding ITMAR*. Vol. 1, 437-447

- McGinty, S. (2002). Community Capacity Building. *ERIC – Search Education Resources*.<https://eric.ed.gov/?id=ED473884>
- McClelland, D.C. (1961). *The Achieving Society*. Free Press, New York.
- Midgley, J. (1995). *Social Development : The Development Perspective in Social Welfare* (pp. 1- 36) London: Sage Publication.
- Mulyadi, M. (2017). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Masyarakat. *Kajian*. Vol.21. No. 2 hal 221-236.
- Oliver, M. (1996). *Understanding disability: From theory to practice*. American Psychological Association. 750 First Street NE, Washington, DC. <http://dx.doi.org/10.1007/978-1-349-24269-6>
- Pearce, D. W (1983). *The Dictionary of Modern Economic*. MacMillan Press. London.
- Pearson, C. M. And Judith A. Clair (1998). Reframing Crisis Management. *Academic Management Review*. Vol. 23. No. 1.
- Peltier, T. R. (2006). Social Engineering: Concept and Solution. *Journal Information System Security*. Vol 15. Issue. 5.<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1201/1086.1065898X/46353.15.4.20060901/95427.3>
- Sumawinta, S. (2004). *Politik Ekonomi Kerakyatan*. Penerbit: PT Gramedia Utama Pustaka Utama Jakarta.
- United Nation Organization. (2000). *World Development Goals*. United Nation Program. http://www.undp.org/content/undp/en/home/sdgoverview/mdg_goals.html
- United Nation Organization. (2015). *Sustainable Development Goals*. United Nation Program. <https://sustainabledevelopment.un.org/topics/sustainabledevelopmentgoals>
- Wong, C-Y and Fung, H-N (2017). ‘Science-technology-industry correlative indicators for policy targeting on emerging technologies: exploring the core competencies and promising industries of aspirant economies’. *Scientometrics*. Vol. 111:841–867.

Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015

Muhammad Fadli¹, Muh. Kausar Bailusy², Jayadi Nas³, dan Achmad Zulfikar⁴

¹ Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

² Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

³ Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin

⁴ Makassar Development Institute

emfadlee03@gmail.com, bailusyunhas@gmail.com, jayadi.nas01@gmail.com,
apa@kabarfikar.com

Abstract

This research aims to illustrate and analyze the role of local elites in increasing voter participation and impact of local elite involvement in North Toraja District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 by using qualitative descriptive method. Data were obtained by using interviews as well as literature and document studies. The results indicate that local elites play a role in increasing participation in Pilkada in North Toraja according to their capacity. Local political elites socialize candidate pairs, become campaign teams and volunteer teams of candidates for regent / vice bupati candidates. Religious figures become part of the election organizers and socialize the implementation of Pilkada through religious activities. Adat leaders play a role by utilizing the charisma owned socialize information Pilkada to the community, build communication with the candidate pair then support it in the elections. The involvement of local elites in the implementation of North Sulawesi District Head Vice Regent and Vice Regent 2015 has a significant impact on the political participation of the community. Increasing the political participation of the people in Pilkada is not solely because of the involvement of local elites in disseminating information on Regional Head Election. However, there are other motivating factors that enable the community to actively participate, namely (1) to be given material rewards (including piloting gambling activities) and (2) the religious sentiments of one of the candidate pairs on religious leaders in worship activities.

Keyword: *Local Elite, Political Participation, Toraja Utara*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan wawancara serta studi pustaka dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elit lokal berperan dalam peningkatan partisipasi pada Pilkada di Toraja Utara sesuai kapasitasnya. Elit politik lokal mensosialisasikan pasangan calon, menjadi tim kampanye dan tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati. Tokoh agama menjadi bagian dari penyelenggara Pilkada dan mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada melalui kegiatan keagamaan. Tokoh adat berperan dengan memanfaatkan kharisma yang dimiliki mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat, membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu (1) diberikan imbalan materi (termasuk kegiatan judi Pilkada) dan (2) adanya sentimen keagamaan salah satu pasangan calon terhadap tokoh agama (pendeta) dalam kegiatan ibadah.

Kata Kunci : *Elit Lokal, Partisipasi Politik, Toraja Utara*

<i>Submit</i>	: 01 November 2017
<i>Review</i>	: 20 Januari 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: ahmad.harakan@unismuh.ac.id

Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana legal untuk pergantian kekuasaan. Disamping bertujuan untuk pergantian kekuasaan, Pemilu juga bermanfaat sebagai ruang evaluasi atas kepemimpinan lima tahunan oleh masyarakat. Pemilu dalam tataran praksisnya adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan politik tersebut mulai dari presiden, gubernur, bupati/walikota serta wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan.

Selain itu, Pemilu juga merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Salah satu konsepsi modern diajukan oleh Joseph Scumpeter dalam Gustiana A. Kambo dkk. (2016:1) yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Penyelenggaraan Pemilu secara berkala merupakan suatu kebutuhan mutlak sebagai sarana demokrasi yang menjadikan kedaulatan rakyat sebagai sumber kehidupan bernegara. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilu akan memberikan legitimasi, legalitas, dan kredibilitas pemerintahan yang didukung oleh rakyat.

Pilkada langsung merupakan arus balik politik lokal atau sering disebut pergeseran dari sistem *elite vote* ke *popular vote*. Sehingga, dalam realitasnya tidak jarang ditemukan permasalahan disana sini, namun permasalahan yang paling sering terjadi adalah benturan berbagai kepentingan politik sehingga dalam ajang Pilkada terkadang terjadi konflik yang sepertinya sulit terhindarkan. Kedudukan kepala daerah sebelumnya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa melihat aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal kemudian berbalik kepada masyarakat untuk secara langsung memilih pemimpin daerahnya.

Tanggal 9 Desember 2015 yang lalu, rakyat Indonesia kembali disuguhkan sebuah pesta demokrasi. Kali ini untuk pertama kalinya pemerintah melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berlangsung serentak secara nasional di 9 (sembilan) provinsi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 36 (tiga puluh enam) kota untuk memilih walikota dan

wakil walikota, serta 224 (dua ratus dua puluh empat) kabupaten untuk memilih bupati dan wakil bupati, totalnya ada 269 (dua ratus enam puluh sembilan) daerah melakukan Pilkada pada hari tersebut.

Pilkada serentak secara umum relatif berlangsung dengan demokratis, aman dan damai, bahkan Pilkada serentak ini juga mendapat apresiasi positif sejumlah kalangan atau pengamat yang menilai penyelenggaraan Pilkada serentak di Indonesia sebagai sebuah eksperimen demokrasi yang demikian mengagumkan dan patut dicontoh oleh negara-negara lainnya. Namun dari keberhasilan pelaksanaan itu terbersit hal yang mengganggu dan merisaukan, yakni: rendahnya partisipasi pemilih. Data yang disampaikan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Ferry Kurnia Rizkiyansyah (www.tribunnews.com 2015/12/16), tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak secara umum hanya sekitar 64,02%. Lebih rendah daripada target yang dipatok oleh KPU, sekitar 77,5%.

Partisipasi pemilih pada Pilkada Kab. Toraja Utara tahun 2015 di atas rata-rata partisipasi nasional yaitu 73,96% dan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan Pilkada tahun 2010. Meningkatnya partisipasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 bukanlah merupakan hal yang terjadi begitu saja. Selain peran penyelenggara Pilkada dalam melakukan sosialisasi, juga karena dukungan dari pihak lain, yakni peran elit lokal. Keikutsertaan elit lokal mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada sangat strategis dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada.

Keberadaan elit lokal di Kabupaten Toraja Utara tentunya menjadi sosok penting dalam masyarakat karena mereka dapat diposisikan sebagai opinion leader. Dalam masyarakat Toraja opinion leader sendiri mencakup elit politik, tokoh agama, dan tetua adat. Hal tersebut terjadi karena elit lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat secara interpersonal, sehingga bentuk komunikasi yang dilakukan oleh elit lokal tersebut mendapat perhatian khusus oleh masyarakatnya.

Masyarakat adat di Toraja memiliki lingkungan adat yang dapat dibagi tiga yaitu; pertama daerah adat bahagian barat dengan penguasanya ialah *Makdika*, kedua, daerah utara penguasanya adalah *Siambe'/Sindo'*, dan ketiga, daerah tallu lembangna penguasanya adalah *Puang*. Penguasa Adat di tiap daerah lingkungan adat dibantu oleh pemimpin adat yang langsung menangani pelaksana adat sebagaimana mestinya. Pemimpin adat umumnya mempunyai nama yang sama untuk semua lingkungan kolektif dalam sebuah desa. Di wilayah Toraja Utara

dipimpin oleh *Ambe' Tondok* ataupun *Toparengnge'* yaitu pemimpin masyarakat kolektif dalam sebuah desa. Tugasnya pluralistik, baik sebagai penguasa maupun sebagai hakim adat untuk menjaga kestabilan masyarakat desanya.

Ambe' Tondok ataupun *Toparengnge'* sebagai salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat tergolong kedalam elit lokal yang tidak memerintah namun memiliki pengaruh dan peran yang besar di dalam masyarakatnya. Di dalam sebuah lembang atau desa di Kabupaten Toraja Utara, pengaruh *Ambe' Tondok* ataupun *Toparengnge'* sangat diperhitungkan dimana segala sesuatu yang akan dan telah dilakukan di dalam sebuah lembang harus seizin dan sepengetahuan oleh *Ambe' tondok* ataupun *Toparengnge'*. Meskipun di dalam lembang tersebut ada elit yang memimpin yaitu kepala lembang namun keberadaan elit tersebut tidak mampu mengurangi peran *Ambe' tondok*.

Tokoh adat yang pada awalnya sebagai pemuka masyarakat adat dimanfaatkan oleh elit politik untuk meningkatkan perolehan suara dalam Pilkada. hal ini dilakukan dengan cara memodifikasi peran dan kedudukan tokoh adat yang pada dasarnya sebagai orang yang dipercaya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan adat menjadi bagian dari tim sukses pasangan calon.

Pengaruh elit lokal khususnya tokoh agama dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 juga terlihat pada saat kejadian marahnya Wakil Bupati petahana, Frederik Buntang Rombelayuk kepada tokoh agama yang terkadang menggunakan kata *kaboro* dalam ceramah agama. Kata *kaboro* dalam Bahasa Toraja mengandung arti menyayangi atau mengasihi. Sementara kata *kaboro* merupakan tagline dari pasangan calon lawan petahana yaitu Pasangan No. Urut 1, Kalatiku Paembonan dan Yosia Rinto Kadang (KABORO).

Kemarahan Frederik Buntang Rombelayuk selaku wakil bupati petahana terhadap tokoh agama tersebut kemudian memicu rasa ketidaksenangan masyarakat terhadap Pasangan No. Urut 2, Frederik Batti Sorring dan Frederik Buntang Rombelayuk (SOBAT). Sehingga para tokoh agama mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencoblosan Pilkada agar tidak memilih pasangan SOBAT. Himbauan serta ajakan tokoh-tokoh agama ini yang kemudian membuat masyarakat turut berpartisipasi dalam mencoblos calon No. Urut 1 dan diduga merupakan salah satu faktor kekalahan pasangan petaha dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Pernyataan *kaboro* yang selalu disebutkan oleh pendeta dalam kegiatan khutbah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk menggiring opini jemaat untuk memilih calon tertentu.

Akan tetapi tema khutbah tersebut telah dijadwalkan oleh Badan Pekerja Sinode (BPS) satu tahun sebelumnya. Selama satu bulan khutbah dalam kegiatan keagamaan harus menggunakan Bahasa Toraja dan bertepatan dengan khutbah tersebut menggunakan Bahasa Toraja.

Fenomena menarik lainnya dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara adalah adanya kebiasaan masyarakat Toraja bermain judi. Dalam masyarakat Toraja, bermain judi sudah merupakan kebiasaan yang sudah ada sejak lama, mereka bermain judi sabung ayam, judi perkelahian kerbau, dan lain sebagainya. Kebiasaan bermain judi ini juga akhirnya ikut dalam pelaksanaan Pilkada. Sebagian warga Toraja Utara yang memiliki dana, bermain judi Pilkada dengan memasang taruhan untuk kemenangan salah satu pasangan calon. Permainan judi Pilkada ini biasa dilakukan di TPS dengan mencari pemenang di TPS sekitar tempat tinggal warga yang berjudi. Nilai uang yang digunakan untuk berjudi juga bukan merupakan angka yang tidak sedikit karena mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

Selain fenomena tersebut di atas, pelaksanaan Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 juga diwarnai dengan terjadinya politik uang. Hal ini dilakukan oleh elit politik untuk mengajak serta mempengaruhi masyarakat pemilih agar memilih calon tertentu. Meskipun mereka mengetahui larangan dan sanksi berat bagi pelaku politik uang, namun mereka berdalih bahwa yang mereka lakukan bukanlah politik uang, melainkan sebuah *cost politic*. Bagi elit politik di Kabupaten Toraja Utara, *cost politic* merupakan sesuatu hal yang harus dikeluarkan sebagai sebuah konsekuensi dari sebuah pelaksanaan Pilkada.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan analisis partisipasi elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Penelitian ini juga menggambarkan dan menganalisis peran elit lokal dalam meningkatkan partisipasi pemilih serta menggambarkan dan menganalisis dampak keterlibatan elit lokal pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan memperlihatkan dan menggambarkan keterlibatan elit lokal dalam pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Diharapkan juga akan memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang berminat memahami dan mengkaji permasalahan keterlibatan elit lokal kaitannya dengan partisipasi politik. Selain itu diharapkan juga dapat menjadi masukan bagi KPU serta *stakeholders* lainnya untuk terus mengoptimalkan partisipasi politik pada Pemilu dan Pilkada.

Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Toraja Utara Provinsi Sulawesi Selatan, fokus penelitian pada elit lokal Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian diarahkan untuk mengetahui atau mengkaji peran dan dampak keikutsertaan elit lokal dalam kaitannya dengan partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam serta studi pustaka dan dokumen. Teknik pengumpulan data melalui: (1) wawancara mendalam, dalam menentukan informan yang diwawancarai, penulis menggunakan metode *purposive*. Penulis melakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) mengacu pada pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dibuat sebelumnya agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian, meski dalam pelaksanaan wawancara, terdapat pertanyaan lanjutan. Pedoman wawancara berisi beberapa poin konsep kunci pertanyaan yang kemudian pertanyaan tersebut berkembang selama proses wawancara mengikuti alur pembahasan, dan (2) studi pustaka dan dokumen, dilakukan dengan mengumpulkan data yang sumbernya dari buku-buku/literatur yang berkaitan dengan partisipasi politik, karya-karya ilmiah sebelumnya yang mendukung penelitian ini, atau referensi lainnya yang masih berhubungan dengan penelitian yang fokusnya tentang partisipasi politik.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif sehingga serangkaian data dapat dimengerti oleh pembaca. Analisis data kualitatif deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian, seperti persepsi, motivasi, perilaku, atau tindakan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Proses analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Tinjauan Pustaka

a) Teori Elit

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya

menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering di artikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi stratifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elite*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*). (Jayadi Nas, 2007)

Secara struktural ada disebutkan tentang administratur-administratur, pegawai-pegawai pemerintah, teknisi-teknisi, orang-orang profesional, dan para intelektual, tetapi pada akhirnya perbedaan utama yang dapat dibuat adalah antara elit fungsional dan elit politik. Yang dimaksud dengan elit fungsional adalah pemimpin-pemimpin yang baik pada masa lalumaupun masa sekarang mengabdikan diri untuk kelangsungan berfungsinya suatu negara dan masyarakat yang modern, sedangkan elit politik adalah orang-orang (Indonesia) yang terlibat dalam aktivitas politik untuk berbagai tujuan tapi biasanya bertalian dengan sekedar perubahan politik. Kelompok pertama berlainan dengan yang biasa ditafsirkan, menjalankan fungsi sosial yang lebih besar dengan bertindak sebagai pembawa perubahan, sedangkan golongan ke dua lebih mempunyai arti simbolis daripada praktis. (Robert Van Niel, 1984)

Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron). (Jayadi Nas, 2007)

Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. (Jayadi Nas, 2007)

Sejalan dengan Pareto, Gaetano Mosca, seorang teoritis elit lainnya, mengatakan bahwa tiap masyarakat – entah suatu bangsa baru atau sudah lama merdeka, besar atau kecil – selalu membentuk dua kelas utama: yang memimpin (*a class that rules*) dan yang dipimpin (*a class that is ruled*). Mosca (1939), menjelaskan sebagai berikut:

“The first class, always the less numerous, performs all political functions, monopolizes power and enjoys the advantages that power brings, whereas the second, the more numerous class, is directed and controlled by the first.” (Kelas pertama, selalu semakin sedikit, melakukan semua fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati kelebihan yang dimilikinya, sedangkan kelas kedua, semakin banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh yang pertama.)

Mosca menjelaskan hubungan dinamis antara elit dan massa. Dalam pandangannya, para elit berusaha bukan hanya mengangkat dirinya di atas anggota masyarakat lain, tetapi juga mempertahankan statusnya terhadap massa di bawahnya, melalui para “sub-elit” yang terdiri dari kelompok besar dari “seluruh kelompok menengah yang baru, aparatur pemerintahan, manager, administrator, ilmuwan lainnya. Setiap masyarakat di manapun berada akan selalu dipimpin oleh sekelompok kecil individu yang berkuasa atas sejumlah besar anggota masyarakat lainnya, yang disebut massa, untuk tunduk dan mematuhi perintah-perintahnya. Elit lokal yang dimaksud dalam hal ini adalah elit politik, elit agama, dan elit masyarakat. Peran masing-masing elit di daerah sangat ditentukan oleh habitus dan modal yang mereka miliki. (Mosca. 1939)

1) Elit Politik

Elit partai politik di daerah secara umum terbagi dua macam. Pertama, elit partai politik yang berda di parlemen. Kedua, elit partai politik yang non parlemen alias sebatas menjadi pengurus partai. Dua jenis elit partai politik ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan dan efektivitas kerja partai politik. Elit partai politik yang bertugas di parlemen harus menunjukkan kemampuannya dalam menghasilkan produk undang-undang yang pro rakyat. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat dipulihkan kembali apabila peran kadernya diparlemen memukau. Jika kader partai politik di parlemen tidak bermutu maka wibawa partai politik menurun. Sementara elit partai politik non parlemen, yaitu elit partai politik yang tidak duduk di DPR, juga memiliki peran. Peran elit partai politik non parlemen sebenarnya lebih mengarah pada pendidikan politik warga masyarakat. Sebagai elit partai non parlemen, tugas utamanya bukan hanya merekrut dukungan massa

melainkan juga melakukan pendidikan politik dan kaderisasi yang baik. Dengan demikian, partai politik menjadi ruang kaderisasi yang dapat melahirkan intelektual organik. Fungsi ini akan berjalan apabila para elit partai politik non parlemen menjalankan fungsi kaderisasi dengan baik. Selain itu, tugas para elit partai politik di daerah adalah mempengaruhi warga masyarakat daerah untuk meningkatkan partisipasi politiknya. Ini merupakan salah satu tugas yang prinsipil, terlebih dalam kaitannya dengan proses demokrasi di daerah. Hal yang paling pokok bagi elit politik adalah melakukan usaha-usaha rasional persuasif untuk mendorong masyarakat supaya lebih aktif dalam partisipasi politik. Masyarakat harus diyakinkan tentang arti penting dan nilai vital politik. Sehingga dengan pemahaman seperti itu, masyarakat turut berpartisipasi dalam aktivitas politik, termasuk warga masyarakat di daerah. (Abd. Halim, 2014)

2) Elit agama

Elit agama di daerah sangat berperan dalam aktivitas politik lokal. Para elit agama mempunyai modal sosial dan simbolik berupa jamaah, pengetahuan agama dan kharisma, yang membuat dirinya dipatuhi oleh segenap masyarakat di daerah. Seringkali, dalam sebuah Pilkada, para calon bersilaturahmi ke pondok-pondok pesantren atau ke rumah-rumah kiai untuk meminta do'a dan restu politik. Silaturahmi politik yang dilakukan kandidat mengindikasikan bahwa pengaruh tokoh agama terhadap masyarakat sangat besar. (Abd. Halim, 2014) Begitu pula halnya yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, calon bupati ataupun wakil bupati melakukan silaturahmi politik kepada tokoh-tokoh Gereja Toraja yang terkumpul dalam Badan Pekerja Sinode (BPS).

Terjunnya elit agama ke kancah perpolitikan menjadikan agama bercampur-baur dengan kepentingan dan aktivitas politik. Dari sanalah lahir politik beraliran agama. Dalam partai politik yang berbasis agama, peran elit agama tidak bisa diabaikan. Para elit agama yang masuk ke dalam struktur partai politik, yang secara formal berbasis agama, meyakini bahwa politik tidak bisa dipisahkan dari agama secara formal. Politik melekat secara integral dengan agama. Elit-elit agama menolak keras sekularisasi, dalam arti pemisahan agama dan politik. Namun, banyak pula elit agama yang berpendapat lain, yang lebih meyakini agama sebagai dasar etika sosial, di mana secara formal harus terpisah dari politik. Sebab, agama yang integral dengan dunia politik dapat menyebabkan nilai-nilai universal agama dimanipulasi dan dipolitisir untuk kepentingan politik praktis. Keterkaitan

agama dengan politik, menurut kelompok ini, lebih pada peran agama dalam *high politic* (politik tinggi), yang diwujudkan melalui upaya menegakkan nilai-nilai universal agama di dalam masyarakat, seperti nilai keadilan, kemanusiaan dan tegaknya supremasi hukum dalam sistem politik apapun. (Abd. Halim, 2014)

3) Elit Sipil

Elit masyarakat sipil ini mencakup banyak kategori, seperti elit organisasi keagamaan, pemuka adat, tokoh pemuda, aktivis mahasiswa, aktivis buruh, komunitas petani, komunitas nelayan, pengurus komunitas seni dan kebudayaan dan tokoh-tokoh organisasi lainnya. Para elit sosial masyarakat ini adalah mereka yang berada di luar struktur kekuasaan dan tidak memiliki modal kapital maupun religi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Modal yang dimiliki oleh masyarakat sipil tersebut adalah modal sosial dan kepentingan - kepentingan rakyat akar rumput. (Abd. Halim, 2014)

Peran elit sosial dalam masyarakat sangat penting. Mereka lebih dekat dengan masyarakat Pemuka adat, misalnya, jelas merupakan pihak yang membawahi sekaligus panutan bagi masyarakat di bawahnya. Karena itu, peran elit masyarakat untuk program-program pembangunan daerah. Sebuah sistem politik yang sehat, salah satunya ditentukan dengan *civil society* yang sehat, sebagai kekuatan kontrol terhadap kekuasaan. Selain itu, peran elit masyarakat daerah bertugas mengayomi dan menjalin kerukunan antar kelompok-kelompok masyarakat. Elit masyarakat daerah jangan menjadi provokator dan pemicu konflik horizontal di daerah. Elit sosial masyarakat hendaknya tidak menjadi pendukung salah satu partai atau calon pemimpin di daerah melainkan membebaskan warganya memilih. Sebagai pribadi, seorang elit sosial masyarakat berhak mendukung salah satu calon. Namun sebagai tokoh masyarakat, ia haruslah netral. Sebab tugas pokoknya sebagai tokoh masyarakat adalah melindungi warganya yang berbeda-beda dalam afiliasi politik. Elit masyarakat sipil berbeda dengan elit partai politik.

Tugas lain para elit masyarakat di daerah mengawasi persaingan para kandidat agar tetap sportif dan tidak mengarah pada tindakan-tindakan negatif, seperti konflik antar pendukung. Dalam hal ini, elit sosial di daerah hendaknya berperan menjadi penyejuk dan pemersatu warganya yang tengah bersaing agar tetap rukun dan toleran. Sebab dalam pemilihan yang diatur secara demokratis, persaingan politik, baik di kalangan elit politik (calon) maupun di kalangan akar rumput, merupakan suatu kelaziman. (Abd. Halim, 2014)

b) Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. di negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintah. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah. Istilah “partisipasi politik” telah digunakan dalam berbagai pengertian yang berkaitan dengan perilaku, sikap dan persepsi yang merupakan syarat mutlak bagi partisipasi politik. Herbert Mc Closky mengemukakan pendapatnya tentang partisipasi politik sebagai:

The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy (partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum). (Herbert McClosky dalam Miriam Budiarmo, 2015)

Definisi yang dikemukakan McClosky tersebut menitikberatkan pada tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Selain itu, hal terpenting yang perlu diperhatikan dalam partisipasi politik yaitu adanya tindakan sukarela dari warga masyarakat tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain. Sedangkan Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya Partisipasi Politik di Negara Berkembang memaknai partisipasi politik sebagai:

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif). (Miriam Budiarmo, 2015)

Pada perspektif pengertian yang generik Miriam Budiarmo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih

pemimpin negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya. (Miriam Budiarmo, 2015)

Ramlan Surbakti memberikan penjelasan terkait pengertian partisipasi politik di atas yakni: partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta menentukan pimpinan pemerintahan. Partisipasi politik tersebut didefinisikan sebagai keikutsertaan warga negara dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan oleh warga negara biasa. (Ramlan Surbakti, 2010)

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk di jalankan, yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*). Dalam sistem pemerintahan, yang berwenang membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah, akan tetapi masyarakat mempunyai hak untuk mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik, seperti memberikan hak suara atau kegiatan politik lain yang dipandang dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik oleh pemerintah dalam konteks berperan serta dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian partisipasi politik tidak mencakup kegiatan pejabat-pejabat birokrasi, pejabat partai, dan *lobbyist* profesional yang bertindak dalam konteks jabatan yang diembannya.

Sifat Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Di negara-negara yang proses

modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi politik warga negara meningkat. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang diambil pemerintah.

Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang* memaknai partisipasi politik sebagai:

By political participation we mean activity by private citizens designed to influence government decision-making. Participation may be individual or collective, organized or spontaneous, sustained or sporadic, peaceful or violent, legal or illegal, effective or ineffective. (partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh Pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif. (Miriam Budiardjo, 2015)

Banyak kalangan yang tidak memberi batasan sifat partisipasi politik antara partisipasi yang dimobilisasi (*mobilized participation*) dengan partisipasi yang otonom (*autonomous participation*). Bahkan ada beberapa ahli yang menganggap tindakan yang dimobilisasi atau yang dimanipulasikan tidak termasuk partisipasi politik. Myron Wiener, umpamanya, menekankan sifat sukarela dari partisipasi, dengan mengemukakan argumentasi bahwa “menjadi anggota organisasi atau menghadiri rapat-rapat umum atas perintah pemerintah tidak termasuk (partisipasi politik)”. (Samuel P. Huntington & Joan M. Nelson, 1984)

Selain Myron Wiener, beberapa ahli yang lebih menfokuskan partisipasi politik hanya pada kegiatan politik yang sifatnya mandiri, seperti McClosky, Almond, Norman H. Nie dan lainnya, mereka menganggap bahwa partisipasi politik terbatas hanya pada kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan oleh pelaku politik atas inisiatif diri sendiri.

Menurut Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson dalam bukunya *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, partisipasi yang bersifat *mobilized* (dipaksa) juga termasuk ke dalam kajian partisipasi politik. Partisipasi otonom dan mobilisasi hanya dalam aspek prinsip, bukan kenyataan tindakan: intinya baik sukarela ataupun dipaksa, warga negara tetap melakukan partisipasi politik.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai suatu kegiatan dan membedakan partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif merupakan mencakupi semua kegiatan warga negara dengan mengajukan usul tentang kebijakan umum, untuk mengajukan alternatif kebijakan umum yang berbeda dengan kebijakan pemerintah, mengajukan kritik dan saran perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan pemimpin pemerintahan. Pada pihak yang lain bahwa partisipasi pasif antara lain berupa kegiatan dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan dengan demikian saja setiap keputusan pemerintah.

Bermacam-macam partisipasi politik yang terjadi diberbagai negara dan berbagai waktu. Kegiatan politik konvensional adalah bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern. Bentuk non-konvensional seperti petisi, kekerasan dan revolusi. Bentuk-bentuk dan frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kekuasaan politik dan kepuasan atau ketidakpuasan warga negara.

Gabriel A. Almond yang dikutip oleh Mas'ood dan MacAndrews (2008:57) dalam buku Perbandingan Sistem Politik, membedakan partisipasi politik atas dua bentuk, yaitu:

- a. Partisipasi politik konvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang normal dalam demokrasi modern.
- b. Partisipasi politik nonkonvensional yaitu suatu bentuk partisipasi politik yang tidak lazim dilakukan dalam kondisi normal, bahkan dapat berupa kegiatan illegal, penuh kekerasan dan revolusioner.

Adapun rincian dari pandangan Almond tentang dua bentuk partisipasi politik dapat dilihat ada tabel berikut :

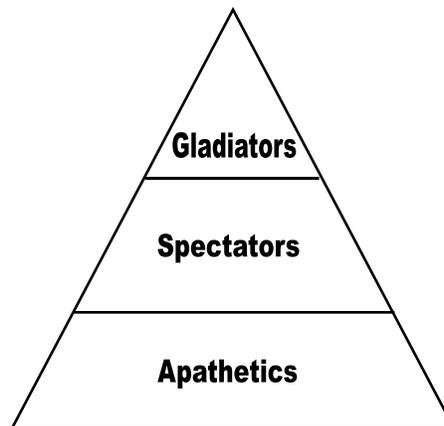
Tabel 1. Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-Konvensional
1. Pemberiansuara 2. Diskusi politik 3. Kegiatan kampanye 4. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan 5. Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif	1. Pengajuanpetisi 2. Berdemonstrasi 3. Konfrontasi 4. Mogok 5. Tindakan kekerasan politik terhadap harta benda (pengeboman, pembakaran) 6. Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, Pembunuhan) 7. Perang grilya dan revolusi

Sumber: Almond dalam Mas' oed dan Mac Andrews (2008)

Pemikiran Almond tersebut dapat dikatakan bahwa partisipasi politik dapat dilihat dalam dua bentuk, yakni partisipasi politik yang bersifat umum, atau partisipasi politik tanpa kekerasan serta partisipasi politik yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam bentuk koersif atau jalur konflik. Menurut L. Milbrath dan M. Goel telah membuat tipologi partisipasi politik atas dasar piramidapartisipasi yang menunjukkan bahwa semakin tinggi intensitas dan derajat keterlibatan aktifitas politik seseorang, maka semakin kecil kuantitas orang yang terlibat didalamnya. (Miriam Budiarjo. 2015)

Bagan 1. Piramida Partisipasi Politik



Sumber: L. Milbrath dan M. Goel (1977) dalam Miriam Budiarjo (2015)

Identitas dan derajat keterlibatan yang tinggi dalam aktifitas politik dikenal sebagai *gladiators* (pemain), yaitu orang-orang yang selalu aktif terlibat dalam proses politik. Adapun

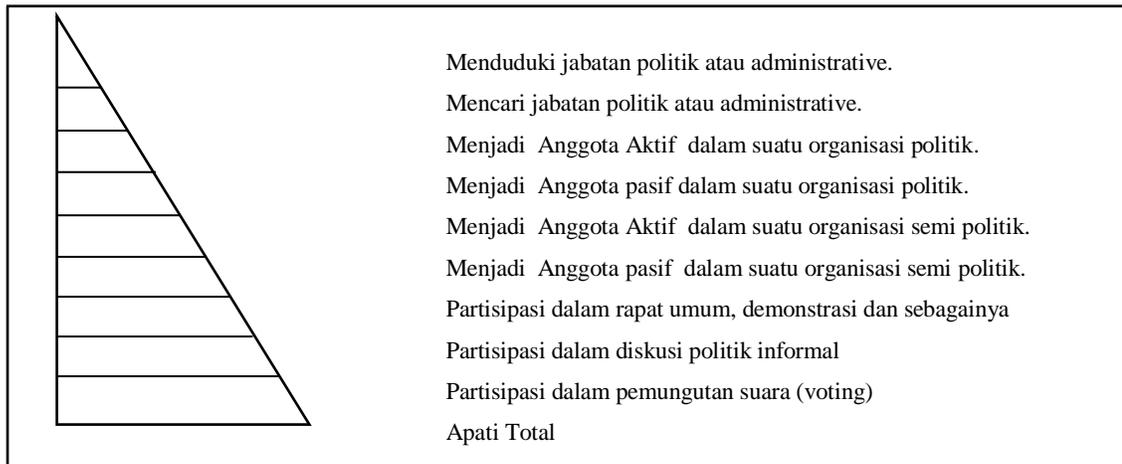
yang masuk dalam kelompok *gladiators* adalah pejabat publik atau calon pejabat publik dan para fungsionaris partai politik atau kelompok kepentingan yang mengurus organisasi secara penuh waktu (*FullTime*).

Lapisan berikutnya setelah lapisan puncak piramida dikenal sebagai *spectators* (penonton), yaitu orang-orang yang setidaknya pernah ikut dalam Pemilu. Mereka yang digolongkan ke dalam kelompok ini adalah mereka yang ikut menghadiri kegiatan politik yang menyita waktu, anggota dalam kelompok kepentingan, pelobi politik, pemilih dalam Pemilu, serta orang yang terlibat dalam diskusi politik dan pemerhati dalam pembangunan politik. Sedangkan lapisan terbawah adalah kelompok yang *apathetics* (apatis), yaitu kelompok orang yang tidak peduli terhadap sesuatu yang berhubungan dengan politik. mereka tidak memberikan sedikitpun terhadap masalah politik.

Partisipasi politik pada negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara tetapi dalam kenyataannya dengan persentase warga negara yang berpartisipasi berbeda dari satu negara dengan negara lain, dengan kata lain tidak semua warga negara ikut dalam proses politik. Fakto-faktor yang diperkirakan dengan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik merupakan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hampir senada dengan Milbrath dan Goel, Michael Rush dan Philip Althoff yang dikutip oleh Damsar dalam Pengantar Sosiologi Politik mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai suatu tipologi politik. Hirarki tertinggi dari partisipasi politik menurut Rush dan Althoff adalah menduduki jabatan politik atau administratif. Sedangkan hierarki yang terendah dari suatu partisipasi politik adalah orang yang apati secara total, yaitu orang yang tidak melakukan aktivitas politik apapun secara total. Semakin tinggi hierarki partisipasi politik maka semakin kecil kuantitas dari keterlibatan orang-orang, seperti yang diperlihatkan oleh bagan hierarki partisipasi politik, dimana garis vertikal segitiga menunjukkan hierarki, sedangkan garis horizontalnya menunjukkan kuantitas dari keterlibatan orang-orang.

Bagan 2. Hierarki Partisipasi Politik



Sumber : Rush dan Althoff (2003) dalam Damsar (2010), hal. 185

Dari gambaran yang telah dituangkan oleh Rush dan Althoff diatas dapat kita asumsikan bahwa semakin tinggi tingkat atau keinginan suatu masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik semakin kecil jumlah masyarakat yang terlibat di dalamnya. Namun sebaliknya semakin kebawah tingkatannya semakin kecil peluang masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik. Apa yang telah dijelaskan Rush dan Althoff dari hirarki tersebut bahwa bentuk partisipasi politik secara umum dan luas serta lebih mudah diamati di lingkungan masyarakat kita ialah pemberian suara pada Pemilu. Partisipasi politik dalam pemberian suatu tersebut ialah dipilih secara langsung anggota DPR/MPR, DPRD, DPD dan presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota oleh masyarakat. Demokrasi rakyat menempati posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang dipilih oleh rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

c) Teori Pilihan Rasional

Sebuah tindakan rasional akan selalu didasarkan pada untung (*benefit*) dan ruginya (*cost*) sebuah pilihan tindakan tersebut diambil. Dalam hal pilihan tindakan untuk mendukung atau memilih sebuah partai politik atau kandidat dalam sebuah Pemilu ataupun Pilkada, masyarakat juga mengkalkulasikan untung dan ruginya keputusan mereka dalam mendukung

partai politik atau kandidat. Manfaat apa yang akan diberikan oleh kandidat, dan apa kerugiannya jika mereka mendukungnya merupakan sesuatu yang menjadi sebuah pertimbangan untuk memilih kandidat dalam Pilkada.

Secara teoritis pendekatan ekonomi atau pilihan rasional diadaptasi dari buku “*An Economic Theory of Democracy*” karangan Anthony Downs. Buku yang dipublikasikan pada tahun 1957 tersebut menjelaskan bahwa pilihan rasional dapat dijelaskan secara ekonomi, yakni dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir resiko. Model pilihan rasional (*Rational Choice Model*) sebagai salah satu pendekatan dalam melihat atau menelusuri pola dukungan masyarakat terhadap kandidat.

Menurut Downs melalui deskripsinya mengenai *homo economicus*, bahwa sang pemilih rasional hanya menuruti kepentingannya sendiri atau kalau pun tidak, akan senantiasa mendahulukan kepentingannya sendiri di atas kepentingan orang lain. Downs menganalogikan partai politik seperti *entrepreneur* dalam mencari keuntungan ekonomi. *Entrepreneur* harus bisa meyakinkan konsumen soal manfaat dari produk yang dijual. Tentunya aspek manfaat tersebut dipahami juga secara rasional oleh konsumen. Sama halnya dengan partai politik atau kandidat dalam sebuah pemerintahan, bagaimana kebijakannya mampu menumbuhkan kepercayaan pemilih soal manfaat yang diperoleh pemilih. Dengan begitu, pemilih akan memilih partai atau kandidat yang memberikan manfaat tersebut. (Anthony Downs dalam KPU Kabupaten Sampang, 2015)

Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa masyarakat pemilih mengetahui apa yang mereka inginkan dan menjadi kebutuhan mereka, mengevaluasi program atau kandidat dan menyesuaikan dengan kepentingan mereka dan kemudian menetapkan pilihan tindakan atau dukungan mereka kepada kandidat. Pilihan sikap masyarakat untuk mendukung atau tidak mendukung kandidat bisa diasumsikan sebagai sebuah tindakan rasional. Dukungan masyarakat terhadap kandidat bisa terbentuk karena hasil evaluasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja dan perilaku kandidat.

Meskipun pemilih dalam teori pilihan rasional tidak memahami secara detail kebijakan pemerintah. Akan tetapi ia dapat mengambil kesimpulan dari proses generalisasi dari kebijakan yang diambil. Sejauh mana kebijakan tersebut menguntungkan secara pribadi dan masyarakat umum. Pemilih dalam teori pilihan rasional juga membandingkan dari sekian alternatif pilihan yang tersedia, lalu mulai memberikan peringkat sebagai acuan dalam

preverensi pilihannya. Pemilih model ini juga memberikan penghargaan kepada partai dan calon yang dirasa menguntungkan dengan cara memilihnya pada Pemilu atau Pilkada. Karenanya, ia harus memiliki informasi memadai untuk menentukan pilihannya. Sekaligus memperkirakan dampak yang akan diperoleh atas pilihannya.

Hasil dan Pembahasan

A. Peran Elit Lokal Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015

1. Elit Politik

Keterlibatan elit politik lokal pada perhelatan Pilkada di Toraja Utara sangat tinggi hal ini disebabkan elit politik yang bersangkutan memaksimalkan sosialisasinya kepada masyarakat. Elit politik tersebut memiliki kekuasaan dan kharisma sehingga mereka dimasukkan dalam tim kampanye. Para elit politik memainkan perannya dalam tim kampanye untuk mendapat dukungan dari pemilih karena mereka menjadi panutan atau acuan masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya. Mereka aktif melakukan kampanye untuk pasangan calon yang didukungnya dengan harapan partisipasi meningkat signifikan dan relevan mendukung mereka dalam kontestasi Pilkada.

Peran elit politik dalam melakukan sosialisasi terhadap calon bupati dan wakil bupati dengan menjadi tim kampanye ataupun menjadi tim relawan yang bekerja setiap saat untuk memenangkan Pilkada. Sehingga elit-elit politik lokal di Toraja Utara dikategorikan sebagai gladiators berdasarkan tipologi partisipasi politik yang dikemukakan oleh Milbrath dan Goel karena memiliki intensitas keterlibatan dalam aktivitas politik yang cukup tinggi. Mereka adalah para pejabat publik atau calon pejabat publik dan para fungsionaris partai politik yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat.

Elit-elit politik sudah pasti memiliki kepentingan langsung dengan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Elit politik ikut aktif berpartisipasi dalam tim kampanye, walaupun tidak, dia akan aktif mensosialisasikan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partainya. Dengan harapan pasangan calon yang diusung akan memenangkan perhelatan lima tahunan tersebut. Sosialisasi yang dilakukan elit politik Toraja Utara dengan ikut sebagai tim kampanye ataupun membentuk tim pemenangan pasangan calon. Kegiatan sosialisasi ataupun

kampanye yang dilakukan oleh elit-elit politik tersebut merupakan bagian dari bentuk partisipasi konvensional yang dikemukakan oleh Almond. Pemilih mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh elit-elit politik lokal dalam menghadapi perhelatan pemilihan bupati dan wakil bupati sehingga dapat dinyatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi politik nyata agar masyarakat dapat berpartisipasi melalui kegiatan tersebut.

Selain itu, elit politik di Toraja Utara juga melakukan cara pragmatis dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Cara-cara pragmatis dilakukan termasuk di dalamnya mempengaruhi pemilih dengan imbalan materi. Kegiatan bagi-bagi uang biasa terjadi menjelang pelaksanaan hari pencoblosan sekitar 3 atau 2 hari sebelumnya.

Menyinggung tentang politik uang yang kerap terjadi dalam Pilkada, elit politik tidak menampik langsung hal tersebut. Akan tetapi mereka menganggap hal tersebut sebagai biaya politik. Biaya politik yang harus dikeluarkan pada saat kontestasi pemilihan di tingkat manapun. Penggunaan istilah biaya politik ini sering digunakan oleh elit-elit politik untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan memberikan imbalan materi kepada pemilih. Biaya politik dilakukan dengan dalih mengganti biaya operasional, pengganti uang bensin, rokok atau makan minum. Hal ini dilakukan oleh elit politik untuk memberikan dorongan atau rangsangan kepada pemilih agar mau ikut serta berpartisipasi dalam Pilkada.

Praktek politik uang yang dilakukan oleh tim pasangan calon yang melibatkan elit politik untuk mempengaruhi pemilih dapat saja meningkatkan partisipasi pemilih. Peningkatan partisipasi tersebut oleh pemilih bukan disebabkan pemahaman tentang pentingnya memilih akan tetapi lebih disebabkan adanya faktor pendorong lain yaitu imbalan materi. Kondisi ini menjadikan pemilih tidak lagi memiliki idealisme dalam menentukan pilihannya karena sudah dibeli oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati. Pola partisipasi pemilih tersebut dapat dikatakan sebagai partisipasi yang bersifat *mobilized* (dimobilisasi) karena orientasi pemilih disebabkan keinginan mendapatkan materi. Hal ini sesuai dengan sifat partisipasi politik yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson. Politik uang merupakan bentuk nyata pilihan rasional ekonomik menurut Downs, karena masyarakat pemilih diperhadapkan pada pilihan pragmatis untung-rugi, dengan

memaksimalkan pemberian uang dari tim pemenang pasangan calon. Mereka juga meminimalkan resiko atau kerugian yang dihadapi dalam memilih baik jarak serta waktu menuju TPS atau dapat dikatakan masyarakat akan memilih berdasarkan imbalan materi yang diberikan. Tetapi penentuan pilihan tersebut ditentukan oleh masyarakat pemilih sesuai hasil evaluasinya terhadap calon dalam Pilkada, apakah sesuai dengan keinginan mereka atau tidak.

Pertaruhan judi Pilkada ini dilakukan hampir secara keseluruhan oleh masyarakat di Toraja Utara. Judi Pilkada cukup signifikan dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015 karena pelaku judi Pilkada mengajak warga masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Akan tetapi bentuk ajakan pelaku judi tersebut merupakan cara-cara yang melanggar regulasi Pilkada. Ini dilakukan dengan memberikan imbalan materi agar masyarakat datang memilih salah satu pasangan calon. Karena pada prinsipnya pelaku judi rela mengeluarkan uang asalkan tidak merugi banyak karena kalah dalam judi Pilkada.

Perbuatan pelaku melalui judi Pilkada tersebut dapat dikatakan masyarakat pemilih pada umumnya sebagai spectators menurut L. Milbrath dan M. Goel. Mereka melakukan kegiatan politik dengan menyita waktu serta memiliki kepentingan dalam Pilkada. Atas dasar kepentingan pelaku judi untuk memenangkan taruhan sehingga berpengaruh juga terhadap perolehan calon yang didukung oleh pelaku judi.

secara spesifik, perjudian ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa saja tapi dilakukan juga dilakukan oleh elit politik di Kabupaten Toraja Utara. Karena perjudian Pilkada ini yang dilakukan oleh elit politik dapat dikategorikan sebagai berikut: secara personal perjudian ini merupakan hobi atau kebiasaan sebagian masyarakat khususnya elit politik, perjudian Pilkada ini dapat memberikan keuntungan materi bagi elit, judi Pilkada dimodifikasi oleh elit politik selain menjadi ajang pertaruhan (judi) juga menjadi ajang memobilisasi masyarakat pemilih agar memberikan suaranya kepada calon tertentu. Dari kategori ini dapat dinyatakan judi Pilkada memberikan dua keuntungan bagi elit politik. pertama keuntungan secara materi (jika memenangkan judi), kedua keuntungan secara politis dengan memobilisasi massa (money politic) untuk memilih calon yang didukungnya.

2. Tokoh Agama

Peranan dan fungsi dari tokoh agama sangat penting dalam mengendalikan ketegangan sosial yang terjadi di masyarakat dalam iklim yang semakin demokrasi ini. Tokoh agama berperan sangat penting dalam menciptakan atau membentuk opini publik atau pendapat umum yang sehat. Oleh karena itu isu-isu yang menyesatkan dan kabar bohong yang tersebar bisa ditangkal masyarakat bila selalu berada dibawah bimbingan tokoh agama.

Pendidikan serta bimbingan dari tokoh agama seharusnya dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dengan baik pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015. Tokoh agama sebagai panutan dapat memberikan teladan kepada masyarakat agar tercipta suasana yang sejuk selama masa tahapan Pilkada. Melakukan kerja sama dengan penyelenggara Pilkada mengajak masyarakat untuk tidak menjadi apatis melainkan ikut aktif dalam memilih pemimpin Kabupaten Toraja Utara lima tahun kedepannya. Sebagian dari elit-elit lokal itu ada yang menjadi penyelenggara Pilkada dengan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Keikutsertaan tokoh-tokoh agama sebagai penyelenggara Pilkada sangat membantu KPU dalam sosialisasi kepada masyarakat, karena selain sebagai elit lokal yang menjadi panutan masyarakat juga sebagai penyelenggara Pilkada. Dua peran yang dimiliki oleh elit lokal tersebut membuat mereka dengan mudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2015.

3. Tokoh Adat

Kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat sebagai panutan dalam masyarakat dimanfaatkan oleh penyelenggara Pilkada untuk membantu melakukan sosialisasi. Sosialisasi mengenai Pilkada sering dilakukan oleh tokoh adat dalam lingkungannya pada kegiatan-kegiatan masyarakat karena pelaksanaan kegiatan tersebut selalu melibatkan tokoh adat.

Selain dimanfaatkan penyelenggara Pilkada untuk sosialisasi, peranan tokoh adat dalam percaturan politik di Kabupaten Toraja Utara memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat menjadi satu kekuatan politik yang dapat mempengaruhi pendapat masyarakat. Karena memiliki kemampuan mempengaruhi masyarakat, maka tokoh adat diperebutkan oleh pasangan calon untuk direkrut dijadikan sebagai tim kampanye atau paling tidak

sebagai tim relawan. Mereka dapat memberikan pengaruh kepada warga masyarakat yang berada dalam wilayah adat yang dikuasainya.

Walaupun menjadi rebutan oleh pasangan calon dalam mencari dukungan masyarakat, kemampuan tokoh adat mempengaruhi pilihan politik masyarakat tidak sama dengan tokoh agama. Perbedaan pengaruh keduanya terletak pada jangkauan wilayah dari keduanya. Tokoh agama tidak terbatas oleh sekat-sekat wilayah adat tertentu, mereka dapat masuk ke semua tempat peribadatan di seluruh Gereja Toraja. Sedangkan tokoh adat hanya dapat memberikan pengaruhnya kepada masyarakat yang ada di wilayah adatnya, dia tidak dapat memasuki wilayah tokoh adat lainnya. Kendati demikian, tokoh adat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, terlebih lagi pada tataran keluarga yang terhimpun dalam satu Tongkonan. Mereka mengkampanyekan pasangan calon dukungan mereka kepada masyarakat di lingkungannya terlebih kepada keluarganya.

Erat hubungan antara elit politik dengan tokoh adat yang ada di Kabupaten Toraja Utara terkait pelaksanaan Pilkada. Keduanya saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya bahwa sebagian tokoh adat ikut menjadi tim kampanye ataupun tim relawan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati. Mereka menjadi bagian dari pendukung setelah sebelumnya melakukan lobi-lobi politik dengan salah satu pasangan untuk mengkomodir kepentingannya beserta masyarakatnya. Sementara itu elit politik mengakomodir kepentingan tokoh adat agar mendapat dukungan sehingga dapat memenangkan pertarungan Pilkada.

B. Dampak Keterlibatan Elit Lokal Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015

Keterlibatan elit lokal diharapkan membawa dampak positif terhadap suasana aman dan damai di Toraja Utara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Selain itu diharapkan pula dengan keterlibatan elit lokal tersebut akan meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Sehingga akan menghasilkan bupati dan wakil bupati yang berkualitas dan memiliki legitimasi di masyarakat.

Peningkatan angka partisipasi pemilih pada Pilkada Toraja Utara tidak dapat dilepaskan dari peran serta elit lokal yang ada di Toraja Utara. Walaupun bukan hanya peran dari elit lokal yang menjadi satu-satunya yang mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

Pilkada. Akan tetapi peran mereka sangat efektif dengan melakukan sosialisasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada sehingga meningkatkan partisipasi pemilih. Dengan banyaknya dan meluasnya pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada maka akan meningkatkan partisipasi pemilih.

Pengaruh yang ditimbulkan oleh keterlibatan elit lokal dalam Pilkada dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari budaya masyarakat Toraja yang menghormati tokoh-tokoh agama serta tokoh adat mereka. dapat dikatakan bahwa kenaikan tingkat partisipasi politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 merupakan dampak dari keterlibatan elit lokal dalam Pilkada. Elit lokal dapat mempengaruhi masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam Pilkada. Tetapi keterlibatan elit lokal dalam Pilkada bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Kemampuan elit lokal dalam mendorong partisipasi politik warga masyarakat pada Pilkada tidak lepas dari kekuasaan yang dimiliki oleh elit tersebut. Lingkaran kekuasaan merepresentasikan sekelompok kecil individu (elit) yang memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan sekelompok besar individu (massa) dengan sedikit kekuasaan atau bahkan mungkin tidak memiliki kekuasaan. Pola hubungan antara elit dengan massa menunjukkan bahwa massa bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap perintah dari elit karena pada diri elit tersebut melekat kekuasaan. Ini juga terjadi pada Pilkada Kabupaten Toraja Utara tahun 2015, dimana elit lokal dapat mengajak dan mengarahkan masyarakat pemilih untuk hadir berpartisipasi dalam Pilkada dan memilih salah satu kandidat sesuai dengan keinginan para elit lokal. Tindakan tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Gaetano Mosca.

mengisyaratkan bahwa peran elit dalam Pilkada Toraja Utara bukanlah satu-satunya faktor yang meningkatkan partisipasi politik pada Pilkada Toraja Utara tahun 2015. Selain keterlibatan langsung elit lokal ada juga faktor lain yang dapat menjadi pendorong peningkatan partisipasi pemilih, yaitu imbalan materi. Padahal praktek politik uang merupakan suatu pelanggaran aturan Pilkada yang sanksinya cukup berat.

Partisipasi politik yang dilakukan sebagian pemilih di Toraja Utara dengan dasar imbalan materi bukanlah merupakan sifat partisipasi yang otonom dari seorang pemilih. Seorang yang menggunakan hak suaranya dalam Pilkada atas dasar karena menerima imbalan materi dapat digolongkan dalam sifat partisipasi yang dimobilisasi. Hal ini dikarenakan

pemilih dalam menyalurkan hak pilihnya bukan merupakan kesadaran dari dirinya dan tidak sesuai dengan hati nurani pemilih itu sendiri, akan tetapi pilihannya akan didasarkan pada pilihan dari yang memberikan imbalan materi. Tindakan pemilih yang menggunakan hak pilihnya karena adanya dorongan imbalan materi tersebut sesuai dengan pandangan Huntington dan Nelson tentang sifat partisipasi politik.

Pemilih di Toraja Utara yang menerima imbalan materi tidak semuanya dapat digolongkan ke dalam pemilih yang dimobilisasi akan tetapi dapat digolongkan dalam sifat partisipasi politik yang otonom. Karena sebagian pemilih telah menentukan pilihan sesuai dengan hati nuraninya tetapi tetap diberikan uang oleh pasangan calon dan timnya. Mereka yang menerima uang tersebut beranggapan bahwa mereka tidak pernah meminta, akan tetapi tim pasangan calon yang datang sendiri memberikan uangnya. Akhirnya memunculkan istilah dalam masyarakat “ambil uangnya, jangan pilih calonnya”. Hal ini sesuai dengan perspektif pilihan rasional Downs, karena pemilih rasional hanya mendahulukan kepentingan (tendensi) pribadinya. Pemilih mengambil uang dari tim pemenang pasangan calon untuk dirinya sendiri sedangkan pilihan politik tetap kembali kepada hasil evaluasi dan menetapkan calon pilihan pemilih itu sendiri.

Partisipasi politik baik yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasi, berkaitan dengan adanya hubungan yang dinamis diantara keduanya. Sehingga antara partisipasi yang otonom dan partisipasi yang dimobilisasi sulit dibedakan dalam realitas tindakan akan tetapi perbedaannya hanya pada prinsipnya. Perilaku pemilih yang awalnya merupakan partisipasi yang dimobilisasi dapat saja berubah menjadi partisipasi yang otonom dan sebaliknya partisipasi yang awalnya merupakan otonom dapat menjadi dimobilisasi. Secara umum masyarakat di Toraja Utara dalam mengikuti/berpartisipasi di event Pilkada hampir sebagian besar dimobilisasi. Hal menarik lainnya yang berkaitan dengan peningkatan partisipasi pemilih di Toraja Utara selain faktor elit dalam mengarahkan masyarakat pemilih, politik uang dalam bentuk bantuan materi pada faktanya terjadinya pelaksanaan judi Pilkada dalam mempengaruhi pemilih di masing-masing TPS. Dan terakhir yang berkaitan dengan isu penghinaan salah satu tokoh agama dalam kegiatan keagamaan.

Terjadinya pelaksanaan judi Pilkada secara langsung dapat dikatakan mempengaruhi peningkatan partisipasi masyarakat pemilih di Toraja Utara berdasar dua alasan; *pertama* judi Pilkada ini hampir secara umum terjadi di Toraja Utara baik skup taruhannya yang nilainya

kecil hingga besar. *Kedua* elit politik memanfaatkan judi Pilkada menjadi arena mobilisasi masyarakat pemilih dalam memilih calon yang dipertaruhkannya.

Kesimpulan

Elit politik memainkan peran dalam Pilkada tidak lepas dari kepentingan untuk mensosialisasikan pasangan calon yang diusung oleh partai politiknya. Mereka masuk ke dalam tim kampanye ataupun tim relawan pasangan calon bupati/wakil bupati dan mengkampanyekannya ke masyarakat dengan berbagai macam cara termasuk menggunakan politik uang.

Tokoh agama melalui BPS berperan dalam Pilkada dengan melakukan pendampingan dan bimbingan kepada masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan hati nuraninya. Tokoh agama dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan bersama dengan penyelenggara Pilkada. Selain melakukan bimbingan kepada masyarakat, BPS juga menghimbau kepada pasangan calon agar berkompetisi dengan cara-cara yang jujur. Ada juga sebagian tokoh agama ikut terlibat dalam tim pasangan calon dan melakukan kampanye.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam masyarakat Toraja Utara oleh karena itu penyelenggara Pilkada memanfaatkan kharisma yang dimiliki oleh tokoh adat untuk mensosialisasikan informasi Pilkada kepada masyarakat. Selain itu ada juga tokoh adat yang membangun komunikasi dengan pasangan calon kemudian mendukungnya dalam Pilkada. Tokoh adat menyerukan kepada masyarakat yang ada di lingkungan adatnya agar memilih pasangan calon yang telah membuat komitmen dengan tokoh adat tersebut.

Keterlibatan elit lokal dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara tahun 2015 memiliki dampak yang cukup baik terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat. Hal ini dikarenakan peran elit lokal dan penyelenggara Pilkada dalam mensosialisasikan informasi tentang Pilkada. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat pada Pilkada bukan semata-mata karena keterlibatan elit lokal dalam mensosialisasikan informasi Pilkada. Akan tetapi terdapat faktor pendorong lain sehingga masyarakat aktif berpartisipasi, yaitu dengan diberikan imbalan materi.

Daftar Pustaka

- Bottomere, T. B. *Elite dan Masyarakat*. Jakarta: Akbar Tanjung Institute, 2006.
- Budiarjo, Miriam (ed.). *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Duverger, Maurice. *Sosiologi Politik (terjemahan)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- Faulks, Keith. *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*. Bandung; Penerbit Nusa Media, 2014.
- Halim, Dr. H. Abd. M.A. 2014. *Politik Lokal Pola, Aktor & Alur Dramatikalnya (Perspektif Teori Powercube, Modal dan Pangung)*, Yogyakarta; Lembaga Pengkajian Pembangunan Bangsa (LP2B).
- Huntington, Samuel P. dan Joan M. Nelson. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Sangkala Pulsar, 1984.
- Maksudi, Beddy Iriawan. *Sistem Politik Indonesia Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- Mas'ood, Mohtar dan Colin MacAnreus. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mosca, Gaetano. *The Rulling Class*. London: Hill Book Company, 1939.
- Nas, Jayadi. *Konflik Elite di Sulawesi Selatan Analisis Pemerintahan dan Politik*. Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, 2007.
- Niel, Robert Van. *Munculnya Elite Modern di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Varma, S. P. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Armunto, Andi Ali. *Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik Studi Tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepercayaan Masyarakat Terhadap Partai Politik*. Tesis. Jogjakarta: Universitas Gadjah Mada, 2006.

Kambo, Gustiana A. dkk. *Optimalisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Laporan. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016.

KPU Kab. Sampang. *Laporan Hasil Penelitian Analisa Perilaku Pemilih dalam Memilih Calon atau Peserta Pemilu di Kabupaten Sampang (Studi Kasus Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014)*. Laporan. Sampang: KPU Kabupaten Sampang, 2015.

Pendidikan Konservasi Perspektif Warisan Budaya Untuk Membangun *History For Life*

Khoirul Huda, Yoga Ardian Feriandi

Universitas PGRI Madiun

khoirulhuda@unipma.ac.id, yogaardianferiandi@unipma.ac.id

Abstract

This article aims to conduct studies to build character history for life in the younger generation through conservation education of cultural heritage perspective combined with the syntax of context-learn inquiry. The method used in this article is the library research method in which the object studied in this study comes from books, notes, journals, transcripts, research reports and other documents that can be found and related to conservative learning, character, history, etc. the techniques used to collect data with documentation, the researchers identify the discourse of books, papers or articles, magazines, journals, newspapers, web (internet), or other information related to conservative learning, character, history or directly related to the title of writing. after the data collected then the data is analyzed to obtain conclusions, forms in descriptive analysis techniques. The conclusion of this research indicates the importance to immediately apply conservation education in changing mindset and behavior in order to form character history for life especially for the young generation. Given the life of the era of globalization requires a young generation of the future that has three characteristics of knowledge or knowledge society, cultured or cultured society, and civilized or civilized society.

Keyword: *Conservative Education; Culture; History For Life*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian guna membangun karakter *history for life* pada generasi muda melalui pendidikan konservasi perspektif warisan budaya yang dipadukan dengan *sintaks context-learn inkuiri*. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode *library research* yang mana objek yang di kaji pada penelitian ini berasal dari buku, catatan, Jurnal, transkrip, laporan penelitian dan dokumen lain yang dapat ditemukan dan terkait dengan pembelajaran konservatif, karakter, sejarah, dll. teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni dengan dokumentasi, pada teknik tersebut peneliti mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran konservatif, karakter, sejarah ataupun yang berkaitan secara langsung dengan judul penulisan. setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya untuk segera menerapkan pendidikan konservasi dalam mengubah mindset dan perilaku agar terbentuk karakter *history for life* khususnya bagi generasi muda. Mengingat kehidupan era globalisasi membutuhkan generasi muda masa depan yang memiliki tiga karakteristik yaitu berilmu atau *knowledge society*, *berbudaya* atau *cultured society*, dan beradab atau *civilized society*.

Kata Kunci : *Pendidikan; Konservasi; Budaya; History for life*

<i>Submited</i>	: 01 November 2017
<i>Review</i>	: 20 Februari 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Penguatan budaya pada masa sekarang dianggap salah satu bagian penting untuk pemberdayaan keberlangsungan bangsa masa mendatang. Pemberdayaan yang dalam hal ini merupakan bentuk perlawanan terhadap pengikisan sendi-sendi normatif manusia berbangsa untuk menyelamatkan kekhasan yang dimilikinya dan ingin menunjukkan eksistensi melalui kebermaknaan sejarahnya. Sebagai manusia yang menghargai bangsa, maka jati diri yang dimiliki harus dikuatkan dan diberdayakan. Tidak hanya untuk membedakan tetapi lebih pada menawarkan dan menjaga serta memposisikan nilai-nilai identitas untuk mencapai konstruksi eksistensial. Konstruksi eksistensial dibentuk dari memahami, lalu mentransformasikan simbol identitas atas dasar dominasi diskursus budaya dan historis yang menyertainya. Telaah identitas dalam pusaran dominasi budaya memposisikan manusia dalam tiga kerangka, yaitu (1). tinjauan *reproduksi culture*, (2). *embed culture*, (3). *elimination culture* dan (4). *reforma culture*. *Reproduksi culture* dimaknai manusia dalam dinamika sosial baik antar individu bersama kelompoknya melahirkan kebiasaan yang membudaya sehingga dalam konteks ini tercipta hasil silang pembaharuan kebudayaan yang menyertai manusianya. Contoh *reproduksi culture* dapat dilihat dari adanya penduduk pendatang yang memiliki budaya berbeda dari masyarakat setempat yang kemudian memaksa pendatang untuk melakukan adaptasi agar dirinya diterima oleh lingkungan setempat, dan pada akhirnya menciptakan campuran budaya dan menjadi budaya baru misalnya perpaduan budaya daerah dengan Negara Asia/Eropa.

Pada *embed culture* posisi budaya yang lama mulai mendapat pengaruh dari budaya baru dan pada akhirnya mengeser budaya lama yang lebih dulu ada. Contohnya adanya perpaduan motif pakaian asli daerah di Indonesia (batik atau pakaian daerah) dengan pola, motif dan model pakaian yang sedang berkembang saat. Hal itu terjadi karena perkembangan jaman dan era globalisasi yang tidak terbendungkan, sehingga memaksa suatu budaya melekatkan (*embed*) budaya lain pada dirinya.

Dalam konteks *elimination culture*, dominasi manusia pada budaya yang telah lama mengikatnya, sedikit demi sedikit mulai luntur. Lunturnya budaya lama tersebut menyebabkan hilangkan simbol-simbol kebudayaan yang selama ini menjadi kekuatannya. Hal tersebut disebabkan meningkatnya perkembangan budaya kontemporer dan dipercaya sebagai pembaharuan yang memiliki nilai positif bagi manusia. Misalnya, ketika zaman dahulu

masyarakat bangga untuk mengenakan busana daerah, maka seiring perkembangan zaman akan hilang dengan sendirinya sesuai dengan dan mengikuti mode saat ini.

Hegemoni budaya populer seperti infiltrasi budaya Korea mengubah mindset manusia dan memaknai peranan penting dalam perubahan yang lebih modern dengan meninggalkan bekas keaslian warisan budaya yang ada. Anak muda lebih tertarik dengan bahasa dan pakaian Korea daripada pakaian khas Indonesia dan bahasa daerah yang ada di Indonesia. Pada akhirnya perubahan tersebut akan mengalami reformasi-culture bahwa budaya akan mengalami proses transformasi menjadi baru dan menghilangkan sama sekali kebiasaan (kebudayaan) yang selama ini melekatnya yang sebenarnya mengenai makna, hakikat dan nilai dapat berperan penting dalam kehidupan manusia. Dominasi masyarakat akan terbangun konstruksi identitas kekinian dengan sendi-sendi tatanan sosial-budaya yang dicoba untuk dirubahnya. Dengan demikian, upaya internalisasi terhadap nilai-nilai warisan bangsa perlu diperkuat dengan menempatkan peran campuran budaya secara seimbang baik ranah lokal dan nasional. Merujuk pada warisan budaya, maka pengenalan tersebut untuk mencapai proses internalisasi perlu direncanakan. Tujuannya tak lain adalah agar pergerakan alur dari proses perjalanan warisan budaya tidak tertutup oleh kebijakan dinamika globalisasi yang dapat mempengaruhi, mengabaikan dan bahkan mendiskriminasi budaya setempat yang cenderung terkerdilkan. Pernyataan tersebut sebenarnya menjadi cerminan kita bahwa pengenalan kepada generasi sekarang harus segera mungkin diterapkan. Keterlambatan terhadap prosesnya menyebabkan determinasi budaya akan terhambat. Hakikat pemaknaan nilai-nilai warisan budaya sebenarnya memberikan kontribusi secara nurani untuk selalu menjaga kesadaran dan pengetahuan dan sebagai bentuk mempertahankan dalam menghadapi hegemoni budaya asing agar tidak dihilangkan dan diabaikan. Dengan demikian, persoalan disintegritas budaya tersebut yang merupakan bentuk dari tantangan dan permasalahan yang dihadapi setiap masyarakat bangsa terutama generasi saat ini. Dampak yang dirasakan adalah muncul sikap mereka yang sering memosisikan hasil kebudayaan yang telah diciptakan masa lalu dan justru berpotensi membentuk pengabaian atau kebencian terhadap warisan bangsa. Permasalahannya adalah bagaimana kurangnya menelaah dan membiasakan untuk memahami proses pembentukan kebangsaan melalui bukti-bukti peninggalan hasil budayanya. Kompensasi yang diterimanya adalah menjadikan generasi muda Indonesia ditempatkan dalam posisi *underdog mentality*. Konsep tersebut dimaknai bahwa menurunnya ruh kecintaan pada bangsa dan meleburnya reformasi resistensi budaya baru atau

bahkan peniadaan tampilan hasil cipta dan karya kolektivitas bangsanya. Keadaan tersebut menandakan bahwa memperlihatkan ketidak eksisan hasil kebudayaan lokal yang sengaja dilebur dalam budaya populer sehingga terjadi suatu siklus marginalisasi budaya. Keterpurukan tersebut sebagai akibat kurangnya kepekaan dan memaknai terhadap paradigma mata rantai suatu nilai-nilai pembentukan bangsa. Adanya sikap pembiaran dan terperdaya dalam dinamika budaya kekinian. Dalam situasi tertentu, secara laten tahap pemberdayaan warisan budaya belum berjalan dengan baik. Apabila Pewarisan budaya berjalan dengan baik, maka memiliki peran dalam pembangunan identitas. Hal ini disebabkan warisan budaya berhubungan dengan internalisasi identitas. Bilamana cakupan internalisasi tercapai, bukan tidak mungkin kekuatan nasionalisme dan rasa cinta kepada bangsanya bisa diwujudkan. Proses pewarisan tersebut bisa disalurkan pada beberapa kegiatan mendidik berbudaya terutama dalam pembelajaran di keluarga sebagai bagian dari pendidikan informal maupun sekolah yang mengikatkan pada lembaga formal. Mengingat tabiat pendidikan adalah terapan kegiatan pengajaran dengan karakteristiknya untuk memberikan pencerahan informasi serta pengubahan perilaku manusia yang menjadi subyek pendidikan. (Ridhayanti 2017)

Dengan demikian, diperlukan suatu formulasi dalam merancang strategi untuk membangun proses internalisasi serapan national-culture terhadap etnosentrisme globalisasi dalam perspektif integritas subordinasi budaya dalam pangsa multikultural. Salah satunya adalah pendidikan konservasi beridentitas warisan budaya sebagai penyemai dini integritas nasionalisme. Pendidikan konservasi tersebut merupakan salah satu bentuk gagasan dalam mengurangi kondisi disinternalisasi pelekatan kebanggaan pada bangsa dalam kekhasan nasionalismenya. Pada konteks tersebut, pendidikan konservasi yang terpenting adalah menekankan pada upaya penguatan melestarikan warisan budaya dari peradaban bangsa. Heterogenitas peradaban bangsa Indonesia perlu direposisiikan dalam segi pemaknaan, simbolisasi, nilai filosofi yang terangkum dalam proses edukasi secara berkelanjutan. Hal itu karena banyak hal dari indonesia yang dapat di gali nilai-nilainya, untuk dijadikan pedoman dalam bertingkah laku (Feriandi, 2017).

Tujuannya tak lain adalah agar dapat membangun karakter *history for life* pada generasi muda yang ditandai oleh (1). Mempunyai rasa memiliki dan kebanggaan terhadap dinamika perjalanan sejarah bangsa, (2). Peduli terhadap apa yang dimiliki suatu bangsa terutama kecintaan pada kebudayaan lokal sebagai penekan ekspansi budaya luar, (3). Menguatkan

kembali sisi nasionalisme dan cinta tanah air terhadap bangsanya meskipun perkembangan globalisasi terus berekspansi, dan (4). Mampu memberikan pelekatan pengetahuan terhadap pembentukan, perkembangan dan dinamika kebangsaan. Pada dimensi lain, bentuk pendidikan konservasi dalam perspektif warisan budaya merupakan suatu bentuk gerakan pendidikan melalui pembelajaran bermakna yang memfungsikan eksistensi reposisi hasil kebudayaan yang saat ini berada dalam posisi marginal guna mewujudkan kebangkitan bangsa secara berkelanjutan melalui dimensi kultural.

Metode

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif, dengan metode deskriptif-kritis. Metode deskriptif kritis merupakan metode yang lebih menekankan pada kekuatan analisis data yang diperoleh melalui berbagai sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan mengandalkan teori-teori yang ada untuk diinterpretasikan secara jelas dan mendalam untuk menghasilkan tesis dan anti tesis (Abdurrahman & Soerjono, 1999).

Selain itu pada penelitian ini juga merujuk pada model studi kepustakaan (*library research*) yang mana objek yang di kaji pada penelitian ini berasal dari buku, catatan, Jurnal, transkrip, laporan penelitian dan dokumen lain yang dapat ditemukan dan terkait dengan pembelajaran konservatif, karakter, sejarah, dll.

Pada penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni dengan dokumentasi, pada teknik tersebut peneliti mengidentifikasi wacana dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, koran, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran konservatif, karakter, sejarah ataupun yang berkaitan secara langsung dengan judul penulisan, setelah data terkumpul maka data tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk-bentuk dalam teknik analisis deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan Konservasi: Makna Dan Konstelasinya

Pendidikan konservasi dalam kajian ini tidak akan lepas dari konteks tujuan pelestarian, penyelamatan, pemberdayaan serta pendayagunaan. Makna tersebut secara normatif mengantarkan kepada peserta didik agar memiliki pemahaman pengetahuan dalam

memberdayakan dan menghormati kekhasan untuk eksistensi dan mereposikannya pada perkembangan dinamika globalisasi sekarang ini. Keterlibatan pendidikan konservasi untuk eksistensi resposisi tersebut karena terdapat konsep pencerahan pengetahuan sehingga muncul kesadaran betapa pentingnya mempertahankan kekhasan yang dimiliki oleh manusia. Mengingat pendidikan merupakan salah satu sarana bentuk pemeliharaan pemahaman pengetahuan dalam mempengaruhi perubahan perilakunya sebagai akibat dari adanya dorongan dari ketercerahan kognitifnya. Keterkaitan dengan pendidikan konservasi ialah bagaimana ketercerahan wawasan berpikir tersebut memberikan dampak dalam perubahan perilaku dalam menempatkan kembali (mereposisi) subjek yang selama ini belum difungsikan dengan baik yang hakikatnya memiliki nilai dan makna untuk pengembangan keilmuan masa depan. Maka pendidikan konservasi dalam penerapannya mempunyai arti penting dalam mendorong generasi muda untuk menyelamatkan keberagaman nilai-nilai kekhasan dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya pengertian pendidikan konservasi adalah pendidikan yang mengharapkan adanya perubahan tingkah laku, sikap dan cara berpikir terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan ekosistemnya (Djoko Setiono, 2011. 2).

Sebagaimana yang dimaksud dalam pernyataan tersebut adalah dalam sisi normatif titik tekan dalam pendidikan konservasi terlihat pada pengelolaan perubahan perilaku disertai dengan segala dinamika perkembangan paradigma berpikir yang diwujudkan dalam bentuk sikap untuk dapat memelihara aspek sumber daya alam yang ada dan dimanfaatkan oleh manusia untuk bersanding di kehidupan manusia itu sendiri. Sumber daya alam yang dalam konteks ini sebagai bagian dari pembentuk karakter kepribadian manusia khususnya generasi muda dengan menawarkan pada pengetahuan masa lampau yang memang harus dipelihara dan dilestarikan.

Pada konsep yang lain menjelaskan bahwa pendidikan konservasi merupakan salah satu pembelajaran secara eksperimental dengan memfokuskan pada beberapa hal, yaitu: (1). Untuk mendukung kepedulian dan perhatian terhadap ekonomi, sosial dan keterkaitannya terhadap lingkungan ekologis baik di perkotaan maupun di pedesaan, (2). Untuk menyediakan setiap orang dengan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan, nilai, perilaku, komitmen, kemampuan yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan (3). Untuk menciptakan pola sikap hidup yang positif baik dari tingkat individu, kelompok dan masyarakat secara keseluruhan terhadap lingkungannya (Alif Sulfiyanto, 2012 dalam <http://www.tngunungmerapi.org/urgensi-pendidikan-konservasi/>)

Pernyataan tersebut menitikberatkan pada bagaimana manusia memiliki rasa kepedulian dalam menciptakan bentuk sikap hidup dalam perilakunya sehari-hari yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pemeliharaan lingkungan sekitar. Perilaku tersebut juga disertai kemampuan dan pengetahuannya sehingga nilai-nilai subyek konservasinya dapat ditindaklanjuti hingga dimasa depan. Pendidikan yang menekankan pada perubahan perilaku cenderung dimanfaatkan dalam pembelajaran sehingga tercapai wujud peran aktif keterlibatan langsung secara kontekstual tatkala berada dalam tempat atau lingkungan tertentu. Selanjutnya, gerakan konservasi mempunyai misi untuk melakukan pembangunan sumberdaya alam dan berpandangan bahwa manusia menguasai alam dan alam melayani kebutuhan manusia serta dinilai sebagai komoditas untuk keuntungan manusia (Didik Suharjito, 2008).

Sebagaimana dalam pernyataan tersebut bahwa konservasi dipandang sebagai penguatan antara satu sama lain dan saling membutuhkan untuk pembangunan kelangsungan sumber daya alam yang dalam hal ini menempatkan simbolisasi normatif keanekaragaman budaya untuk terus menerus dikuatkan nilai filosofinya dalam memacu generasi saat ini agar tidak punah. Senada dengan, Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo menjelaskan bahwa

Konservasi atau pelestarian adalah salah satu jenis pendekatan dalam perencanaan kota atau penataan ruang yang dalam Perda kota Surabaya No 5 Tahun 2005 menyatakan bahwa pelestarian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya bertujuan untuk mempertahankan keaslian bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya, melindungi dan memelihara bangunan atau lingkungan cagar budaya dari kerusakan serta memanfaatkan bangunan atau lingkungan cagar budaya demi kepentingan pembangunan. (Volare Amanda Wirastari dan Rimadewi Suprihardjo, 2012: 63)

Pendapat yang lain dikemukakan Isdaryono bahwa konsep konservasi merupakan proses panjang baik dalam dimensi konservasi material dan non material kemudian membuat sarana prasarana sampai ke masalah aksesibilitas ke lokasi dan mengarah pada pemanfaatan secara ekonomis untuk menunjang nilai-nilai historisnya maupun nilai-nilai emosionalnya yang terkandung dalam warisan tersebut. Dengan demikian dari beberapa telaah pendapat yang dikemukakan tersebut, maka pendidikan konservasi merupakan suatu tindakan seseorang dalam proses pembelajaran dan mendidik untuk memberikan pengubahan perilaku dan paradigma berpikirnya melalui perubahan tindakan dan sikapnya terhadap lingkungan sekitar yang memiliki unsur-unsur nilai kehidupan dengan harapan terdapat keterjagaan keanekaragaman ekosistem kebudayaannya agar tidak punah, dengan mendorong perilaku kepeduliannya untuk

pembangunan kekhasan yang dimiliki masyarakat. (Rikka Agustriana Sinulingga dan Igusti Angung Oka Mahagangga, 2016)

Warisan Budaya Untuk Pendidikan Konservasi

Secara makna, warisan budaya merupakan wujud peninggalan hasil pemikiran dan karya manusia masa lampau yang secara normatif mengandung nilai-nilai filosofis sebagai bentuk simbolisme dalam pusaran kehidupan masyarakat dahulu kala. Pemaknaan warisan budaya tidak hanya memahami dan mengerti bentuknya secara kronologis, melainkan ada upaya untuk melestarikan, menjaga serta memosisikannya ke dalam penguatan internalisasi di dalam kepribadian setiap manusia khususnya generasi sekarang yang bertujuan agar tindakan punahnya dapat dihindari. Menjaga warisan budaya diperlukan demi kelangsungan kebangsaan yang menekankan pada 1). Wawasan budaya dapat menyadarkan betapa pentingnya mempelajari kronologis sejarah bangsa dari sisi kemegahan budaya, 2). Sebenarnya dalam dimensi masa lampau, bangsa ini memiliki kemegahan yang besar disertai bukti hasil kebudayaannya, dan 3). Hasil karya masa lampau tidak hanya dipandang dalam bentuk visualisasi, melainkan memaknai nilai yang terkandung didalamnya untuk dimanfaatkan dalam proses internalisasi di era sekarang sehingga penguatan sisi pengakuan bisa dirasakan baik secara lokal, nasional dan global. Pengakuan tersebut merupakan sebuah bentuk penghormatan yang bersifat etno-kultural dalam menjaga eksistensi. Warisan budaya secara kategorinya dapat dibagi menjadi dua yaitu warisan budaya bersifat benda dan warisan budaya tak benda. Warisan tak benda dapat dimaknai:

Sebagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan (serta instrumen, objek, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya) yang diakui oleh masyarakat, kelompok dan bahkan dalam beberapa kasus, individu sebagai bagian dari warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ditransmisikan dari generasi ke generasi dan diciptakan berulang-ulang secara terus-menerus oleh komunitas dan kelompok dalam rangka merespons (kebutuhan di) lingkungan mereka, interaksi mereka dengan alam sekitar dan sejarah mereka. Warisan budaya tak benda tersebut memfasilitasi masyarakat dalam rangka membangun identitas dan eksistensi serta mempromosikan penghormatan atas keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia (Hairus Salim, 2014).

Pada prinsipnya warisan tak benda tersebut merupakan hasil kebudayaan dari dimensi pengetahuan dan merupakan bentuk ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat sebagai ungkapan identitas yang menyertainya. Laurajane Smith menjelaskan mengenai karakteristik kriteria sebuah warisan adalah materialitas (wujud kebendaan), usia, estetika, dan/atau sifat monumentalnya yang dipandu dengan penelusuran historis yang luas sehingga dapat diakui sebagai warisan

budaya. Warisan budaya bersifat benda adalah wujud materialnya seperti bangunan, situs dan benda cagar budaya yang telah berada pada suatu kawasan dan merupakan aset hasil kebudayaan masa lampau. Keberadaan warisan budaya tersebut penting untuk diperkenalkan ke generasi sekarang guna sebagai bentuk penghormatan, kesadaran dan pengakuan agar warisannya tidak kalah dengan budaya masa kini. (dalam Hairus Salim, 2014)

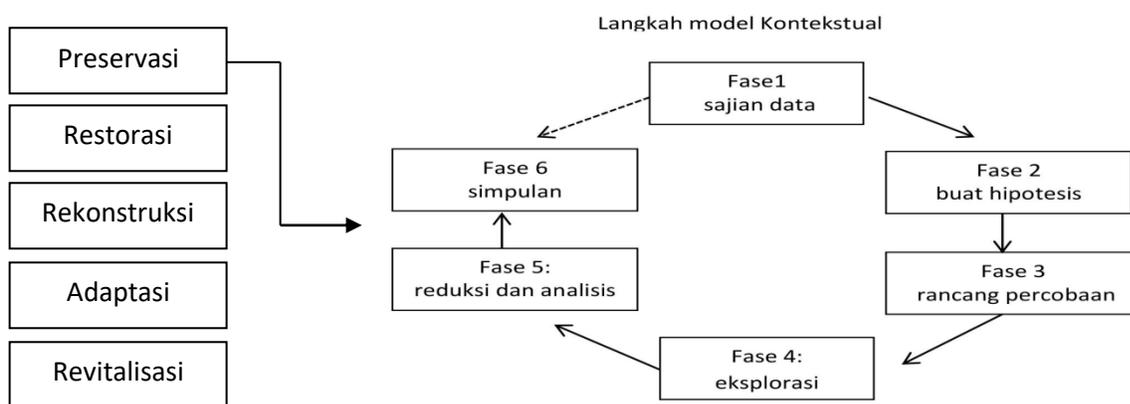
Model Pendidikan Konservasi Warisan Budaya

Untuk implementasi pendidikan konservasi diperlukan suatu model dan strategi yang di dalam tahapannya konsisten terhadap upaya membangun pembelajaran yang hierarki pada pendekatan konservatif. Suatu model yang efektif apabila ketercapaian indikator yang termaktub pada ranah tujuan tersebut dapat terlaksana. Pendidik dalam merancang model pendidikan konservasi perlu memikirkan kembali inti pokok capaian pembelajaran yang diinginkan secara spesifik sehingga pada pelaksanaannya memainkan peran penting terutama menyangkut internalisasi nilai-nilai budaya yang beridentitas. Sebagaimana model yang digunakan oleh pendidik pada umumnya, pada prinsipnya model pendidikan konservasi menitikbertakan pada perpaduan teori dengan praktik atau yang biasa disebut dengan pendekatan kontekstual. Pada dasarnya model pembelajaran konservasi merupakan perpaduan dengan pengajaran kontekstual dengnan pendekatan inquiri yang menekankan pada pengalaman belajar, yang kemudian dari pengalaman tersebut peserta didik mampu memaknai kandungan nilai-nilai filosofi dan perkembangannya secara konstruktif. Pada prinsipnya cakupan model mencakup beberapa kegiatan, seperti yang dikemukakan Marquis-Kyle & Walker dan Alvares (Maman Rachman, 2006) yang meliputi ranah:

- a. Preservasi adalah tindakan mempertahankan dengan upaya melestarikan sesuai keadaan asli tanpa ada perubahan dan mencegah penghancuran.
- b. Restorasi adalah pengembalian yang telah dibangun disuatu tempat ke kondisi semula yang diketahui dengan menghilangkan atau membangun kembali tambahan atau kompen semula tanpa menggunakan bahan baru,
- c. Rekonstruksi adalah membangun kembali suatu tempat sesuai dengan kondisi semula dan diperbedakan dengan menggunakan bahan baru atau lama,
- d. Adaptasi adalah merubah suatu tempat dengan penggunaan yang dapat digabungkan.

e. Revitalisasi adalah mereposisikan untuk memanfaatkan kembali bangunan yang sudah ada tanpa mengubah dan mengurangi kekhasan yang dimiliki obyek tersebut.

Penjelasan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang bisa dipergunakan dalam upaya pendidikan konservasi secara berkelanjutan. Desain pembelajaran tersebut cukup komprehensif karena setiap ranah memiliki tujuan masing-masing. Pada intinya adalah kerangka tersebut sebenarnya dapat dikombinasi dengan pendekatan inquiry terutama dalam aspek pembelajaran langsung (kontekstual). Sebagaimana yang tercermin dalam pembelajaran kontekstual yang menekankan pada upaya membangun kesadaran terhadap keberadaan warisan budaya agar etno-budaya terbangun. Pada konteks yang lebih luas sebenarnya dapat dilakukan peleburan dengan upaya menggabungkan ke beberapa model pembelajaran yang mempunyai kekhasan kontekstual tetapi desainnya masih tetap mengandung dan mencerminkan kegiatan konservatif. Pengembangan model pembelajaran yang telah digabungkan tampak pada gambar berikut ini:



Gambar 1. Model pembelajaran konservasi modifikasi sintaks contex-learn inkuiri Sumber: Trianto (2007)

Gambar tersebut merupakan keterterapan pembelajaran konservasi dengan langkah-langkah yang ditawarkan dalam model kontekstual inkuiri yang mana peserta didik berusaha mencari dan mengeksplorasi beberapa warisan budaya dengan arahan dari pendidik. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam tulisan ini desain kegiatan yang akan dijadikan bahan rujukan model masih dalam tahap **preservasi** dimana peserta didik diperkenalkan untuk mengetahui warisan budaya dengan berbagai sumber yang ada baik primer maupun sekunder dan tanpa merubah atau

meneliti secara mendalam obyek yang dikaji dan hanya sampai bagian pengamatan dan masih dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Integrasi Pendidikan Konservasi pada mata pelajaran

Terkait dengan langkah-langkah konstetual seperti di jelaskan di atas maka pada tahapan preobservasi akan meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik (Budyono & Feriandi, 2017). Pertama kognitif, mengisi otak, mengajarnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat memfungsikan akalnya menjadi kecerdasan intelegensi. Pada tahap ini peserta didik diberikan pengetahuan mengenai pengenalan/disajikan data-data mengenai berbagai macam budaya-budaya atau tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Pengenalan tersebut akan lebih optimal jika bisa dilakukan dengan menggunakan strategi pembelajaran “Belajar melalui pengalaman” yakni dengan mengunjungi cagar-cagar budaya secara langsung yang ada di Indonesia. Jika hal tersebut bisa dilakukan maka peserta didik akan mendapatkan pengalaman nyata/*Factual* yang dapat membantunya untuk memahami nilai-nilai sejarah yang ada, Selain itu dengan mengajak siswa belajar melalui pengalaman maka siswa akan mulai belajar dari hal-hal yang bersifat *factual* menuju konseptual.

Namun tentu saja mengunjungi cagar budaya secara langsung tidak dapat dilakukan setiap saat, karena keterbatasan dana, waktu dll. Sehingga dalam hal ini pendidik juga dapat mengenalkan sumber-sumber budaya melalui cara lain, misalnya dengan vidio, foto, maupun miniatur dari tempat-tempat bersejarah. Dengan demikian maka pendidik akan lebih menghemat waktu biaya dan tenaga untuk dapat mengenalkan cagar budaya yang ada di Indonesia. Pada tahap ini pendidik menjadi fasilitator bagi peserta didik untuk membandingkan cagar-cagar budaya dalam kondisi ideal yang didapat dari berbagai sumber dan kondisi nyatanya saat ini, diharapkan dengan membandingkannya ranah dari afektif siswa menjadi tergugah untuk dapat membantu melestarikan atau membuat hipotesis dan merancang tindakan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Ranah yang Kedua yakni afektif, yang berkenaan dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Pada ranah ini pendidik berusaha mempengaruhi sisi afektif siswa. Setelah mendapat sajian data dan mengetahui berbagai macam permasalahan yang

ada maka langkah yang selanjutnya adalah, peserta didik mulai mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut dan membuat hipotesisnya. Untuk itu pendidik dapat menggunakan metode dilema moral yang dihubungkan dengan kebudayaan dan kondisi sejarah yang ada di Indonesia. Dilema moral merupakan suatu kondisi dimana seseorang diperhadapkan dengan dua atau lebih kondisi yang tidak mengenakkan, tetapi peserta didik diharuskan harus memilih salah satu kondisi tersebut. Pada hal ini peserta didik diberikan pandangan mengenai suatu dilema yang dihadapi pemerintah untuk merawat dan memelihara tempat-tempat bersejarah. Harapannya adalah peserta didik selain mampu mencari solusi bagi permasalahan yang telah di identifikasinya, dan tidak sewenang-wenang menyalahkan pihak lain. Dengan metode dilema moral ini ranah afektif peserta didik akan terpengaruhi, sehingga benar-benar berkomitmen untuk melakukan perbaikan atau mengatasi permasalahan yang ditemuinya melalui berbagai macam cara.

Ketiga, psikomotorik, adalah berkenaan dengan *action*, perbuatan, perilaku, dan seterusnya. Dengan demikian maka peserta didik membuat produk makalah atau karya tulis yang berisi solusi-solusi dari permasalahan yang ada dan ditemuinya ketika melakukan pengamatan. Pada tahap ini peserta didik mulai melakukan ekporasi terkait subyek yang dibuatkan rancangan percobaanya, dan dilanjutkan reduksi dan analisis data serta membuat suatu kesimpulan atas permasalahan yang ada. Dengan demikian ketiga ranah tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari model pembelajaran konservasi modifikasi dengan menggunakan *sintaks contex-learn inkuiri*. Dari hal itu maka pembelajaran akan mendapatkan hasil yang maksimal karena melalui tahapan yang mengandung dari tiga ranah pengetahuan (Bloem). Selain itu ketiga ranah tersebut juga merupakan cara yang efektif untuk mendidik karakter konservatif peserta didik, hal itu dapat kita lihat dari berbagai kajian tentang karakter. (Budiyono & Feriandi, 2017).

Kesimpulan

Pendidikan konservasi dapat diupayakan untuk didesain pada pembelajaran IPS guna memelihara serta menyadarkan peserta didik dalam membangun nasionalisme melalui warisan budaya bangsa. Pembelajaran IPS di anggap sebagai sarana yang tepat membangun *History For Life* karena “dalam pembelajaran IPS juga terdiri dari berbagai disiplin ilmu sosial dan *humanity* yang diorganisir dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Kebudayaan Indonesia”. Dalam hal ini tidak dapat dimaknai

bahwasanya mata pelajaran lain tidak bisa untuk menjadi sarana membangun *History For Life*, namun dalam konteks ini IPS menjadi mata pelajaran yang secara langsung terkait dengan pengetahuan tentang sejarah. Memperkenalkan sejak dini warisan budaya akan mendorong proses penguatan internalisasi kekhasan budaya bangsa agar tetap eksis di era globalisasi dengan adanya pendidikan konservasi. Mengingat suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya mempertahankan keasliannya dan perawatannya namun juga tidak mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik. Sehingga betapa pentingnya penerapan konservasi dalam mengubah mindset dan perilaku agar terbentuk mentalitas nasionalisme khususnya bagi generasi muda. Mengingat kehidupan era globalisasi membutuhkan generasi muda masa depan yang memiliki tiga karakteristik yaitu berilmu atau *knowledge society*, berbudaya atau *cultured society*, dan beradab atau *civilized society*.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, H., & Soerjono. (1999). *Metode penelitian deskriptif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Alif Sulfiantono. 2012. Urgensi Pendidikan Konservasi. (Online). dalam <http://www.tngunungmerapi.org/urgensi-pendidikan-konservasi/>. Diakses 2 April 2017.
- Anshori, S. (2016). Kontribusi Ilmu Pengetahuan Sosial dalam Pendidikan Karakter. *Eduexos: Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 3(2).
- Budiyono, B., & Feriandi, Y. A. (2017). Menggali Nilai Nilai Kearifan Lokal Budaya Jawa Sebagai Sumber Pendidikan Karakter. In *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling*, 1,(1), 92-103.
- Cucum Herlinawati. 2014. Upaya Unesco Dalam Pelestarian Candi Borobudur Sebagai Situs Warisan Dunia Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010. *Ejournal Ilmu Hubungan Internasional*, 2 (1), 171-182.
- Didik Suharjito. 2008. Orientasi Nilai Dan Gerakan Masyarakat Pro-Konservasi Di Indonesia. *Media Konservasi*, 13(1), 38-45.
- [Djoko setiono. 2011. Pendidikan konservasi. Dalam pelatihan pendidikan konservasi alam angkatan 26. Makalah disajikan dalam the Indonesian wildlife conservation foundation \(IWF\) dan Balai Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi, 18-19 Juli 2011.](#)
- Feriandi, Y. A. (2017) Revitalisasi moral kewarganegaraan dalam ungkapan Jawa sebagai sumber pembentukan civic culture dan politic culture. *JURNAL CIVICS*, 14(2), 176-182.
- Hairus salim. 2014. Kretek sebagai warisan budaya. *Wacana: Jurnal Transformasi Sosial*, 34(2), 3-9
- Huda, K. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran IPS Sejarah melalui Aplikasi Sway Berkonten Indis di SMP Negeri 8 Madiun. *Historia: Jurnal Pembelajaran Sejarah dan Sejarah UM Metro*, 5(2), 125-142.
- Ki Hajar, Dewantara. (2004) *Bagian pertama : Pendidikan* (Cetakan ketiga) Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Lickona, T. (1991). *Educating for character*. New York: Bantam Books.
- Maman Rachman. 2012. Konservasi Nilai Dan Warisan Budaya. *Indonesian Journal Of Conservation*. 1 (1) , 30-39
- Marzuki, M., & Feriandi, Y. A. (2016). Pengaruh Peran Guru Ppkn dan Pola Asuh Orang Tua terhadap Tindakan Moral Siswa. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 46(2), 193-206.

- Ridaryanthi, M. Bentuk Budaya Populer Dan Konstruksi Perilaku Konsumen Studi Terhadap Remaja. *Jurnal Visi Komunikasi*, 13(1), 87-104.
- Rikka Agustriana Sinulingga Dan Igusti Angung Oka Mahagangga. 2016. Upaya Konservasi Rumah Adat Karo Dalam Menunjang Pariwisata Budaya Di Desa Lingga Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 4 (2), 139-145.
- Raharjo, T. J., Rifai, A., & Suminar, T. (2015). Keefektifan Manajemen Pendidikan Karakter Pilar Konservasi Budaya melalui Strategi Pembelajaran Inkuiri Sosial bagi Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. *Journal of Nonformal Education*, 1(1). 26, 34
- Trianto. 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif berorientasi konstruktivistik. Jakarta: Prestasi Pustaka
- Volare Amanda Wirastari Dan Rimadewi Suprihardjo. 2012. Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kawasan Cagar Budaya Bubutan Surabaya). *Jurnal Teknik ITS*. 1, (2), 63-67.

Perayaan Grebeg Suro sebagai Potensi Pengembangan Sektor Wisata Budaya Ponorogo

Khoirurrosyidin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

rosyidin.kh@gmail.com

Abstract

The celebration of “*Grebeg Suro*” is an annual agenda organized by the Ponorogo Regency Government and is always present the attention and long-awaited of Ponorogo people (domiciled in the city of Ponorogo as well as in other cities) as well as various communities from other cities, including tourists from overseas. Ponorogo regency government has responded well by compiling various agenda of activities that can coloring the celebration of “*Grebeg Suro*”. Various events or competitions held in “*Grebeg Suro*”, starting various events or lombase not the opening ceremony of “*Grebeg Suro* of Grebeg Suro, Reyog Festival National Center of Peace in “*Aloon-Aloon Ponorogo*”, Kirap Pusaka, Closing of “*Grebeg Suro*”, “*Larung Risalah*”, and various other events, it was able to attract a large audience or visitors. The celebration of “*Grebeg Suro*” is actually derived from the customs of the community taken over by the Regional Government as the Annual Agenda by involving the community as a whole with a decision on the Head of Regent of Ponorogo Second Level Region No. 63 Juncto 130 Year 1987 about the Tourism Team of Ponorogo Level II Region.

Keyword: *Celebration, Grebeg Suro, Tourism*

Abstrak

Perayaan “*Grebeg Suro*” merupakan sebuah agenda rutin tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan selalu mendapatkan perhatian publik, serta dinantikan oleh masyarakat Ponorogo maupun kota lain yang ada di wilayah Jawa Timur ataupun Luar pulau Jawa, termasuk para turis dari mancanegara. Pemerintah Kabupaten Ponorogo telah merespon dengan baik dengan menyusun berbagai agenda kegiatan yang mampu mewarnai kemeriahan Perayaan “*Grebeg Suro*” tersebut. Berbagai acara dihelat dalam Perayaan “*Grebeg Suro*”, mulai berbagai acara atau lomba sebelum acara Pembukaan “*Grebeg Suro*”, Malam Pembukaan “*Grebeg Suro*”, Festival Reyog Nasional, Pusat Keramaian di Alun Alun Ponorogo, Kirap Pusaka, Malam Penutupan “*Grebeg Suro*”, “*Larung Risallah*”, agenda tersebut telah menarik minat penonton atau pengunjung yang sangat besar. Perayaan “*Grebeg Suro*” sebenarnya berasal dari kebiasaan masyarakat yang kemudian dalam perkembanganya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagai Agenda Tahunan yang melibatkan partisipasi masyarakat secara menyeluruh, yang di legal formalkan melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 63 juncto 130 Tahun 1987 tentang Tim Kepariwisataaan Daerah Tingkat II Ponorogo.

Kata Kunci : *Perayaan, Grebeg Suro, Pariwisata*

<i>Submite</i>	: 01 November 2017
<i>Review</i>	: 01 Maret 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: yuli@usm.ac.id

Pendahuluan

Pelaksanaan Perayaan Grebeg Suro merupakan *momentum* penting bagi masyarakat dalam maupun luar Ponorogo. Disamping sebagai *barometer* perkembangan seni budaya, Perayaan Grebeg Suro tersebut juga merupakan *indikator* kepedulian Pemerintah Kabupaten Ponorogo terhadap persoalan sosial ekonomi dan budaya masyarakat Ponorogo. Adapun alasan penyelenggaraan perayaan Grebeg Suro: 1), Memperbaiki mutu dari kesenian Reog Ponorogo sebagai aset kekayaan budaya Nasional, 2) menyokong kegiatan pariwisata daerah, di Kabupaten Ponorogo, 3). Merayakan tahun baru 1 Muharram, 4) meningkatkan perekonomian dari aktifitas tersebut.

Perayaan Grebek Suro sebenarnya berasal dari kebiasaan masyarakat yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagai Agenda Tahunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dengan dasar regulasi atau kebijakan yakni Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 63 juncto 130 Tahun 1987 tentang Tim Kepariwisata Daerah Tingkat II Ponorogo. Pariwisata menjadi sektor yang sangat diperhatikan secara khusus, karena sektor ini banyak menyumbang dalam perekonomian di daerah meupun secara nasional. Berangkat dari perhatian khusus di sektor pariwisata, pemerintah harus berupaya secara berkesinambungan untuk secara terus - menerus memberdayakan seluruh potensi dan sumber – sumber penunjang kegiatan pariwisata, supaya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan devisa Negara melalui wisata daerah.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timuryang memiliki potensi yang cukup tinggi di bidang kepariwisataan. Di Ponorogo terdapat wisata dimana didalamnya meliputi wisata alam, wisata religi dan wisata kebudayaan. Tercatat tidak kurang dari 26 objek wisata yang dapat diandalkan pengembangannya. “*Bhumi Reyog*” atau Kota Reog merupakan julukan dari Kabupaten Ponorogo karena kesenian Reog inilah berasal. Selain kesenian tersebut, sebenarnya Kabupaten Ponorogo memiliki banyak sekali Pondok Pesantren, yang terkenal diantaranya, Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di desa Gontor, kecamatan Mlarak. Tidak hanya itu, di Kabupaten Ponorogo banyak sekali daya tarik wisata wisata alam seperti Telaga Ngebel, dan hamparan pegunungan dan bukit yang indah. Selama ini masyarakat masih hanya mengenal potensi wisata Ponorogo lewat Kesenian Reog, belum mengenal lebih jauh potensi alamnya.

Kepala daerah beserta dengan staff dan jajarannya di kantor Pemerintahan Kabupaten Ponorogo melakukan pengambilan kebijakan, berdasarkan nilai – nilai luhur yang ada dan di percayai masyarakat, dimana wilayah ini dalam sejarah masa lalu memiliki *local Widom* berupa penyelenggaraan kegiatan (*Grebeg Suro*). Kegiatan “*Grebeg Suro*” merupakan kegiatan atau ritual yang dianggap sacral oleh masyarakat Ponorogo, yang diselenggarakan pada setiap tanggal 1 pada bulan Muharram (1 Suro pada tahun penanggalan Jawa), kegiatan tersebut secara umum bertujuan untuk melestarikan nilai – nilai luhur yang ada termasuk di dalam kesenian Reog Ponorogo.

Grebeg Suro secara kultural merupakan wujud syukur masyarakat terhadap sang pencipta, yang terbentuk melalui pesta rakyat. Kegiatannya sendiri berisi beberapa agenda, mulai dari: kesenian dan tradisi yang mempertunjukan kesenian reog dengan model festival yang diikuti oleh berbagai daerah baik di pulau Jawa Atau di luar pulau Jawa bahkan dari Korea dan Hongkong, selain acara tersebut terdapat juga kegiatan Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Do’a di Telaga Ngebel. Kegiatan ini sudah belasan tahun dilaksanakan. Tentunya ada nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya sehingga dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Ponorogo.

Nilai – nilai luhur yang terkandung dalam kegiatan tersebut, bisa terlihat atau nampak pada berbagai gerakan, persimbolan dan juga sikap yang sedang dipertunjukan, nilai tersebut berbeda dnegan yang ada di daerah tersebut karena dalam pengemasan dan juga pertujukannya di tampilkan berbeda, atau secara sederhana karena kesenian ini berasal dari Ponorogo maka sudah jelas jika nilai – nilai dari tradisi ini hanya terdapat di wilayah tersebut. *local wisdom* merupakan nilai – nilai lokal yang dipercaya oleh masyarakat setempat dan diyakini kebenarannya.

“*Grebeg Suro*” yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah merupakan pesta rakyat, disinilah terlihat antusias masyarakat yang secara berbeondong – bonding turut serta berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, jika kita lihat secara lebih dekat, terlihat warga masyarakat Ponorogo sangat peduli dan mencintai kebudayaanya, khususnya dalam upaya pelestarian kebudayaan dan juga keseniannya. Dalam kegiatan ini terlihat budaya luhur yakni upaya gotong royong. Kegiatan ini diharapkan dapat memelihara nilai – nilai religi pada masyarakat Ponorogo, sehingga kesenian budaya di Kabupaten Ponorogo dapat terjaga.

Tinjauan sejarah memeperlihatkan jika masyarakat Ponorogo dahulu ketika menjelang malam 1 Suro, memiliki kebiasaan melakukan tirakat semalam suntuk dan dibarengi dnegan

kegiatan berkeliling kota, dan berhenti di daerah Alun – alun, dalam perkembangannya kemudian, Pada era kepemimpinan Bupati Subarkah pada tahun 1987, kemudian memunculkan gagasan yang inovatif terkait pelestarian budaya, dal ini dilatarbelakang mulai menurunnya minat dan kepedulian pemuda dengan kesenian Khas Ponorogo, oleh sebab itu maka di gagas lah kegiatan, “*Grebeg Suro*” dan memadukannya dengan kegiatan Reog, awal penyelenggaraan kegiatan tersebut belum bersifat nasional, masih bersifat lokal.

Runutan agenda kegiatan “*Grebeg Suro*” dimulai dari penyelenggaraan Festival Reog Nasional, yang biasanya dilakukan selama 4 (empat) hari, yang melibatkan peserta yang berasal dari Kabupaten Ponorogo maupun luar Kabupaten. Selanjutnya peserta tersebut akan diambil 10 Besar group Reyog terbaik dan 10 besar pembina terbaik, kemudian sehari sebelum 1 Suro akan diselenggarakan Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka dari kota lama ke kota tengah untuk mengenang perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo dari kota lama ke kota tengah. Malam 1 Suro diadakan penutupan Festival Reog Nasional dan pengumuman lomba, dan tepat tanggal 1 Suro diadakan Larungan Risalah Do’a di Telaga Ngebel. Nilai *Local Wisdom* yang ada dalam aktifitas tersebut yakni nilai simbolik, nilai tanggung jawab, nilai keindahan, nilai moral, nilai hiburan, nilai budaya, nilai sosial, nilai ekonomi, nilai apresiasi, dan nilai religius.

“*Grebeg Suro*” sebagai sebuah potensi, perlu tersu untuk di kembangkan, dan juga harus di kolaboratif. Tahapan kegiatan yang bisa dilakukan yakni dengan membuat desain yang baik, akan tetapi harus terus dilakukan perbaikan, proses pengembangan tersebut harus bercorak kolaboratif, dnegan melibatkan berbagai pihak, perencanaan yang baik harus benar – benar menghasilkan kegiatan yang rapi, jelas dan memiliki pembangunan yang baik. (Rustiadi, 2009)

Perencanaan desain pengembangan merupakan sebuah aktifitas yang etrukur dan terencana dan tidak dapat terpisahkan, sehingga bisa secara progresif menyelesaikan masalah yang terjadi, Ada 4 (empat) kegiatan dalam proses deain dalam pengembangan yakni: a). memilih lingkungan yang akan digunakan, b). memilih format produk yang akan di pertunjukan dan pemanfaatan media untuk mempermosikan, c). menentukan format penilaian aktivitas atau kegiatan tersebut, d. mendesain dan mengembangkan produk yang akan di pasarkan. Dalam pemilihan lingkungan dan format media yang akan di gunakan perlu diperhatikan beberapa hal, yakni: (1) perlengkapan/peralatan desain (*tools of design*), misalnya chart, video, komputer, dan lain -lain, (2) proses desain (*process of design*). Prosedur evaluasi lebih menekankan pada evaluasi formatif dengan pendekatan kualitatif.

Metode

Penelitian ini berjenis kualitatif, dengan model deskriptif, jenis ini diambil karena peneliti akan berusaha mengungkap realitas sosial secara benar atau sesuai dengan kenyataan, di dasarkan pengumpulan kata – kata, yang akan di analisis secara relevan. Kemudian hasil analisis tersebut kemudian di deskripsikan secara detail tanpa interpretasi ilmiah.

Dengan menggunakan teknik purposive sampling informan dalam penelitian ini yaitu :Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Kepala Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Ketua Perayaan Grebeg Suro Kabupaten Ponorogo Tahun 2015, (empat) orang masyarakat penjual dagangan sekitar kawasan wisata,2 (empat) orang Wisatawan Domestik

Peneliti melakukan penguraian data, dengan teknik analisis kualitatif, sehingga memperoleh ilustrasi terkait fenomena atau peristiwa yang ada dan terjadi di lapangan, perolehan peristiwa tersebut diawali dengan pengumpulan data – data primer seperti hasil wawancara dari para informan, berdasarkan indikator yang sudah di tentukan.

Hasil dan Pembahasan

Dari berbagai pendapat informan, mereka mayoritas berpendapat bahwa Perayaan Grebeg Suro yang ada di Ponorogo sebenarnya adalah merupakan perayaan hari besar bagi umat Islam yang jatuh pada tgl 1 Muharram, dan diperingati sesuai dengan tradisi masyarakat yang disebut sebagai Tirakatan artinya kita sebagai masyarakat harus selalu mendekatkan diri dan juga memanjatkan doa serta Puji Syukur, kepada Tuhan Yang Kuasa agar senantiasa diberi keselamatan dan kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dikuatkan oleh pendapat bapak

Ir. Mahmud Budihartono, M.Si menyatakan “Grebeg di Ponorogo mempunyai makna yaitu untuk mendekatkan diri dan memanjatkan doa kepada Yang Kuasa agar senantiasa diberi keselamatan dan kesejahteraan serta merupakan acara tahunan yang dirayakan setiap tanggal 1 Muharram (1 Suro pada tahun Jawa) dan kegiatan rutin bertujuan melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yakni kekhasan dan keaslian Reog yang menjadi seni asli Ponorogo.

Sedangkan menurut Kepala dinas pariwisata Drh. Sapto Djatmiko, MM menjelaskan bahwa “Awalnya kegiatan Grebeg Suro Ponorogo ini, adalah acara atau kegiatan yang diadakan atau diselenggarakan dengan tujuan untuk memperingati datangnya tahun baru Islam (dalam istilah Jawa disebut Suro). Berbagai macam tata cara serta ritual dalam kegiatan ini diarahkan untuk menyambut bulan Sura bagi masyarakat Ponorogo adalah, bagian dari kegiatan religius atau keagamaan. Semua itu dilakukan hanya dalam proses pendekatan kepada Tuhan Yang Kuasa”.

Penjelasan diatas tentang kegiatan masyarakat Ponorogo di malam sebelum 1 Suro dnegan melakukan tirakat, dengan mengelilingi kota dan tidak tidur atau bergadang (*melek'an*), yang kemudian istilah tersebut Masyarakat Ponorogo melakukan melakukan tirakatan di bulan suro identik dengan sakralitas.mengelilingi kota dan tidak tidur pada malam satu suro (melekan) yang selanjutnya tradisi tersebut disebut Grebeg Suro. Cikal bakal Grebeg Suro diyakini ratusan tahun yang lalu telah dilakukan masyarakat Ponorogo secara spontan, responsif dalam menyambut tahun baru Suro “

Perayaan Grebek Suro sebenarnya berasal dari kebiasaan masyarakat yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagai Agenda Tahunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dengan didasarkan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 63 juncto 130 Tahun 1987 tentang Tim Kepariwisataaan Daerah Tingkat II Ponorogo. Adapun untuk memperingati dilaksanakan Perayaan Grebeg Suro dalam wujud pesta rakyat Ponorogo, berbagai kegiatan digelar antara lain :Festifal Reyog,Pacuan Kuda,Simaan Al Qur'an, Pemilihan Kakang Senduk,Istiqozah, berbagai Pameran (Industri kecil, Bonsai, Adenium, Lukisan, Tanaman Hias Pasar Malam di Aloon-Aloon, Festival Reyog Nasional , Pawai Sepeda Unto, Kirab Pusaka,Ketoprak, Wayang Kulit, Musik Dangdut, Larung Risallah Doa, dan Festival Musik”.

Agenda “*Grebeg Suro*” telah banyak “menyedot” perhatian serta rasa antusias masyarakat baik di wilayah Ponorogo atau dilur wilayah, pengunjung yang datang dapat memberikan efek ganda terhadap berbagai sektor lainnya, seperti meningkatnya perputarang uang, selama agenda tersebut yang membawa pemasukan bagi masyarakat di wilayah Ponorogo.

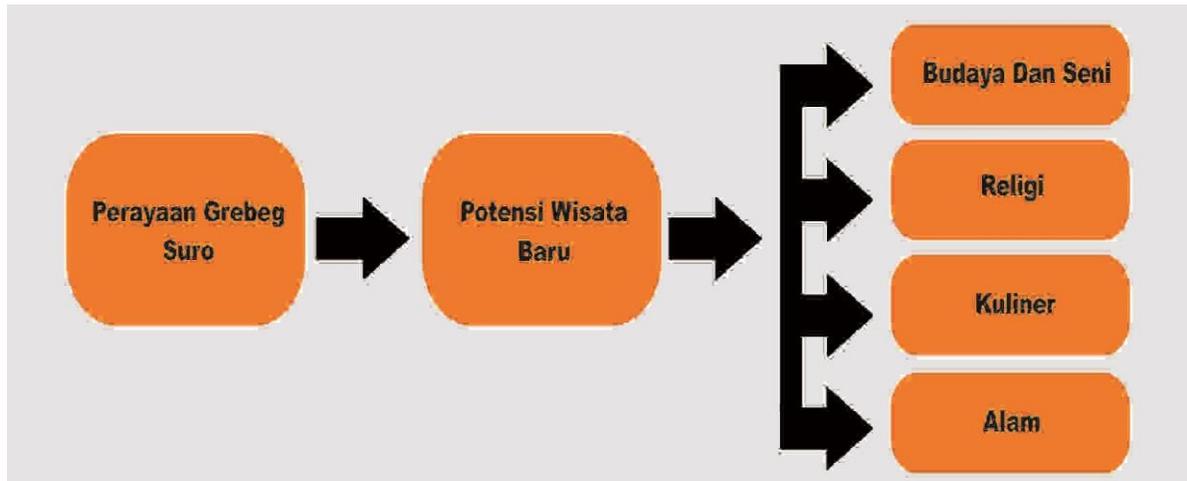
Grebeg Suro dan Potensi Pengembangan Wisata budaya di Ponorogo

Momentum grebeg suro bisa dijadikan kesempatan untuk meningkatkan potensi obyek wisata yang lain di kabupaten Ponorogo, hal ini sangat mungkin karena Ponorogo memiliki beragam objek wisata, diantaranya Makam Batoro Katong yang menjadi bukti sejarah masuknya agama islam di kota Ponorogo, kemudian masih dalam rangkainya grebeg suro adalah kegiatan tradisional yang ada di masyarakat seperti Larung Risalah Do'a, Taman Rekreasi Singo Pitu, Pentas Wayang Kulit dan Reog Bulan Purnama dan Iain-Iain., yang semuanya dapat di kemas dalam satu paket wisata budaya, dan ditetapkan dalam kalender wisata Ponorogo.

Pemerintah kabupaten Ponorogo dalam mengembangkan potensi wisata budaya terlihat peduli dan serius, ini semua dilakukan agar peninggalan – peninggalan bersejarah, bisa kembali di pentaskan dalam kegiatan – kegiatan masyarakat, sehingga dapat dikenal dan tetap tumbuh subur, dalam pertunjukan tersebut pesan – pesan sosial harus digalakan tentang menjaga warisan leluhur. Hal tersebut ternyata cukup berhasil, hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan wisata di Kabupaten Ponorogo melalui jumlah kunjungan wisatawan, sejak tahun 2009 sampai dengan 2016 terus mengalami peningkatan. Farida menyampaikan selama 2015 tempat wisata paling banyak dikunjungi yaitu Telaga Ngebel dengan jumlah wisatawan 76.464 orang. Selanjutnya, tempat wisata paling banyak dikunjungi yaitu Masjid Tegalsari dengan jumlah wisatawan 62.725 orang. Sedangkan tempat wisata paling sedikit dikunjungi wisatawan yaitu Air Terjun Pletuk dengan jumlah wisatawan 1.170 orang. Wisatawan yang datang ke Ponorogo selama 2016 mencapai 249.294 orang. Rinciannya, wisatawan lokal sebanyak 249.229 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 65 orang.

Saat ini sarana dan prasarana penunjang mulai tersedia, guna melancarkan kegiatan wisata menuju kewilayah tersebut, berbagai model transportasi online juga telah banyak di Kabupaten Ponorogo, sehingga wisatawan tidak lagi mengalami kesusahan dalam menjangkau akses wilayah tersebut. Pengelolaan potensi wisata dilakukan dengan mempersiapkan dan menggandeng, pihak swasta seperti: pengusaha penginapan, pengusaha rumah makan/restoran, pengusaha travel dan perbankan, hotel, restoran, dan biro perjalanan wisata, sehingga fasilitas tersebut secara perlahan terpenuhi, dan dapat membantu aksesibilitas wisatawan yang akan berkunjung ke destinasi yang ada di wilayah Ponorogo, menjadi lebih aman, nyaman dan mudah.

Gambar 1 Skema Potensi Pariwisata di Kabupaten Ponorogo



Kesimpulan

Agenda Wisata “*Grebeg Suro*” jika dilihat secara historis merupakan tradisi cultural masyarakat, sebagai wujud atau bentuk pesta rakyat di wilayah kabupaten Ponorogo. Acarnay terdiri dari kegiatan seni dan budaya, dimulai dari Festival Reog Nasional, Pawai Lintas Sejarah dan Kirab Pusaka, dan Larungan Risalah Do’a di Telaga Ngebel. Kegiatan ini telah lama dan memiliki nilai – nilai luhur masyarkaata yang di percaya.

Perayaan Grebek Suro sebenarnya berasal dari kebiasaan masyarakat yang diambil alih oleh Pemerintah Daerah sebagai Agenda Tahunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara keseluruhan dengan didasarkan pada Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 63 Juncto 130 Tahun 1987 tentang Tim Kepariwisataa Daerah Tingkat II Ponorogo.

Perayaan Grebeg Suro telah mampu membangkitkan berkembangnya obyek wisata baru di Ponorogo, baik wisata seni dan budaya maupun wisata alam. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Ponorogo terus melonjak bisa dilihat dari kunjungan wisatawan 2016 mencapai 249.294 orang. Rinciannya, wisatawan lokal sebanyak 249.229 orang dan wisatawan mancanegara sebanyak 65 orang. Kasi Promosi dan Informasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo, Farida Nur Aini, mengatakan angka tersebut mengacu pada wisatawan yang tercatat pemerintah dan mengunjungi sejumlah tempat wisata dan agenda budaya yang ada di Ponorogo.

Dengan perayaan Grebeg Suro ini telah menjaga eksistensi masyarakat Ponorogo dalam menjaga budaya yang turun temurun dilakukan oleh generasi masa lalu.

Wilayah Ponorogo memiliki potensi alam budaya yang dapat dijadikan sebagai potensi pembangunan wilayah, dengan dijadikan sebagai destinasi pariwisata, obyek – wisata yang aada saat ini telah banyak di tunjang dnegan berbagai faislitas, seperti sarana transportasi, penginapan dan hotel, restoran, sehingga sangat potensial untuk dikembangkan kedepannya.

Daftar Pustaka

- Andri Harianto, khoirurrosyidin. *Upaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemuda dan olahraga dalam melestarikan Kesenian Keling di Kabupaten Ponorogo*, skripsi. 2017.
- Agus Salim, *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial (dar iDenzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2014, Ponorogo Dalam Angka.
- C.A. Van Peursen, *Strategi Kebudayaan*. Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1988.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatchan H.A, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Surabaya: Jengala Pustaka Utama.
- H. Kodyat, *Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat, *KEBUDAYAAN JAWA*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakara, Bandung, 1995.
- Lono Simatupang, *Pergelaran Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya*, Jala sutra, Yogyakarta, 2013.
- Nyoman Kutha Ratna, 2010, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: PustaPelajar
- Nyoman S Pendit, 1994, *Potensi Pariwisata*, Gramedia Pustaka Utama
- Paul Stange, *Politik Perhatian (Rasa Dalam Kebudayaan Jawa)*, LKiS, Jakarta, 1998.
- Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2008, *Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga*
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2012 *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ponorogo Tahun 2012-2032*
- Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008, *tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo*
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota*

Profil Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo, 2010 s.d 2015

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo Tahun 2010-2015.

Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Kualitatif (Dasar – Dasar Penelitian)*, PT Usaha Nasional, Surabaya, 1993.

Totok Mardikanto, *Komunikasi Pembangunan – Acuan Bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan*, Sebelas Maret Press, Surakarta, 2010.

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Yoeti, 2001, *Pengantar Ilmu Pariwisata*

Yusuf Harsono dan Slamet Santoso, *Dinamika Perubahan Struktur Sosial Para Warok Ponorogo (Studi Kasus: Mobilitas Sosial Vertikal – Horizontal Para Warok di Kabupaten Ponorogo)*, *Fenomena Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial – Humaniora*, Vol 2. No 1, Januari 2005, ISSN 1693-8038.

How Are They Elected? Vote Buying And General Election In Ogan Ilir District, South Sumatera Province

Mery Yanti¹, Alamsyah²

¹Department of Sociology, Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia

² Department of Public Administration, Universitas Sriwijaya Palembang, Indonesia

Mery.yanti@fisip.unsri.ac.id, alamsyah78@fisip.unsri.ac.id

Abstract

This article designed to examine patronage practice in the 2014 general election in Ogan Ilir district, South Sumatera Province, Indonesia, before and after election in one electoral area (Ogan Ilir 1). We apply Nine Step to Victory (Alamsyah, 2015) framework to achieve this goal. Our key informants are some legislative candidates and their brokerage or winning team at various level. Primary data gathered through depth interview and secondary data collected from the government institution. This data will be analyzed using interactive model (Miles, Huberman, and Saldana, 1994). Drawing on the qualitative approach, we find that, before election day, all candidates in this area practicing vote buying and patronage to get political support from the voters. A form of patronage dominated by club goods, and cash transfer (transport allowance, communication and consumption cost, and vote buying). We do not find incumbency candidate who is practicing fork barrel. After election day, especially when the winner candidates, has been working as a legislator, he has an obligation to continuing patronage through informal and cultural networking (personal or community event). In this various event, he must deliver goods, services, or money to the people (as an individual or group). Our results are strengthening the previous finding that all candidates have begun implementing patronage strategy when they are recruiting the winning team, campaign, and realize vote buying. Family, especially extended family, and friendship is the primary foundation for all candidates to build brokerage (the winning team) structure. All candidates also using “by name by address” strategy to guide vote-buying practice. We discuss this finding, showing limitation and agenda for the research on this topic.

Keyword: *General Election, Patronage, Clientelism, Vote Buying, Local Politics*

<i>Submite</i>	: 20 November 2017
<i>Review</i>	: 15 Maret 2018
<i>Accepted</i>	: 30 Juni 2018
<i>Surel Correspondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Introduction

Since 1999, Indonesia entering into a new stage and build significant progress in electoral reform. For example, Indonesia has adopted the multiparty system, an individual quota for women in the fixed list, direct election as a mechanism to choose the president, the governor, the

mayor, and the regent, and strengthening the Agency of General Elections Supervisions. However, general elections are, especially regional head elections, are expensive. The rich people can only enter it. Indonesia also remains a severe problem with political behavior (the elites and the voters) in electoral politics, for example, vote buying, vote trading, and political dowry which is expressing patronage as a part of political culture.

The 2014 General Election is the fourth general election after New Order regime. It has been realized peacefully. However, one of the issues that highlighting by the mass media is the phenomenon of money politics. Tempo magazine, for example, publishing some news related to money politics (Burase, 2014; Fitria, 2014). These stories tell us how the police officer confiscating hundreds of million rupiah from people who alleged will spread money before or within election day, the role of brokers to connecting candidate to the voters, and several citizens who reject money politics. In South Sumatera province, there is several demonstrations who demanding for recalculation and re-voting in several points in Palembang City due to the ballot papers problems (Sumatera Ekspres, April 12, 2014). However, in general, political and social stability after the 2014 General Election remains conducive.

From a scientific point of view, media coverage on money politics means that it is an empirical phenomenon. However, media does not give fully analysis to this event. It is why this research is dedicated to mapping the pattern and variations of patronage politics in the 2014 General Elections. Theoretically, many scholars have been using patronage as theoretical framework to describing and analyzing Indonesian politics. It had replacing identity politics perspective that growing faster in the early of decentralization era (Erb et al., 2005, pp. 149-179; Faucher, 2005, pp. 132-148; Picard, 2005, pp. 116-131). In Indonesian context, off course, identity politics cannot be abandoning. However, as Aspinall (2011, pp. 289-319) noted, patronage is a trump for identity politics. Patronage could be occurrence at state level (Fukuoka, 2013, pp. 991-1013; Robison & Hadiz, 2004, p. 43) or society level (Antlöv, 2003, p. 206). Political elite and ordinary people have the same opportunity to become subject of patronage (Allen, 2014, pp. 221-245).

Desk study shows that clientelism and patronage, especially vote buying, is not happening in Indonesia only, but also in many countries, for example, Malaysia (Weiss, 2014), Latin America (Carreras & Irepoglu, 2013, pp. 609-619; Desposato, 2006, pp. 62-80; Gonzalez-Ocantos et al., 2012, pp. 202-217), Ghana (Ichino & Nathan, 2013, pp. 428-441; Weghorst &

Lindberg 2013, pp. 717-734), and Colombia (Rueda, 2017, pp. 163-177). It could be caused by low-income rate (Brusco et al., 2004, pp. 66-88; Weitz-Shapiro, 2012, pp. 568-583), quality of democracy (Keefer, 2007, pp. 804-821), patron-client relationship and weakness of government institution (Manzetti & Wilson, 2016, pp. 949-970),

For Hicken (2011, pp. 289-310), clientelism have many consequences. It will affect democracy functions, citizens attitudes toward democracy, the capacity of government to produce public policy, party system, levels of rent seeking, public sector inefficiencies, corruption and perception of corruption, politicization of bureaucracy, development of political institutions, and accountability. However, political participation, access to information, voter education campaign could reduce clientelism, patronage or vote buying practice in general election (Vicente & Wantchekon, 2009, pp. 292-305).

Previous study show that electoral politics, especially at grassroots level, in Indonesia has been dominated by patronage praxis (Aspinall & Mada, 2015). Current finding on this topic is very varied. For example, Aspinall (2014, pp. 545-570) was developed brokerage typology based on candidate resources ownership and broker subjective perception on candidate opportunity to winning election. Allen (2015, pp. 73-85) argue that in the electoral districts where the state played a dominant role in the economy, voters and candidates tended to form the type of patron-client bonds that resulted in high levels of preference voting. However, a few studies give attention to patronage praxis at grassroots level after election day. We are, then, attempt to elaborate this topic more deeply.

We define patronage as exchange good and service between voter and candidate to get political support (Aspinall, 2013). It could be deliver through programmatic or non-programmatic approach (Stoke, 2011). In anthropology view, exchange is always containing reciprocity norm. Reciprocity means that exchange good and service always based on trust, mutual obligation, and voluntary. If A give something to B based on voluntary, then B has obligation to give A something else based on voluntary norm (Eriksen, 2004). In economic literature, exchange mechanism similar to the supply-demand principle. Smith (1776) believed that supply-demand law is the best mechanism in the world to make welfare society.

Allen (2015, pp. 73-85) argue that in the electoral districts where the state played a dominant role in the economy, voters and candidates tended to form the type of patron-client bonds that resulted in high levels of preference voting. A few studies give attention to patronage

praxis at grassroots level after election day. This article, then, is attempting to elaborate this topic more deeply. The research question is how to explain the candidate strategy to winning the 2014 General Elections in Ogan Ilir districts? Does the candidate have similar or different strategy to get political support from the voters? Do they still use patronage to maintain positive relationship with their constituency?

We utilize the Nine-Step to Victory (Alamsyah, 2015) framework to understanding patronage praxis at the grassroots level. According to this framework, every candidate, based on their cognitive competency, develop an imaginary scaffold as a guide to winning the elections. This stage consists of nine steps: securing the nomination, mapping a victory strategy, forming a team, *sosialisasi*, recruiting and training witnesses, using the quiet period, monitoring vote tabulation as it moves through the system, monitoring the result, and getting ready for the legal challenge. However, the last stage is optional and usually work when there is the dispute on the general election result.

Methods

We use qualitative approach and case study design (Yin, 2009) to guide research process. This study was conducted in Ogan Ilir District, South Sumatera Province, Indonesia, and focused on one electoral district (Ogan Ilir 1) which containing three sub-districts: Indralaya, South Indralaya, and North Indralaya. We use purposive methods to select research informant. The researcher uses purposive methods to select research sample. The informant consists of (a) five candidates who have status as incumbent legislator; (b) five candidates who have status as non-incumbent legislator; (c) ten people who helped candidates as campaign team. Political praxis in Indonesia called campaign team as a successful team or the winning team. We use depth interview to collecting primary data. Secondary data was gathered from government institution, especially Ogan Ilir District of General Election Commission. Data will be analyzed qualitatively using interactive model (Miles, Huberman, and Saldana, 1994).

Result and Discussion

a. Patronage before election day

1. Securing nomination

To become a candidate, someone must be entering her name into the *Daftar Calon Tetap* (DCT, fixed list candidate) which is decided by party officer. Each political party have internal mechanism to prepare DCT. All political party tend to, except PBB and PKPI, fill out their DCT with maximum number (total number of seats in an electoral district). In 2014 general election, Indonesia still adopt majority system. Consequently, candidate number in DCT is not important. It is no longer a critical factor to determine someone as the winner or the loser. “Don’t think about number. If you want to be a winner, go to the people and give them money in the right time”, said WM, incumbent candidate from PDI-P (interview, 08/09/2015).

In this study, several key informants receive number one in the DCT because they are political party official at district level (for example: AS, FH, and HM). We do not find praxis where party official sell and/or candidate purchase number within the DCT in this phase. All party official also perceives women quota (30% from total DCT) as administrative prerequisite. The candidate does not worry to fail getting number in the DCT. “Our party has many cadres. We can count them one by one. However, few people have a spirit, braveness, and resources to fight in general election”, said KMT, non-incumbent candidate from PAN (interview, 10/08/2015).

2. Mapping a victory strategy

As an electoral district, Ogan Ilir 1 consist of three sub-districts: North Indralaya (16 villages), Indralaya (20 villages), and South Indralaya (14 villages). Half of Ogan Ilir 1 has grown as urban area because Indralaya sub-district has role as the capital city of Ogan Ilir district. Conversely, South Indralaya still appears as rural area. In term of ethnicity, population of South Indralaya sub-district has dominated by *Meranjat* and *PegaganUlu* ethnic. North Indralaya and Indralaya sub-district is inhabited by *Sakatiga* ethnic, *PegaganIlir* ethnic, and migrants people who live in transmigration village and urban housing area.

Based on self-identification through interview, each candidate represents a particular ethnic (see Table 1). All candidates do not use ethnicity as entry point to catch the voters. However, each candidate recognizes that, in some villages, there are voters who vote based on ethnicity consideration. This situation is representing by some jargon: *wangtobo* (Pegagan Ulu ethnic), *urangdiri* (Meranjat ethnic), and *urang kite* (Sakatiga ethnic) that indicating voters' in-group feeling.

Table 1 Key informant composition based on village, sub-district, and ethnicity

No.	Candidate initial	Village	Sub-district	Ethnicity
1.	AS	Sukaraja Baru	Indralaya Selatan	Pegagan Ulu
2.	HM	Muara Kamal	Indralaya	Pegagan Ilir
3.	WM	MuaraPenimbung	Indralaya	Pegagan Ilir
4.	KMT	Indralaya	Indralaya	Sakatiga
5.	FH	Lorok	Indralaya	Pegagan Ilir
6.	EPU	Meranjat	Indralaya Selatan	Meranjat

Source: primary data

When mapping a victory strategy, some candidate defines her village where she was born, and/or she grew up as vote bank. In these villages, candidates feel that they still have extended family and close friend. In Ogan Ilir district, a person is considered as a part of extended family if she has *dulur* (sibling), *misan* (first cousin), *mindu*(second cousin), *mentelu* (third cousin), and *seraikunyt* (fourth cousin) status to the others person(Alamsyah, 2015, pp. 155-156).All candidates, besides consanguinity, also see matrimony relation as part of extended family. Trust is the primary reason for candidate to functioning their extended family as vote base and political machine. All candidates, then, use personal network member of their extended family to expand their success team in Ogan Ilir 1 electoral district.

Among the candidates who were interviewed, only AS and WM were not using family networks as political machine. AS (non-incumbent candidate from NasDem) use party infrastructure and social organization (in this case: *Karang Taruna Ogan Ilir*) as a

political machine. AS has experience as the chairman of *Karang Taruna Ogan Ilir* (KTOI). Half of NasDem official at district, sub-district, and village level is recruited from peoples who have been experience as KTOI activist at district, sub-district, and village level. He, then, uses organization sentiment to mobilize, especially youth voter in the village level.

Meanwhile, WM (incumbent candidates from PDIP) uses party infrastructure because he believed that there is Sukarno loyalist who live in Ogan Ilir 1. He does not see her village as vote bank. "I cannot expect too much from MuaraKamal village. Many candidates (from other party) who come from this village. In this situation, the voter will be dispersed based on the extended family of each candidate. It is why I focused on the outside of my village. In the outside, I focused on to approaching the voters who are still loyal to the Bull logo and Sukarno figure", said WM (interview, 09/08/2015).

Although HM, KMT, and FH use extended family as vote bank, they also seek votes in other villages. They are understanding very well that it is impossible to get 60% votes from their village. "My previous experience show that I am only gets 10% - 25% of total *DaftarPemilihTetap* (DPT, fixed list voter) thorough extended family. I must seekvotes from other villages. However, political works become easier because I already have vote bank in my village", said HM (interview, 30/09/2015).

3. Forming a team

It is impossible to reach voters without a team. In Ogan Ilir 1, all candidates, including candidate who has position as a chairman of political party in district level, do not use party infrastructure as the primary source of their winning team. They are also recruit some ordinary people, primarily in village level, as member of winning team. Recruitment of this people based on social networking such as friendship, professional relationship, acquaintances, or part of extended family networking. Friendship and extended family network have high trust value than professional relationship and acquaintances. When a candidate does not have social networking in certain area, then she will fail to approach the voters.

Ogan Ilir 1 has 50 villages. Each candidate does not put the winning team in all villages. They choose and determine targeted villages carefully. In this phase, each candidate will collect information about total number of voters in the village and how

many candidates have social networking to those villages. Based on this information, then, there will be two typologies of village: *desabertuan* (owned village) and *desatakbertuan* (un-owned village). The villages, as shown in Table 1, is owned village because there are many candidates come from these villages. Each candidate need extra energy to infiltrate owned village, because the owner lives or has strength social networking in this village.

Some candidates, for example AS (non-incumbent candidate from NasDem) and FH (non-incumbent candidate from Gerindra), create the structure of winning team in line with division of administrative area (i.e.: district, sub-district, village, neighborhood, and polling station). Other candidates create more flexible structure. For example, HM (incumbent candidate from PAN) and KMT, does not have team at sub-district level. They are recruit people at village level and control it directly.

Practice of patronage is beginning to happen when candidates forming a winning team. The simplest form of patronage is provision of transportation and communication funds for winning team member during campaign process. All candidate who were interviewed did not give honorarium to their winning team. They only give Rp50,000 – Rp100,000 per person to their winning team as one-way transportation and communication fund. There is no regular schedule for candidate to give this fund. It is depending on work load that carry out by winning team at particular area. Simply put, no job no money. Other form of patronage is, as AS (non-incumbent candidate from NasDem) practiced in one of the villages in South Indralaya sub-district, give fresh money to farmer groups which consist of 40 households as group member.

During campaign time, voter will demand anything to candidates (i.e.: sport club uniform, football, volleyball, uniform for women club, fund for special event, and etc). For incumbent candidate, they will respond this request as long as it is considered as rational demand. However, KMT tend to ignore these demands. “I have been twice become candidate. Based on previous experience, I know that such assistance would be forgotten quickly by voters. Voters are easier to remember final touch even its value does not big”, said KMT (interview, 08/10/2015).

4. Sosialisasi

One the team was formed, the next step was *sosialisasi*, which basically means “promotion”. The core task was getting the candidate’s name, face, party affiliation and number on the ballot known by target voters (using sample ballot paper to show them how to locate the candidate was especially important as voting day neared) (Alamsyah, 2015, pp. 147-173). All candidates see that banners and billboards are still important as an instrument for candidate promotion. However, if we compare to 2004 and 2009 general election, there is no “banners war” in 2014 general election.

Several candidates still realize closed and limited meeting to the voters in village level. The number of voter who invited to this meeting is very varied (between 10-30 people). Although, candidate has money to make a big meeting (more than 50 people), but their winning team at village level tend to reject this event. “More people means more responsibility. If I invite more people, for example 50 people, then a half of them is missed (do not choose my candidate) in election day, it will destroy my relationship to candidate. So, little is better as long as it does not move to another candidate”, said Hepi, winning team of PPP candidate (interview, 27/06/2015).

EPU (non-incumbent candidate from Golkar) realize closed meeting three times. “I was invited to meeting three times by EPU. Closed meeting was held at him family house. The number of participant between 20 – 30 people. Each participant will receiveRp50,000 as transportation fund. Other example is Bi’ul (winning team of PD candidate) who realize a closed meeting without attending by his candidate. “I meet with 50 youth people in my house. We discuss their plan to watch a football match at Sriwijaya Stadium (headquarter of Sriwijaya Football Club) in Palembang. I said that my candidate will give full support for your plan, but you must choose him in election day. *Alhamdulillah*, my candidate gives them two bus and economy ticket for 100 youth people” (interview, 06/09/2015).

KMT does not realize closed meeting. “We have smart card. Everyone who has a smart card will protect by mortality insurance and received assistance business fund (between Rp5,000,000 – Rp100,000,000). This program is fully funded by RusdiTahar (member of Sumatera Selatan House of Representative) through aspiration fund”, said Teguh (winning team KMT) (interview, 07/06/2015). WM, incumbent candidate from PDIP, is also does not realize closed meeting because he doesn’t trust this event will

determine election result. “In my mind, closed meeting is ineffective and high costly. The most important thing in election is the final touch” said WM (interview, 08/09/2015).

The ultimate goal of closed meeting is preparing by name by address strategy (Triantini, 2015). Each member of winning team must to identify and conditioning registered voter name in fixed voters list (DPT) in each polling station (TPS) who are willing to choose their candidate. The winning team, then, will bring its record to candidate. Each candidate has own mechanism to verify this record. It is a basis for each candidate to spread money to the voters. However, according to EPU, “this record is not a war guide. It’s just a picture that describing my effort to win election. In the last minute, leave the picture into your box, then see what is happen in the war arena. As a fighter, if someone sell, I will buy it” (interview, 10/09/2015).

Generally, the winning team will prioritize their extended family as primary candidate supporter. After that, they will record voter in the outside of their extended family. “I go door to door. I asked to family head, how many voters in this house. If they do not know what should be choose in election day, then I ask to all family member who has been registered to choose my candidate. If they know who should be choose in election day, for example this household has five voters, then I ask them to give me one or two voters to choose my candidate. Three voters as vote rest could be given to other candidate”, said Wawan, member of EPU winning team (interview, 20/06/2015).

Door to door strategy also performed by winning team of other candidates. Consequently, each winning team cannot avoid data duplication (one registered voter is recorded by two or more candidate winning team). “If you meet an honest voter, they will inform us that they were already listed as supporter of candidate A or B. Unfortunately, most voter are not willing to open this information due to secret norm in general elections”, said Hepi, winning team of PPP candidate (interview, 06/27/2015). Each candidate has different target in certain village. In one village, EPU has targeted his winning team to get 500 votes (Wawan, interview, 20/06/2015). UR, non-incumbent candidate from Partai Demokrat, also ask to his winning team to get 500 votes (Bi’ul, interview, 06/09/2015). While Hepi, winning team of PPP candidate, is only charged to get 50 votes in one polling station (interview, 06/27/2015).

5. Recruiting and training witnesses

Witness is someone who received mandate from parties official to supervise process of voting and vote counting at polling stations. Each political party may submit only one witnesses into the polling area. In Ogan Ilir, official party witnesses are popular with the term of *saksidalam* (inside witness). In addition, there is also the term of *saksiluar* (outside witness) who received informal mandate from certain candidates to mobilize voters, supervising process in polling station, and reporting election result directly to candidate.

Each political party has a different mechanism for managing and training witnesses in polling stations. Party officials tend to prioritize their cadre in village level as inside witness. Party official is also responsible for inside witness financing. While outside witness is depending primarily on candidate financial strength. In Ogan Ilir 1, outside witness will receive Rp50,000 and inside witness will gets Rp100,000 and logistic (food, snacks, drinks, cigarettes, and mobile phone credit). According to WM, incumbent candidate from PDIP, “a witness is a spearhead in election day. They should not be hungry and sluggish. His body, eyes, and minds must be literate for 24 hours” (interview, 09/08/2015).

6. Using the quiet period

Normatively, quiet period can be defining as period where all campaign activity is prohibited. In fact, this is a moment for all candidate to practicing vote buying. From all successful candidates are interviewed, all of them provide Rp100,000 per voter, including voters who are conditioned through a network of family or friendship. This value is excluding transportation cost for winning team who has job to distribute this money to the voters. Only AS, non-incumbent candidate from NasDem, gives Rp50,000 per voter. Helmi (member of AS winning team in Tanjung Dayang Selatan village) has explanation for this value. “As a public figure in Ogan Ilir, AS want to measure his supporter loyalty. I think, it’s relate to next pilkada in Ogan Ilir”, said Helmi (interview, 25/09/2015). For AS, non-incumbent candidate from NasDem, it is important to highlight that general election is not about money. “You can make analysis. I get the voters with Rp50.000, while others candidate buysit with higher price (Rp100,000). The question is why do they persist choose me even though they receive less money that other voters? There must be something

behind this voter attitude. Something that certainly is not money”, said AS (interview, 26/09/2015).

In Ogan Ilir 1, vote buying is starting at quite period until voters go to polling station. Off course, each candidate winning team do not move silently. "In quiet period, our village look like a market. The winning team member is very busy to distribute white envelope to voters. Voters who felt his name has been recorded by a certain winning team will participated actively to get a white envelope. They claim candidate or winning team promise. In election day, most people choose not to go to their rubber plantation, because they get additional income. Imagine that if a household have four voters, then they will get Rp400,000 in that day as additional income. That is just from one candidate”, said Wawan (20/06/2015). In this situation, Election Supervisory Officers (PPL) at village level is powerless. “He just watching the game. But, don’t worry, there is special envelope for PPL officer”, said Hepi (interview, 20/06/2015).

7. Monitoring vote tabulation as it moves through the system

In election day, an inside witness goes to polling station at 6 am. She must show letter of assignment from party official to polling station official. She will receive official ID card from polling station official. Several inside witnesses have official uniform from their party. Voting process at polling station will take place from 7.00 am – 13.00 pm. Polling station officer will start counting result of election after 13.00 pm and finished at 17.00 pm. However, overall administration process at polling station will completed at night (usually at 20.00 pm). All witnesses will get C1 Appendix which contain general election result at polling station.

C1 Appendix is a document that more valuable than money and gold at election day. High competition among candidate within and between political party make all candidate to analyze C1 Appendix earlier. Each candidate prepares special team to collect and tabulated it. “I prepared three cars to collect C1 Appendix. One car covering one sub-district”, said WM, incumbent candidates from PDIP (interview, 10/08/2015). NasDem, PAN, Gerindra, and Golkar do similar step. One day after election day, WM disseminate leaflet containing information about 2014 general election result in Ogan Ilir 1. “I do this as reminder to all candidate. My message is simple: do not try to make vote trading with

general election officer at all level, I have Appendix C1 ten hundred percent”, said WM, incumbent candidates from PDIP (interview, 10/08/2015). KMT is a little confusion about 2014 general election because he cannot collect Appendix C1 one hundred percent. “We, as a political party, do not solid even though there is internal agreement about recruiting and financing witnesses. Each candidate runs alone and promote her owns ego and interest”, said KMT (interview,08/10/2015).

8. Monitoring the result

From TPS, TPS officer will give Appendix C1 to *PanitiaPemungutanSuara* (PPS, village-level voting committee). All party witnesses will get the D1 form (a recapitulation of all the polling booth result in the village). PPS, then, bring all D1 form to *PanitiaPemilihan Kecamatan* (PPK, subdistrict election committee). PPK will produce the DA1 form (a recapitulation of all PPS in their area) and send it to *KomisiPemilihanUmum Daerah* (KPUD, Regional General Elections Commission). In this phase, each political party recruit one officer as outside witness to guard all ballot in the KPUD office for eight days. All witnesseswork 24 hours and receive honorarium, logistic, and transportation funds. Off course, there is several police officer in the KPUD office.

9. Getting ready for legal challenge

In Ogan Ilir 1, there is only one dispute on general election result which has been decided by the *MahkamahKonstitusi* (MK, Constitutional Court) through MK decision number: 09-04-07/ PHPU.DPR-Parliament/XII/2014. In this phase, each candidate must bring witnesses and lawyer to MK. Disputed party have to spend extra funding for lawyer and witnesses who had left their families for a few days, including transportation, food, and accommodation in Jakarta.

b. Patronage after election day

Before election day of 2014 election day,patronage practice has dominated by financing winning team, individual and club goods, and vote buying.One year after election day, elected candidate usewedding and death events as a momentum to practicing patronage. It is recorded from selected interview with candidate as follows:

"I almost go to wedding party every week. In Ogan Ilir, wedding schedule was almost uniform, if not Wednesday-Thursday or Saturday-Sunday. In one day, I received three or four wedding invitation. When I come to this invitation, I must give them white envelope. Content of this envelope is money. The amount of money in this envelope is varied and depending on closeness between me and him", said AS, non-incumbent candidate from NasDem (interview, 26/09/2015).

"I always receive wedding invitation. I will be coming as long as I have free time. If I cannot attend to this invitation, I will send a white envelop which contain money to them. For me, attending wedding party is the most effective communication strategy to maintain constituents", said WM, incumbent candidate from PDI-P (interview, 08/09/2015).

Another event is *Ramadhon, Hari Raya Idul Fitri* (Eid al-Fitr), and *Hari Raya Idul Adha* (Eid al-Adha). "I received *Tunjangan Hari Raya* (THR, special incentive for Eid al-Fitr) from EPU (non-incumbent candidate from Golkar", said Wawan (interview 20/06/2015). Jalal, winning team member of DPRD Sumatera Selatan candidate (DPRD, South Sumatera Province Parliament) said that he receives THR every year before Eid al-Fitr celebration (interview, 21/09/2015). Helmi, winning team member of AS (non-incumbent candidate from NasDem, said that he never received THR. "I would contact him if there are personal that I cannot tackle alone and need help from AS", said Helmi (interview, 28/06/2015).

Based on candidate point of view, particularly elected candidate, it is time to begin using their power to oversee proposed development project. "In the past, my position is very weak. We lost in *Pilkada* 2010 (*Pilkada*, General Election of Head Region). My party, PDIP, has weak opposition relate to Golkarpower in executive and legislative. Now, I am a vice chairman of DPRD Ogan Ilir. I have strong position to determine budget allocation and bringing project to my constituent", said WM, incumbent candidate from PDIP (interview, 09/08/2015). KMT is also trying to keep care activity to their constituent. "I provide one sheep to my constituent in one village for Eid al-Adha celebration. Sacrifice is the way to maintain vertical relation (with the God) and horizontal relation (with my voters)", said KMT (interview, 10/08/2015).

In Stoke (2011) views, our finding show that how non-programmatic approach dominated patronage praxis in Ogan Ilir 1. It is also supporting Allen (2014, pp. 221-245) who said that political elite and ordinary people have the same opportunity to become subject of patronage. In our case, candidates get political support and voters get material and

immaterial benefits. Patronage praxis after election day show that patronage is never ending cycle. It does not stop when general election is end. Candidate maintain their constituent through patronage. We also agree with Aspinall (2011, pp. 289-319) who noted that patronage is a trump for identity politics. In our case, patronage is prerequisite for candidate to winning election even though she has a broad social networking and more popular than another candidate.

Conclusion

Money politics is empirical problem in Indonesia. Based on patronage approach, this research is devoted to understanding this problem and attempt to answer three questions: how to explain the candidate strategy to winning the 2014 General Elections in Ogan Ilir districts? Does the candidate have similar or different strategy to get political support from the voters? Do they still use patronage to maintain positive relationship with their constituency?

From the previous section, the researcher concludes that: (a) the implementation of the 2014 election in the electoral district of Ogan Ilir 1 tinged with political patronage conducted before and after the elections. Before the day of the elections, patronage practices embodied in the form of transport allowance, honorarium, cash consumption, relief goods to the community, and the utilization of the funds aspirations of councilors South Sumatra Province. Post-election, patronage is manifested in the form of donations at weddings, deaths, and the celebration of Islam days; (b) the practice of patronage began to happen when the candidates form a winning team, socialize, and vote buying; (c) networking family, particularly the extended family, and friendship is the foundation of the main candidates to build a winning team structure. However, the voices of the voters successfully conditioned to by 'by name by address' strategy; (d) elected candidate still continue practicing patronage as a tool for maintaining their constituent.

This research has several limitations. *First*, it is true that this research shows how *the Nine Step to Victory* is very useful framework to understanding the candidate and the voter behavior based on sequential principle and the candidate point of view. However, this framework should be combine to another approach to capture the complexity of local political landscape in the general election atmosphere. For example, this framework could be combine using Cultural Theory or Narrative Approach to understand local politics issues vigorously. To complement this

approach, it is important to build a sequential framework based on the voter point of view as a part of knowledge on Indonesian voter behavior.

Second, the researcher does not explain programmatic approach in Ogan Ilir 1. Conversely, he only focusing his study to elected candidate-broker relation in individual level. In his minds, as shown by WM statement in the above, local politician in Ogan Ilir District also request government projects so that they can maintain their constituent through government funds. This statement, then, open a research question on programmatic approach praxis at district level. The next research should be elaborated in the next research.

Third, network is the essence relation between the candidate, broker, and voter. This research fails to visualize this network because he does not apply *Social Network Analysis* (SNA). In the future, SNA should be considered as an approach and method to understanding patronage network at grass root level. For example, SNA could help the researcher to determine “who connect with whom” and “who is the central actors within voter’s network”. Visualizing patronage network into graphic give opportunity for the researcher to get more intuitions.

Fourth, when all party official perceives women quota (30% from total DCT) as administrative prerequisite, this research did not interview a women candidate, a women broker, or a women voter. It, then, fail to capture the voice of women as a candidate, a broker, or a voter. Does the man prefer than the women when adopting patronage as political strategy? Does the women candidate considered sex and gender attribute when recruit a broker? The next research should prioritize this issue because there are two women (5 percent) in Ogan Ilir District House of Representative (*DPRD Kabupaten Ogan Ilir*) as the winner of the 2014 General Elections.

References**Book**

- Alamsyah, A. (2015). *Musi Banyuasin, Sumatera Selatan: Dominasi Haji Sen*. In E. Aspinall & S. Mada (Eds.), *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014* (pp. 147-173). Yogyakarta, Indonesia: Pol Gov.
- Aspinall, E. (2013). *Money politics: patronage and clientelism in Southeast Asia*. In W. Case (Ed.), *Handbook of Democracy in Southeast Asia*. London, UK: Routledge.
- Aspinall, E., & Mada, S. (2015). *Politik Uang di Indonesia*. Yogyakarta, Indonesia: PolGov.
- Erb, M., Beni, R., & Anggal, W. (2005). *Creating cultural identity in an era of regional autonomy: reinventing Manggarai?* In M. Erb, M. Picard, & C. Faucher (Eds.), *Regionalism in post-Suharto Indonesia* (pp. 149-179). New York: Routledge Curzon.
- Eriksen, T. H. (2004). *What is anthropology?* London, UK: Pluto Press.
- Faucher, C. (2005). *Regional autonomy, Malayness and power hierarchy in the Riau Archipelago*. In M. Erb, P. Sulistiyanto, & C. Faucher (Eds.), *Regionalism in post-Suharto Indonesia* (pp. 132-148). New York, USA: Routledge Curzon.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebooks*. London, UK: SAGE Publications.
- Picard, M. (2005). *Otonomidaerah in Bali: the call for special autonomy status in the name of Kebalian*. In M. Erb, P. Sulistiyanto, & C. Faucher (Eds.), *Regionalism in post-Suharto Indonesia* (pp. 116-131). New York, USA: Routledge Curzon.
- Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganizing power in Indonesia: the politics of oligarchy in an age of markets*. New York, USA: RoutledgeCurzon.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. London, UK: W. Strahan and T. Cadell.
- Stoke, S. (2011). *Buying votes: distributive politics in democracy*. New Heaven, USA: Yale University Press.
- Triantini, Z. E. (2015). *Blora, Jawa Tengah: Sabet sebagai Penentu Kemenangan*. In E. Aspinall & S. Mada (Eds.), *Politik Uang Di Indonesia: Patronase Dan Klientelisme Pada Pemilu Legislatif 2014*. Jogjakarta, Indonesia: PolGov.
- Weiss, M. L. (2014). *Electoral Dynamics in Malaysia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Yin, Robert K. (2009). *Case Study Research: Design and Methods*. London, UK: SAGE Publications.

Journal

- Allen, N. W. (2014). From Patronage Machine to Partisan Melee: Subnational Corruption and the Evolution of the Indonesian Party System. *Pacific Affairs*, 87(2), 221-245. doi:10.5509/2014872221
- Allen, N. W. (2015). Clientelism and the personal vote in Indonesia. *Electoral Studies*, 37, 73-85. doi:10.1016/j.electstud.2014.10.005
- Antlöv, H. (2003). Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(2), 193-214. doi:10.1080/00074910302013
- Aspinall, E. (2011). Democratization and ethnic politics in Indonesia: nine theses. *Journal of East Asian Studies*, 11(2), 289-319.
- Aspinall, E. (2014). When Brokers Betray: Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 46(4), 545-570. doi:10.1080/14672715.2014.960706
- Brusco, V., Nazareno, M., & Stokes, S. C. (2004). *Vote Buying in Argentina*. Latin American Research Review, 39(2), 66-88. doi:10.1353/lar.2004.0022
- Carreras, M., & Irepoglu, Y. (2013). Trust in elections, vote buying, and turnout in Latin America. *Electoral Studies*, 32, 609-619. doi:10.1016/j.electstud.2013.07.012
- Desposato, S. W. (2006). Parties for Rent? Ambition, Ideology, And Party Switching in Brazil's Chamber of Deputies. *American Journal of Political Science*, 50(1), 62-80.
- Fukuoka, Y. (2013). Indonesia's 'democratic transition' revisited: a clientelist model of political transition. *Democratization*, 20(6), 991-1013. doi:10.1080/13510347.2012.669894
- Gonzalez-Ocantos, E., de Jonge, C. K., Meléndez, C., Osorio, J., & Nickerson, D. W. (2012). Vote Buying and Social Desirability Bias: Experimental Evidence from Nicaragua. *American Journal of Political Science*, 56(1), 202-217. doi:10.1111/j.1540-5907.2011.00540.x
- Hicken, A. (2011). Clientelism. *Annual Review of Political Science*, 14(1), 289-310. doi:10.1146/annurev.polisci.031908.220508
- Ichino, N., & Nathan, N. L. (2013). Do Primaries Improve Electoral Performance? Clientelism and Intra-Party Conflict in Ghana. *American Journal of Political Science*, 57(2), 428-441. doi:10.1111/j.1540-5907.2012.00624.x
- Keefer, P. (2007). Clientelism, Credibility, and the Policy Choice of Young Democracies. *American Journal of Political Science*, 51(4), 804-821.

- Larreguy, H., Montiel Olea, C. E., & Querubin, P. (2017). Political Brokers: Partisans or Agents? Evidence from the Mexican Teachers' Union. *American Journal of Political Science*, 61(4), 877-891. doi:10.1111/ajps.12322
- Manzetti, L., & Wilson, C. J. (2016). Why Do Corrupt Governments Maintain Public Support? *Comparative Political Studies*, 40(8), 949-970. doi:10.1177/0010414005285759
- Rueda, M. R. (2017). Small Aggregates, Big Manipulation: Vote Buying Enforcement and Collective Monitoring. *American Journal of Political Science*, 61(1), 163-177. doi:10.1111/ajps.12260
- Vicente, P. C., & Wantchekon, L. (2009). Clientelism and vote buying: lessons from field experiments in African elections. *Oxford Review of Economic Policy*, 25(2), 292-305. doi:10.1093/oxrep/grp018
- Weghorst, K. R., & Lindberg, S. I. (2013). What Drives the Swing Voter in Africa? *American Journal of Political Science*, 57(3), 717-734. doi:10.1111/ajps.12022
- Weitz-Shapiro, R. (2012). What Wins Votes: Why Some Politicians Opt Out of Clientelism. *American Journal of Political Science*, 56(3), 568-583. doi:10.1111/j.1540-5907.2011.00578.x

Online Media

- Burase, A. (2014). *Money Politics Reports Began to Appear*. Tempo.co, April 9, 2014. URL: <https://nasional.tempo.co/read/569059/money-politics-reports-began-to-appear>
- Fitria, A. G. (2014). *Survey: 2014 Election Prone to Money Politics*. Tempo.co, Maret 26, 2014. URL: <https://nasional.tempo.co/read/565546/survey-2014-election-prone-to-money-politics>

Moderation and Civilization

(A Historical Analysis on the Moderate Policy of the Rustamid Dynasty)

Ahmad Choirul Rofiq

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

ahmadchoirulrofiq@iainponorogo.ac.id

Abstract

The Rustamid Dynasty (160-296 AH / 776-909 AD) was a remarkable Ibadite dynasty. Unfortunately, most of the historical works have paid little attention to the development of Islamic civilization during the Rustamid reign. This fact is very contrary to the study of Sunnite or Shi'ite dynasties. This paper shows that the Rustamids performed their moderate policy by giving great tolerance, freedom, and equality to all citizens who lived in their territory, especially in Tahert (part of Algeria) and Jabal Nafusah (part of Libya). Consequently, this moderate policy, which was encouraged by the moderate Ibadite doctrine, had influence on the establishment of Islamic civilization in the Maghrib. The Rustamids successively played a significant role in economic prosperity, intellectual development, and Islamization. Like the Rustamids, the plural society of Indonesia can obtain the achievements of civilization by maintaining their multicultural diversity. Hence, the Indonesian government, the Muslim organizations, and all of the Muslim people should promote tolerant Islamic teachings and support intellectual movement.

Keyword: *the Ibadites, the Rustamids, Moderate Policy, Islamic Civilization*

<i>Submite</i>	: 30 November 2017
<i>Review</i>	: 20 Maret 2018
<i>Accepted</i>	: 29 Juni 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Introduction

The Islamic history tells us that there was an Ibadite government in the Maghrib. It was the Rustamids (the Rustumids) who accomplished their regime for over a century. They developed a great advance in economic field as well as in intellectual field. Their political territory boundary was close to the Aghlabids (183-296 AH / 800-909 AD), the Idrisids (172-313 AH / 789-926 AD), and the Midrarids (140-296 AH / 757-909 AD). Today Tahert (Tihart, Tahart, dan Taihort), the Rustamid capital, is in Algeria, and Jabal Nafusah, their vital province, is in Libya. Their reign began in 160 AH (776 AD) and crumbled when the Fatimids had destroyed them in 296 AH (909 AD). (al-Hariri, 1987, pp. 94, 185, 234) Although the Rustamids could establish their civilization, many historical works still have not taken adequate notice to

them. This fact is completely different from the researches of Sunnite or Syi'ite history. The following paper deals with the moderate policy implemented by the Rustamids in their effort to uphold Islamic civilization.

Muhammad 'Isa al-Hariri, in his work entitled *ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Maghrib al-Islami: Hadharatuha wa 'Alaqatuha al-Kharijiyyah bi al-Maghrib wa al-Andalus*, paid more attention to political affairs, such as situation of the Rustamid regime and internal strife to gain power. Al-Hariri shown the economic and intellectual achievement during the Rustamid rule. However, al-Hariri did not explain the motive behind the Rustamid policy that made their accomplishment happen.

The similar case is also found in the work of Ibrahim Bahaz entitled *ad-Daulah ar-Rustamiyyah: Dirasah fi al-Audha' al-Iqtishadiyyah wa al-Hayah al-Fikriyyah* (Alpha Publisher, Algiers, 2010). Indeed, he elucidated the economic and intellectual situation of the Rustamids. But he did not point out the factor that influenced the Rustamid policy. In addition to the works of al-Hariri and Bahaz, there was *al-Azhar ar-Riyadhiyyah fi A'immah wa Muluk al-Ibadhiyyah* written by Sulaiman Basya al-Baruni. This book was valuable because of its information about the establishment of the Rustamids until their collapse. Nevertheless, al-Baruni was unable to give historical analysis since he wrote his work descriptively. (al-Baruni, 1987)

Another book was *al-Ibadhiyyah fi Maukib at-Tarikh* written by 'Ali Yahya Mu'ammam. Unfortunately, the author preferred to write his work tendentiously to his Ibadite sect. As an insider writer, he used to admire the Rustamid dynasty and avoid any negative assessment towards the Rustamids. For example, his statement that the Rustamid government had a close similarity to the government of *al-Khulafa' ar-Rasyidun* (the rightly guided caliphs) because the Rustamid dynasty performed *syura* (consultation) to run their government and solve their problems. (Mu'ammam, 2008)

The same perspective was shown by Bukair ibn Balhah in his work entitled *al-Imamah 'inda al-Ibadhiyyah baina an-Nazhariyyah wa at-Tathbiq: Muqaranah ma'a Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*. Ibn Balhah stated clearly that the system of Ibadite governments, both in Oman and Tahert, was founded upon the principle of *syura* dan *ikhtiyar hurr* (free election). The political succession which was limited to the descendant of 'Abd ar-Rahman ibn Rustam could be accepted for the reason that the Ibadites carried out this policy to prevent political conflict among them. (Balhah, 2010)

Methods

According to the literature review above, there is no comprehensive research on the Rustamid policy and the factor that induced the Rustamids to carry out their policy. Moreover, this historical research is different from the previous works because of behavioural approach applied to analyze political behaviour of the Rustamids. This library research utilizes behavioural approach (Surbakti, 1992, p. 131) as well as historical method which are composed of topic selection, heuristic, verification, interpretation, and historiography. (Kuntowijoyo, 1997, p. 89) The topic on the Rustamid policy is chosen in connection with the fact that it is rarely discussed by historians. Besides, there is primary source which makes this topic workable. The main source is *Akhbar al-A'immah ar-Rustamiyyin* written by Ibn ash-Shaghir, historian who lived at the reign of the Rustamids, especially under the rule of Abu al-Yaqzhan ibn Aflah. This study also uses relevant secondary sources to elucidate analysis. However, the verification of *Akhbar al-A'immah ar-Rustamiyyin* is not performed utterly because this verification was done by A. de C. Motylinski in 1905 and Ibrahim Bahaz in 1985. (ash-Shaghir, 1986)

To ease process of analysing the moderate Rustamid policy in the Maghrib and its motive, it is important to define the meaning of the Maghrib, policy, and moderation. Yaqut al-Hamawi wrote that the Maghrib included the area between Milyanah (in Ifriqiyyah) and the Atlantic Ocean, and then it also embraced Andalusia. (al-Hamawi, 1977, p. 161) Some sources said that the Maghrib was divided into three parts, namely, Maghrib Adna (Tunisia today), Maghrib Ausath (Algeria), dan Maghrib Aqsha (Morocco). (al-Baruni, 1987)

This writing takes the definition of policy that means every decision made by government to control and regulate public society. (Surbakti, 1992, p. 190) The connotation of moderation is behaviour that keeps away from extremeness and radicalness. (Guralnik, 1996, p. 871) Immoderation is its antonym. It is indicated by extreme behaviour or excessive deeds, and then followed by refusing any different opinion or belief and eliminating tolerant or open-minded attitude. (Haidar, 1988)

Result and Discussion

1) The Rulers of the Rustamid Dynasty

Before elaborating the Rustamid policy, it is necessary to catch a glimpse of the Rustamids. The accomplishment of the Ibadites to obtain political victory in the Maghrib was

achieved by severely struggle. After Salmah ibn Sa'd had preached Ibadite doctrines in the Maghrib in 95 AH (713 AD), the Ibadites made several great efforts, for instance, the revolts commanded by 'Abd Allah ibn Mas'ud at-Tujibi in 127 AH (744 AD), 'Abd al-Jabbar ibn Qais al-Muradi and al-Harits ibn Talid al-Hadrami in 131 AH (748 AD), Isma'il ibn Ziyad an-Nafusi in 132 AH (750 AD), and then Abu al-Khaththab al-Ma'afiri in 140 AH (757 AD). At-Tujibi led the Hawwarah, one of Berber tribes, in Tripolitania to rebel against 'Abd ar-Rahman ibn Habib, Umayyad administrator in the Maghrib. But they were defeated easily by Ibn Habib.

The Hawwarite revolt continued under the command of 'Abd al-Jabbar and al-Harits. This rebel ended when al-Harits and 'Abd al-Jabbar had been killed suddenly. The failure also occurred in the revolt of Isma'il who directed the Nafusah tribe in opposition to Umayyad government. After several collapses, the Ibadites in the Maghrib made intensive contact with the leaders of Ibadite community in Basrah to prepare more careful and systematic struggle. (Isma'il, 1985)

Many emissaries from the Maghrib were sent to Basrah. Those delegates, who were called *hamalat al-'ilm*, lived for about five years (135-140 AH / 752-757 AD) there. They learnt directly from Abu 'Ubaidah Muslim ibn Abi Karimah, the highest leader of the Ibadites, and other Ibadite personages. (Nashir, 2006, p. 446) Subsequently, Abu 'Ubaidah chose Abu al-Khaththab as an Ibadite leader in the Maghrib. After coming back to the Maghrib, Abu al-Khaththab in 140 AH (757 A.D) convinced a number of Berber tribes, such as Nafusah, Hawwarah, and Zanatah to become a member of the Ibadites and take part into Ibadite struggle until their accomplishment of mission. Afterwards, they were successful to conquer Tripolitania, Jazirah Jirbah, Jabal Damr, Qabis, and even Qayrawan.

Unfortunately, they were crushed by the Abbasid military at the battle of Tawurga in 144 AH (761 AD). Ya'qub ibn Habib who was known as Abu Hatim al-Malzuzi since 145 AH (762 AD) then occupied the Ibadite leadership. However, in 155 AH (772 AD) the Ibadites were also defeated in Jabal Nafusah. At this battle Abu Hatim and his army become the victims. When Abu Yahya ibn Qiryas had continued the leadership, the similar failure occurred in 156 AH (773 AD). A significant outcome was obtained by the Ibadites under the command of 'Abd ar-Rahman ibn Rustam. (Isma'il, 1985, pp. 85-95) 'Abd ar-Rahman avoided an aggressive attack of Muhammad ibn al-Asy'ats, the governor of Egypt sent by

Abu Ja'far al-Mansur, after he had escaped to the Sufjaj Mountain. He even got a great support from many Berber tribes, such as Nafusah, Hawwarah, Lawatah, Miknasah, Mazatah, and Lamayah. (al-Baruni, 1987, pp. 43-45) They eventually went to Tahert and installed 'Abd ar-Rahman as the leader of the Ibadites in 160 AH (776 AD). (al-Hariri, 1987)

There is no information about 'Abd ar-Rahman's genealogy in *Akhbar al-A'immah ar-Rustamiyyin*. Ibn ash-Shaghir only said that the Ibadites moved to Tahert and then had the same opinion to chose 'Abd ar-Rahman as their leader to carry out several responsibilities, for instance, helping the oppressed people, giving a verdict of guilty to every unlawful deed, distributing a tithe, and so forth. 'Abd ar-Rahman was designated because he didn't have a tribe or family who could protect him. At the assignment of 'Abd ar-Rahman as administrator of Qayrawan, Abu al-Khaththab asserted that the Ibadites would easily turn down 'Abd ar-Rahman if he deviated from the Islamic law because he did not have any defending tribe or family. (ash-Shaghir, 1986)

Al-Hariri stated that the genealogy of 'Abd ar-Rahman ibn Rustam referred to Bahram whose lineage related to the Persian kings. At that time, Bahram ('Abd ar-Rahman's grandfather) was a *maula* of 'Utsman ibn 'Affan in Medina. Rustam passed away when he made the pilgrimage to Mecca together with his wife and 'Abd ar-Rahman, his son. His wife got married again with a man from Qayrawan and then took 'Abd ar-Rahman there. 'Abd ar-Rahman grew up in Qayrawan where the Ibadite doctrines had been preached by Salmah ibn Sa'd. Being attracted by the Ibadite teachings, he followed this religious sect. (al-Hariri, 1987, pp. 74-78) Later he was a member of delegates sent to Basrah and struggled together with Abu al-Khaththab to establish a political authority for the Ibadites.

After his assignment as a leader of the Maghrib Ibadites, 'Abd ar-Rahman immediately started to build Tahert to become their capital. Firstly, he received financial support from the Ibadite society in Basrah. This assistance was delivered by reason of vast information that there was an Ibadite leader with a great honesty, justice, modesty, and humility. As a result of it, the prosperity of Tahert people increased. Such condition fascinated every traveler, tourist, and merchant who came to Tahert. Furthermore those men felt convenient to stay and live in Tahert. Therefore, the population of Tahert grew up and turned into assorted. The affluence of life remained until the death of 'Abd ar-Rahman. (ash-Shaghir, 1986, pp. 32-41) Before his death in 171 AH (787 AD), he had formed a commission to

appoint his successor. This board finally elected ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Abd ar-Rahman as a leader. (al-Baruni, 1987)

Although there were some political problems, ‘Abd al-Wahhab successfully led his leadership. His achievement was denoted by stability and steadiness in administration as well as in prosperity. Moreover, the Rustamids influence reached abroad indicated by their encirclement of Tripolitania and triumph over Tilimsan. Another accomplishment was attainment of strong loyalty and allegiance from the people of Jabal Nafusah whose support was very indispensable for the survival of the Rustamids. (ash-Shaghir, 1986, p. 45) Besides, he created tranquillity inside the Rustamid territory until his death in 211 AH (826 AD). Perhaps his valuable experience during the reign of his father was the factor that helped him to run his government. (al-Hariri, 1987)

‘Abd al-Wahhab was succeeded by his son, Aflah, because Aflah had overcome the revolt of Banu Massalah (ash-Shaghir, 1986, p. 55) and the rebellion of Yazid ibn Fandin. (al-Baruni, 1987, p. 161) The Rustamids achieved their glory during his sovereignty. The trade activity progressed well and many foreign merchants come to Tahert. Hence, the financial revenue multiplied and the wealth developed rapidly. But the situation changed when Aflah’s son, Abu al-Yaqzhan, had made a pilgrimage to Mecca and he was captured by Abbasid military. He felt so sad for many years and finally died. (ash-Shaghir, 1986, pp. 61-62, 64-69) His death in 240 AH (854 AD) ended his flourishing government. (al-Hariri, 1987)

Then some Ibadites met Abu Bakr ibn Aflah to assign him as their leader. At that moment, there was a refutation from some citizens who disagreed with this appointment, but most people ignored this rejection. The crucial problem faced by Abu Bakr related to the assassination of Muhammad ibn ‘Irfah. Because Abu Bakr failed to deal with the conflict, his rule did not sustain for a long time. Abu al-Yaqzhan Muhammad ibn Aflah, Abu Bakr’s brother, replaced him in 241 AH (855 AD) and returned the political stability. (al-Hariri, 1987) Ibn ash-Shaghir, who beheld directly the leadership of Abu al-Yaqzhan, said that Abu al-Yaqzhan was similar to ‘Abd ar-Rahman ibn Rustam, the founder of Rustamid dynasty. Both of them were very pious and modest men. Besides, Abu al-Yaqzhan could enhance the intellectual activity in Tahert. Many scholars from various sects appeared during his administration because he did not discriminate them. His government took forty years until his death in 281 AH (894 AD). (ash-Shaghir, 1986)

The Ibadites elected Abu Hatim ibn Abu al-Yaqzhan to take the place of his father. Although several clashes emerged and Abu Hatim was enforced to leave Tahert, he could establish his authority. (ash-Shaghir, 1986, pp. 102-115) He restored the political situation and social condition after internal dissension. However, the miserable disaster happened when the Rustamids had been defeated by the Aglabids in 283 AH (896 M) at the battle of Manu in Jabal Nafusah. His reign persisted until his murder in 294 AH (906 AD). After this assassination, al-Yaqzhan ibn Abi al-Yaqzhan continued the Ibadite leadership. But most people detested him and thought that he was involved to this political conspiracy. As a consequence, his government did not run smoothly. In addition, the threat of Abu 'Abd Allah al-Husain, a Syi'ite commander ordered by 'Ubaid Allah al-Mahdi (the founder of Fatimid dynasty), came and eventually annihilate the Rustamids in 296 AH (909 AD). (al-Baruni, 1987)

2). The Moderate Policy of the Rustamid Dynasty

The Rustamids fruitfully established remarkable civilization because of their moderate policy. Undoubtedly, this policy corresponded to the Ibadite doctrine that preferred a moderate behaviour than extreme conduct to the non-Ibadite people. (al-Isfaraini, 1988) As a consequence of it, the Ibadites were renowned as the closest Kharijite sect to *Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah* or the Sunnites. (Zahrah, 1946) The Rustamid policy to the non-Ibadites, either Muslim or non-Muslim, was founded on the basis of tolerance. Such moderation was applied during the period of Rustamid dynasty from the first ruler ('Abd ar-Rahman) to the last ruler (al-Yaqzhan). For this reason, there were various citizens who lived freely and peacefully in the Rustamid territory without any distinction or discrimination.

As mentioned above, 'Abd ar-Rahman ibn Rustam, the founder of Rustamid dynasty, was famed of his modesty, humility, honesty, and justice. All people were very delighted of his headship. From the beginning of his sovereignty, he focused his attention to make prosperity of citizens. Hence, many travelers and merchants from abroad came to Tahert and dwelt there. They were from different homelands, for example Basrah and Kufah. Additionally, there were non-Muslim communities paid some *jizyah* (head tax on free non-Muslims under Muslim rule). Because of this affluence, the Rustamids smoothly rejected the second financial assistance from the Ibadites of the Masyriq. (ash-Shaghir, 1986)

‘Abd al-Wahhab continued ‘Abd ar-Rahman’s moderate policy. As a consequence, the prosperity of his society went to a great extent. The reign of Aflah enhanced the wealth of his people. This enrichment was denoted by remarkable development and trade activity operated by both national and foreign businessmen. But such conducive situation was disrupted by internal conflict in the short period of Abu Bakr ibn Aflah. After the accession of Abu al-Yaqzhan ibn Aflah, the political instability could be controlled and the government was handled well. Abu al-Yaqzhan made a peaceful situation and encouraged the pluralistic life by making *munazharah* (academic debate and discussion) followed by many different scholars, either the Ibadites or non-Ibadites. Ibn ash-Shaghir, the Syi’ite historian, was a witness who joined directly the public gathering between Abu al-Yaqzhan and his people. (ash-Shaghir, 1986)

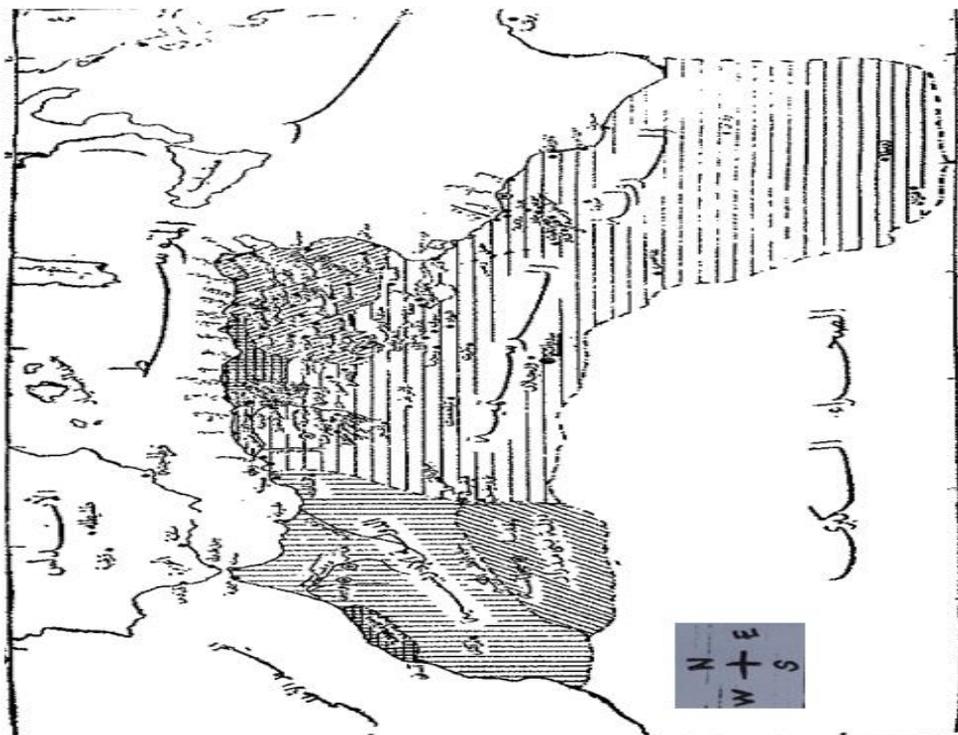
The situation of harmony and tolerance appeared during the reign of Abu Hatim too. Many scholarly forums were held. Moreover, there was a number of non-Ibadite persons who served him as his staff, for instance, Abu Mas‘ud, Abu Danwan, and ‘Ulwan ibn ‘Ulwan who were Hanafite men came from Kufah. Besides, Abu Hatim sometimes took the advice from his advisors, both from Ibadites and non-Ibadites. (ash-Shaghir, 1986)

The reign of al-Yaqzhan ibn Abi al-Yaqzhan was similar to his predecessors. He also gave tolerance and equality to all citizens without discrimination against their sects. Unfortunately, the Rustamid oppositions took advantage of this tolerant policy to help the foreign adversaries demolish the Rustamids, especially when Abu ‘Abd Allah asy-Syi’i had attacked Tahert and finally killed al-Yaqzhan. These latent opponents consisted of the Syi’ites, the Mu‘tazilites, and the Shufrites. Perhaps these groups had the courage to dissolve the Rustamids because they had known that the Rustamids were on the verge of dissolution. Ofcourse they witnessed the downfall of the Nafusites by the Aglabids at the battle of Manu in 283 AH (896 AD). (al-Baruni, 1987)

This state of affairs was akin to the situation during the last days of the ‘Abbasids in 656 AH (1258 AD) in Baghdad. It was mentioned that before the collapse of Abbasid power, the Syi’ites (conducted by Ibn al-‘Alqami, the vizier of the Caliph al-Musta‘sim), had assisted Mongolian troops led by Hulaku Khan to attack and destroy the ‘Abbasids. (Hasan, 1967) It is understood that the Rustamids surely preferred the Ibadite sect than other sects because a believer must support and spread his own belief. Moreover, the Ibadites were the majority

people in the Rustamid territory. For this reason, the non-Ibadites always took advantage of every chance to strike the Rustamids. Hence, each tolerant government should preclude any menace and ought to be cautious every time.

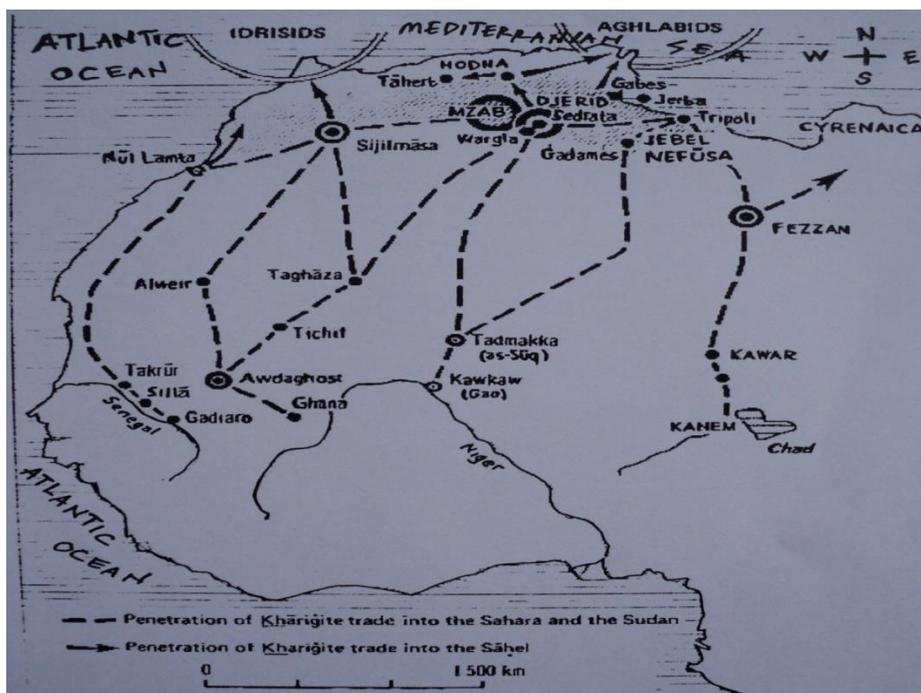
The previous explanation clearly proved that the Rustamids, from their early government until their downfall, constantly applied tolerant policy to their people without distinction of their sects. All citizens of different faiths had a similar opportunity to stay and live under the spirit of harmony. Although the Rustamids protected every religion, however, the Ibadite scholars naturally attempted to defend their Ibadite sect. They responded and replied another sect by open debate orally. Besides, they also wrote many works to argue against their opponents. (al-Baruni, 1987) Moreover, there were non-Muslim inhabitants under the Rustamid rule. At that time, there was Yahudza ibn Quraisy, a Jewish linguist who had many academic works in comparative languages of Arabic, Hebrew, and Berber. The Christians, who most of them were African people, existed too in Tahert. (al-Hariri, 1987)



The Rustamid Territory (al-Hariri, 1987)

The moderate policy of the Rustamids also clearly appeared in the economic activity. The livelihoods which became the sources of Rustamid revenue were trade, agriculture (olive, grape, palm, and wheat), cattle breeding (sheep, horse, and donkey), industry (cloth), and

mining (iron). The greatest income was earned from trade. The exported products consisted of earthenware, glassware, and perfume, whereas the imported commodities were composed of gold, slave, and ivory from *Bilad as-Sudan*, (al-Hariri, 1987) i.e. the land of the Negroes or the dark-skinned group of people. (Lombard, 2004)



Trade Routes in the Rustamid Era (Lombard, 2004)

Practicing economic policy, the Rustamids steadily upheld the value of justice, equality, and public kindness. These worthy values are Islamic universal principles to gain successful leadership. The Rustamids continuously performed these valuable principles. They consistently gave the same chance to everybody to undertake economic activity. All people must obey the government rule to gain advantages, whereas the Rustamids had to maximize their economic potentiality and ensure that their economic activities run in appropriate way for Islamic principles. Besides, the Rustamids effectively made governmental income from taxes, alms, donations, and *jizyah* for the necessities of government and society. For that reason, the Rustamids performed redistributive policy (Surbakti, 1992) by taking some wealth of their citizens and giving its benefit to them through certain governmental programs. The advantages of earnings were fulfilled by means of development over the Rustamid territory until the prosperity of society could be achieved.

On the intellectual field, the Rustamids had many scholars and learned men, such as ‘Abd ar-Rahman ibn Rustam, ‘Abd al-Wahhab ibn ‘Abd ar-Rahman, Aflah ibn ‘Abd al-Wahhab, dan Abu al-Yaqzhan ibn Aflah, (Mu‘ammar, 2008) Mahdi an-Nafusi, ‘Abd Allah al-Lamthi, and Mahmud ibn Bakr. ‘Abd ar-Rahman had an exegesis of the Qur’an. (al-Baruni, 1987). ‘Abd al-Wahhab wrote his *Masa’il Nafusah* on Islamic jurisprudence. (al-Hariri, 1987) Aflah mastered Arabic literature, mathematics, and astronomy. Abu al-Yaqzhan wrote about 40 works. (al-Baruni, 1987). Because of their intellectual enthusiasm, the Rustamids vigorously transferred valuable works from the Masyriq to the Maghrib, especially to the library of al-Ma’shumah (in Tahert) and that of Khizanah Nafusah (in Jabal Nafusah). (al-Hariri, 1987) Moreover, Tahert was famous as *‘Iraq al-Maghrib*, *al-‘Iraq ash-Shaghir*, *Balkh al-Maghrib*, (al-Baruni, 1987) or *Little Basra*. (Lombard, 2004)

Apart from these achievements, the Rustamids also had significant contribution to Islamization in the Maghrib and *Bilad as-Sudan*. For about two centuries (130-340 AH / 750-950 AD), the Kharijite people gained control of trade routes in the Maghrib and *Bilad as-Sudan*. Many Ibadite merchants made journeys along the vast area, such as Tahert, Wargla, Nafzawa, Jabal Nafusah, Tadmakkat, Gao, and Ghana. (Kaye, 1997) By this economic activity, the Ibadites took advantages of trading business and preaching Islam at the same time.

3). The Rustamid Policy and Its Relevance to the Indonesian Society

Donald V. Gawronski said that history is the interpretative study of the recorded fact of bygone human beings and societies, the purpose of which study is to develop an understanding of human actions, not only in the past but for the present as well. History seeks to understand the human past in an effort to understand a changing present, with the ambitious hope that such an understanding will provide worthwhile guidelines for future use. (Gawronski, 1969) That is the valuable benefit of history. Relating to the plurality of Indonesian people, the historical study on the the moderate policy of the Rustamids and its impact on the establishment of Islamic civilization in the Maghrib gives us many advantages. We can conclude, by this historical reading, that the successful advancement of the Rustamid Dynasty was influenced by their policy to perform great tolerance among their plural citizens.

Plurality is an indisputable fact of Indonesian society. Referring to the Report of the Wahid Institute (WI) 2008 and the Moderate Muslim Society (MMS) 2009, that religious conflicts tend to not be better. In the 2008-2009 annual report on religious pluralism, there are eight categories recorded by WI and MMS from 2008-2009: The deception of the group/individual, whether it is done by the community, the state, or a combination of both, violence based on religion, religious regulation, places of worship conflicts, such as vandalism, licensing problems, land disputes and other matters related, freedom of thought and expression, inter-religious relations as the issue of the spread of hatred against other religions, religious fatwa and morality and pornography which, although not directly related to religion, but the issues of morality and pornography-in-praxis reality cannot be separated from religious understanding. (Ni'am, 2015)

Pancasila, accepted by virtually all Muslim, secular and non-Muslim leaders, is the common ideological platform (*kalimatun sawa*) of the Indonesian state that is has a lot of diversity and plurality, not only in terms of ethnicity and culture, but also in terms of religion. For mainstream Muslims, however, the Pancasila is already Islamic enough; all pillars of Pancasila are basically in conformity with the fundamental teachings of Islam. Since the Indonesian state with Pancasila ideology is already Islamic enough, there is no strong reason for mainstream Muslims to transform Indonesia into an Islamic state. That is why any attempt to create an Islamic state Indonesia fails to attract the interest of mainstream Muslims. (Azra, 2006) The Indonesian Constitution guarantees all persons the freedom of worship according to his/her own religion or belief. Pancasila states that the belief in the One and Only God is the fundamental principle of Indonesian nation.

Indonesia, the plural country with the largest Muslim population in the world, should be the model of other Islamic nations to prove that Islam is moderate and tolerant because the concept of moderation and tolerance can be found easily in the Islamic teaching based on the Qur'an. Islam gives the right to freedom of conscience and conviction to the citizens. The Holy Qur'an has laid down the injunction: "There should be no coercion in the matter of faith" (2: 256). Although there is no truth or virtue greater than Islam, and although Muslims are enjoined to invite people to embrace it and advance arguments in favour of it, they are not asked to spread this faith by force. Whoever accepts it does so by his own choice. Muslims welcome such converts to Islam with open arms and admit them to their community with

equal rights and privileges. But, equally, Muslims have to recognize and respect the decision of people who do not accept Islam. No moral, social or political pressures may be put on them to change their minds. (Mawdudi, 1980)

Islam demanded Muslims to be kind and fair to non-Muslims. Allah states in the Glorious Qur'an: "Allah forbids you not with regard to those who fight you not for (your) faith nor drive you out of your homes, form dealing kindly and justly with them". (60: 8). Islam forbids abusing the beliefs of non-Muslims, when it provokes the other party to respond with reciprocal abuse. Instead, Allah instructs Muslims to use a fair and well-matured dialogue with such people. Allah says: " Say: O People of the Book! Come to common terms between us and you; that we worship none but Allah; that we associate no partners with Him; that we erect not, from among ourselves, Lords and patrons other than Allah. If then they turn back, say you: Bear witness that we are Muslims" (QS. 3: 64). (al-Sheha, 1980)

The spirit of the Qur'an finally inspired Muslims to become tolerant to non-Muslims. Historical studies have recorded a harmonious relation among the followers of Islam, Christianity, Judaism, and other religion. The prophet Muhammad set an example of tolerance in Medina. The messenger wrorte a document concerning the "Migrants" and the "Helpers" in which he made a friendly agreement with the Jews. (Peters, 1994) This document has been preserved which is commonly known as the Constitution of Medina. It appears to be authentic. It may be taken to show that the people of Medina were regarded as constituting a political unit of a new type, an *ummah* or community. It was bound together by their solemn agreement with one another. (Watt, 1961) The bond between members of the *ummah* transcends any bonds or agreements between them and the pagans, and they are all to seek revenge if any Muslim is killed fighting in the way of God. Besides, there are clauses dealing with relations with the Jews, who are partners in the affairs of Medina and bear their share of the expenses of warfare as long as there is no treachery between them and the Muslims although both Muslims and Jews will keep their own religion. (Kennedy, 1986)

Umar ibn al-Khaththab also performed tolerant policy. When the surrender of Jerussalem seemed to be imminent, Umar went to Syria and concluded a treaty with the notables of the city on very generous terms. Christians were to be given protection, and to have freedom of worship, paying a tax which in comparison was less heavy than that which in the past they had paid to Byzantium. (Holt, 1970) Furthermore, the Abbasid dynasty made a

similar policy. They successfully achieved the golden age of Islamic civilization because of this religious tolerance. At that time, the adherents of these religions lived together with great harmony. Moreover, non-Muslim community contributed to intellectual achievement during the Abbasid reign. The Abbasid citizens composed of Muslims and non-Muslims. The non-Muslims comprised Christians, Jews, Sabaeans, and Zoroastrians. (Ali, 1994) They were highly regarded by the Abbasid government because Islam doctrine orders its followers to esteem another religion and considers them as *Ahl adz-Dzimmah* (the free non-Muslim subjects living in Muslim countries who, in return for paying the capital tax, enjoyed protection and safety) or *Ahl al-Kitab* (the People of the Book), especially Christians and Jews. (Al-'Udat, 1992)

The non-Muslims were respected by the Abbasids. They enjoyed the practice of their religion and their customs and frequently became influential in the Abbasid government. (Grunebaum, 1953) This fact was different from the Christian empire which attempted to impose Christianity on its subjects. (Al-Aayed, 2002) The *dzimmah* on the whole worked well. The non-Muslims managed to thrive under Muslim rule, and even to make a significant contribution to Islamic civilization. (Lewis, 1974) At that time, many non-Muslim scholars contributed their valuable works to intellectual achievement during the Abbasid reign. The most celebrated of non-Muslim scholars was Abu Zaid Hunain ibn Ishaq al-'Ibadi. He was a native of Hira, the son of a Christian (Nestorian) druggist. Hunain had many other friends and clients, mostly physicians of Jundi-Shapur and those who had removed to Baghdad and used the Arabic language. (O'Leary, 1979)

This paper expects to give a positive outlook on the relationship between the Muslim and non-Muslim communities in our daily life. As we know, Indonesian people composed of various ethnicities and religions. They can emulate the success of Abbasid and Rustamid government in creating a harmonious multicultural relationship along with the achievements of civilization. Perhaps, the plural society of Indonesia can obtain their splendour by maintaining this multicultural diversity. Moreover, Indonesian Islam has a number of distinctive characters vis-à-vis Middle Eastern Islam. Indonesian Islam is a moderate and accommodative kind of Islam. For that reason, Indonesian Islam is called as “Islam with a smiling face”; Islam which in many ways is compatible with modernity, democracy, and plurality. Despite these distinctions, Indonesian Islam is not less Islamic compared to Islam

somewhere else. Geographically, Islamic Indonesia is far away from the Middle East, but that does not mean that Indonesian Islam is religiously peripheral. (Azra, 2006)

The Indonesian government, the Muslim organizations, and all of the Muslim people should promote tolerant Islamic teachings. They must prevent radicalism and avoid liberalism to create a peaceful life. Multicultural Islamic education is a means for Indonesia with its *Bhinneka Tunggal Ika* (Unity in Diversity) to shape inclusive religiosity and reach the higher civilization as the Rustamids did. Besides, Indonesian government must provide the impetus of science and technology development because civilization will never be achieved without science and technology. Therefore, every intellectual movement as well as scientific researches and innovations should be fully supported by Indonesian government. Indeed, civilization is an advance level of development characterized by advance social development, economic progress, good political organization, scientific and technological development maintained with enthusiasm to pursuit the knowledge in which many ethnicities and religions may participate. (Ashimi, 2016)

Conclusion

The Rustamids consistently performed the Ibadite teaching that appreciated all Muslim people equally and took no notice of their various sects. (al-Isfaraini, 1988) Therefore, it can be declared that the implementation of moderate policy was inspired by theological value, i.e. the Ibadite doctrine. Because of this moderate behaviour, the Rustamids accomplished their government peacefully and gave tolerant rule to all citizens under their administration. Accordingly, they obtained great achievement in the establishment of Islamic civilization. Finally, it is more useful to make the Rustamid accomplishment generally known, for example, by inclusion the Rustamid Dynasty into the books of Islamic history that should be taught in the Islamic university. Besides, forthcoming contemporary research should be carried out to make discussion on the Ibadites more comprehensive, for instance, research on existing Ibadite society. Actually, Indonesian people potentially can realize higher civilization as the Rustamids did. The Indonesian government, the Muslim organizations, and all of the Muslim people should promote tolerant Islamic teachings and support intellectual movement. Moreover, educating all societies to prefer moderation and avoid extremism must be held persistently to maintain peaceful life and obtain an advance of civilization.

References

- Al-Aayed, S. H. 2002. *The Rights of Non-Muslims in the Islamic World*. Riyadh: Dar Eshbelia.
- Al-Baruni, S. B. 1987. *Al-Azhar ar-Riyadhiyyah fi A'immah wa Muluk al-Ibadhiyyah*. Vol. 2. Oman: Salthanah 'Uman.
- Al-Hamawi, Y. 1977. *Mu'jam al-Buldan*. Vol. 5. Beirut: Dar Shadir.
- Al-Hariri, M. 1987. *Ad-Daulah ar-Rustamiyyah bi al-Maghrib al-Islami*. Kuwait: Dar al-Qalam.
- Ali, A. 1994. *A Short History of the Saracens*. New Delhi: Nusrat Ali Nasri for Kitab Bhavan.
- Al-Isfaraini, A. 1988. *At-Tabshir fi ad-Din wa Tamyiz al-Firqah an-Najiyah 'an al-Firqah al-Halikin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Sheha, A. R. 1980. *Human Rights in Islam and Misconceptions*. London: Islamic Foundation.
- Al-'Udat. 1992. *Al-'Arab al-Nashara*. Damascus: al-Ahali.
- Ash-Shaghir, I. 1986. *Akhbar al-A'immah ar-Rustamiyyin*. Beirut : Dar al-Gharb al-Islami.
- Ashimi, Tijani Ahmad. 2016. "Islamic Civilization: Factors Behind Its Glory and Decline". *International Journal of Business, Economics and Law*. Vol. 9, Issue 5. 180-184.
- Azra, A. 2006. "Indonesian Islam, Mainstream Muslims and Politics". *Taiwanese and Indonesian Islamic Leaders Exchange Project* (pp. 1-11). Taiwan Taipei: The Asia Foundation.
- Balhah, B. i. 2010. *Al-Imamah 'inda al-Ibadhiyyah baina an-Nazhariyyah wa at-Tathbiq*. Vol. 2. Oman: Maktabah adh-Dhamiri.
- Gawronski, D. V. 1969. *History: Meaning and Method*. Illinois: Scott, Foresman, and Company.
- Grunebaum, G. E. 1953. *Medieval Islam*. Chicago: University of Chicago.
- Guralnik, D. B. 1996. *Webster's New World College Dictionary*. New York: A Simon & Schuster Macmillan Company.
- Haidar, K. 1988. *I'tidal am Tatharruf*. Kuwait: Dar Qirthas li an-Nasyr.
- Hasan, H. I. 1967. *Tarikh al-Islam as-Siyasi, wa ad-Dini, wa ats-Tsaqafi, wa al-Ijtima'i*. Vol. 4. Cairo: Maktabah an-Nahdhah al-Mishriyyah.
- Holt, P. 1970. *The Cambridge History of Islam*. Vol. IA. Cambridge: Cambridge University Press.
- Isma' il, M. 1985. *Al-Khawarij fi Bilad al-Maghrib hatta Muntashaf al-Qarn ar-Rabi'*. Maghrib: Dar ats-Tsaqafah.

- Kaye, A. S. 1997. "Bilad al-Sudan" in *The Encyclopaedia of Islam*. Vol. 9. Leiden: E. J. Brill.
- Kennedy, H. 1986. *The Prophet and the Age of the Caliphates*. London: Longman.
- Kuntowijoyo. 1997. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Lewis, B. 1974. *Islam from the Prophet to the Capture of Constantinople*. New York: Harper & Row.
- Lombard, M. 2004. *The Golden Age of Islam*. Princeton: Markus Wiener Publishers.
- Mawdudi, A. A. 1980. *Human Rights in Islam*. London: Islamic Foundation.
- Mu'ammam, Y. 2008. *Al-Ibadhiyyah fi Maukib at-Tarikh*. Vol. 2. Seeb: Maktabah adh-Dhamiri.
- Nashir, M. S. 2006. *Mu'jam A'lam al-Ibadhiyyah min al-Qarn al-Awwal al-Hijri ila al-'Ashr al-Hadhir*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Ni'am, S. 2015. "Pesantren: the miniature of moderate Islam in Indonesia". *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 5, 111-134.
- O'Leary, D. L. 1979. *How Greek Science Passed to the Arabs*. Great Britain: Routledge & Kegan Paul Ltd.
- Peters, F. 1994. *A Reader on Classical Islam*. Princeton: Princeton University Press.
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Watt, W. M. 1961. *Muhammad, Prophet and Statesman*. Oxford: Clarendon Press.
- Zahrah, M. A. 1946. *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah fi as-Siyasah wa al-'Aqa'id*. Egypt: Dar al-Fikr al-'Arabi.



**UCAPAN TRIMAKASIH KEPADA PEER – REVIEW PADA TERBITAN
JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA)
VOLUME 6 NO 02 JULI 2018**

Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si (IPDN Jatinangor Indonesia)

Dr. Oman Sukmana, Drs., M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

Dr. Habib Ahmad, S.Sos, M.A (Universitas Muhammadiyah Malang)

Drs. Jusuf Harsono, M.Si (Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Achmad Zulfikar, S.IP, M.Si (Universitas Hasanudin Makassar)

Alamsyah, S.AP, M.AP (Universitas Sriwijaya Palembang)



**AUTHOR GUIDELINES / GAYA SLINGKUNG
JURNAL ARISTO (SOSIAL, POLITIK, HUMANIORA)**

**Masterplan reserves cultural policy development in the Ponorogo district
Masterplan kebijakan pengembangan cagar budaya di kabupaten Ponorogo**

(Article Title: Indonesian or English Lenguange, Times New Roman 14 pt, bold, centered / Huruf Besar, Bahasa Indonesia ataupun Inggris, Times New Roman 14 pt, di hitamkan)

(The title of the article should be brief and informative and it should not exceed 20 words / Judul artikel harus singkat dan informatif dan tidak melebihi 20 kata).

Yusuf Adam Hilman, Imam Prasojo, dan Jimly Assidiqi.

(Author Name / Nama Penulis: First Author, Second Author, and Third Author: Times New Roman 12 pt)

Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

(Affiliations: Times New Roman 12 pt)

adamhilman@umpo.ac.id, Imam@ui.ac.id & Jimly@mk.ac.id

(Email Author: Times New Roman 12 pt)

Abstract & Abstraksi

*(Article Title: English and Indonesian Lenguange, 200 Times New Roman 11 pt, Single Space Lines, Justify)
(Keyword / Kata Kunci : 3 – 5 Kata,*

Keyword

Regency of ponorogo having natural resources, as well as the potential typical culture, and a society that can be develop into the tourism. The potential can be then developed, that can bring up the optimal and into factors that supports the construction of tourism in district Ponorogo. In carrying out development of tourism in Ponorogo, there are several constraint or factors barrier, including: 1. Access Of Transportation Facilities And Infrastructure Who Are Still Minimal And Not Optimal. 2). To access the road facilities and cross is still far from expectation, disturbing visitors to access tourism in the Ponorogo.

Keyword: The Community Development, Development Of Tourism, The Potential Of The Region.

Kata Kunci

Kabupaten ponorogo memiliki sumber daya alam, serta potensi budaya yang khas, dan masyarakat yang dapat berkembang menjadi pariwisata. Potensi tersebut dapat kemudian berkembang, yang dapat memunculkan faktor optimal dan menjadi yang mendukung pembangunan pariwisata di Kabupaten Ponorogo. Dalam melaksanakan pembangunan pariwisata di Ponorogo, ada beberapa kendala atau faktor penghalang, termasuk: 1. Akses atas fasilitas Transportasi Dan Infrastruktur Siapa



Masih Minimal Dan Tidak Optimal. 2). Untuk mengakses fasilitas jalan dan lintas masih jauh dari harapan, mengganggu pengunjung untuk mengakses pariwisata di Ponorogo.

Kata Kunci: Pengembangan Komunitas, Pengembangan Pariwisata, Potensi Kawasan.

<i>Submite</i>	: 14 Nov 2016
<i>Review</i>	: 14 Nov 2016
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2017
<i>Surel Corespondensi</i>	: adamhilman@umpo.ac.id

The organization of the manuscript includes **Introduction, Methods, Results and Discussion, Conclusions and References.**

Organisasi naskah meliputi **Pendahuluan, Metode, Hasil dan Pembahasan, Kesimpulan dan Referensi.**

Pendahuluan / Introductions

Metode / Methode

Hasil dan Pembahasan / Result and Discussion

Kesimpulan / Conclusion

(12 pt, di hitamkan / 12 pt, bold)

The first letter of headings and subheadings are capitalized and headings are numbered in Arabic numerals. The manuscript is written with Times New Roman font size 10, single-spaced, left and right alligned, on one-sided pages and on A4 paper (210 mm x 297 mm) with the upper margin of 3.5 cm, lower 2.5 cm, left and right each 2 cm. The manuscript including the graphic contents and tables should be no longer than 15 pages, including pictures and tables. The use of subheadings is discouraged. Between paragraphs, the distance is one space.

Huruf pertama dari judul dan subjudul dikapitalisasi dan judul diberi nomor dengan angka Arab, Naskah ditulis dengan ukuran font Times New Roman 12, spasi tunggal, kiri dan kanan alligned, pada satu sisi halaman dan di atas kertas A4 (210 mm x 297 mm) dengan margin atas 3,5 cm, bawah 2,5 cm, kiri dan kanan masing-masing 2 cm. Naskah termasuk isi grafik dan tabel harus tidak lebih dari 15 halaman, termasuk gambar dan tabel. Penggunaan subpos tidak disarankan. Antara paragraf, jarak adalah satu ruang.



Abbreviations/Terms/Notations/Symbols.

The use of abbreviations is permitted, but the abbreviation must be written in full and complete when it is mentioned for the first time and it should be written between parentheses. Terms/foreign words or regional words should be written in italics. Notations should be brief and clear and written according to the standardized writing style. Symbols/signs should be clear and distinguishable, such as the use of number 1 and letter l (also number 0 and letter O).

Singkatan / Istilah / Notasi / Simbol. Penggunaan singkatan diperbolehkan, tapi singkatan harus ditulis lengkap dan lengkap ketika disebutkan untuk pertama kalinya dan itu harus ditulis dalam tanda kurung. Syarat / kata-kata asing atau kata-kata daerah harus ditulis dalam huruf miring. Notasi harus singkat dan jelas dan tertulis sesuai dengan gaya penulisan standar. Simbol / tanda-tanda harus jelas dan dapat dibedakan, seperti penggunaan nomor 1 dan huruf l (juga angka 0 dan huruf O)

Tables (12 pt, bold)

(one blank single space line, 10 pt)

Tables are written with Times New Roman font size 10 and single spaced below the title of the table. The title of the table is written with font size 10 (boldface) above the table as prescribed in the format given below as example. The table is numbered in Arabic numerals. There is one single space line between the table and the paragraph. The table is placed immediately after it is referred to in the text. The frame of the table uses 1 font-size line. If the title in each table column is long and complex, the columns are numbered and the notes are given below the table. *(one blank single space line, 10 point font)*

Tabel (12 pt, bold)

(Kosong satu spasi, 10 pt)

Tabel ditulis dengan ukuran font Times New Roman 10 dan tunggal spasi di bawah judul tabel. Judul tabel ditulis dengan ukuran font 10 (huruf tebal) di atas meja seperti yang ditentukan dalam format yang diberikan di bawah ini sebagai contoh. tabel diberi nomor dengan angka Arab. Ada satu spasi tunggal antara meja dan paragraf. meja ditempatkan segera setelah disebut dalam teks. Bingkai meja menggunakan 1 font-size line. Jika judul di setiap kolom tabel panjang dan rumit, kolom diberi nomor dan catatan yang diberikan di bawah meja. *(Kosong satu spasi, 10 pt)*



Table 1. Number of Testing of WFF Triple NA=15 or NA=8 (9 pt, bold) (one blank single space line, 6 pt)

Tabel 1. Jumlah Pengujian WFF Tiga NA = 15 atau NA = 8 (9 pt, bold) (Kosong satu spasi, 6 pt)

NC	NP			
	3	4	8	10
3	1200	2000	2500	3000
5	2000	2200	2700	3400
8	2500	2700	16000	22000
10	3000	3400	22000	28000

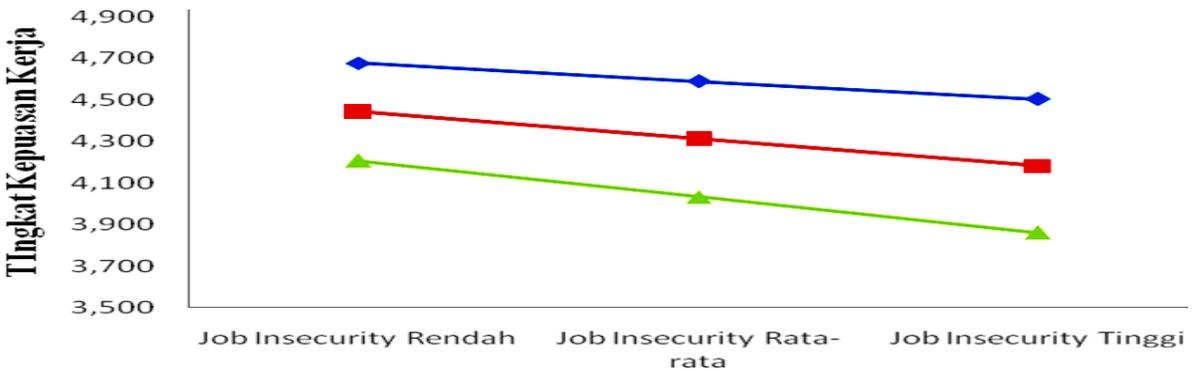
(two blank single space lines, 10 point font)
(Dua kosong satu ruang baris, huruf 10 point)

Graphic Contents (12 pt, bold)
(one blank single space line, 10 pt)

Graphic contents are placed symmetrically on the page and there is one blank single space line between the graphic content and the paragraphs. A graphic content is placed immediately after it is referred to in the body of the text and is numbered in Arabic numerals. Caption for the graphic content is written below it and there is one blank single space line between it and the graphic content. The caption is written in font size 9, boldface, and placed as in the example. Between the graphic content with the body of the text there are two blank single space lines.

Isi grafis (12 pt, bold)
(Kosong satu spasi, 10 pt)

Isi grafis ditempatkan secara simetris pada halaman dan ada satu kosong spasi tunggal antara konten grafis dan paragraf. Sebuah konten grafis ditempatkan segera setelah disebut dalam tubuh teks dan nomor dalam angka Arab. Caption untuk konten grafis yang tertulis di bawah itu dan ada satu kosong spasi tunggal dan konten grafis. caption yang ditulis dalam ukuran font 9, tebal, dan ditempatkan seperti pada contoh. Antara konten grafis dengan tubuh teks ada dua spasi tunggal.



(one single space, 6 point font)
(Satu spasi tunggal, 6 titik font)

Figure 1. The Interaction of Job Insecurity and Employability against Work Satisfactory on Outsourced Employees (9 pt, bold) (two single space, 10 pt)

For any graphic contents which have been published by another author, the corresponding author must obtain a written permission from that other author and his/her publisher. Include one graphic content which is printed in good quality in a full-size page or scanned graphic content in good resolution in the format as follows {name of file}.jpeg, or {name of file}.tiff. If the graphic content is in the form of photograph, include one original photograph. The photograph is printed in black and white unless the photograph will appear in color. The author will be charged an additional fee for color printing of more than 1 page. The font face to be used in the graphic content or graph should be the one generally available in each word processor and operational system such as Symbol, Times New Roman and Arial with the font size not less than 9 point.

Gambar 1. Interaksi Job Insecurity dan Employability melawan Kerja Memuaskan dari outsourcing Karyawan (9 pt, bold) (dua spasi tunggal, 10 pt)

Untuk setiap isi grafis yang telah diterbitkan oleh penulis lain, penulis yang sesuai harus mendapatkan izin tertulis dari yang penulis lain dan / nya penerbitnya. Sertakan satu gambar yang dicetak dengan kualitas yang baik dalam satu halaman penuh atau hasil scan konten grafis resolusi baik dalam format sebagai berikut {nama file} .jpeg, atau {nama file} .tiff. Jika gambar dalam bentuk foto, termasuk satu foto asli. foto itu dicetak dalam warna hitam dan putih kecuali foto itu akan muncul dalam warna. Penulis akan dikenakan biaya tambahan untuk cetak warna lebih dari 1 halaman. Font face yang akan digunakan dalam konten grafis atau grafik harus menjadi salah satu umumnya tersedia di setiap pengolah kata dan sistem operasional seperti Symbol, Times New Roman dan Arial dengan ukuran font tidak kurang dari 9 titik.



Daftar Pustaka / Reference

The reference writing must be in accordance with APA (American Psychological Association) format. The references should use the primary sources (journals or books). Can use the mendeley, Endnote, and Zotero application.

Penulisan referensi harus sesuai dengan APA (American Psychological Association) format. Referensi harus menggunakan sumber - sumber primer (jurnal atau buku). Dapat menggunakan aplikasi mendeley, Endnote, dan Zotero.



Examples:

Books:

Creswell, J.W. (2008). *Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research* (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.

Book chapter:

Markus, H.R., Kitayama, S., & Heiman, R.J. (1996). Culture and basic psychological principles. Dalam E.T. Higgins & A.W. Kruglanski (Eds.), *Social psychology: Handbook of basic principles*. New York: The Guilford Press.

Online document:

Van Wagner, K. (2006). Guide to APA format. *About Psychology*. Accessed on November 16, 2006 from <http://psychology.about.com/od/apastyle/guide>.

Journal Article:

Wassman, J., & Dasen, P.R. (1998). Balinese spatial orientation. *Journal of Royal Anthropological Institute*, 4, 689-731.

Online journal:

Jenet, B.L. (2006). A meta-analysis on online social behavior. *Journal of Internet Psychology*, 4. Accessed on November 16, 2006 from <http://www.Journalofinternetpsychology.com/archives/volume4/3924.html>.



Article from a Database:

Henriques, J.B., & Davidson, R.J. (1991) Left frontal hypoactivation in depression. *Journal of Abnormal Psychology, 100*, 535-545. Diambil 16 November 2006 dari PsychINFO database.

Online Forums, Discussion Lists, or Newsgroups:

Leptkin, J.L. (2006, November 16). Study tips for psychology students [Msg. 11]. Message were rely on <http://groups.psychhelp.com/forums/messages/48382.html>.

Research Report:

Villegas, M., & Tinsley, J. (2003). *Does education play a role in body image dissatisfaction?* Laporan Penelitian, Buena Vista University. Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia. (2006). *Survei nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kelompok rumah tangga di Indonesia, 2005*. Depok: Pusat Penelitian UI dan Badan Narkotika Nasional.



E-ISSN



9 772527 844009

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

P-ISSN



9 772338 516003